

Jakarta, 06 Oktober 2014

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Parlemen RI
Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan
Jakarta-10270

Perihal : PETISI RAKYAT MENGGUGAT

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H.,
Jabatan : **Ketua Umum FRONT PELOPOR untuk Kebenaran dan Keadilan**
Ketua Dewan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN SOEKARNO
NIK : 09.5306.670952.0024
Alamat : Jl. Jatipadang Raya No.54 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Beserta **Progres 98** dan berbagai elemen anak bangsa yang bergerak dalam satu barisan perjuangan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dengan dilakukannya 4 (Empat) kali Amandemen terhadap UUD 1945, telah merubah secara substansial tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. UUD 1945 yang telah diamandemen melahirkan *derivat* undang-undang serta berbagai peraturan pemerintahan yang dijiwai bukan oleh semangat **gotong-royong**, tetapi dijiwai oleh semangat yang berorientasi **free market liberalism**.

Semangat **free market liberalism** yang lahir dari rahim 'demokrasi liberal' sejatinya merupakan suatu faham yang sangat bertentangan secara diametral dengan ideologi **PANCASILA**. **Free market liberalism** telah banyak melahirkan *elite-elite* kekuasaan yang tidak lagi memiliki jiwa 'nasionalisme' dan 'patriotisme', tetapi lebih memilih untuk 'menghamba kepada kepentingan asing' dengan bersedia menjadi **proxy** mereka.

Bahwa Pemilihan Umum, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, DPR Prov, DPR Kab/Kota, maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, berlangsung dalam suatu kompetisi yang tetap dijiwai oleh semangat **free fight liberalism**.

Oleh karenanya, hasil Pemilihan Umum yang seharusnya menjadi sarana **legitimasi politik bagi keabsahan pemerintahan** melalui pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilandasi oleh prinsip-prinsip **jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia**, sering kali harus

diselesaikan melalui mekanisme keputusan hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 Ayat (3), Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan Pasal 25 UUD 1945, yaitu **Mahkamah Konstitusi**, akibat adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh **peserta Pemilihan Umum** maupun yang dilakukan oleh **pihak penyelenggara pemilihan umum**.

Pemaknaan Pemilihan Umum yang **jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia** adalah 'jaminan terhadap hak setiap warga negara dalam menentukan pilihannya, tidak boleh ada pihak manapun yang menghalangi ataupun mereduksi', oleh karena itu setiap pelanggaran atas hak tersebut haruslah ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dari hasil seminar yang dilaksanakan di **Universitas Bung Karno**, pada tanggal 3 September 2014 tentang '**kajian proses dan legitimasi hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden thn 2014**', diperoleh kesimpulan, **bahwa didalam proses pelaksanaan maupun proses penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden thn 2014, tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan cara-cara yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, diantaranya :**

1. **Terkait data Daftar Pemilih Tetap (DPT).**

Adanya lonjakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang melonjak hingga 6 (Enam) Juta dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPR Prov, Kab/Kota tahun 2014.

Jumlah pemilih dalam DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum adalah 188.461.971 orang, atau lebih banyak 6,7% pemilih jika dibandingkan dengan data dari Biro Pusat Statistik, yaitu sebesar 176.662.097 orang.

Selama ini data dari Biro Pusat Statistik selalu dijadikan acuan seluruh kegiatan terkait dengan pendataan penduduk di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum ternyata tidak menjadikan data tersebut sebagai acuan, Komisi Pemilihan Umum telah memiliki data acuan dari **sumber lain**, yang terindikasi berasal dari suatu lembaga milik Asing.

2. **Dalam proses penyelesaian gugatan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden thn 2014 yang diajukan oleh salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 1/PHPU.PRES/XII/2014 menolak seluruh gugatan yang diajukan, sesungguhnya masih menimbulkan persoalan dan tanda tanya..**

- 2.1 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : **1/PHPU.PRES/XII/2014** Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, terjadi **ke-tidak sinkron-an (missing link)** antara **konsideran, pertimbangan dan konklusi**.
- 2.2. Bahwa putusan *a quo* sesungguhnya telah **melanggar Undang-Undang No.48 tahun 2009**, tentang Kekuasaan Kehakiman. serta **melanggar etika persidangan**, dimana keabsahan sebuah Putusan (vonis) harus dibacakan oleh Majelis Hakim secara terbuka dihadapan para pihak. Fakta dalam persidangan, putusan setebal 4.390 halaman, pada hari Kamis 21 Agustus 2014, sejak pukul 14.30 hingga pukul 20.44 hanya dibacakan sebanyak 225 halaman dari 300 halaman yang sedianya akan dibacakan.
- 2.3 Bahwa fakta persidangan telah memberikan satu bukti dimana Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus sebagai Ketua Majelis Persidangan pada hari itu, Kamis 21 Agustus 2014 dengan tegas menyatakan bahwa dari putusan setebal 4.390 halaman, hanya bisa diunduh di website Mahkamah Konstitusi sebanyak 261 halaman, dengan demikian terbukti bahwa prosedur pembacaan putusan telah dilanggar oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- 2.4 Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menganggap adanya dampak politis kecurangan yang terjadi secara sistemik, terstruktur dan massif penghilangan hak konstitusional dari masyarakat Papua pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Papua sebagai akibat dari masih banyaknya masyarakat di Papua yang kehilangan hak pilihnya disebabkan didaerahnya tidak dilaksanakan Pemilihan Umum. Digunakannya sistem **noken** dan **ikad** dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk inkonsistensi dan kerancuan berfikir para Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena sekalipun sistem ini sudah menjadi tradisi masyarakat Papua, sejatinya sistem ini tidak mewakili prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang Jujur, Adil, Langsung, Bebas dan Rahasia, **one man one vote**, serta tidak dikenal dalam sistem ketata negaraan Republik Indonesia. Dengan diakomodasikannya sistem Noken dan Ikad maka Mahkamah Konstitusi secara sengaja justru membuka ruang politik terjadinya proses dis-integrasi Bangsa.
- 3 Adanya Kontradiksi Putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan adanya **pelanggaran** oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum terkait perintah pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan pelanggaran tersebut, Ketua DKPP beserta

empat anggota DKPP lainnya memberhentikan 5 orang anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Papua, 2 orang anggota KPU Serang, Banten dan 2 orang anggota KPU Banyuwangi, Jawa-timur, serta memberi teguran kepada 30 orang anggota KPU, Bawaslu/panwaslu, termasuk dalam hal ini teguran kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, keduanya terbukti melanggar kode etik.

Terhadap keadaan ini tentu menjadi pertanyaan apabila terjadi pelanggaran etika oleh para komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam sebuah proses Pemilu sebagai cerminan penghargaan hak konstitusional warga Negara, maka sesungguhnya para Komisioner Komisi Pemilihan Umum jelas sangat tidak etis untuk melaksanakan Pemilihan Umum itu sendiri. Karena etika sebagai unsur dari suatu proses berfikir dan bertindak tentang baik dan buruk, tentang patut dan ketidak-patutan berperilaku haruslah dilaksanakan secara *professional* dan *proper*.

Sementara Mahkamah Konstitusi tidak menjadikan temuan DKPP tersebut sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan, keadaan ini jelas telah menimbulkan musibah hukum dan ketidak pastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, apa gunanya sidang DKPP diadakan apabila hasilnya tidak menjadi acuan atau dasar pertimbangan dalam penegakan hukum terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

- 4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tidak dilakukan dengan cara-cara yang *proper*, jujur dan transparan karena Calon Presiden terpilih yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum masih memiliki sejumlah persoalan hukum yang harus terlebih dahulu diselesaikan secara tuntas, yaitu :
 - a. Persoalan hukum terkait penyaluran dana bantuan pendidikan masyarakat Solo (PMKS) tahun 2010, dimana berdasarkan hasil verifikasi tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Itjen Kemendagri telah ditemukan adanya tindak pidana korupsi pada PMKS sebesar Rp.11.5 Milyard s/d Rp.12 Milyard dari penggunaan dana APBD sejumlah Rp.23 Milyard.
 - b. Persoalan hukum menyangkut Kasus penyediaan bus Transjakarta senilai Rp.1.5 Triliun yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.
 - c. Persoalan hukum menyangkut alih fungsi taman BMW di Jakarta-Utara yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

- d. Kepemilikan rekening diluar negeri yang tidak dilaporkan dan tidak dilampirkan dalam daftar kekayaan Calon Presiden ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e. Kasus Pidana, dimana dalam " Pembagian Zakat " Idul Fitri 1-2 Syawal 1435 H (28-29 Juli 2014), di rumah Calon Wakil Presiden (JK) di Makassar telah menimbulkan korban jiwa. Peristiwa yang sama pernah terjadi di Pasuruhan Jawa – Timur dan Dermawan yang melakukan Zakat diganjar hukuman 4 Tahun Penjara.

Berdasarkan atas hal-hal yang dikemukakan diatas, maka kami mengajukan **PETISI RAKYAT MENGGUGAT** sebagai berikut :

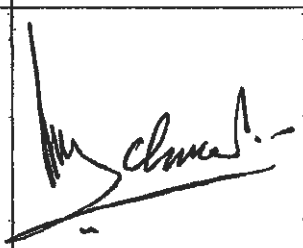
Meminta kepada Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar :

1. Memanggil Ketua dan seluruh Anggota **Komisi Pemilihan Umum** Republik Indonesia untuk mempertanggung-jawabkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. Memanggil Ketua dan Anggota hakim **Mahkamah Konstitusi** untuk menjelaskan perihal putusan nomor : **1/PHPU.PRES/XII/2014** tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Memanggil Ketua dan Anggota **Komisi Pemberantasan Korupsi** terkait pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4. Memanggil **Kepala Kepolisian Republik Indonesia** untuk memberikan klarifikasi atas kasus meninggalnya penerima zakat di rumah Wakil Presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
5. Memanggil Kepala **BIN dan BAIS** terkait situasi keamanan dan kepentingan Nasional
6. Menunda pengambilan sumpah dan janji **Pasangan Presiden dan Wakil Presiden** Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sebelum pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dimaksud dituntaskan secara hukum.






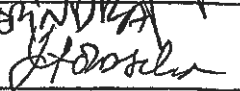
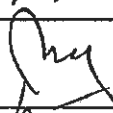




7. Meninjau kembali Undang-Undang No.8 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
8. Meninjau kembali Undang-Undang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilu.
9. **Menyatakan** bahwa terjadinya **Musibah Hukum Ketatanegaraan** di Indonesia, berpangkal (berhulu) **pada kejadian yang luar biasa yang disebut Amandemen** Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang mengganti (bukan hanya merubah) Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 yang berasaskan **Demokrasi Pancasila** menjadi Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen berasaskan **Liberalisme Kapitalisme**.
10. Menyatakan kembali ke Jati Diri Bangsa, **Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Konstitusi Proklamasi UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945** sebagai **landasan Konstitusional**.

Demikian PETISI RAKYAT MENGGUGAT ini kami ajukan, demi tegaknya kebenaran dan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

**PENANDA-TANGAN
PETISI RAKYAT MENGGUGAT**

NAMA	ORGANISASI	TANDA TANGAN
HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, SH	Ketua Umum FRONT PELOPOR Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno	

**PENANDA-TANGAN
PETISI RAKYAT MENGGUGAT**

NAMA	ORGANISASI	TANDA TANGAN
HENDRY YATNA	JAPTA	
Siswati Maruto	FRONT PELOPOR AB Capital	
Moh. MARUTO	FRONT PELOPOR	
DESLIANA	FRONT PELOPOR	
SURIA, ATI KUSUMAH	KABID HUMAS PP PIRA	
Cetty Sholichah 0858	KOORD. HUMAS DPP BAHANDRA P. Lintas Profesi	
SYAMSUDIN ANGGIR MONDE	BETUM BETAR PNI	0817660057 SATOL
Noor Gasm	FRONT PELOPOR	 0817654545
RUSTAM AGI	SB	Rus 08151117002
SYAMSIAH SALEH	SIAP BERJUANG	08134432529
Enny W	SIAP MERDEKA	08134432529
ENY KUSRINI	PEREMPUAN NUSANTARA	08131944166 / 081788951
HURBA	Grp byn	
M. Subhan	AIS	
HENKONO MINDA	SAICT 1	
ANDI KADIR	PELANCAN MP	

DATHIA SELA

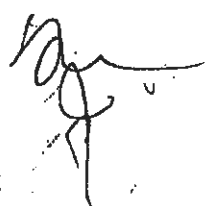
Gyntya

UTI PRAWIRO

TEGAR INDONESIA

PIRA BOGOR





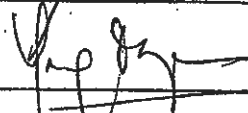

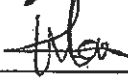


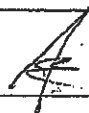


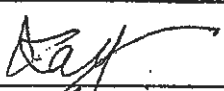


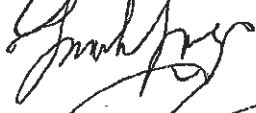


Siap Tempur



—

[illegible]

PENANDA-TANGAN
PETISI RAKYAT MENGGUGAT


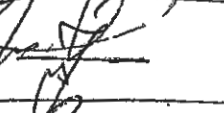
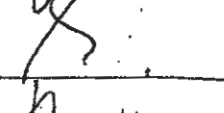
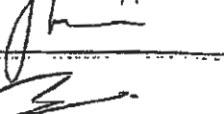
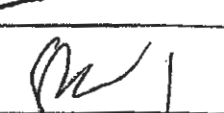
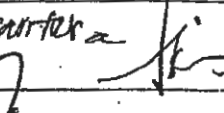
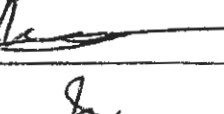


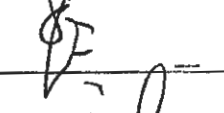
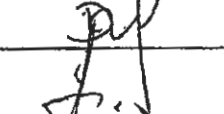
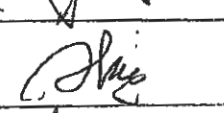
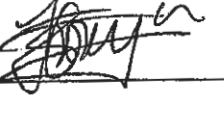

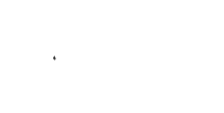

	NAMA	ORGANISASI	TANDA TANGAN
1	Dpumi astuti	Front Pelopor	Drist
2	Dewi Ramayani	--	
3	Dina S. Pratama	--	
4	R. Widiyanto	-	
5	Mulyum SH	KMT	
6	Jkma	relawan	
7	sydk fctm	Relawan	
8	Mawar	Relawan	
9	LIA (085218978967)	Perorangan	
10	Nelly Warnim	--	
11	M ISAK	RELAWAN	
12	CODOT	--	
13	ARMUDIN. Hp 0815 1533 6618	ASPETES PELINDO	
14	Baye Dlan Kuning	Relawan	
15	PATIALA PASARIBU	Relawan	
16	JOHN DM	Relawan	
17	Jamiah Stregar	ADVOCAT	
18	Servasius S. Manek	Advokat	
19	M. Lilipary	Relawan	

**PENANDA-TANGAN
PETISI RAKYAT MENGGUGAT**

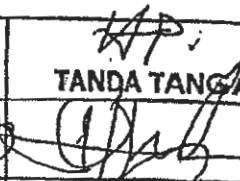
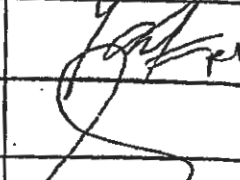
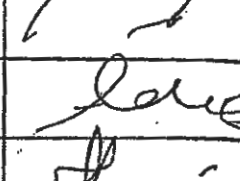
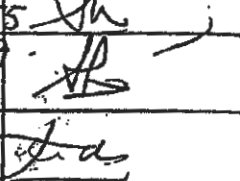
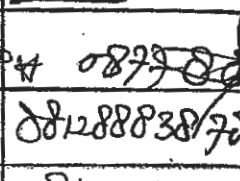
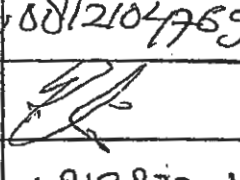
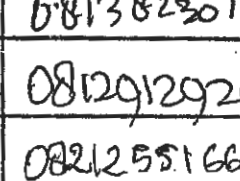
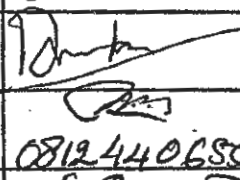
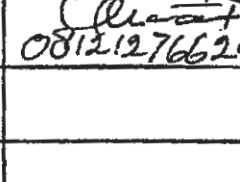
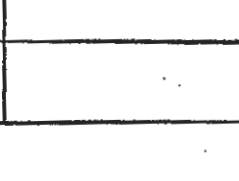

NAMA	ORGANISASI	HP TANDA TANGAN
AGA KHAN, SH.	Lumbung Aspirasi Anak Bangsa.	
Novandri	Oerendra	081-4110521
IXDHIE SEDJATIE	MERAH PUTIH INDONESIA BERKUALITAS	082125889099
HULFA <i>< Gapi Nusantara ></i>	<i>hulfa_ceria@yahoo.com</i> Kadep M. Kebercaan	081378179109
M. M. DEKIR	VBK Dewan Rakyat	081399330689
Hernie Hedy		087878137707
Yolanda	Front Pembela Keadilan	08161984097
A. KHALIQ AHMAD	PDP	081813560
CONNY. E. TERUNGANI	DPP. HPP 45.	0813 82063669
MUFIZARILYAT	---	082117776828
RENI HARTI	POLONIA	081319176337
NURJANNAH	POLONIA	081214220950
LUTFI HOLY	PELAWAN PAHM	087849660821
CHRISTY. PARIMUSSA	--- BID	081307469035
Heidy G. Parimussa	--- BID	081317469035
Mieke Manuhutu	Oerendra Taman Mini	081294163141

PENANDA-TANGAN
PETISI RAKYAT MENGGUGAT

HP

NAMA	ORGANISASI	TANDA TANGAN
MUKHALIS ABDULHAJI	RAKYAT BERGERAK	
YUS RUSMANI	RAKYAT KRATON	
DIMMY. CK. SG. AU	GL-PRO	
NOVERIA PARASAKI	GERAKAN BIRUK R. B. N	
SUBHAN HADJI	AIS	
SATIMAN. PHD	SAYAP BARUDA	
MINTO TAKYO	Lembaga Ketahanan (KEMTAN NAS)	
H. ARMAN, M.	Prabowo Baru	
Mien	Mevale pntih	
Joel Freire	Komunitas Biruk	
Dedy. W / Verty belu	Prabowo Baru	
Rina Wahyuningsih	SRIKANDI GARDEN P.	
Biana Simuraya S.H	permatas prabowo	
Shinta. Rayani. D.	Partai Gerindra	
Maya H.	KAPPS 1	
Harry. Christ. N	SAPMA	

PENANDA - TANGAN
PETISI RAKYAT MENGGUGAT

NAMA	ORGANISASI	TANDA TANGAN
GAALI-K	RELAWAN KOMANDO	
RATIH PERMANASARI	WASEKJEND IDEK	
Nuning Suryawati	RELAWAN	
Artsewa Rajiva. B	"	
R. Ajeng Nur Ielly	Relawan	
INDAH YULIA	Relawan KMP 081319955	
Titiek Bakrie	— 0813145575	
Teuis Sukarna	— 22	
Toni Adnan	— KNR MP 087700883	
MOH TAHER	Relawan RTI	081288838788
HERI	GERAKAN RAKYAT BERSEKUTU	081210476900
IBU Hj ELSE	Depok	
SYEKH AHMAD MANSUR	JAKARTA pusat cipta	081382301679
NIWIT Yudi P.	RELAWAN CAJAH BERSEKUTU	081291292949
TUTY.	— 1 —	08212551668
Wahyudin. D.	KAPRI 08.	
PEGGY TENDEAN	RELAWAN SULUT	081244065599
TANTY	GERAM INDONESIA RAYA	081212766244

[illegible]

PENANDA - TANGAN

PETISI RAKYAT MENGGUGAT

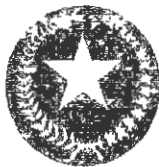
[illegible]

PENANDA - TANGAN
PETISI RAKYAT MENGGUGAT

[illegible]

PENANDA - TANGAN
PETISI RAKYAT MENGGUGAT

[illegible]



FRONT PELOPOR

UNTUK KEBENARAN DAN Keadilan

JALAN JATIPADANG RAYA NO: 54 A, JAKARTA SELATAN

LAMPIRAN :

PETISI RAKYAT MENGGUGAT

- **TERBONGKARNYA REKENING PASANGAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA DI LUAR NEGERI DAN GUGURNYA PELUANG KEDUANYA SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI**
- **DUGAAN KOLUSI DAN KORUPSI KASUS TAMAN BMW DKI JAKARTA**
- **SURAT OMBUDSMAN RI TENTANG KLARIFIKASI LAPORAN DUGAAN KORUPSI YANG BERLARUT-LARUT**
- **LAPORAN DUGAAN KORUPSI KE KPK TENTANG DANA BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA (SOLO) TAHUN 2010 (KASUS BPMKS)**
- **LAPORAN DUGAAN KORUPSI APBD UNTUK KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA SURAKARTA TAHUN 2009**
- **SURAT FRONT PELOPOR UNTUK PRESIDEN SBY, KEPALA KEJAKSAAN AGUNG DAN KAPOLRI**

KETUA UMUM FRONT PELOPOR



HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, S.H.,

LAMPIRAN

I

(SATU)

**TERBONGKARNYA REKENING PASANGAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA
DI LUAR NEGERI DAN GUGURNYA PELUANG KEDUANYA SEBAGAI
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI**

KONFIDENSIAL / SEGERA

1 OKTOBER 2014

ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

**TERBONGKARNYA REKENING PASANGAN JOKO WIDODO –
JUSUF KALLA DI LUAR NEGERI DAN GUGURNYA PELUANG
KEDUANYA SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI:**

**KONSEKUENSI LOGIS KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN
ASPEK HUKUM, LEGITIMASI / MORAL / ETIKA, DAN
KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA**

Money Laundering Case of JKW and JK: The Indonesian National Security Threat

Money laundering is not only a criminal but a national security issue with its multidimensional nature that in overall can be categorized as non-military and unconventional threats. In practice, money laundering is often used in conjunction with other type of national security threats: corruption; bribery; drug and narcotic trafficking; human-trafficking; terrorism; and wider kinds of national security threats whose purpose is to take over the resources of target country by foreign / non-state / other state actors through the bribery of target country's national leaders. Given its impacts and scope of engagement, money laundering is also a serious threat to international security, stability and development on which the global community including the United States and Indonesia has the commitment to fight.

According to an UN Convention commonly referred as the 1988 Vienna Convention (Article 3 Section 1b), *money laundering is the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions. This is the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences.*

According to 2011 Financial Action Task Force (FATF) Report, there are a number of inherent characteristics in money laundering that are practiced by Politically Exposed Person (PEP) from around the world that includes but not limited to President, Prime Minister, Governor, Mayor, Congressman, and the family members of state leader.

Related to this very serious national security issue, the Indonesian government (KPK) is currently investigating the financial intelligence report pertaining the finding of JKW & JK's overseas accounts that never been reported to the government (The letter of KPK dated on 27 August 2014). **Not only is this a serious violation to the UU 42 2008 (The Presidential and Vice Presidential election Act), their overseas accounts have inherent characteristics with the common practice of money laundering (placement, layering, and integration by using gatekeepers, Trust and Company Service Provider, remote opening, surrogates, shell companies and various overseas account split up in various jurisdictions that are highly**

associated with global money laundering activities) as defined by worldwide survey of Financial Action Task Force of which Republic of Indonesia is a member country.

As JKW and JK are the elect President and Vice President, we have to be very cautious, value free and non-partisan to view and judge this issue because their "alleged" involvement in such activities are not only intolerable but also a serious threat to international and Indonesian national security. Verse 6 and 7 of the Indonesian constitution prohibits someone who are involved in any criminal offences including treason, corruption, bribery, and other offences and activities that jeopardize the honor and national security interests of the country from becoming the President and Vice President of the Republic of Indonesia.

That said this is not merely a politically-driven movement, and it is also not exaggerating if all national elements including the KMP to request the Indonesian government to prioritize its national, governmental efforts in order to investigate and to validate the alleged involvement of JKW and JK in money laundering activities before the two are cleared and deserved to be inaugurated. As the FATF report suggests, money laundering is the iceberg manifestation of all other criminalities and offences that are committed by the subject. Specifically for JKW, a number of corruption cases including the most prominent one (The Trans Jakarta case) that has the high likelihood of his involvement is likely connected to this money laundering activity.

Within this logic, we cannot afford to make such important decision merely based on the administrative logic (must inaugurate the winner of the election), but to assure and prioritize that for the sake of Indonesian national security inauguration of "cleared national leaders" is the integral part of securing Indonesian national security interests and not ironically become the turning point of jeopardizing Indonesian national interests. The administration matters and rule of law should follow the strategic logic of national security interests and not the other way around.

How can JKW and JK be faithful in big things if they are not faithful and having the integrity (honesty) in small things? It is not exaggerating if the global community (including the United States) also has very serious and strong commitment to fight global money laundering activities as laid out by the United States National Money Laundering Strategy (2007), the United States Money Laundering Threat Assessment (2005), and the FATF Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment in 2010 (A view of how and why criminals and terrorists abuse finances, the effect of this abuse and the steps to mitigate these threats).

**Terbongkarnya Rekening Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla di Luar Negeri dan Gugurnya
Peluang Keduanya Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI:**

**Konsekuensi Logis Keamanan Nasional Berdasarkan Aspek Hukum, Legitimasi/Moral/Etika,
dan Kepentingan Nasional.**

*"Cheater, Liar, Law Breaker, Illegitimate Individual and Traitor to the Country Cannot and Never Deserve to Lead.
Praise to GOD the Almighty Who Reveals All This Truth to Our Nation."*

1. Ringkasan

Sebagaimana berdasarkan UUD 1945 salah satu persyaratan utama dari seorang calon Presiden adalah tidak pernah mengkhianati negara termasuk dalam bentuk korupsi, penyuapan, dan bentuk bentuk pelanggaran hukum lainnya, maka ditemukannya puluhan rekening berjumlah jutaan U.S. Dollar atas nama Joko Widodo (dan istri) dan Jusuf Kalla (dan istri) di luar negeri sejak 18 Juli hingga 17 Agustus 2014 yang tidak dilaporkan kepada negara (dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara / LHKPN) harus dapat membatalkan pelantikan keduanya sebagai Presiden/Wakil Presiden RI. Pembatalan pelantikan ini didasarkan pada tiga aspek: batal demi hukum; legitimasi/moral/etika; dan kepentingan nasional Indonesia.

Dengan kata lain, terbongkarnya 52 rekening multinasional milik Joko Widodo (dan istri) dengan jumlah total 13.181.414 USD dan 74 rekening multinasional milik Jusuf Kalla (dan istri) dengan jumlah total 22.176.024 USD yang tidak dilaporkan ke negara ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi Keamanan Nasional (*National Security threats*). Korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara merupakan satu paket *vicious cycle* dari siklus kemiskinan, demoralisasi bangsa, kehancuran sosio-ekonomi, dan destabilisasi politik suatu negara termasuk negara demokrasi.

Tepatnya, berdasarkan Pasal 6 UUD 1945 "*salah satu persyaratan utama calon Presiden/Wakil Presiden adalah tidak pernah mengkhianati negara*", dan berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 jika keduanya sudah terpilih dan dilantik maka "*seorang Presiden / Wakil Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya oleh MPR berdasarkan usulan dari DPR jika terbukti telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden*".

Berdasarkan konstitusi negara inilah (UUD 1945) maka temuan atas 36 rekening aktif Joko Widodo di luar negeri yang tidak pernah dilaporkan kepada negara dengan jumlah total

8.514.725 USD dan tersebar di 13 negara ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius (*clear and present danger*) dilihat dari aspek hukum, legitimasi/moral/etika, dan kepentingan nasional Indonesia. Bukan hanya itu saja, 36 rekening ini dibuka dalam kurun waktu sejak 2005 hingga 2013, dan 36 rekening ini semuanya menerima aliran dana masuk (*in-transfer*) pada periode menjelang Pemilu 2014, tepatnya mayoritas antara kuartal keempat (Q4) 2013 hingga kuartal pertama (Q1) 2014.

Ironisnya, bukan hanya Joko Widodo saja yang memiliki berbagai rekening siluman ini. Paling tidak tercatat terdapat 16 rekening di luar negeri yang tersebar di 6 negara atas nama Iriana Widodo yang juga tidak dilaporkan ke negara sebesar 4.666.689 USD. Dari sisi Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla juga terdapat masing-masing 42 (2 di Indonesia) dan 32 (3 di Indonesia)¹ rekening aktif di berbagai negara dimana mayoritas dari rekening rekening ini juga tidak dilaporkan ke negara dengan jumlah masing-masing 14.538.197 USD dan 7.637.827 USD (total 22.176.024 USD).

Patut diperhatikan bahwa ternyata berbagai rekening atas keempat nama ini tersebar di berbagai yurisdiksi termasuk negara-negara yang selama ini terkenal sebagai tempat pencucian uang seperti Marshall Islands dan West Indies, serta lokasi-lokasi yang cukup aneh dan sangat jarang digunakan untuk kepentingan bisnis dan investasi seperti Bosnia & Herzegovina dan Kroasia. Bahkan untuk Iriana Widodo dan Mufidah Kalla keduanya memiliki dana yang sangat besar di Bosnia & Herzegovina (Hampir 50% dari total jumlah aset finansial atas nama Mufidah Kalla berada di wilayah Bosnia & Herzegovina).

2. Tiga Dimensi Pelanggaran dan Sumber Ancaman Terhadap Kepentingan Nasional

Pertama: Alasan Hukum.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, baik UUD 1945 maupun UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, seorang calon Presiden dan Wakil Presiden pertama-tama harus dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan harta kekayaannya secara sah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dengan demikian, dengan ditemukannya berbagai rekening siluman di luar negeri (yang tidak pernah dilaporkan kepada negara) paska penetapan keduanya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dapat membatalkan legalitas keduanya sebagai calon Presiden dan Wakil

¹ Terjadi kesalahan penulisan nama bank untuk rekening Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla di *Bank of Indonesia*.

Presiden RI sekalipun keduanya telah ditetapkan oleh lembaga hukum di Indonesia (Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi) sebagai pemenang dalam Pilpres 2014. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa tidak dilaporkannya harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya ini tidak dapat dikategorikan hanya sebagai "kealpaan administratif" tetapi merupakan suatu bentuk kesengajaan yang dimotivasi oleh intensi / maksud strategis yang tidak benar / dan tidak dapat dibenarkan ditinjau dari aspek hukum, legitimasi/moral/etika, dan kepentingan nasional Indonesia.

Terbongkarnya jejak dari berbagai rekening siluman ini bukan saja hanya melanggar UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, melainkan merupakan manifestasi gunung es (*iceberg tip*) dari serangkaian jaringan dan aktifitas kriminal yang berada di bawahnya. Serangkaian jaringan dan aktifitas kriminal ini termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. Cara mendapatkan harta kekayaan secara tidak sah dan melawan hukum melalui proses korupsi dan penyuapan sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum kepada negara.
- b. Motivasi melakukan kebohongan publik yang dilakukan oleh oknum pejabat publik (*politically exposed person / PEP*).
- c. Motivasi dan perbuatan penghindaran dan penggelapan pajak (*illegal tax avoidance and evasion*).
- d. Motivasi dan perbuatan pencucian uang (melalui proses *placement of stolen assets / korupsi, layering /* pelapisan melalui *corporate vehicles / shell corporations* dan rekening *offshore*, dan integrasi ke dalam jaringan finansial global yang semuanya menggunakan jasa dari *Trust and Company Service Providers*). Pencucian uang merupakan ancaman terhadap Keamanan Nasional dan Internasional yang sangat serius dimana seorang oknum pejabat publik / PEP melakukan manipulasi hasil korupsi dan penyuapan yang diterimanya dengan cara menyembunyikan dan / atau "mencucinya" agar akhirnya "bisa terlihat" sebagai aktifitas bisnis dan keuangan yang legal.
- e. Upaya penyuapan jaringan internasional terhadap pimpinan tertinggi pemerintahan di Republik Indonesia yang akhirnya dapat membahayakan kepentingan nasional Indonesia.

Kedua: Alasan Legitimasi.

Legalitas dan legitimasi merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama dan merupakan elemen integral di dalam konsep kekuasaan (*power*). Walaupun KPU dan MK sudah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pada Pilpres 2014 lalu, penetapan keduanya bukan saja dapat menjadi tidak legal karena keduanya dianggap secara

sengaja tidak dapat melaporkan dan mempertanggung jawabkan jutaan aset nya di luar negeri kepada negara, melainkan juga telah kehilangan legitimasi sebelum keduanya dapat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014 nanti. Dengan kata lain, MPR tidak dapat melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hingga keduanya dapat mempertanggung jawabkan aset jutaan dollar mereka di luar negeri ini di hadapan negara (lembaga hukum terkait seperti KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, dan KPU) dan rakyat (MPR).

Dengan demikian adalah wajib hukumnya bagi lembaga hukum di negara ini dan wakil rakyat untuk dapat secara sah dan terbuka memberikan klarifikasi / *clearance* terhadap kasus ini sebelumnya keduanya dapat dilantik. Kegagalan dalam melakukan klarifikasi terhadap hal ini akan memperkeruh polemik di masyarakat yang akhirnya dapat berujung pada meledaknya pergerakan (dan revolusi) sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan kepentingan nasional di kemudian hari, yang tidak terbatas pada *impeachment* dan pergolakan sosio-politik-ekonomi lainnya yang sangat tidak diharapkan muncul di kemudian hari. Dan Jika hal ini benar terjadi maka Presiden SBY bisa dikatakan belum berhasil dalam meninggalkan *legacy* / warisan yang baik bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

Ketiga: Alasan Kepentingan Nasional.

Presiden (dan Wakil Presiden) di Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam sistem presidensial di Indonesia dimana di tangan seorang Presiden terletak sumber daya politik terbesar. Dengan demikian, sebagai Panglima Tertinggi Presiden adalah seorang individu yang berhak memegang kualifikasi / tingkat tertinggi dalam hal *clearance* intelejen (*Top Secret*) dan merupakan satu satunya individu di republik ini yang berhak mengetahui seluruh rahasia negara baik yang mencakup kekuatan potensial (kekayaan alam, teritorial, dan demografi) maupun kekuatan ril (instrumen kekuatan nasional dalam hal militer, intelejen, politik-diplomasi, penegakan hukum, informasi, finansial, dan ekonomi).

Oleh karena itu, calon Presiden atau Presiden terpilih yang tidak bersih secara hukum apalagi dianggap dan diduga terlibat di dalam kejahatan / kriminalitas internasional sudah tidak lagi (secara *legal* dan *legitimate*) dapat diberikan kepercayaan oleh negara dan bangsa sebagai Panglima Tertinggi karena diberikannya jabatan dan akses kepada individu seperti ini bukan saja mencoreng kehormatan bangsa Indonesia di dunia internasional, tetapi juga akan berdampak negatif secara signifikan terhadap keselamatan bangsa dan kepentingan nasional Indonesia. Dengan kata lain, kasus ini sudah menjadi ancaman nyata (*clear and present danger*) terhadap Keamanan Nasional dan dalam konteks inilah maka individu dengan karakteristik seperti ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianat bagi bangsa dan negara.

3. Analisa Terhadap Temuan Rekening Siluman Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Luar Negeri

Pertama. Di dunia hingga saat ini terdapat sedikit sekali entitas (*private wealth investigator*) yang dapat melakukan investigasi aset / rekening dari seseorang yang berada di lebih dari satu negara. Aktivitas ini melibatkan operasi forensik tingkat tinggi, keterlibatan pemerintahan suatu negara dan biasanya digunakan untuk melakukan investigasi terhadap sosok / individu yang dianggap penting. Investigasi yang sama pernah dilakukan untuk menelusuri aset beberapa diktator-koruptor seperti Ferdinand Marcos (Filipina), Augusto Pinochet (Cili), Juan Peron (Argentina), hingga oknum pejabat publik / PEP lainnya setingkat Anggota Parlemen, Kepala Daerah, Perdana Menteri, Penasehat Presiden, keluarga Presiden, hingga Presiden di berbagai negara, bahkan termasuk di Amerika Serikat (*Financial Action Task Force Report 2011: Laundering the Proceeds of Corruption, 47 - 50*).

Kedua. Kesalahan minor oleh *private wealth investigator* pada aspek redaksional / penulisan seperti "Shangai" pada bagian Bank HSBC (seharusnya "Shanghai") dan Busheikha (seharusnya "Abu Sheikha") adalah hal yang biasa. Hal ini tidak menegasikan kebenaran substansial dari laporan rekening Joko Widodo di luar negeri yang ditulis dan dilaporkan dengan menggunakan bahasa *financial forensic doctor* yang sangat spesifik (*IBAN Code, Account Number, Account Type, Balance, Account Holders, Authorized Account Holder, Date of Account Opening, and Last Wire Transfer*).

Ketiga. Rekening ini adalah rekening khusus yang dibuka dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Dengan demikian rekening ini tidak dapat sembarang menerima transfer dari luar, sehingga jika kita ingin melakukan transfer ke rekening ini untuk menguji eksistensi dari rekening ini maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Bukan hanya itu saja, rekening jenis ini juga merupakan rekening khusus yang dapat melakukan *in-transfer* dan *out-transfer* pada waktu *weekend* termasuk hari Sabtu.

Kelima. Adanya kebocoran informasi mengenai rekening rekening multinasional ini menunjukkan adanya kekuatan besar di dunia yang ingin membukakan tabir yang sebenarnya tentang Joko Widodo dan Jusuf Kalla di hadapan masyarakat Indonesia dan dunia. Kekuatan besar di dunia ini sangat mungkin tidak menginginkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Keenam. Bukti berbagai rekening Jokowi di luar negeri ini mempunyai bobot laporan intelejen yang sangat tinggi dan harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden SBY. Pemerintah dan MPR harus segera mengambil langkah tegas untuk melakukan investigasi dan validasi terhadap laporan aset kekayaan finansial Joko Widodo dan Jusuf Kalla di luar negeri yang tidak dilaporkan ke KPK dan KPU ini.

Ketujuh. Rekening dan jumlah kekayaan Joko Widodo di luar negeri ini melibatkan beberapa aktor individu dan kelompok lainnya yang selama ini terkesan ingin sekali memaksakan Joko Widodo untuk menjadi Presiden RI pada tahun 2014.

Keterlibatan berbagai aktor dan kelompok lainnya dalam kasus rekening siluman ini adalah antara lain sebagai pemberi suap, *gatekeepers* (individu yang menjadi arsitek dari konfigurasi pencucian uang hasil korupsi dan penyuapan), *Trust and Company Service Providers* yang mengatur pembukaan rekening *offshore* di yurisdiksi asing, dan penggunaan nama orang lain (rekening atas nama istri, anak, dan anggota keluarga serta kerabat dekat lainnya).

Dengan kata lain, konsekuensi dari investigasi terhadap kasus ini adalah bisa cukup banyak: pembuktian adanya tindak pidana korupsi; tindak pidana kebohongan publik; dan tindak pidana pencucian uang yang bisa menyeret banyak nama lainnya.

4. Modus Operandi Rekening Siluman Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Luar Negeri

Joko Widodo

Pertama. Berdasarkan laporan investigasi yang diterima hingga 17 Agustus 2014, Joko Widodo terdeteksi mempunyai **36 rekening aktif di luar negeri yang semuanya tidak dilaporkan dalam LHKPN ke KPK dan KPU**. 36 rekening ini Jokowi banyak tersimpan dalam bentuk mata uang Euro yang dalam perhitungan konversi U.S. Dollar berjumlah total 8.514.725 USD. 36 rekening multinasional Joko Widodo dibuka dalam kurun waktu **2005 hingga 2013 dengan semuanya menggunakan kedok 11 nama perusahaan** dimana Joko Widodo tercatat sebagai **satu-satunya pihak yang mempunyai otoritas atas rekening rekening tersebut (*signatory / sole authorized holder*): Enterprise, LLC; Pacific Financial, LLC; Travel Consultant, LLC; Hotels and Accommodation, Ltd; Malaysian Tourism Travel; Communications and Systems Development IBC; Gourment World, Ltd; Quality Wood Import, IBC; South Seas IBC; Artistic Associate Producers, CO; dan Antique, LLC.**

Masing-masing rekening ini menerima aliran dana masuk dalam kurun waktu menjelang Pemilu 2014. Tepatnya, mayoritas dari 36 rekening ini menerima aliran dana pada kuartal keempat (Q4) 2013 dan / atau kuartal pertama (Q1) 2014. 36 rekening ini terdiri dari 1 *corporate account*, 7 *checking accounts*, 5 *international accounts* dan 23 *saving accounts*. Adapun 36 rekening ini tersebar di **13 negara**: Solomon Islands; Marshall Islands; West Indies; New Guinea; Filipina; Malaysia; Singapura; Mongolia; Hong Kong; Lebanon; Yordania; Bangladesh; dan Bosnia & Herzegovina.

Kedua. Terdapat indikasi skema perbuatan melanggar hukum (pencucian uang) jika dilihat dari fakta bahwa beberapa rekening di berbagai negara ini dibuka di saat yang bersamaan: 2 rekening di CSCBANK SAL Lebanon (17 May 2005); 3 rekening di Union Bank of Philippines (2 September 2005); dan 3 rekening di Busheika Exchange Yordania (17-19 November 2009).

Ketiga. Secara keseluruhan Joko Widodo memiliki aktifitas keuangan yang signifikan di luar negeri dengan tingkat volatilitas yang sangat tinggi (banyak terdapat rekening *checking*, rekening internasional dan rekening perusahaan). Dengan kata lain adalah tidak biasa bagi seorang pejabat publik untuk membuka rekening di luar negeri melalui jasa *Trust and Company Service Providers* dari lokasi yang berjauhan (*remote opening*) termasuk dengan menyimpan mayoritas tumpukan rekening ini dalam bentuk mata uang Euro (mata uang yang tidak umum digunakan dalam aktifitas perdagangan di wilayah Asia).

Keempat. Melihat karakteristik berbagai rekening di luar negeri yang dimiliki oleh Iriana Widodo dan berdasarkan pengalaman dari investigasi terhadap praktek pencucian uang, Joko Widodo diduga terindikasi melakukan pengalihan (*diversion* dan *deception*) dari beberapa aktifitas keuangannya dengan menggunakan nama istrinya, Iriana Widodo.

Kelima. Selain jumlah rekening ini (8.514.725 USD) tidak konsisten dengan jumlah LHKPN yang dilaporkan ke KPK dan KPU dimana Joko Widodo hanya melaporkan jumlah *Cash and Deposit Savings* sebesar 27.633 USD + RP 448.140.718 (setara dengan 37.180,85 USD), Joko Widodo memiliki 2 rekening yang dibuka di negara yang sering terasosiasi dengan upaya pencucian uang dan / atau kasus korupsi lainnya. Kedua rekening ini adalah yang terdapat di Loyal Bank (di West Indies dengan menggunakan kedok perusahaan dengan nama Communications and Systems Development IBC) dan di Bank of Marshall Islands (di wilayah yurisdiksi Marshall Islands dan menggunakan kedok perusahaan dengan nama Quality Wood Import IBC). Uniknya kedua rekening ini juga dibuka dalam bentuk Euro.

Hal ini patut diperhatikan mengingat Bank Sentral Uni Eropa hanya melakukan *monitoring* terhadap rekening mata uang Euro pada saat di tahap awal (pembukaan) dan akhir (penutupan) dari rekening yang bersangkutan. Kedua rekening ini juga dibuka dengan menggunakan *corporate accounts* tetapi dalam bentuk rekening *saving* (tidak lazim bagi perusahaan untuk memiliki rekening *saving*. Biasanya perusahaan menyimpan uangnya dalam bentuk deposito atau investasi). Kedua rekening ini dibuka dari Loyal Bank di Singapura dan New Guinea (Marshall Islands) dengan menggunakan jasa *Trust and Company Service Providers*.

Secara spesifik, perlu digarisbawahi bahwa Marshall Islands dengan *transparency score* 18% dan *secrecy score* 82% tidak mewajibkan pemilik perusahaan dan pihak bank untuk menyediakan informasi tentang kepemilikan perusahaan kepada publik termasuk via internet. Selain itu

Marshall Islands juga termasuk yurisdiksi yang tidak memenuhi standar anti pencucian uang internasional (*international anti-money laundering standards*).

Iriana Widodo

Berdasarkan laporan investigasi yang diterima hingga 17 Agustus 2014, Iriana Widodo terdeteksi memiliki 16 rekening di luar negeri yang tidak dilaporkan ke KPK dan KPU dalam LHKPN dengan nilai total 4.666.689 USD. 16 rekening ini dibuka dalam periode waktu 2008 – 2012 dan berada di 6 negara: Singapura; Monako; Ukraina; Bosnia & Herzegovina; Uni Emirat Arab; dan Cayman Islands. 16 Rekening ini juga semuanya menerima aliran dana pada tahun 2013 dan / atau 2014. **Rekening multinasional Iriana Widodo semuanya menggunakan kedok rekening 6 perusahaan dimana Iriana Widodo tercatat sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai otoritas atas rekening rekening tersebut (*signatory / sole authorized holder*): Business and Investment Ltd; Antique and Classic, LLC; K&K; Classic Boat SR; Restoration International, Inc; K Productions, Ltd.**

Menarik untuk diperhatikan adalah keberadaan 2 rekening atas nama Iriana di Monako (dengan kedok perusahaan dengan nama Business and Investment, Ltd). Salah satu dari rekening di Monako ini dibuka di KBL Private Bankers. Bank ini terkenal memberikan tingkat kerahasiaan yang tinggi dan hanya orang-orang dengan referensi yang sangat khusus dapat membuka rekening di bank ini. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah kejanggalan status Iriana sebagai ibu rumah tangga yang dapat membuka rekening di bank seperti ini melalui rekening perusahaan. Selain di KBL Private Bankers Monako, Iriana juga memiliki beberapa rekening dengan karakteristik yang identik dengan 36 rekening multinasional milik Joko Widodo.

Jusuf Kalla

Berdasarkan laporan investigasi yang diterima hingga 17 Agustus 2014, Jusuf Kalla terdeteksi memiliki 42 rekening aktif di berbagai negara (2 di Indonesia) dengan jumlah total sebesar **14.538.197 USD yang juga tidak dilaporkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada negara melalui KPK dan KPU (seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo)**. Sesuai LHKPN ke KPK dan KPU, aset *cash* dan *deposit savings* Jusuf Kalla adalah hanya sebesar 700.813 USD + RP 6.945.423.767 (setara dengan 576.240 USD). Perlu digarisbawahi bahwa jumlah ini jauh di bawah jumlah **14.538.197 USD yang terdeteksi tersebar di 42 rekening multinasional**. Adapun 40 dari 42 rekening ini juga menerima aliran dana pada tahun 2013 dan / atau 2014. **39**

Rekening multinasional Jusuf Kalla menggunakan kedok rekening perusahaan dan 3 atas nama rekening pribadi.

Secara *overall*, hampir dari 50% aset keuangan Jusuf Kalla ini berada di Uni Emirat Arab (di kota Abu Dhabi dan Dubai) dan tersimpan dalam bentuk mata uang Euro dan U.S.Dollar. Sisa dari aset keuangan Jusuf Kalla berada di Qatar, Hong Kong, Bahamas, Filipina, Makao, Barbados, Monako, Kroasia, Fiji, dan Indonesia (sedikit sekali). Penting untuk diperhatikan bahwa sebagian dari aset keuangan Jusuf Kalla juga berada di negara yang tidak biasa digunakan untuk kepentingan bisnis dan investasi seperti Kroasia.

Mufidah Kalla²

Berdasarkan laporan investigasi yang diterima hingga 17 Agustus 2014, Mufidah Kalla terdeteksi memiliki 32 rekening aktif (3 di Indonesia) yang tersebar di Bosnia & Herzegovina, Singapura, Bermuda, Uni Emirat Arab, Cayman Islands, dan Indonesia (sedikit sekali). Adapun seluruh 32 rekening aktif ini menerima aliran dana pada tahun 2013 dan / atau 2014.

29 rekening multinasional Mufidah Kalla menggunakan kedok rekening perusahaan dan 3 atas nama rekening pribadi. Selain itu, satu poin penting yang perlu dicurigai adalah bahwa hampir 50% aset keuangan Mufidah Kalla dari 32 rekening ini berada di Bosnia & Herzegovina yang merupakan negara yang tidak biasa digunakan sebagai lokasi bisnis dan investasi. Identik dengan rekening atas nama Joko Widodo dan Iriana Widodo, seluruh aset keuangan Mufidah Kalla di Bosnia & Herzegovina juga dibuka melalui rekening perusahaan.

5. Kesimpulan

Pertama. Terbongkarnya berbagai rekening siluman di luar negeri ini merupakan ancaman yang sangat serius terhadap Keamanan Nasional.

Berbagai rekening atas nama Joko Widodo, Iriana Widodo, Jusuf Kalla, dan Mufidah Kalla ini dibuka secara terkoordinasi dalam hal jumlah, waktu, dan lokasi yurisdiksi, tepatnya di negara-negara yang kompromistis dengan praktek penggelapan pajak dan pencucian uang. Rekening rekening ini dibuka dari jarak jauh (*remote opening*) dengan menggunakan jasa *Trust*

² Terjadi kesalahan penulisan nama dalam laporan investigasi. Harusnya Mufidah Mi'ad Saad (bukan Mufdiah Mi'ad Saad).

and Company Service Providers dan menggunakan lapisan perusahaan (*buffer / shell corporations*). Untuk di negara-negara tertentu, rekening-rekening ini disimpan dalam bentuk mata uang Euro yang *less supervised* oleh Bank Sentral Uni Eropa dibandingkan dengan mata uang U.S. Dollar yang mendapatkan pengawasan jauh lebih ketat oleh pemerintah Amerika Serikat.

Kedua. Berdasarkan informasi investigasi dapat disimpulkan bahwa Joko Widodo tidak melaporkan seluruh aset kekayaan yang dimilikinya, termasuk dalam hal ini adalah 36 rekening siluman atas nama Joko Widodo (tersebar di 13 negara dengan jumlah 8.514.725 USD) dan 16 rekening siluman atas nama Iriana Widodo (tersebar di 6 negara dengan jumlah 4.666.689 USD). Jika dijumlah, nilai total dari seluruh rekening multinasional atas nama Joko Widodo dan Iriana Widodo ini adalah sebesar 13.181.414 USD (jumlah sebesar ini dipecah dalam jumlah jumlah yang kecil di 52 rekening yang tersebar di 18 negara). Jumlah sebesar ini tentunya jauh lebih besar dari yang dilaporkan oleh Joko Widodo ke KPK dan KPU dengan nilai total *Cash* dan *Deposit Savings* sebesar 27.633 USD + RP 448.140.718 (setara dengan 37.180,85 USD). Tepatnya, jumlah aset finansial yang dilaporkan oleh Joko Widodo dalam LHKPN hanya sekitar 0.49% dari jumlah aset finansial yang ditemukan di berbagai negara tersebut.

Ketiga. 52 rekening atas nama Joko Widodo dan Iriana Widodo yang tersebar di 18 negara ini diduga kuat terasosiasi dengan aktifitas kejahatan internasional berupa korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Anatomi dan konfigurasi dari seluruh rekening Joko Widodo dan Iriana Widodo di luar negeri ini memenuhi persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai pencucian uang / *money laundering*.

Keempat. Rekening rekening atas nama Joko Widodo dan Iriana Widodo secara aktif melakukan aktifitas transaksi (aliran dana keluar dan masuk) pada Q4 2013 dan Q1 2014 yang merupakan periode waktu kritis menjelang Pemilu 2014. Aktifitas aliran dana terbanyak pada rekening rekening atas nama Joko Widodo terjadi pada bulan Desember 2013 dan terjadi di negara Singapura, Hong Kong, dan Swiss dengan nilai total 600.000 USD. Sementara itu, aktifitas aliran dana terbesar atas nama Iriana Widodo terjadi pada bulan Juli dan Desember 2013 dengan nilai total tidak kurang dari 560.000 USD.

Kelima. Rekening atas nama Jusuf Kalla paling banyak melakukan aktifitas aliran dana pada bulan Desember 2013 dan April 2014 dengan nilai total tidak kurang dari 160.000 USD dan terjadi di Singapura dan Hong Kong. Sementara itu, untuk Mufidah Kalla jumlah transaksi terbesar terjadi pada bulan Februari 2014 dengan total nilai tidak kurang dari 450.000 USD dan terjadi di Singapura.

Mengingat bahwa total aset keuangan pada LHKPN yang dilaporkan oleh Jusuf Kalla ke KPK dan KPU adalah hanya sebesar 700.813 USD + RP 6.945.423.767 (setara dengan 576.240 USD) maka perlu digarisbawahi bahwa jumlah ini jauh berada di bawah jumlah 14.538.197 USD yang terdeteksi tersebar di 42 rekening multinasional. Tepatnya, jumlah yang dilaporkan dalam LHKPN hanyalah sekitar 8.8% dari yang aset keuangan yang terdeteksi di 42 rekening multinasional tersebut. Dengan kata lain, oleh Jusuf Kalla harta kekayaan di berbagai negara ini juga tidak dilaporkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada negara. Seperti pada kasus Joko Widodo dan Iriana Widodo, anatomi dan konfigurasi dari seluruh rekening Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla di luar negeri ini memenuhi persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai pencucian uang / *money laundering*.

Keenam. Secara keseluruhan, 126 rekening atas nama 4 pemilik rekening tersebut melakukan aktifitas transaksi terbesar di bulan Desember 2013 dengan nilai total 2.061.893 USD dan terjadi di negara Singapura, Hong Kong, dan Swiss.

Ketujuh. Dari seluruh analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa berbagai fakta di atas bertentangan dengan profil dan reputasi Joko Widodo yang selama ini diproyeksikan ke publik sebagai politisi yang jujur dan sederhana. Bukan hanya itu saja, terbongkarnya berbagai rekening siluman jutaan U.S. Dollar di berbagai negara ini secara otomatis membatalkan pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla karena keduanya diindikasikan kuat terbukti melanggar hukum, melanggar moralitas/etika yang menyebabkan keduanya kehilangan legitimasi, dan mengancam keselamatan bangsa serta kepentingan nasional Indonesia.

6. Rekomendasi

Pertama. Menyadarkan seluruh komponen bangsa Indonesia bahwa kasus ini adalah kasus Keamanan Nasional yang sangat serius dan bahwa *cheater*, pembohong, pelanggar hukum, individu yang kehilangan legitimasi, dan penghianat negara tidak dapat dan tidak layak untuk memimpin apalagi sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi.

Kedua. Mengharuskan seluruh lembaga / institusi hukum terkait untuk melakukan pemeriksaan secara tuntas terhadap kasus terbongkarnya berbagai rekening siluman ini.

Ketiga. Mengharuskan DPR dan MPR untuk melakukan pemeriksaan secara tuntas terhadap kasus terbongkarnya berbagai rekening siluman ini.

Keempat. Mengharuskan MPR dan Mahkamah Agung untuk tidak melantik Joko Widodo dan Jusuf Kalla hingga keduanya dapat dibuktikan tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap kasus terbongkarnya berbagai rekening siluman ini.

7. Lampiran

- a. Laporan Investigasi 18 Juli 2014 perihal temuan 20 Rekening atas nama Joko Widodo dan 12 rekening atas nama Iriana Widodo.
- b. Laporan Investigasi 17 Agustus 2014 perihal temuan 36 rekening atas nama Joko Widodo, 16 rekening atas nama Iriana Widodo, 42 rekening atas nama Jusuf Kalla, dan 32 rekening atas nama Mufidah Kalla.
- c. *Financial Action Task Force Report 2011.*
- d. Daftar Pejabat Publik di berbagai negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan penghianatan terhadap negara berdasarkan *Financial Action Task Force Report 2011.*

Financial investigation - insights

- Due to the exceptional urgency characterizing this project, the information brought in this report is partial - additional information would be provided as soon as possible. We would discuss the potential operational uses of this valuable information face to face.
- The financial investigation led to the identification of a total of 20 bank accounts connected with the subject and his wife.
- When compared with the subject's equity statement, even while taking into consideration the partiality of the financial intelligence, we find clear indications for significant discrepancies.

Financial investigation - insights

- o All of the subject's bank accounts are attributed to the following companies
 1. ENTERPRISE LLC
 2. TRAVEL CONSULTANTS LLC
 3. Artistic Associate Producers CO
 4. ANTIQUES LLC
- o The subject is listed as a signatory/sole authorized holder
- o All bank accounts are listed outside of Indonesia, and some were opened in known offshore countries (Solomon Islands, Hong Kong, Singapore, Philippines, Mongolia, Jordan and Lebanon)

Financial investigation - insights

Some of the bank accounts were opened simultaneously - several accounts opened in the same branch and on the same date, such as two of the CSCBANK SAL in Lebanon, all three accounts in the Union Bank of the Philippines, all three accounts in Bushelkha Exchange accounts in Jordan etc

The subject holds 4 checking accounts, 5 international accounts, 10 savings accounts and 1 corporate account

Financial investigation - insights

- o Even though the subject is a public figure in Indonesia, he has significant financial activity outside of the country. The subject's offshore financial activity is also characterized by a high level of volatility (many checking, international and corporate accounts in total)
- o The subject performed several significant financial transfers in two indicative short periods of time - the last quarter of 2013 and the first quarter of 2014 - both near the dates of elections in Indonesia.
- o The subject's wife also holds several offshore companies and bank accounts of similar nature to the subject's own financial activity. We estimate based on our experience, that this indicates that the subject transferred some of his own financial activity under his wife's name.

[illegible]

奇天

Financial investigation – equity statement

Pratiwi Susanto - Harta Rakasa

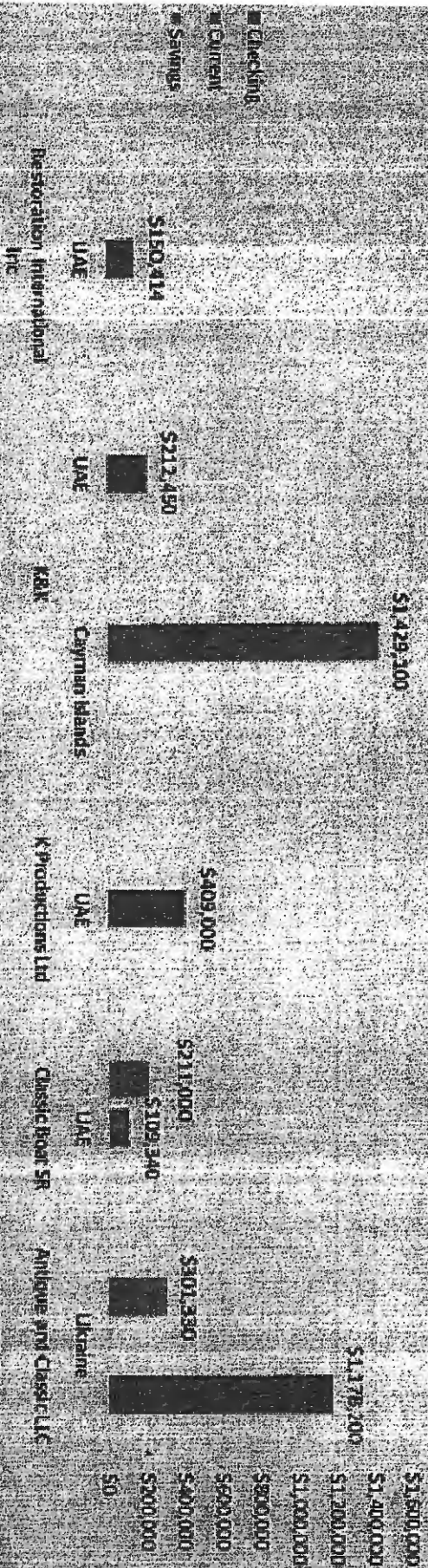


Joko Widodo - Jusuf Kalla

Rp 605.802.100.000	Rp 21.744.232.500	Fixed Assets	Rp 29.453.455.000	Rp 121.937.182.000
Rp 1.432.500.000		Vehicle Unit	Rp 954.500.000	Rp 525.000.000
Rp 32.196.000.000		Agriculture, Fishing and Mining	Rp 572.440.076	Rp 1.000.000.000
	Rp 95.000.000	Precious Metals	Rp 27.200.000	Rp 100.000.000
	Rp 1.650.000.000	Precious Stones	Rp 15.000.000	Rp 100.000.000
Rp 3.000.500.000	Rp 2.050.000.000	Arts and Antiques		
Rp 1.221.721.000	Rp 380.000.000	Others	Rp 319.150.000	Rp 139.700.000
Rp 1.308.182.000.013	Rp 4.116.720.712	Securities		Rp 34.803.839.280
Rp 20.498.057.351	Rp 357.650.412	Cash and Deposit/Savings	Rp 448.140.718	Rp 8.845.423.787
Rp 104	Rp 76.002		Rp 633	Rp 700.813
Rp 1.870.392.380.402	Rp 30.234.940.584	Total Wealth	Rp 28.882.946.012	Rp 485.010.485.057
Rp 503.394	Rp 375.002		Rp 633	Rp 1.058.554
Source: KPU				Rp 5M

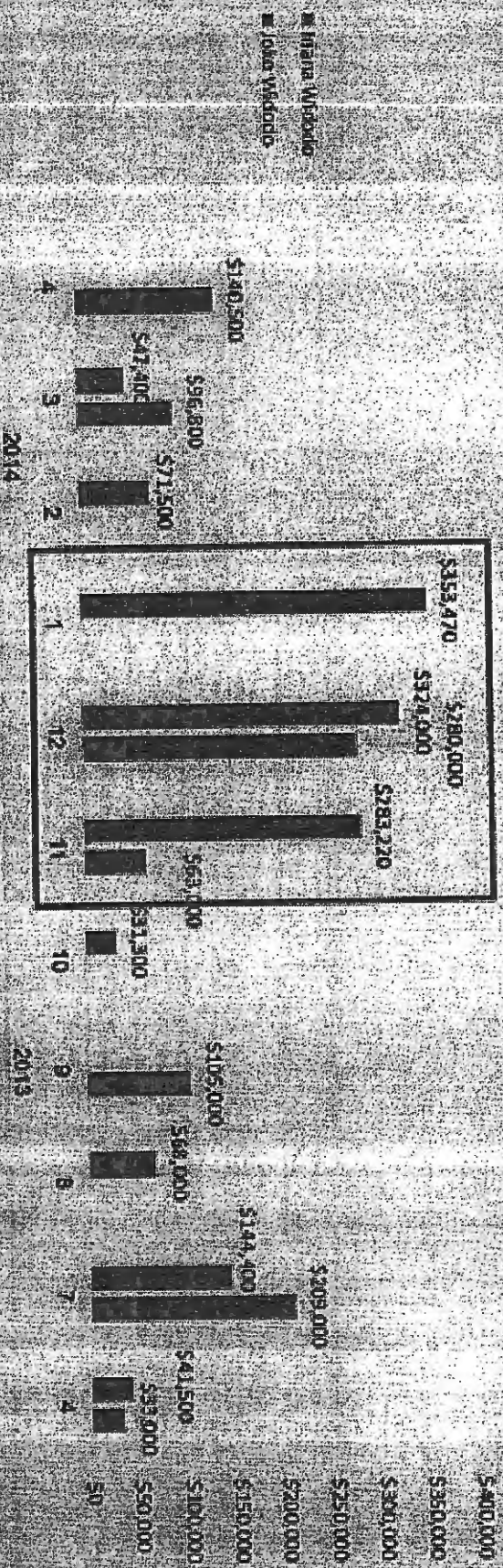
Financial investigation - analysis

The subject wife's total Sum of Money divided by Company, Country and Type of Account:



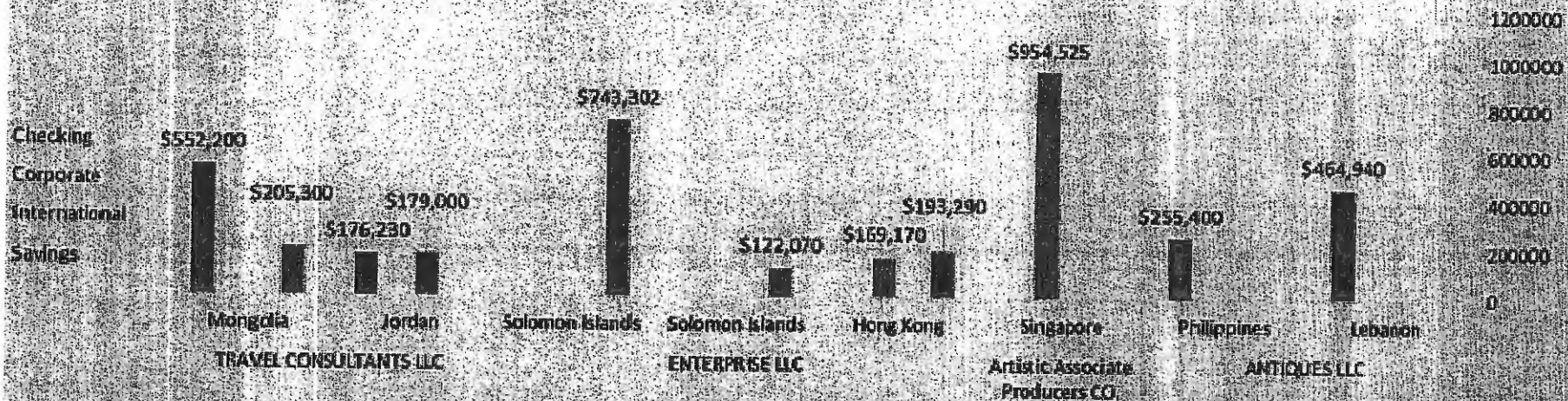
financial investigation - analysis

Transfers of Money from/to the subject's accounts, by months:



Financial investigation - analysis

The Subject's total Sum of Money, divided by Company, Country and Type of Account:



CONFIDENTIAL REPORT

JOKO WIDODO



Date of Report: July 18, 2014

Personal Data:

Name:

JOKO WIDODO

DOB:

JUNE 21, 1961

Last name at birth:

"Mulyono"

Wife:

Iriana Widodod

DOB:

Oct 1st, 1963

DETAILS OF BANK ACCOUNTS FOUND GLOBALLY FOR JOKO WIDODO

1. WESTPAC BANKING CORP HONIARA



Bank Name: Westpac Banking Corp Honiara

Branch: PO BOX 466 C / O OFFICE SUVA City: Honiara, Salomon Islands

IBAN Code: SB0845223682343468722459

Bank Account Number: 43468722459

Account Type: Checking Account

Balance: USD 743,302.00

Account Holders: ENTERPRISE LLC

Authorized Account Holders: 1 - JOKO WIDODO

Date of account opening: 11/09/2009

Last wire transfer: Date: 16/02/2014, USD 71,500.00 - From Switzerland

2. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANCARIA GROUP LIMITED



Bank Name: AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANCARIA GROUP LIMITED

Branch: Mendaña AVENUE, Honiara City, Salomon Islands

IBAN Code: SB299367978193455468896

Bank Account Number: 93455468896

Account Type: Checking Account

Balance: USD 122,070.00

Account Holders: ENTERPRISE LLC

Authorized Account Holders: 1 - JOKO WIDODO

Date of account opening: 16/11/2009

Last wire transfer: Date: 10/12/2013, USD 72,000.00 - From Switzerland

3. HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED



Bank Name: Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

Branch: Hong Kong Bank Building Suite 123-1 Queens Road Central

Swift Code: HSBCHKHHEBD

IBAN Code: HK85996781993843001410

Bank Account Number: 781993843001410

Account Type: Checking Account

Balance: USD 193,290.00

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Account Holders: ENTERPRISE LLC

Date of account opening: (Initiation) 18.10.2010

Last wire transfer: 19.11.2013

4. HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED



Bank Name: Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

Branch: Hong Kong Bank Building Suite 123-1 Queens Road Central

Swift Code: HSBCHKHHEBD

IBAN Code: HK83996781992143117865

Bank Account Number: 781992143117865

Account Type: International account

Balance: USD 77,500.00

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Account Holders: ENTERPRISE LLC

Date of account opening: (Initiation) 18.10.2010

Last wire transfer: 26.10.2013

5. HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED



Bank Name: Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

Branch: Hong Kong Bank Building Suite 123-1 Queens Road Central

Swift Code: HSBCHKHHEBD

IBAN Code: HK64996781992113119890

Bank Account Number: 781992113119890

Account Type: International account

Balance: USD 91,670.00

Authorized Account Holders: 1 - JOKO WIDODO

Account Holders: ENTERPRISE LLC

Date of account opening: (Initiation) 18.10.2010

Last wire transfer: 04.07.2013

6. **BANK OF MONGOLIA**

Bank Name: Bank of Mongolia

Branch: Baga Toiruu-9, 210646 Ulaanbaatar, Ulaanbaatar

SWIFT code: BOMUMNUBXXX

IBAN Code: MN76199933207645371

Bank Account Number: 99933207645371

Account Type: Checking Account

Balance: USD 205,300.00

Account Holders: TRAVEL CONSULTANTS LLC

Authorized Account Holders: 1 - JOKO WIDODO

Date of account opening: 14.04.2010

Last wire transfer: Date: 11.01.2014, USD 51,000.00 - From Hong Kong



7. **BANK OF MONGOLIA**

Bank Name: Bank of Mongolia

Branch: Baga Toiruu-9, 210646 Ulaanbaatar, Ulaanbaatar

SWIFT code: BOMUMNUBXXX

IBAN Code: MN83199933219649383



Bank Account Number: 199933219649383

Account Type: Savings Account

Balance: USD 341,200.00

Account Holders: TRAVEL CONSULTANTS LLC

Authorized Account Holders: 1 - JOKO WIDODO

Date of account opening: 14.04.2010

Last wire transfer: Date: 10.12.2013, USD 161,000.00 - From Hong Kong

8. BANK OF MONGOLIA

Bank Name: Bank of Mongolia

Branch: Address: Baga Toiruu-9, 210646 Ulaanbaatar, Ulaanbaatar

SWIFT code: BOMUMNU8XXX

IBAN Code: MN31199933210640377

Bank Account Number: 199933210640377

Account Type: Savings account

Balance: USD 211,000.00

Holder of the bank account: TRAVEL CONSULTANTS LLC

Authorized Account Holders: 1 - JOKO WIDODO

Date of account opening: 15.04.2010

Last wire transfer: Date: 17.11.2013 - USD 57,500.00 - From Hong Kong



9. BUSHEIKHA EXCHANGE

Bank Name: BUSHEIKHA EXCHANGE

Branch: 133 Gardenis, AMMAN, Jordan

IBAN Code: JO95133317811899001

Bank Account Number: 133317811899001

SWIFT code: ABXUJOAAXXX

Account Type: Savings Account



Balance: USD 67,000.00

Holder of the bank account: TRAVEL CONSULTANTS LLC

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Date of account opening: 17.11.2009

Last wire transfer: Date: 27.07.2013, USD 47,400.00 - Hong Kong

10. BUSHEIKHA EXCHANGE



Bank Name: BUSHEIKHA EXCHANGE

Branch: 133 Gardens, AMMAN Jordan

IBAN Code: JO17133317811899338

Bank Account Number: 133317811899338

SWIFT code: ABXUJOAAXX

Account Type: Savings Account

Balance: USD 109,230.00

Holder of the bank account: TRAVEL CONSULTANTS LLC

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Date of account opening: 17.11.2009

Last wire transfer: Date: 14.04.2013 - USD 41,500.00 - From Hong Kong

11. BUSHEIKHA EXCHANGE



Bank Name: BUSHEIKHA EXCHANGE

Branch: 133 Gardens, AMMAN Jordan

IBAN Code: JO43133317811899743

Bank Account Number: 133317811899743

SWIFT code: ABXUJOAAXX

Account Type: Corporate Account

Balance: USD 179,000.00

Holder of the bank account: TRAVEL CONSULTANTS LLC

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Date of account opening: 19.11.2009

Last wire transfer: Date: 25.08.2013, USD 27,000.00 - From Hong Kong

12. CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD



Bank Name: Chang Hwa Commercial Bank Ltd

Branch: 1 Finlayson Green, #08-00 Singapore 049246

IBAN Code: SG545561306635197930376

Bank Account Number: 561306635197930376

SWIFT code: CCBGSGSG

Account Type: International Account

Balance: USD 116,407.00

Holder of the bank account: Artistic Associate Producers CO

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Date of account opening: 07.03.2007

Last wire transfer: Date: 19.08.2013, USD 41,000.00 - Hong Kong

13. CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD



Bank Name: Chang Hwa Commercial Bank Ltd

Branch: 1 Finlayson Green, #08-00 Singapore 049246

IBAN Code: SG695561306637197038414

Bank Account Number: 561306637197038414

SWIFT code: CCBGSGSG

Account Type: International Account

Balance: USD 218,414.00

Holder of the bank account: Artistic Associate Producers CO

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Date of account opening: 07.03.2007

Last wire transfer: Date: 16.11.2013 - USD 172,500.00 - Hong Kong

14 CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD



Bank Name: Chang Hwa Commercial Bank Ltd

Branch: 1 Finlayson Green, #08-00 Singapore 049246

IBAN Code: SG645561306637206579812

Bank Account Number: 561306637206579812

SWIFT code: CCBCHSGG

Account Type: International Account

Balance: USD 619,704.00

Holder of the bank account: Artistic Associate Producers CO

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Date of account opening: 07.03.2007

Last wire transfer: Date: 12.01.2014, - USD 201,000.00 - Hong Kong

15 UNION BANK OF THE PHILIPPINES



Bank Name: Union Bank of the Philippines

Branch: Ground floor Unit 101 AIC Burgundy Empire Tower, ADB Ave, Ortigas, Pasig City

IBAN Code: PH766691649947850001913

Bank Account Number: 91649947850001913

SWIFT code: UBPHPHMM

Account Type: Savings Account

Balance: USD 59,200.00

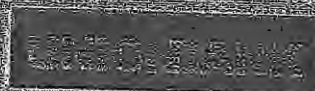
Holder of the bank account: ANTIQUES LLC

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Date of account opening: 02.09.2005

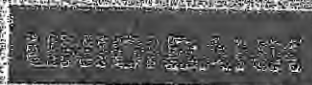
Last wire transfer: 10.12.2013, USD 91,000.00 - Hong Kong

16. UNION BANK OF THE PHILIPPINES



Bank Name: Union Bank of the Philippines
Branch: Ground floor Unit 101 AIC Burgundy Empire Tower, ADB Ave., Ortigas, Pasig City
IBAN Code: PH226691649947850001139
Bank Account Number: 691649947850001139
SWIFT code: UBPHPHMM
Account Type: Savings Account
Balance: USD 93,300.00
Holder of the bank account: ANTIQUES LLC
Authorized Account Holders: 1 - JOKO WIDODO
Date of account opening: 02.09.2005
Last wire transfer: 29.07.2013 - USD 97,000.00 - Hong Kong

17. UNION BANK OF THE PHILIPPINES



Bank Name: Union Bank of the Philippines
Branch: Ground floor Unit 101 AIC Burgundy Empire Tower, ADB Ave., Ortigas, Pasig City
IBAN Code: PH276691649947850001340
Bank Account Number: 691649947850001340
SWIFT code: UBPHPHMM
Account Type: Savings Account
Balance: USD 102,900.00
Holder of the bank account: ANTIQUES LLC
Authorized Account Holders: 1 - JOKO WIDODO
Date of account opening: 02.09.2005
Last wire transfer: 18.11.2013 - USD 53,220.00 - Hong Kong

18. CSCBANK SAI



Branch: No. 133, 150 Commodore Street, Hamra, Beirut 1103 2120, Lebanon

IBAN Code: LB383372900200498712365

Bank Account Number: 72900200498712365

SWIFT code: CCSCLBBE

Account Type: Savings Account

Balance: USD 161,000.00

Holder of the bank account: ANTIQUES LLC

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Date of account opening: 17.05.2005

Last wire transfer: 26.10.2013, USD 31,300.00 - Hong Kong

19. CSCBANK SAL



Branch: No. 133, 150 Commodore Street, Hamra, Beirut 1103 2120, Lebanon

IBAN Code: LB363372900200413714890

Bank Account Number: 72900200413714890

SWIFT code: CCSCLBBE

Account Type: Savings Account

Balance: USD 97,940.00

Holder of the bank account: ANTIQUES LLC

Authorized Account Holders: 1- JOKO WIDODO

Date of account opening: 17.05.2005

Last wire transfer: 07.01.2014, USD 101,470.00 - Hong Kong

20. CSCBANK SAL



Branch: No. 133, 150 Commodore Street, Hamra, Beirut 1103 2120, Lebanon

Iban Code: LB363372900200414913907

Bank Account Number: 72900200414913907

SWIFT code: CCSCLBBE

Account Type: Savings Account

Balance: USD 206,000.00

Holder of the bank account: ANTIQUES LLC

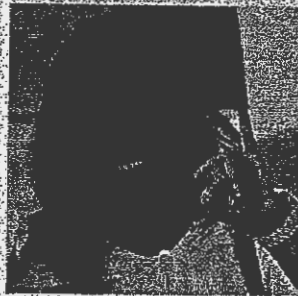
Authorized Account Holders: 1 - JOKO WIDODO

Date of account opening: 29.08.2006

Last wire transfer: 21.03.2014, USD 47,400.00 Hong Kong

CONFIDENTIAL REPORT

IRIANA WIDODO



Date of Report: July 18, 2014

DETAILS OF BANK ACCOUNTS FOUND GLOBALLY FOR JOKO WIDODO

1. TF BANK KONTRAKT INC

Bank
Kontrakt

Branch: PO address 58, VOZDVYZHENSKA UL., 01025 KIEV, city kiev

Iban Code: UA1122243159766

Bank Account Number: 22243159766

Swift Code: ANTAUAUKXXX

Account Type: Checking Account

Balance: USD 404.200

Holder of the bank account: Antique and Classic LLC

Authorized bank account: 1

Date of account opening: 14.10.2009

Last wire transfer: 27.03.2014, USD 77.800,- Hong Kong

2. TF BANK KONTRAKT INC

Bank
Kontrakt

Branch: address 58, VOZDVYZHENSKA UL., 01025 KIEV, city kiev

Iban Code: UA12122243139960

Bank Account Number: 22243139960

Swift Code: ANTAUAUKXXX

Account Type: Checking Account

Balance: USD 774.000

Holder of the bank account: Antique and Classic LLC

Authorized bank account: 1

Date of account opening: 14.10.2009

Last wire transfer: 05.09.2013, USD 11.000,- Hong Kong

3. TF BANK KONTRAKT INC

Bank
Kontrakt

Branch: address 58, VOZDVYZHENSKA UL., 01025 KIEV, City Kiev

Iban Code: UA48122243139991

Bank Account Number: 22243139991

Swift Code: ANTAUAUKXXX

Account Type: Savings Account

Balance: USD 301.330

Holder of the bank account: Antique and Classic LLC

Authorized bank account: 1

Date of account opening: 19.10.2009

Last wire transfer: 22.07.2013, USD 209.000 - Hong Kong

4. FIRST CARRIBBEAN INTERNATIONAL BANK LT. GRAND CAYMAN

Branch: Ramada Grand Cayman Resort, George Town KY1-1102, G - Caïman

Iban Code: KY98344471499410984576

Bank Account Number: 344471499410984576

Swift Code: FCIBWCUXXX

Account Type: Savings Account

Balance: USD 507.700 -

Holder of the bank account: K&K

Authorized bank account: 1

Date of account opening: 25.05.2008

Last wire transfer: 28.11.2013, USD 63.000 - Singapore



5. FIRST CARRIBBEAN INTERNATIONAL BANK LT. GRAND CAYMAN

Branch: Ramada Grand Cayman Resort, George Town KY1-1102, G - Caïman

Iban Code: KY96344471499000083591

Bank Account Number: 344471499000083591

Swift Code: FCIBWCUXXX

Account Type: Savings Account

Balance: USD 605.000 -

Holder of the bank account: K&K

Authorized bank account: 1

Date of account opening: 25.05.2008

Last wire transfer: 07.12.2013, USD 31.000 - Singapore



6. FIRST CARRIBBEAN INTERNATIONAL BANK LT. GRAND CAYMAN

Branch: Ramada Grand Cayman Resort, George Town KY1-1102, G - Caïman

Iban Code: KY28344471499000073660

Bank Account Number: 344471499000073660

Swift Code: FCIBWCUXXX

Account Type: Savings Account

Balance: USD 316.400 -

Holder of the bank account: K&K

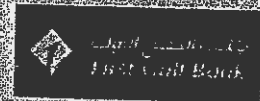
Authorized bank account: 1

Date of account opening: 25.05.2008

Last wire transfer: 03.09.2013, USD 94.000 - Hong Kong

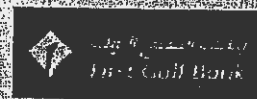


7. FIRST GULF BANK



Branch: Abu Dhabi AL Khubairah Branch, Zayed First Street, Khalidiya
Iban Code: AE69566610789300671
Bank Account Number: 566610789300671
Swift Code: FGBMAEAA
Account Type: Savings Account
Balance: USD 211.000,-
Holder of the bank account: Classic Boat SR
Authorized bank account: 1
Date of account opening: 16.07.2009
Last wire transfer: 14.04.2013, USD 33.000,- Hong Kong

8. FIRST GULF BANK



Branch: Abu Dhabi AL Khubairah Branch, Zayed First Street, Khalidiya
Iban Code: AE03566610789300113
Bank Account Number: 566610789300113
Swift Code: FGBMAEAA
Account Type: Current Account
Balance: USD 109.3400,-
Holder of the bank account: Classic Boat SR
Authorized bank account: 1
Date of account opening: 16.07.2009
Last wire transfer: 21.12.2013, USD 86.000,- Singapore

9. MASHREQ BANK



Branch: P.O. Box 233483, Dubai Mall
Iban Code: AE43566610789300751
Bank Account Number: 566610789300751
Swift Code: BOMLAEDCSU
Account Type: Current Account (EJ-Customer-services)
Balance: USD 75.207,-
Holder of the bank account: Restoration International Inc
Authorized bank account: 1
Date of account opening: 23.11.2009
Last wire transfer: 09.12.2013, USD 163.000,- Singapore

10. MASHREQ BANK



Branch: P.O. Box 233483- Dubai Mail
Iban Code: AE88566610789300911
Bank Account Number: 566610789300911
Swift Code: BOMLAEADCSU
Account Type: Current Account
Balance: USD 75,207-
Holder of the bank account: Restoration International Inc
Authorized bank account: 1
Date of account opening: 23.11.2009
Last wire transfer: 04.04.2014 - USD 81,000- - Hong Kong

11. JANATA BANK



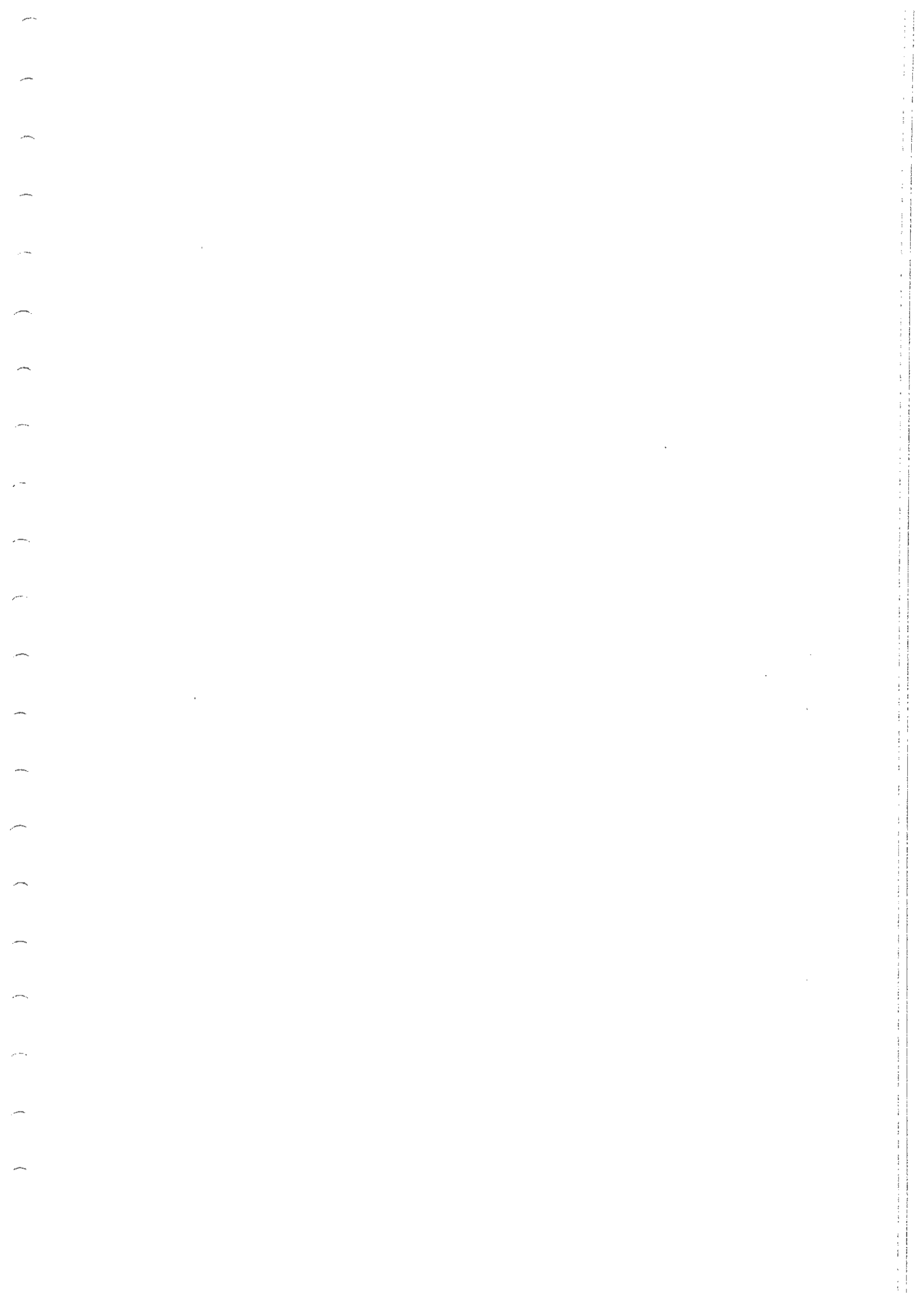
Branch: Abu Dhabi Branch, Obied Sayah Al-Mansuri Building, Electra Road, P.O. Box-2630
Iban Code: AE74566610789300193
Bank Account Number: 566610789300193
Swift Code: JANBAEADXB
Account Type: Current Account
Balance: USD 212,450-
Holder of the bank account: K&K
AUTHORIZED bank account: 1
Date of account opening: 17.12.2010
Last wire transfer: 03.03.2014, USD 19,000- - Hong Kong

12. UNITED ARAB BANK

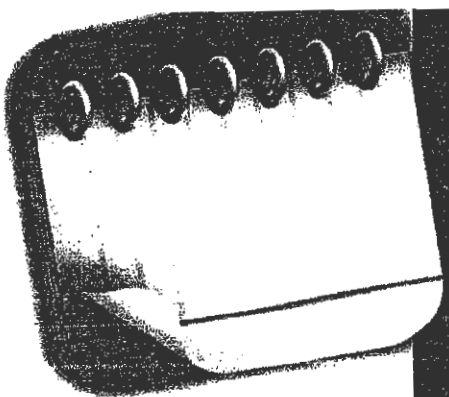


البنك العربي الجديد
UNITED ARAB BANK

Branch: Al Burj Avenue P.O. Box 881 Sharjah
Iban Code: SG215561306635133939391
Bank Account Number: 561306635133939391
Swift Code: UARBAEAA
Account Type: Current Account
Balance: USD 409,000-
Holder of the bank account: K Productions Ltd
Authorized bank account: 1
Date of account opening: 10.12.2010
Last wire transfer: 19.04.2014, USD 59,500- - Singapore



INSIGHTS



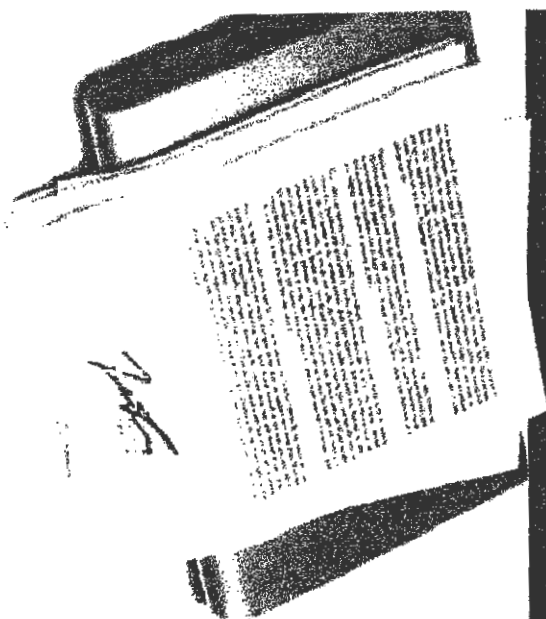
Financial investigation – insights

- The financial investigation led to the identification of a total of **52 bank accounts** connected with the **subject and his wife** (36 accounts related to the subject, and 16 related with his wife).
- Additionally, further financial investigation results indicate that the **subject's deputy and his wife** are connected with a total of **74 active bank accounts** (42 accounts related with the second in command, and 32 accounts related with his wife).

Financial investigation - insights

- o The subject is listed as a **signatory / authorized holder** on all accounts.
- o Bank accounts were opened in known **offshore** countries: Solomon Islands, Marshall Islands, Hong Kong, Singapore, Philippines, Mongolia, Jordan and Lebanon.
- o Some of the bank accounts were **opened simultaneously** - several accounts opened in the same branch and on the same date, such as two of the CSCBANK SAL in Lebanon, all three accounts in the Union Bank of the Philippines, all three accounts in Busheikha Exchange accounts in Jordan etc.

FINDINGS



oko and Iriana Widodo



52

Active accounts

*20 new

0

Closed accounts

1

Corporate
account

1

CDS certificate
of deposit

2

Current
accounts

5

International
accounts

15

Checking
accounts

28

Savings
accounts

Bank accounts

Accounts co-owned with companies: All (52)

Value of total balance: USD 13,181,414

Joko Widodo



Bank accounts

36

Active accounts

*16 new

0

Closed accounts

1

Corporate
account

7

Checking
accounts

5

International
accounts

23

Savings
accounts

Accounts co-owned with companies: All (36)

Value of total balance: USD 8,514,725

ko Widodo's bank accounts scan (part I):

Name	Bank Name	Branch Country	TYPE OF ACCOUNT	CURRENCY	BALANCE (\$)	Account Holders	DATE OF OPENING	Last Wire Transfer Date	Last Wire Transfer: Sum (\$)
000	METRO BANK LTD. (BANK OF THE PHILIPPINES)	SARONGI, SINGAPORE	CURRENT	USD	574382.00	ENTERPRISE LTD.	17/01/2007	26/02/2016	574500.00
000	BANK OF MONGOLIA	MONGOLIA	CURRENT	USD	526500.00	ENTERPRISE LTD.	14/01/2010	15/03/2016	526200.00
000	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	HONGKONG	CURRENT	USD	519500.00	ENTERPRISE LTD.	03/02/1997	15/03/2016	519500.00
000	METRO BANK LTD. (BANK OF THE PHILIPPINES)	SARONGI, SINGAPORE	CURRENT	EUR	510270.00	ENTERPRISE LTD.	15/03/2014	10/01/2016	510280.00
000	BANK OF CHINA LIMITED	SARONGI, SINGAPORE	CURRENT	USD	512200.00	ENTERPRISE LTD.	01/01/2010	10/02/2016	512300.00
000	BANK OF CHINA LIMITED	MANILA, PHILIPPINES	CURRENT	USD	49200.00	ENTERPRISE LTD.	19/01/2010	10/02/2016	50700.00
000	HSBC BANKING GROUP LIMITED	HONGKONG	CURRENT	USD	520400.00	ENTERPRISE LTD.	19/11/2006	21/07/2016	521000.00
000	CHINA BANKING CORPORATION LIMITED	SINGAPORE	CURRENT	USD	506700.00	ENTERPRISE LTD.	07/03/2007	12/01/2016	520100.00
000	CHINA BANKING CORPORATION LIMITED	SINGAPORE	CURRENT	USD	520500.00	ENTERPRISE LTD.	07/03/2007	16/01/2016	517500.00
000	CHINA BANKING CORPORATION LIMITED	SINGAPORE	CURRENT	USD	516000.00	ENTERPRISE LTD.	07/03/2014	19/03/2016	501000.00
000	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	HONGKONG	CURRENT	USD	501600.00	ENTERPRISE LTD.	07/03/2010	06/03/2016	501000.00
000	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	HONGKONG	CURRENT	USD	519500.00	ENTERPRISE LTD.	19/03/2010	26/03/2016	519500.00
000	HSBC BANKING GROUP LIMITED	SINGAPORE	CURRENT	EUR	506270.00	ENTERPRISE LTD.	01/01/2010	20/02/2016	506600.00
000	BANK OF CHINA LIMITED	MANILA, PHILIPPINES	CURRENT	EUR	520220.00	ENTERPRISE LTD.	26/03/2010	20/02/2016	511900.00
000	BANK OF CHINA LIMITED	MANILA, PHILIPPINES	CURRENT	EUR	508380.00	ENTERPRISE LTD.	11/01/2010	10/01/2016	510100.00
000	BANK OF CHINA LIMITED	MANILA, PHILIPPINES	CURRENT	EUR	520200.00	ENTERPRISE LTD.	30/03/2010	16/02/2016	524800.00

ko Widodo's bank accounts scan (part II):

Name	Bank Name		Branch	Country	TYPE OF ACCOUNT	CURRENCY	BALANCE (\$)	Account Holders	DATE OF OPENING	Last Wire Transfer: Date	Last Wire Transfer: Sum (\$)
1000	BNP	OFI	SOHAR	Morocco	SAVING	USD	\$912,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	11/01/2000	10/20/2000	\$10,000
1001	BOFIA	BOFIA	BOFIA	PERU	SAVING	BUR	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1002	METROBANK	NEW YORK BRANCH		USA	SAVING	USD	\$100,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1003	CHINA BANK	BEIJING		CHINA	SAVING	USD	\$100,000	CHINA BANK	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1004	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1005	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1006	METROBANK	NEW YORK BRANCH		USA	SAVING	USD	\$100,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1007	CHINA BANK	BEIJING		CHINA	SAVING	USD	\$100,000	CHINA BANK	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1008	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1009	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1010	METROBANK	NEW YORK BRANCH		USA	SAVING	USD	\$100,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1011	CHINA BANK	BEIJING		CHINA	SAVING	USD	\$100,000	CHINA BANK	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1012	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1013	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1014	METROBANK	NEW YORK BRANCH		USA	SAVING	USD	\$100,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1015	CHINA BANK	BEIJING		CHINA	SAVING	USD	\$100,000	CHINA BANK	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1016	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1017	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1018	METROBANK	NEW YORK BRANCH		USA	SAVING	USD	\$100,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1019	CHINA BANK	BEIJING		CHINA	SAVING	USD	\$100,000	CHINA BANK	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1020	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1021	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1022	METROBANK	NEW YORK BRANCH		USA	SAVING	USD	\$100,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1023	CHINA BANK	BEIJING		CHINA	SAVING	USD	\$100,000	CHINA BANK	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1024	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1025	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1026	METROBANK	NEW YORK BRANCH		USA	SAVING	USD	\$100,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1027	CHINA BANK	BEIJING		CHINA	SAVING	USD	\$100,000	CHINA BANK	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1028	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1029	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1030	METROBANK	NEW YORK BRANCH		USA	SAVING	USD	\$100,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1031	CHINA BANK	BEIJING		CHINA	SAVING	USD	\$100,000	CHINA BANK	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1032	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1033	BOFIA BANK	BOFIA		PERU	SAVING	USD	\$100,000	BOFIA SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000
1034	METROBANK	NEW YORK BRANCH		USA	SAVING	USD	\$100,000	TRAVELCO SUBSIDIARY	01/01/2000	01/01/2000	\$0,000

Iriana Widodo



Bank accounts

16

Active accounts

*4 new

0

Closed accounts

5

Savings
accounts

8

Checking
accounts

2

Call
accounts

1

CDS certificate
of deposit

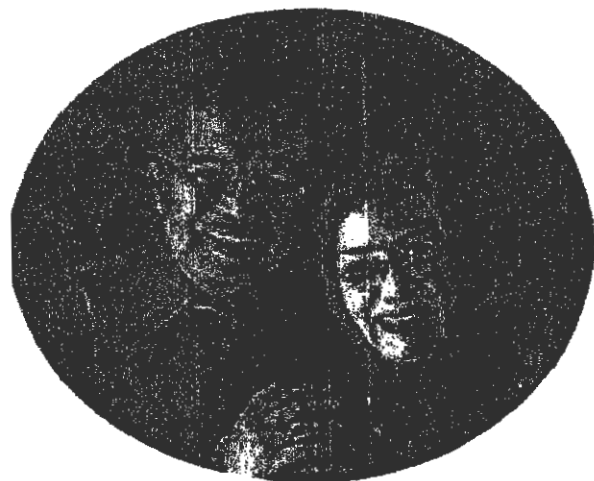
Accounts co-owned with companies: All (16)

Value of total balance: USD 4,666,689

ana Widodo's bank accounts scan:

Name	Bank Name	Branch Country	TYPE OF ACCOUNT	CURRENCY	BALANCE (\$)	Account Holders	DATE OF OPENING	Last Wire Transfer Date	Last Wire Transfer Sum (\$)
Idodo	STANDARD CHARTERED LIMITED	SINGAPORE	Call	EUR	\$114,310.04	Business and Investment Ltd.	17/05/2010	24/07/2013	\$43,550.00
Idodo	KBL PRIVATE BANKERS	MONACO	Call	EUR	\$60,442.04	Business and Investment Ltd.	17/05/2010	24/07/2013	\$31,624.00
Idodo	BOE PRIVATE BANKERS	MONACO	s Certificate de Depos	EUR	\$226,040.00	Business and Investment Ltd.	24/12/2011	05/11/2013	\$49,580.00
Idodo	TF BANK CONTRACT INC	Ukraine	Checking	USD	\$771,000.00	Andique and Classic LLC	14/10/2009	05/09/2015	\$11,000.00
Idodo	TF BANK CONTRACT INC	Ukraine	Checking	USD	\$404,200.00	Andique and Classic LLC	14/10/2009	27/03/2014	\$77,800.00
Idodo	BOEAB BANK A.D.	BOSNIA Y HERZEGOVINA	Checking	USD	\$214,900.00	Business and Investment Ltd.	30/12/2010	16/08/2013	\$53,400.00
Idodo	MASHREQ BANK	UAE	Checking	USD	\$75,379.00	Restoration International	23/11/2009	04/04/2014	\$81,000.00
Idodo	MASHREQ BANK	UAE	Checking	USD	\$75,207.00	Restoration International	23/11/2009	09/12/2013	\$103,000.00
Idodo	UNITED ARAB BANK	UAE	Current	USD	\$409,000.00	K Productions Ltd	10/12/2012	19/04/2016	\$59,500.00
Idodo	JAMATA BANK	UAE	Current	USD	\$212,450.00	CBK	17/11/2010	03/03/2014	\$19,000.00
Idodo	FIRST GULF BANK	UAE	Current	USD	\$109,340.00	Classic Boat SR	16/07/2009	21/12/2013	\$85,000.00
Idodo	FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL	Cayman Islands	Savings	USD	\$605,000.00	K&K	25/05/2008	07/12/2013	\$31,000.00
Idodo	BANK LT GRAND CAYMAN	Cayman Islands	Savings	USD	\$507,700.00	K&K	25/05/2008	28/11/2013	\$63,000.00
Idodo	FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL	Cayman Islands	Savings	USD	\$316,400.00	K&K	25/05/2008	03/09/2013	\$94,000.00
Idodo	BANK LT GRAND CAYMAN	Cayman Islands	Savings	USD	\$301,390.00	Andique and Classic LLC	19/10/2009	22/07/2013	\$209,000.00
Idodo	TF BANK KONTRAKT INC	Ukraine	Savings	USD	\$211,000.00	Classic Boat SR	16/07/2009	14/04/2013	\$33,000.00
Idodo	FIRST GULF BANK	UAE	Savings	USD					

uhammad Jusuf Kalla
&
Mufdiah Mi'ad Saad



Bank accounts

74

Active accounts

0

Closed accounts

44

Checking
accounts

30

Savings
accounts

Accounts co-owned with companies: 68

Sole holder accounts: 6

Value of total balance: USD 22,176,024

uhammad Jusuf Kalla



Bank accounts

42

Active accounts

0

Closed accounts

29

Checking
accounts

13

Savings
accounts

Accounts co-owned with companies: 39

Sole holder accounts: 3

Value of total balance: USD 14,538,127

Muhammad Jusuf Kalla's bank accounts scan (part 1):

This image shows a dark, textured surface, likely a scan of a blank page from an old document. The overall color is a deep charcoal gray to black. There are prominent vertical streaks or bands running down the length of the image, suggesting uneven lighting or scanning artifacts. Numerous small, bright white specks are scattered across the entire surface, which could be dust particles, paper grain, or scratches on the scanner glass. No text, figures, or other markings are present.

hammad Jusuf Kalla's bank accounts scan (part II):

[illegible]

Mufdiah Mi'ad Saad



Bank accounts

32

Active accounts

0

Closed accounts

15

Checking
accounts

17

Savings
accounts

Accounts co-owned with companies: 29

Sole holder accounts: 3

Value of total balance: USD 7,637,827

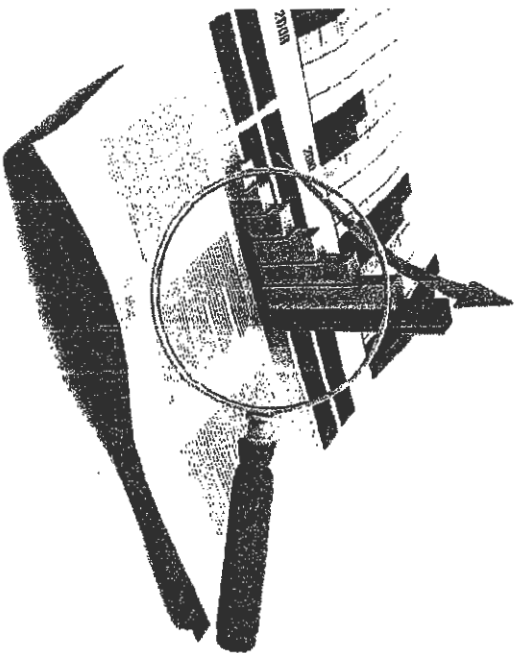
Ufdiah Mi'ad Saad's bank accounts scan (part 1):

Name	Bank Name	Branch Country	TYPE OF ACCOUNT	CURRENCY	BALANCE (\$)	Account Holders	Country where the account was opened	Last Wire Transfer Date	Last Wire Transfer: Sum (\$)
Mi'ad Saad	NATIONAL BANK OF FUJIAN	UAE	Checking	EUR	\$178,318.00	International Media and Entertainment Inc	Hong Kong	28/12/2013	\$5,768.70
Mi'ad Saad	NATIONAL BANK OF FUJIAN	UAE	Checking	EUR	\$246,828.00	Entertainment Inc	Hong Kong	15/11/2013	\$20,904.00
Mi'ad Saad	NATIONAL BANK OF FUJIAN	UAE	Checking	USD	\$155,200.00	International Media and Entertainment Inc	Hong Kong	30/01/2014	\$1,059.00
Mi'ad Saad	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SINGAPORE	Checking	EUR	\$140,164.00	Services Inc	Singapore	30/03/2014	\$35,282.70
Mi'ad Saad	NOUMURA SECURITIES (BERMUDA) LTD	BERMUDA	Checking	EUR	\$137,330.00	Global Financial Advisors	Hong Kong	16/12/2013	\$12,998.00
Mi'ad Saad	DBS SINGAPORE	SINGAPORE	Checking	EUR	\$133,738.34	Solutions United	Singapore	17/04/2014	\$15,808.00
Mi'ad Saad	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SINGAPORE	Checking	EUR	\$130,382.00	Services Inc	Singapore	19/04/2014	\$29,409.00
Mi'ad Saad	NOUMURA SECURITIES (BERMUDA) LTD	BERMUDA	Checking	USD	\$125,900.00	Global Financial Advisors	Hong Kong	19/11/2013	\$11,200.00
Mi'ad Saad	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SINGAPORE	Checking	USD	\$115,200.00	Services Inc	Singapore	19/03/2014	\$34,100.00
Mi'ad Saad	BANCO BPI CAYMAN LTD	Cayman Islands	Checking	EUR	\$115,132.80	Management Ltd	Singapore	27/05/2014	\$2,937.40
Mi'ad Saad	TAI FUNG BANK LTD (TFB)	MACAU	Checking	EUR	\$98,624.00	South Pacific Logistics LLC	Hong Kong	29/12/2013	\$5,628.00
Mi'ad Saad	BANCO BPI CAYMAN LTD	Cayman Islands	Checking	USD	\$74,750.00	Management Ltd	Singapore	16/05/2014	\$9,411.00
Mi'ad Saad	TAI FUNG BANK LTD (TFB)	MACAU	Checking	USD	\$60,950.00	South Pacific Logistics LLC	Hong Kong	17/01/2014	\$5,470.00
Mi'ad Saad	BANK OF INDONESIA	INDONESIA	Checking	IDR	\$28,701.60	MUFIDAH MI'AD SAAD	Indonesia	16/01/2014	\$2,908.17
Mi'ad Saad	BANK PAKYAT INDONESIA	INDONESIA	Checking	IDR	\$11,634.77	MUFIDAH MI'AD SAAD	Indonesia	06/05/2014	\$3,956.26
Mi'ad Saad	PAVOVIC INTERNATIONAL BANK	BOSNIA Y HERZEGOVINA	Savings	EUR	\$5,489,302.20	INTERNATIONAL SOUTH TRADE	Singapore	16/02/2014	\$426,265.00

ufdiah Mi'ad Saad's bank accounts scan (part I):

Name	Bank Name	Branch Country	TYPE OF ACCOUNT	CURRENCY	BALANCE(S)	Account Holders	DATE OF OPENING	Last Wire Transfer Date	Last Wire Transfer Sum (S)
Mi'ad Saad	ERG BANK SINGAPORE	SINGAPORE	Savings	EUR	\$417,008.00	SOUTH TRIDE INTERNATIONAL Global Financial Advisors SO SINGAPORE LHM TRADE INTERNATIONAL LLC Global Financial Advisors PACIFICTECHNOLOGY LIMITED	14/12/2012	05/06/2014	\$19,395.20
Mi'ad Saad	NOMURA SECURITIES (BERMUDA) LTD	BERMUDA	Savings	EUR	\$325,565.50		28/11/2013	07/09/2014	\$10,472.00
Mi'ad Saad	DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED	SINGAPORE	Savings	EUR	\$275,772.90		07/11/2012	28/12/2013	\$40,066.00
Mi'ad Saad	NOMURA SECURITIES (BERMUDA) LTD	BERMUDA	Savings	USD	\$204,900.00		28/11/2013	26/12/2013	\$4,300.00
Mi'ad Saad	COMMERZBANK AG SINGAPORE	SINGAPORE	Savings	EUR	\$171,596.76	INTERNATIONAL Financial Management Ltd Tourism and Travel Services Inc PACIFICTECHNOLOGY LIMITED	28/10/2011	30/06/2014	\$9,782.00
Mi'ad Saad	BAIJANG BPI CAYMAN LTD	Cayman Islands	Savings	EUR	\$159,532.00		09/06/2012	19/02/2014	\$4,258.00
Mi'ad Saad	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SINGAPORE	Savings	USD	\$147,550.00		18/11/2012	25/12/2013	\$107,400.00
Mi'ad Saad	COMMERZBANK AG SINGAPORE	SINGAPORE	Savings	EUR	\$120,152.44		28/10/2011	10/02/2014	\$19,296.00
Mi'ad Saad	DBS SINGAPORE	SINGAPORE	Savings	EUR	\$99,452.02	Global Business Solutions Limited International Financial Management Ltd International Media and Entertainment Inc Tourism and Travel Services Inc International Media and Entertainment Inc	16/02/2009	13/12/2013	\$16,145.66
Mi'ad Saad	BANCO BPI CAYMAN LTD	Cayman Islands	Savings	USD	\$93,200.00		06/09/2012	23/04/2014	\$8,500.00
Mi'ad Saad	NATIONAL BANK OF FUJIAH	UAE	Savings	USD	\$62,100.00		23/09/2011	12/05/2014	\$5,030.00
Mi'ad Saad	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SINGAPORE	Savings	EUR	\$51,228.20		18/11/2012	22/02/2014	\$19,416.60
Mi'ad Saad	NATIONAL BANK OF FUJIAH	UAE	Savings	EUR	\$46,632.00	Entertainment Inc South Pacific Logistics LLC MUPDAH MIAD SAAD South Pacific Logistics LLC	23/08/2011	16/05/2014	\$3,805.60
Mi'ad Saad	TAI FUNG BANK LTD (TTB)	MACAU	Savings	USD	\$42,990.00		16/11/2011	29/04/2014	\$4,560.00
Mi'ad Saad	BANK RAKIA INDONESIA	INDONESIA	Savings	IDR	\$42,782.24		25/04/2010	11/06/2014	\$2,122.11
Mi'ad Saad	TAI FUNG BANK LTD (TTB)	MACAU	Savings	EUR	\$42,116.20		16/11/2011	24/04/2014	\$3,508.12

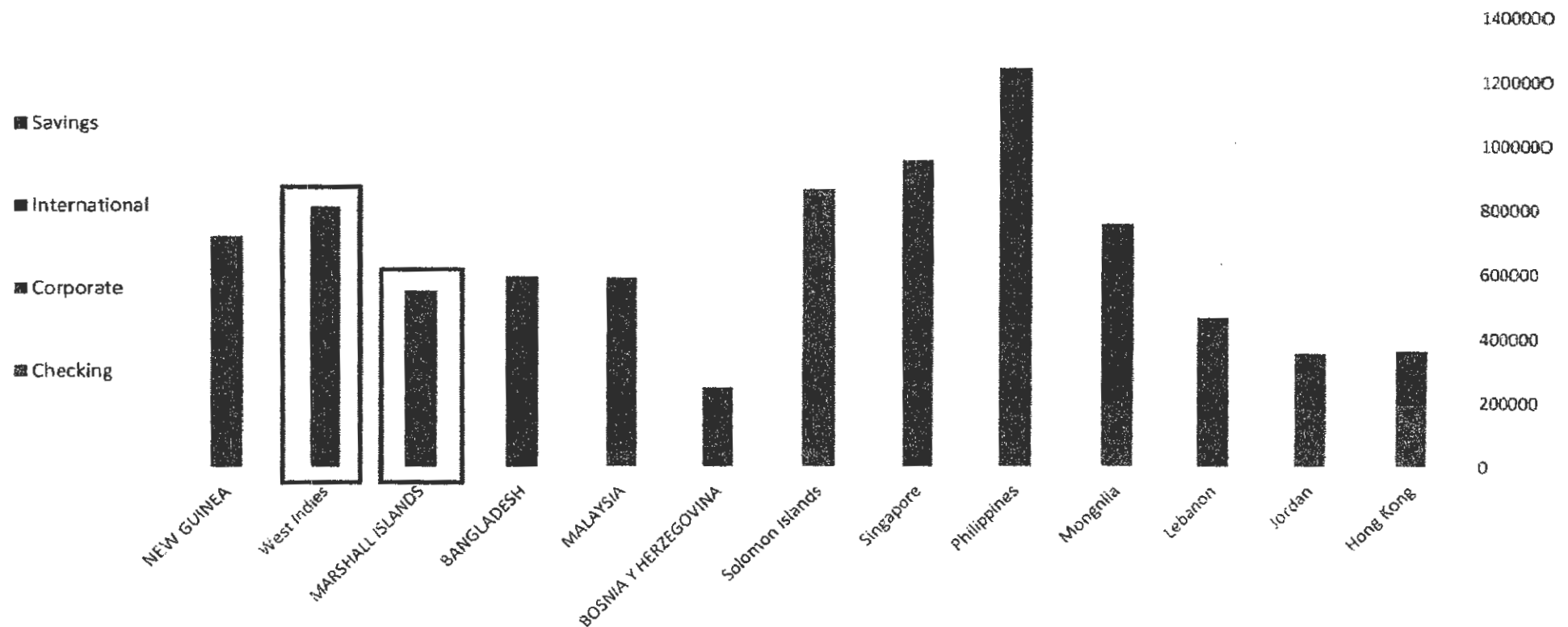
BANK ACCOUNTS ANALYSIS



Bank accounts analysis - Joko Widodo



Total sum of money (\$), divided by country and type of account:



Bank accounts analysis - Joko Widodo



When compared with the subject's **equity statement**, we find clear indications for significant discrepancies:

JOKO WIDODO					CALON PRESIDEN PERIODE 2014-2019				
JOKO WIDODO					CALON PRESIDEN PERIODE 2014-2019				
Rp29,453,455,000					Rp954,500,000				
\$0					\$0				
Rp0					Rp488,140,716				
\$0					\$27,633				
Rp0					Rp31,829,885,794				
\$0					\$27,633				
Rp0					Rp1,936,939,782				
\$0					\$27,633				
Rp0					Rp29,892,946,012				
\$0					\$27,633				

Bank accounts analysis – Joko Widodo



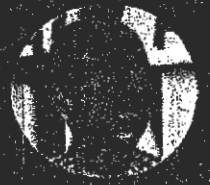
The target has two bank accounts which raise questions about the possibility of money laundering and/or corruption:

- I. Bank account in Loyal Bank in St. Vincent and the Grenadines – **West Indies**.
- II. Bank account in Bank of Marshall Islands – **Marshall Islands**.

The information regarding these two accounts is unusual:

- I. The places – St. Vincent & the Grenadines and Marshall Islands are considered as low credible off-shores.
- II. Specifically Loyal Bank in St. Vincent & the Grenadines and Marshall Islands as whole appear as money laundering concern.

Bank accounts analysis - Joko Widodo

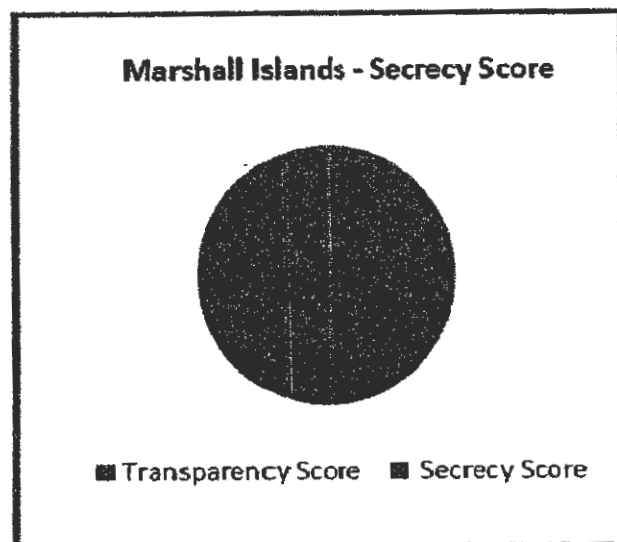


- III. The accounts are in Euro. It's worth to mention that the EU countries monitor Euro transactions only if those start or end in Europe. Not like the US that monitor every single transaction in USD.
- IV. Both of the accounts were opened under corporates accounts (account holder) but they are Saving Accounts - Which is quite strange for a corporate to hold savings (usually its deposits or investments).
- V. The accounts were opened from Singapore (Loyal Bank) and New Guinea (Marshall Islands) probably via service providers.

Bank accounts analysis - Joko Widodo



Details about Marshall Island's banks Financial Secrecy, taken from the 'Financial Secrecy Index' report:



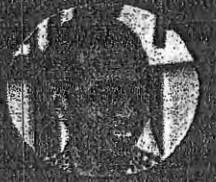
Public Company Ownership: Does the relevant authority make details of ownership of companies available on public record online for less than US\$10/€10?

Marshall Islands does not require that company ownership details are publicly available online

Anti-Money Laundering: Does the jurisdiction comply with the FATF recommendations?

Marshall Islands does not comply with international anti-money laundering standards

Bank accounts analysis - Joko Widodo



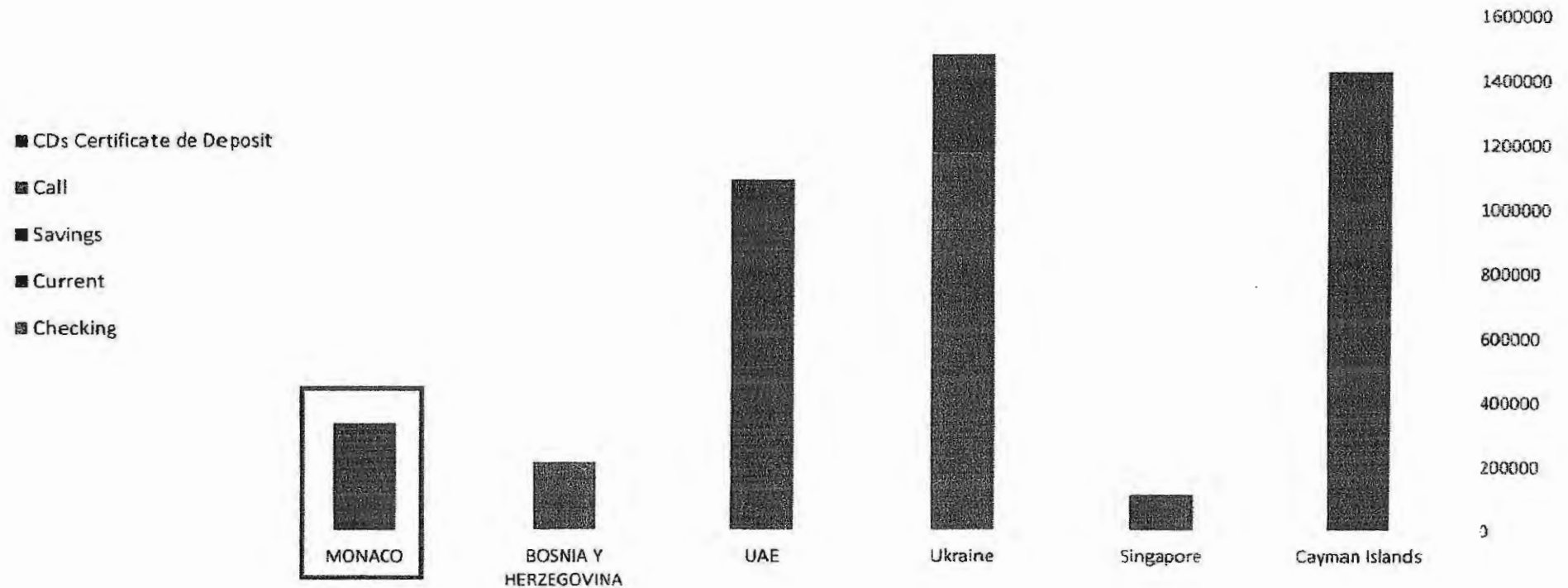
o Even though the subject is a public figure in Indonesia, he has significant financial activity **outside of the country**. The subject's offshore financial activity is also characterized by a high level of volatility (many checking, international and corporate accounts in total).

It's not typical for non-businessman to open offshore accounts via service providers from remote places as corporates in a currency which is not so tradable in the Far East.

Bank accounts analysis - Iriana Widodo



Total sum of money (\$), divided by country and type of account:



Bank accounts analysis – Iriana Widodo



o Iriana has two bank accounts in **Monaco**. These accounts raise, again, some questions:

- I. The accounts were opened in one of the credited banks – KBL Private Bankers. It's important to mention that not everyone can open account in this bank without distinguished sufficient references.
- II. The bank provide high secrecy to the account holders.
- III. Mrs. Widodo opened both the accounts through business corporate.

Bank accounts analysis - Iriana Widodo



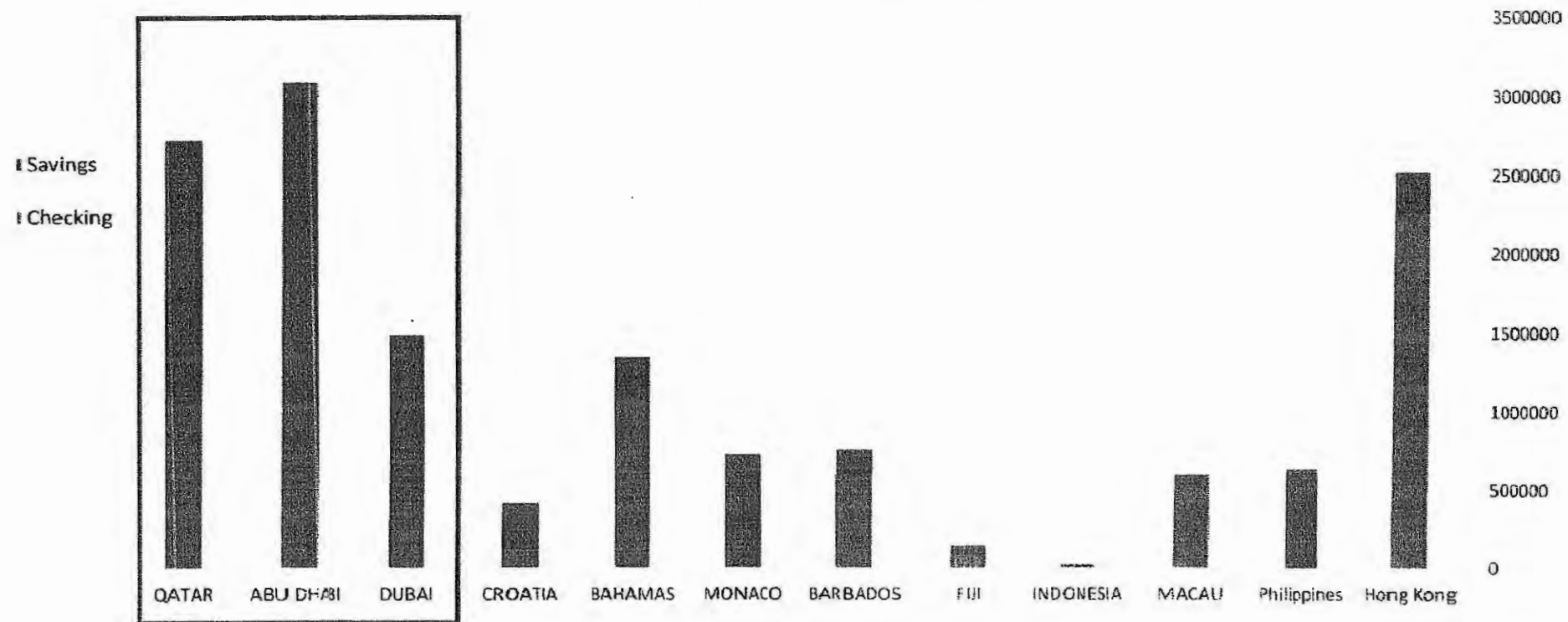
In addition, she holds several offshore companies and bank accounts of similar nature to the subject's own financial activity. We estimate, based on our experience, that this indicates that the subject transferred some of his own financial activity under his wife's name.

It's not typical for a woman who isn't business oriented to have an account at this bank, especially with the above mentioned characteristics.

Bank accounts analysis - Muhammad Jusuf Kalla



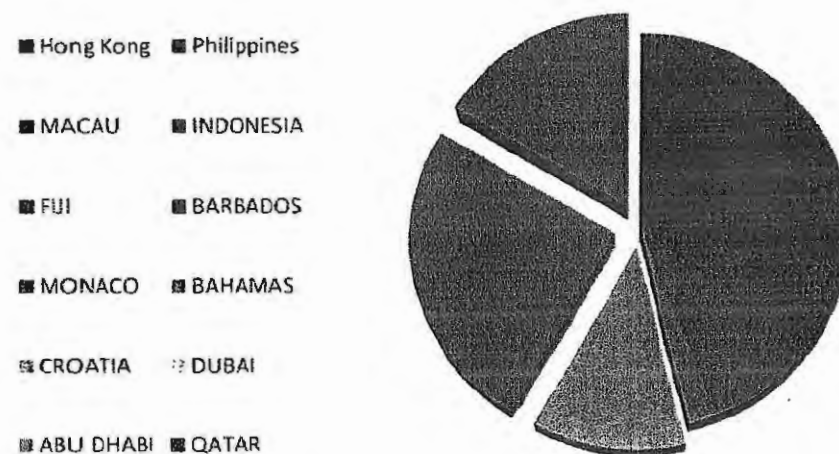
Total sum of money (\$), divided by country and type of account:



Bank accounts analysis - Muhammad Jusuf Kalla



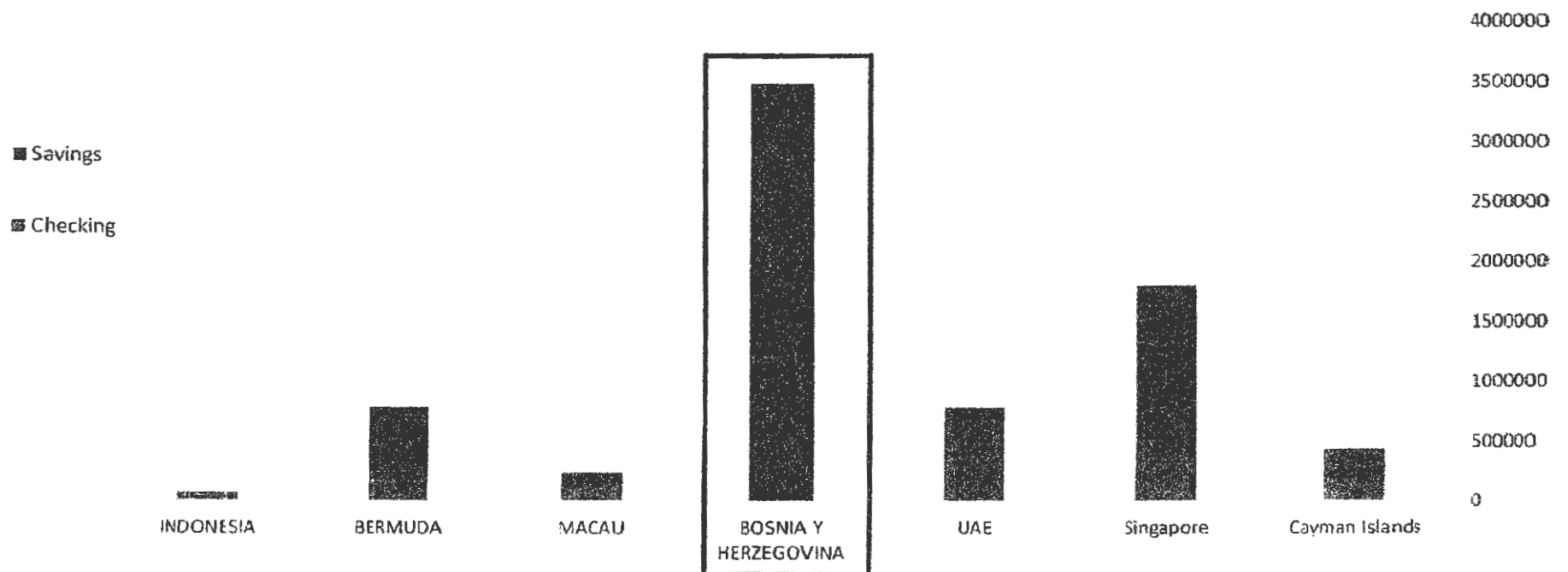
Almost half of Mr. Kalla's financial assets are located in the UAE, and in both currencies of USD and EURO:



Part of his holdings are in places which are not considered as highly common places to invest or to do business with, like Croatia.

Bank accounts analysis - Mufdiah Mi'ad Saad

Total sum of money (\$), divided by country and type of account:

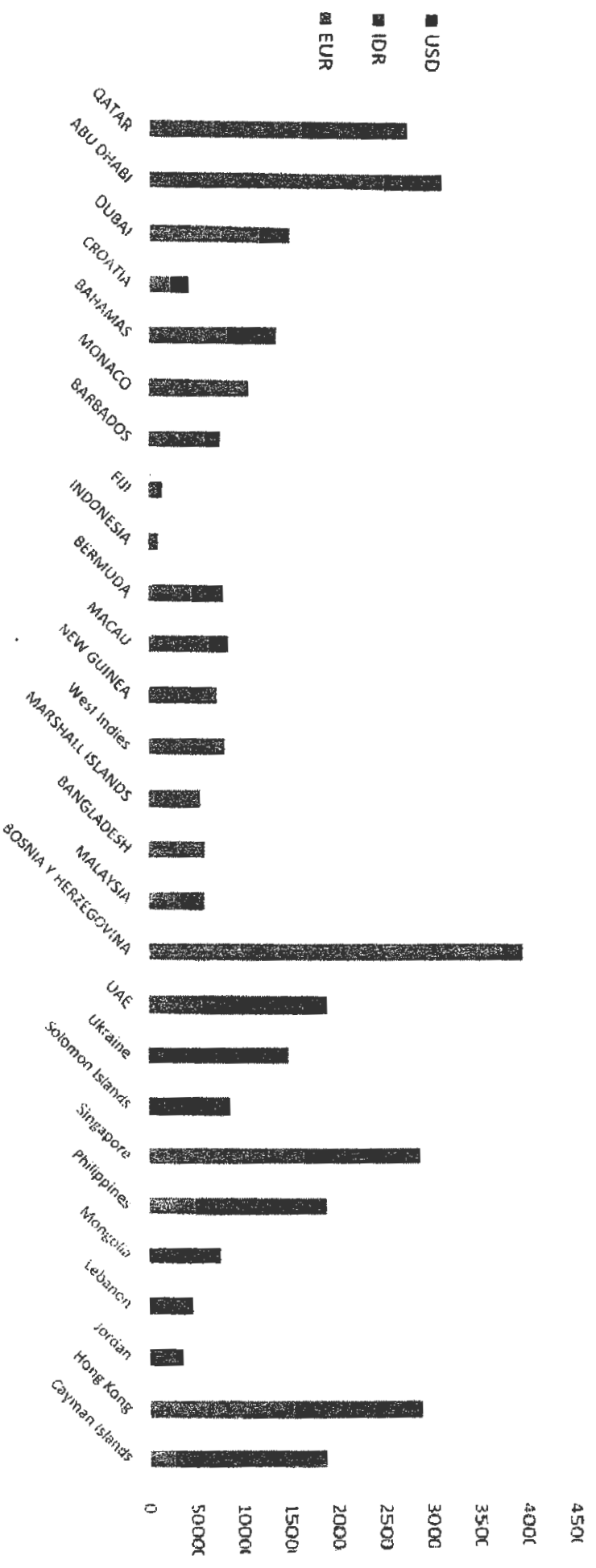


Bank accounts analysis - Mufdiah Mi'ad Saad

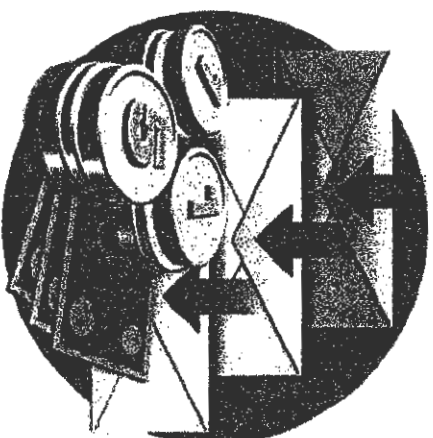
- Almost half of her financial assets are held in **Bosnia Y Herzegovina**, again via business corporate.
- The two wives have financial assets in Bosnia Y Herzegovina, which considers a quite rare place to do business with nor to invest in generally.

Bank accounts analysis – Summary:

Total sum of money (\$) in all 4 bank accounts, divided by country and currency:

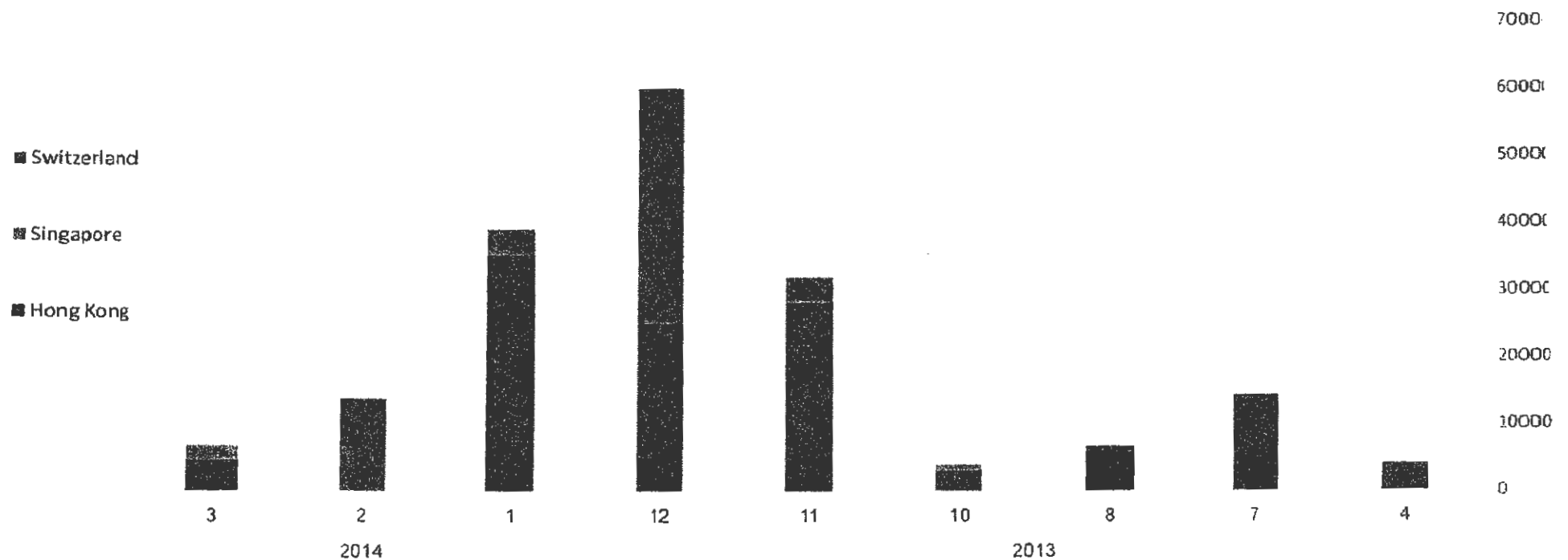


MONEY TRANSFERS ANALYS



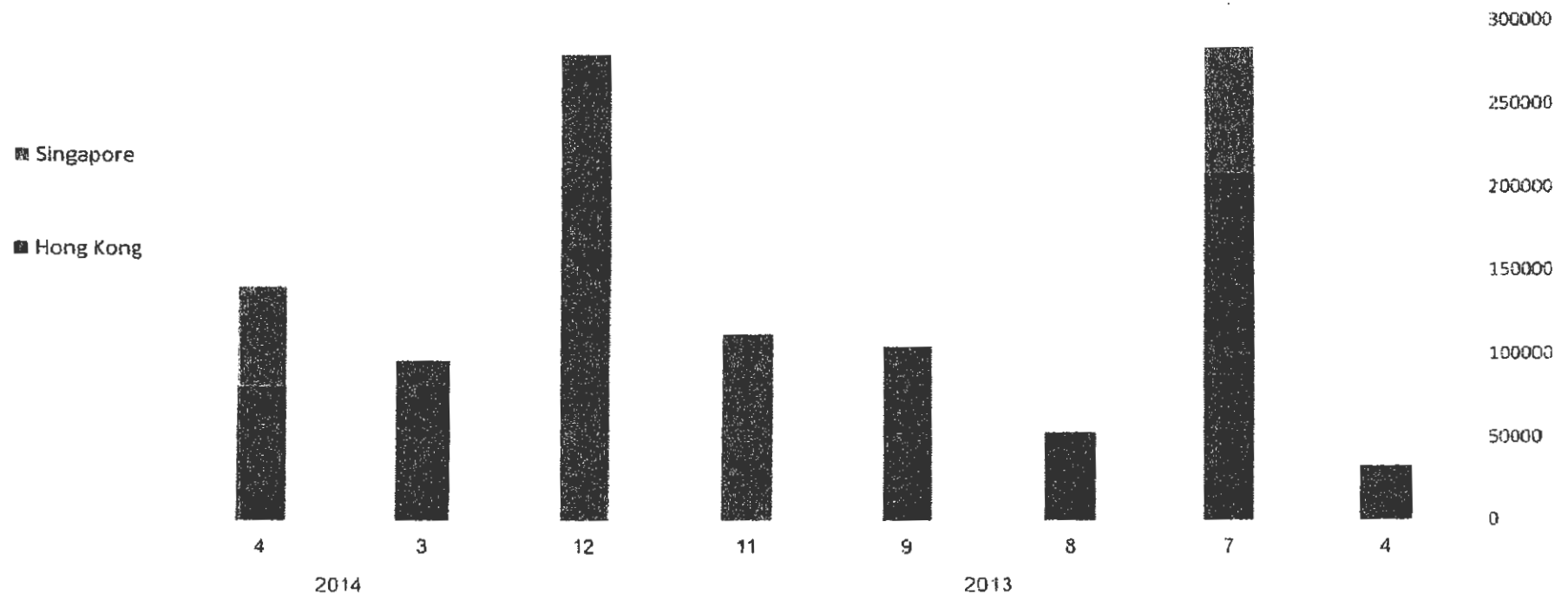
Money transfers analysis - Joko Widodo:

Sum of last transferred money to/from bank accounts, divided by months a countries involved:



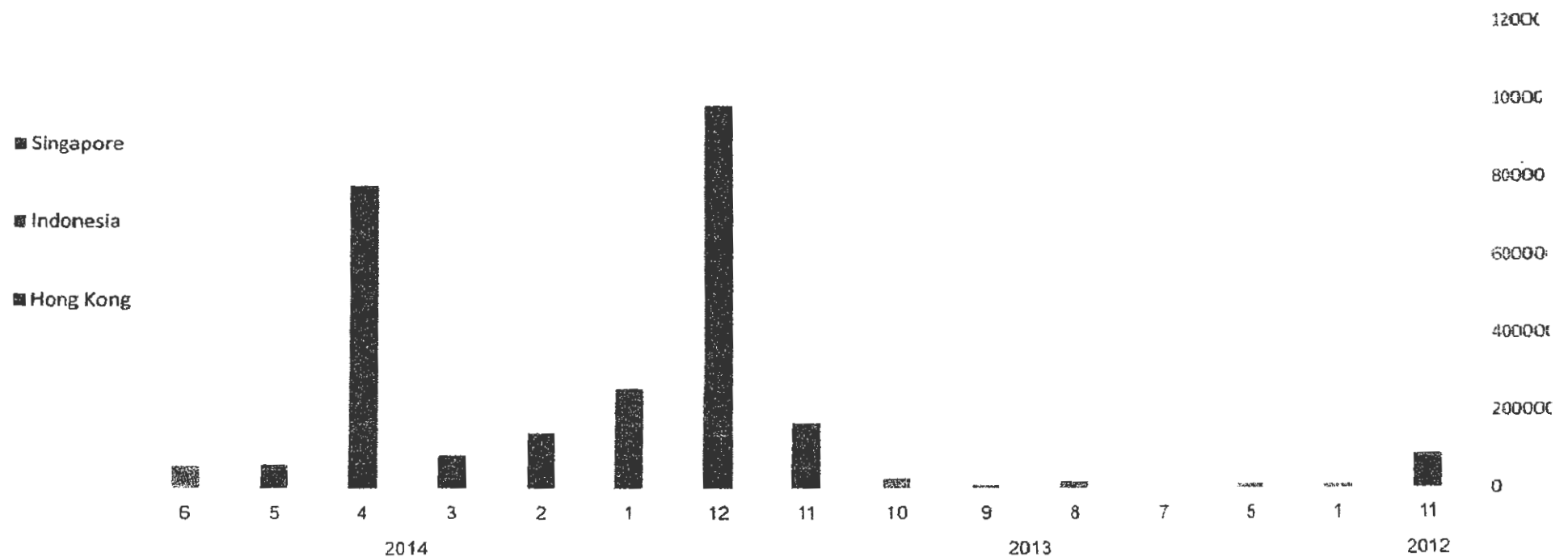
Money transfers analysis - Iriana Widodo:

Sum of last transferred money to/from bank accounts, divided by months & countries involved:



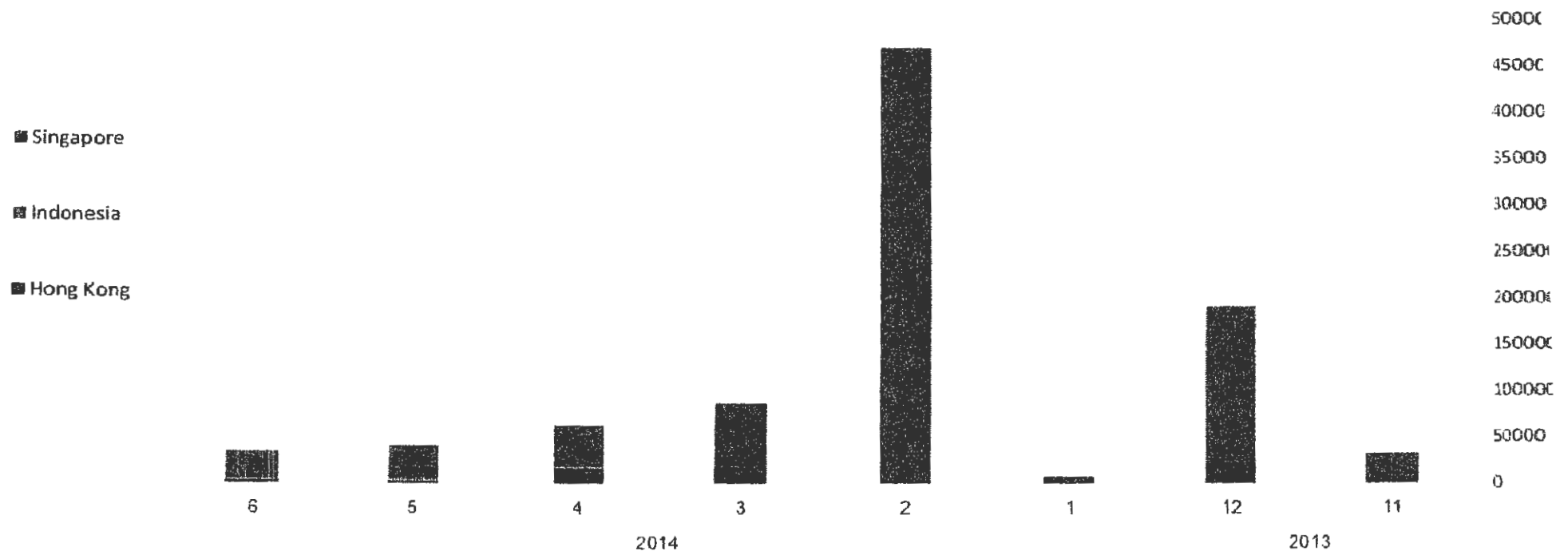
Money transfers analysis - Muhammad Jusuf Kalla:

Sum of last transferred money to/from bank accounts, divided by months a countries involved:



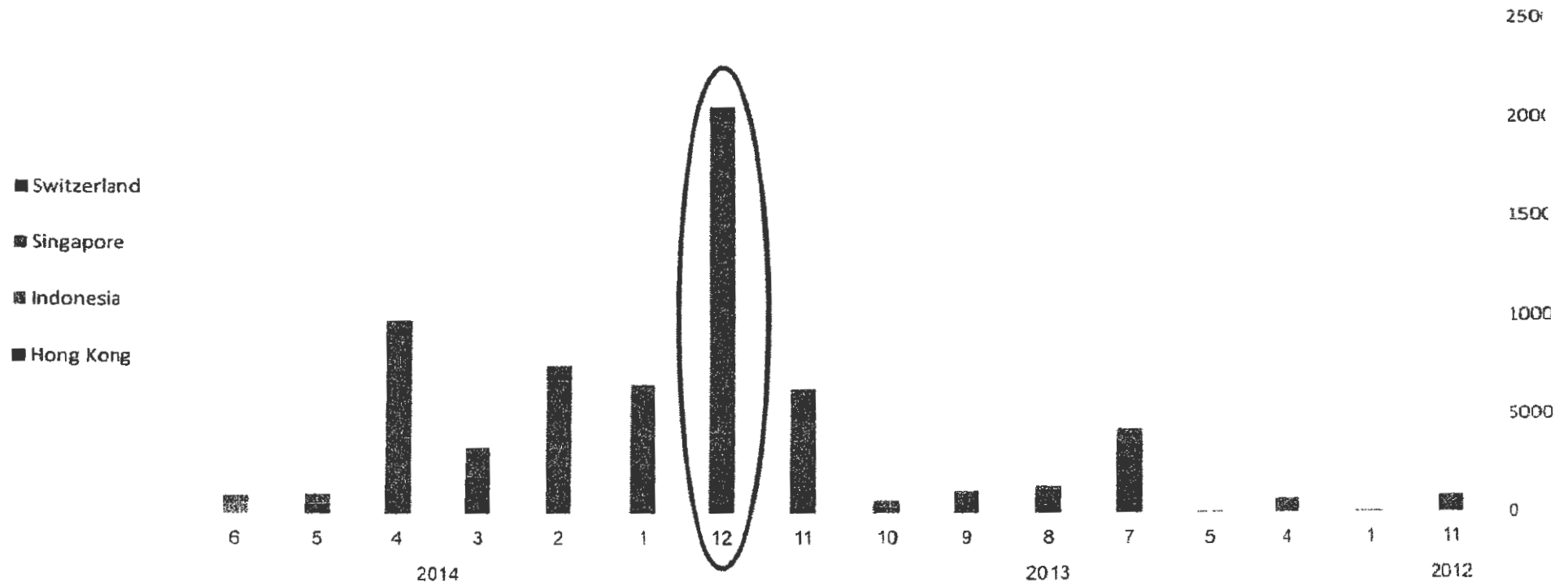
Money transfers analysis - Mufdiah Mi'ad Saad

Sum of last transferred money to/from bank accounts, divided by months a countries involved:



Money transfers analysis – Summary:

Sum of last transferred money to/from all 4 bank accounts, divided by month and countries involved:

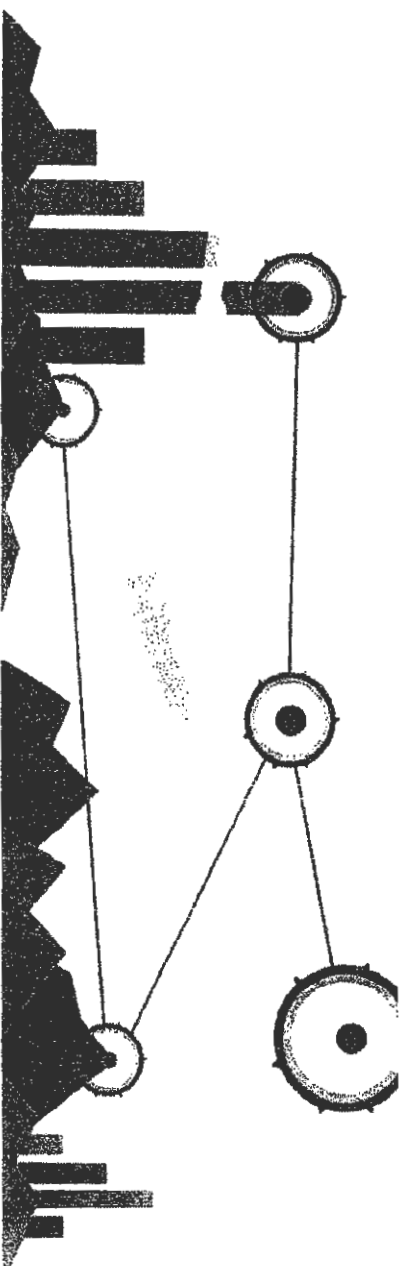


Money transfers analysis - Summary:

- o Among the last wire transactions of all 126 accounts, 30 were made during **December 2013**, one month prior to the official announcement regarding the 2014 elections.
- o A sum equal to at least **\$2,061,893** was transferred during this period – 1/3 of the transferred funds which are documented in our database.

This could indicate a connection between the funds transferred and the elections procedure.

ANALYSIS SUMMARY



Financial investigation - analysis summary:

○ Places:

- offshores
- on-shores with a lenient supervision
- on-shores/offshores that provide high secrecy

○ Accounts opening procedures:

- using service providers
- create business buffer (corporate)
- remote opening

○ Currency:

In specific places like offshores, the main currency is Euro, which is less supervised comparing to Dollar.

Financial investigation - analysis summary:

○ Type of accounts:

- saving accounts for corporates
- a lot of checking accounts
- many international transactions - some of them seems coordinated by date, sum or place

The above characteristics don't settle with the targets' political profiles, nor their public reputation.



FATF Report

Laundrying the Proceeds of Corruption

July 2011



THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)

The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and promotes policies to protect the global financial system against money laundering and terrorist financing. Recommendations issued by the FATF define criminal justice and regulatory measures that should be implemented to counter this problem. These Recommendations also include international co-operation and preventive measures to be taken by financial institutions and others such as casinos, real estate dealers, lawyers and accountants. The FATF Recommendations are recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard.

For more information about the FATF, please visit the website:

WWW.FATF-GAFI.ORG

© 2011 FATF/OECD. All rights reserved

Cover image © Thinkstock

No reproduction or translation of this publication may be made without prior written permission.
Applications for such permission, for all or part of this publication, should be made to
the FATF Secretariat, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France
(fax +33 1 44 30 61 37 or e-mail: contact@fatf-gafi.org).

TABLE OF CONTENTS

■ 1. INTRODUCTION.....	4
Scope	6
Methodology.....	7
■ 2. WHY A TYPOLOGY ON LAUNDERING THE PROCEEDS OF CORRUPTION?.....	9
A. Corruption and the economy	9
B. Recent attention on corruption.....	11
C. Other initiatives and studies analyzing and reviewing the investigation and prosecution of corruption.....	12
1. The global anticorruption framework.....	12
2. Other studies.....	15
■ 3. AN ANALYSIS OF THE MOST COMMON METHODS USED TO LAUNDER THE PROCEEDS OF GRAND CORRUPTION.....	16
A. Use of Corporate Vehicles and Trusts.....	17
B. Use of Gatekeepers.....	19
C. Use of Domestic Financial Institutions.....	21
D. Use of Offshore/Foreign Jurisdictions.....	23
E. Use of Nominees	23
F. Use of cash.....	24
■ 4. VULNERABILITIES LEADING TO AN INCREASED RISK OF THE LAUNDERING OF THE PROCEEDS OF CORRUPTION	26
A. Control over the State.....	26
B. Financial Institution Capture	28
C. Ineffective Enhanced Due Diligence	29
D. Ineffective communication among States and financial institutions	32
■ 5. CONCLUSION	34
■ 6. SUGGESTED FOLLOW-UP WORK.....	35
REFERENCES	38
BIBLIOGRAPHY.....	42
ANNEXES.....	46
ANNEX 1: GRAND CORRUPTION CASE INVENTORY	47
ANNEX 2: OVERVIEW OF INTERNATIONAL ACTION TO FREEZE ASSETS BELONGING TO FORMER HEADS OF STATE, THEIR ENTOURAGE AND CERTAIN STATE ENTITIES UNDER THEIR CONTROL	51

5. CONCLUSION

119. Corruption-related money laundering shares many of the same traits as the laundering of proceeds of other types of crime, but there are important differences as well. Corrupt PEPs, like other criminals, have a need to disguise the proceeds of their crimes, and use a variety of methods ranging in sophistication, to do so. Corrupt PEPs may have certain natural advantages in laundering their funds not available to other criminals: they may control the machinery of the state, allowing them to co-opt those individuals and institutions that are supposed to prevent and detect such crimes; they can use the proceeds of corruption to finance political parties or organisations and, in turn, reinforce their control over government mechanisms; their political power gives them the ability to recruit skilled associates within their own country to engage in transactions to make the proceeds indistinguishable from legitimate money and provide a diplomatic cover; and they often have a veneer or respectability that deflects suspicion.

120. On the other hand, corrupt PEPs also face risks that other criminals do not: A PEP's mere association with large unexplained wealth can be enough to trigger inquiries. As we noted previously, greater information often exists as to the wealth and income of PEPs as a result of asset and income disclosure requirements, which would allow a more accurate assessment of the nature and source of specific transactions. Lastly, more attention being paid to this issue by multilateral bodies, NGOs and individual governments than ever before.

121. The cases in this study reveal that, similar to other sophisticated criminals, corrupt PEPs use a broad array of methods to hide their proceeds. Corrupt PEPs disguise their ownership through corporate vehicles and trust companies and use gatekeepers and nominees to launder proceeds through the domestic and foreign financial institutions. They have used their power to acquire state assets, control law enforcement, and capture banks. Finally, past cases demonstrate that AML standards are not always being implemented by financial institutions; nor are AML laws and regulations being enforced by regulatory authorities or supervisors. Case after case shows how financial institutions have failed to follow AML procedures – even where those procedures called for only an ordinary risk-based approach – and have thus given corrupt PEPs continued and unabated access to the global financial system.

122. Preventing and detecting the proceeds of corruption involve the array of FATF recommendations. While Recommendation 6, regarding EDD for PEPs, is obviously central to an effective AC regime, our survey indicates that corruption-based money laundering also requires jurisdictions to effectively implement the Recommendations on corporate vehicles and trusts (Recommendations 33 and 34); the power and authorities (including the independence) of the competent authorities (Recommendations 26, 27 and 28); the use of cash couriers (Special Recommendation IX); gatekeepers (Recommendation 12); and the need for integrity within financial institutions themselves (Recommendation 23). Moreover, as we note below, it may be useful to look again at some of these recommendations in light of this report's findings.



ANNEX 1: GRAND CORRUPTION CASE INVENTORY

Identifier	dates	source country	destination country	approx. amount (US millions)	official	nature of the corruption	state capture	gatekeeper	FI capture	foreign accounts	domestic accounts	corporate vehicle	shell company	cash	family members/ associates?	nominee/ false name?
Frederick Titus Chiluba	1995-2001	Zambia	UK, Jersey, US	\$72 M	president	embezzlement	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Diepreye AlamieYeigha	1999-2005	Nigeria	UK, South Africa	\$17 M	State governor	embezzlement	Y		N	Y	N	Y		Y		
Joshua Dariye	1999-2006	Nigeria	UK, Nigeria	\$17 M	State governor	embezzlement	Y	Y	N	Y	Y	Y		Y	Y	Y
Pavel Lazarenko	1992-1997	Ukraine	US, Switzerland, Antigua, Poland, Bahamas	\$44 M	prime minister	embezzlement; extortion	Y	Y	Y	Y		Y			Y	
Vladimiro Montesinos/Alberto Fujimori	1990-2000	Peru	Switzerland, US, Cayman Islands	\$ 250 M	presidential advisor	bribery; self dealing	Y	Y	Y	Y	Y	Y			Y	
WGYP 2003-04 case 16	unknown	"former dictatorship"	domestic	\$ 6 M	petroleum minister	embezzlement	N		N		Y					Y
West African PEP #1	2005-2011	Equatorial Guinea	US	\$80 M	president's son	embezzlement; self dealing	Y	Y	N	Y	Y	Y				
West African PEP #2 (wife, adult children, daughter-in-law)	1985-2009	Gabon	US, Malta, Switzerland, France, UK	\$130 M	President (son)	embezzlement				Y	Y	Y		Y	Y	
Atiku Abubakar	2000-2008	Nigeria	US, Guernsey	\$40 M	vice president	self dealing	Y	Y		Y		Y			Y	

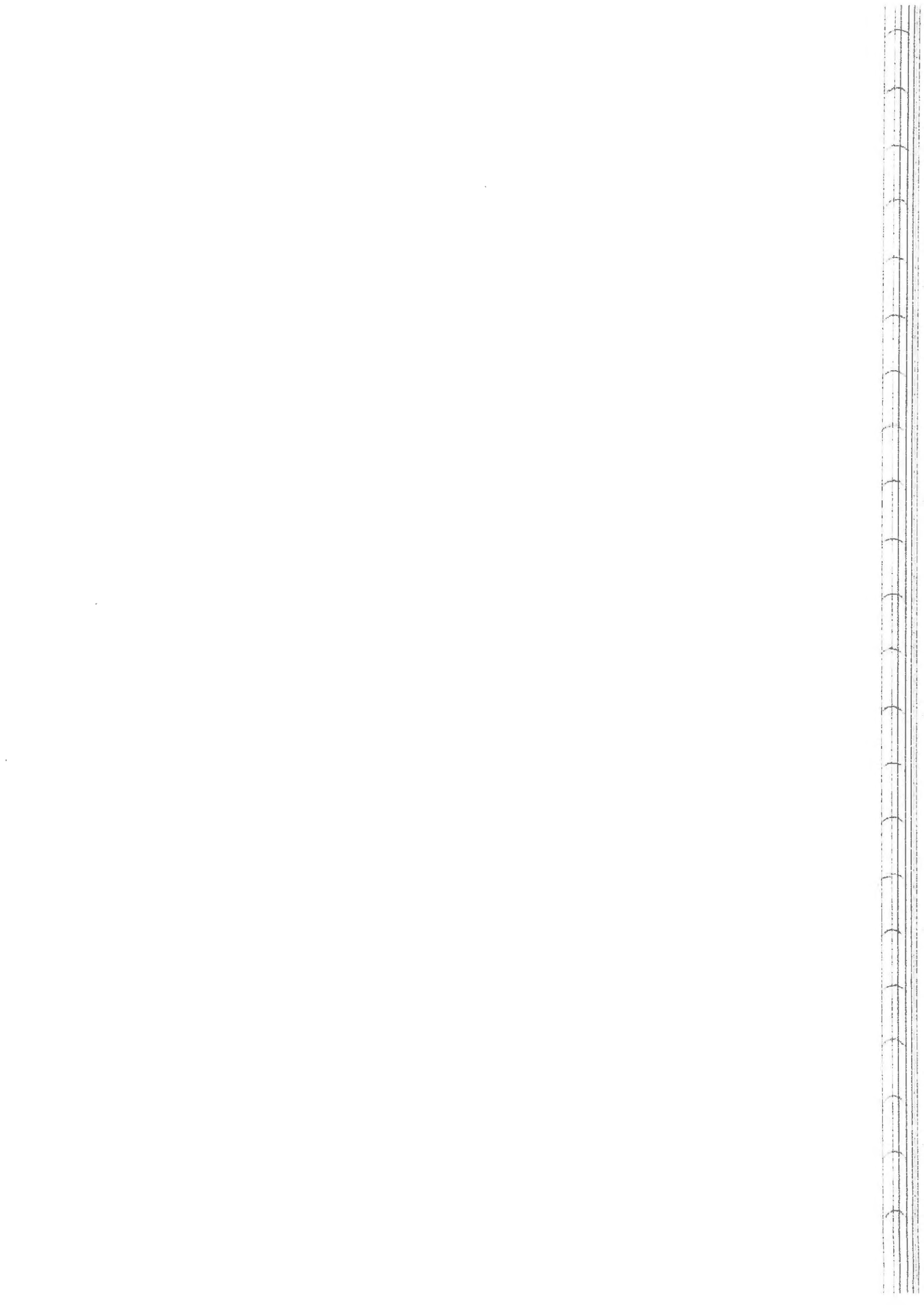
■ Laundering the Proceeds of Corruption– July 2011

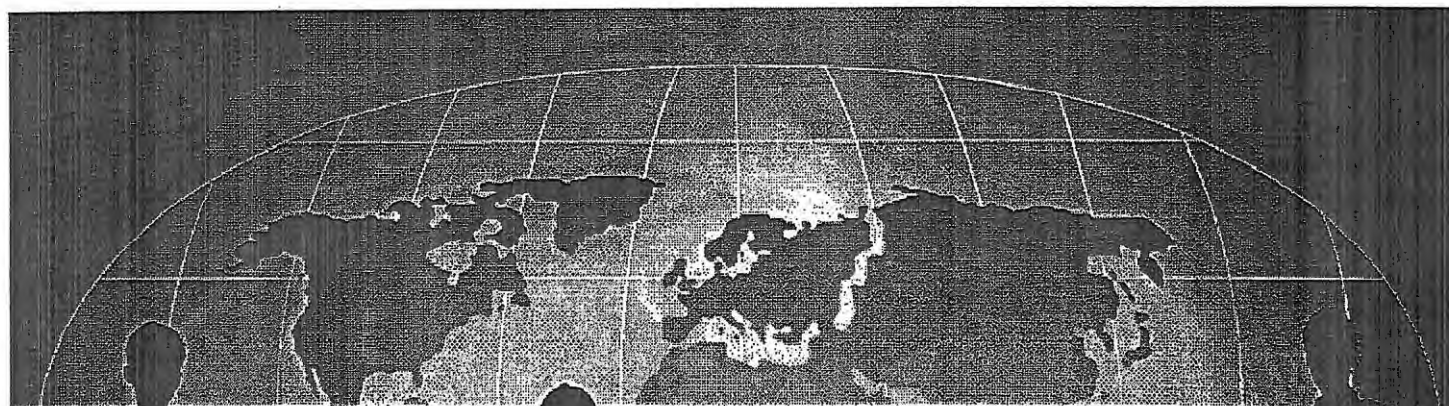
Identifier	dates	source country	destination country	approx. amount (US millions)	official	nature of the corruption	state capture	gatekeeper	FI capture	foreign accounts	domestic accounts	corporate vehicle	shell company	cash	family members/ associates?	nominee/ false
EAG #1 (p. 14)	2003-04	Russia	Russia	\$500,000	program administrator	embezzlement	N	N	N	N	Y	Y	Y			
EAG#2 (p. 15)		Ukraine	"abroad"	\$4 M	officials of a national enterprise	self dealing	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N		
Sani Abacha (and sons)	1993-2000	Nigeria	UK, Switzerland, US, Jersey, Luxembourg, Lichtenstein, Austria, France, Lebanon, Kenya, Cayman Islands, Bahamas	\$3,000 - 5,000 M	president	embezzlement; extortion; self dealing	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Ferdinand Marcos	1965-1986	Philippines	Singapore, Switzerland, US	\$5,000 - 10,000 M	President	embezzlement; bribery	Y			Y		Y	Y		Y	
Jean-Claude Duvalier	1971-1986	Haiti	UK, Switzerland	\$300 M	President	embezzlement	Y	Y		Y					Y	
Ao Man Long	1999-2006	Macau China	HK, Macau, UK	\$100 M	Secretary for Transport and Public Works	bribery	N		N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
Chen Shui-Bien	2000-2008	Taiwan	Switzerland, US	\$14 M	President (wife)	bribery	N	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
South Asian PEP (husband)	1995-1997	Pakistan	UK, Switzerland, British VI	\$40 M	Prime Minister (husband)	bribery		Y	N	Y		Y	Y		Y	
Augusto Pinochet	1973-2004	Chile	Chile, US, UK,	\$27 M	President	unknown	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
West African PEP #3	2000-04	Equatorial Guinea	US, Bahamas		President	bribery, embezzlement, self dealing	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	

Identifier	dates	source country	destination country	approx. amount (US millions)	official	nature of the corruption	state capture	gatekeeper	FI capture	foreign accounts	domestic accounts	corporate vehicle	shell company	cash	family members/ associates?	nominee/ false
Raul Salinas	1998	Mexico	US, Switzerland, UK, Cayman Islands	\$80-100 M	President (brother)	embezzlement	N		N	Y	Y	Y	Y		Y	
Arnoldo Aleman	1997-2002	Nicaragua	Nicaragua	\$100 M	President	embezzlement	Y		N	Y		Y	Y		Y	
Yevgeny Adamov	1993-2003	US, Russia	US, Monaco, France	\$15 M	Minister of Atomic Energy	embezzlement	N		N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Xu Chaofan, Xu Guojun, and Yu Zhendong (Bank of China embezzlement)	1992-2001	China	US, Canada, HK China	\$485 M	bank officials	embezzlement	N			Y	Y	Y	Y		Y	
Joseph Estrada	1998-2001	Philippines	Philippines	\$11 M	President	bribery; embezzlement	N	Y	N	N	Y	Y			Y	Y
Denis Christel Sassou Nguesso	2004-2006	Congo	UK		President	embezzlement		Y		Y		Y	Y			
Central American PEP	2000-2004	Guatemala	US, France, Luxembourg, UK, Switzerland, Lichtenstein	\$15 M	President	embezzlement	N		N	Y		Y		Y	Y	N
Khaleda Zia/Arafat Rahman	1991-2001	Bangladesh	Singapore, Austria, Cyprus	\$3 M	Prime Minister (son)	bribery	N		N	Y		Y	Y		Y	
Carlos Garcia	1993-2004	Philippines	US	\$6.8 M	General (son)	bribery	N		N	Y	Y			Y	Y	
Juthamas Siriwan/Green (Bangkok film festival case)	2002-2007	Thailand	US, Jersey, Singapore, UK	\$1.8 M	Governor of Tourism	bribery	N		N	Y		Y		Y	Y	

■ Laundering the Proceeds of Corruption— July 2011

Identifier	dates	source country	destination country	approx. amount (US millions)	official	nature of the corruption	state capture	gatekeeper	FI capture	foreign accounts	domestic accounts	corporate vehicle	shell company	cash	family members/ associates?	nominee/ false
Nino Rovelli	1990-1993	Italy	US, UK, Switzerland, Canada, Cayman Islands, Costa Rica	\$500 M	judges	bribery	N	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N
Titan bribery – Benin	1999-2001	US	Benin	\$3.5 M	president	bribery			N	N	Y	N	N	Y	Y	
Randall Cunningham	2000-2005	US	US	\$2.4 M	senior legislator	bribery	N	N	N	N	Y	Y	N	Y		N





FATF Report

Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment

*A view of how and why criminals and terrorists abuse finances,
the effect of this abuse and the steps to mitigate these threats.*

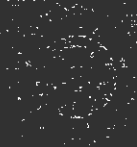
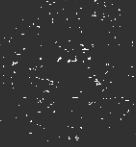
July 2010

2007

NATIONAL MONEY LAUNDERING STRATEGY



U.S. Money Laundering Threat Assessment





progres 98'

Puluhan Rekening Milik Joko Widodo dan Iriani Widodo di Sejumlah Bank Luar Negeri Yang Tidak Dilaporkan kepada KPU / KPK Dalam Proses Pendaftaran Pencapresan

Bersama ini kami dari Progres 98, telah menemukan dugaan penyimpangan serius berupa manipulasi laporan kekayaan Calon Presiden Joko Widodo yang tidak transparan disampaikan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Temuan dimaksud berupa sejumlah kepemilikan nomor rekening atas nama Joko Widodo dan Iriana Widodo di beberapa bank luar negeri senilai USD 8 juta. Tindakan ini secara tidak langsung telah berakibat pada praktek manipulasi data Laporan Kekayaan Pejabat kepada pihak KPU dan KPK.

Sebagaimana diketahui bahwa penyampaian Laporan Kekayaan Joko Widodo yang resmi tercatat di KPK senilai Rp. 29.453.455.000. Dari data yang dipublikasikan terbukti diragukan kebenarannya bila di bandingkan dengan jumlah uang yang dimiliki Joko Widodo dan istrinya sebagai di sebutkan di atas (USD 8 juta).

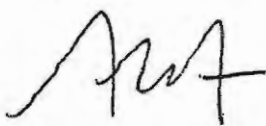
Atas temuan dugaan penyimpangan tersebut, maka melalui kesempatan ini kami tegaskan sebagai berikut:

1. Minta kepada pihak KPU dan KPK untuk bersikap transparan dan tegas dalam menegakkan hukum serta aturan guna mengkonfirmasi laporan dugaan atas kepemilikan uang di sejumlah rekening di berbagai bank luar negeri milik calon presiden Joko Widodo dan Iriani Widodo. (data temuan terlampir).
2. Tindakan manipulasi dan kebohongan publik yang dilakukan oleh calon presiden Joko Widodo tersebut, merupakan masalah serius yang disinyalir terindikasi KKN dan berpotensi terhadap tindakan praktek politik uang dalam proses pemilihan presiden.

Demikian penyampain laporan kami sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam upaya penegakan hukum serta pengawasan pemilu bersih bagi kepentingan bangsa dan negara. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 22 Juli 2014

hormat kami



Faizal Assegaf
Ketua Progres 98



Komisi Pemberantasan Korupsi

**TANDA BUKTI
PENERIMAAN LAPORAN / INFORMASI DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nomor Informasi : 70800

Dengan ini menerangkan bahwa :

Jenis Pelapor : LSM
Nama Organisasi : Progres 98
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 133
Nomor Telepon : 0218303325
Email :
Media Penyalpaian : Pelapor Langsung

Identitas Penanggung Jawab :

No.	Nama	Alamat	Jenis Identitas	Nomor	Jabatan	No. Telp
1	Aminuddin	-	KTP	-		081219718584

Telah menyampaikan laporan / informasi tentang (peristiwa apa, tempat / waktu kejadian, modus operandi, kerugian yang timbul) :

Dugaan penyalahgunaan LHKPN an. Joko Widodo

Lampiran dokumen pendukung :

NO.	JENIS DATA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Berkas dokumen	1	1. Financial Investigation 2. Confidential Report

Jakarta, 22/07/2014

Penanggung Jawab

Aminuddin

Penerima Laporan Pengaduan Masyarakat

Wahyudi Triaji

Catatan :

Tanda Bukti Penerimaan Laporan Informasi ini hanya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah datang dan atau memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Pernyataan atau isi laporan beserta dokumen-dokumen pendukungnya adalah tanggung jawab pelapor.

**TANDA BUKTI
PENERIMAAN LAPORAN / INFORMASI DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nomor Agenda : 2014-08-000066

Nomor Informasi : 71289

Dengan ini menerangkan bahwa :

Jenis Pelapor : Organisasi Masyarakat
 Nama Organisasi : Progress 98
 Alamat : Jl. Bulak Tengah II RT/RW 010/007 Kel. Klender Kec. Duren
 Sawit, Jakarta Timur
 Nomor Telepon :
 Email :
 Media Penyampaian : Pelapor Langsung

entitas Penanggung Jawab :

No.	Nama	Alamat	Jenis Identitas	Nomor	Jabatan	No. Telp
	S. Aminuddin, SE, MM	Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 133 Jakarta Selatan	KTP	-	Ketua Litbang Progress 98	08129261791

lah menyampaikan laporan / informasi tentang (peristiwa apa, tempat / waktu kejadian, modus operandi, kerugian ng timbul) :

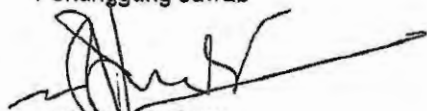
Penyampaian tambahan data kepemilikan rekening di luar negeri atas nama Joko Widodo, Iriana Widodo, Jusuf Kalla dan Mufidah Mi"ad Saad Jusuf Kalla

impiran dokumen pendukung :

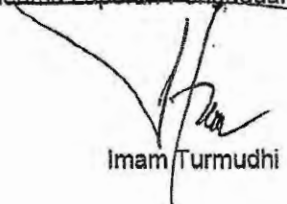
O.	JENIS DATA	JUMLAH	KETERANGAN
	Berkas dokumen	1	Financial Investigation

Jakarta, 19/08/2014

Penanggung Jawab


 S. Aminuddin, SE, MM

Penerima Laporan Pengaduan Masyarakat


 Imam Turmudhi

itatan :

nda Bukti Penerimaan Laporan Informasi ini hanya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah datang dan atau memberikan informasi anya dugaan tindak pidana korupsi
 nyataan atau isi laporan beserta dokumen-dokumen pendukungnya adalah tanggung jawab pelapor.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : R-~~3386~~40-43/08/2014
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan atas pengaduan
Masyarakat

27 Agustus 2014

Yth. Aminuddin
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 133
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan pengaduan Saudara yang disampaikan secara langsung tanggal 22 Juli 2014 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat kami informasikan bahwa pengaduan Saudara telah kami teruskan ke Bidang Pencegahan KPK.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan,
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan
Pengaduan Masyarakat,

Annies Said Basalamah

Tembusan :
Yth. Pimpinan KPK

LAMPIRAN

II

(DUA)

DUGAAN KOLUSI DAN KORUPSI KASUS TAMAN BMW DKI JAKARTA

LAPORAN PERKEMBANGAN
TERKAIT
DUGAAN KOLUSI DAN KORUPSI
KASUS TAMAN BMW DI PROVINSI DKI JAKARTA

(DILENGKAPI DENGAN FOTO COPY DOKUMEN)

OLEH
PRIJANTO
WAGUB DKI JAKARTA 2007 -2012

JAKARTA, 4 APRIL 2014

TERBATAS

DAFTAR ISI

- 1. LAPORAN PERKEMBANGAN DAN PERMOHONAN TERKAIT KASUS TAMAN BMW DI PROVINSI JAKARTA (5 halaman)**
- 2. LAMPIRAN – LAMPIRAN (Foto copy dokumen)**
 - a. Laporan kepada pimpinan KPK, 7 November 2013 (1 bendel)***
 - b. Konsignasi PT. Buana Permata Hijau & PT. Narpati Estate, 1990/1991 (1 bendel)***
 - c. Keputusan Kakanwil BPN Jakarta tentang Pemberian Hak Pakai, tahun 2003 (1 bendel)***
 - d. Berita Acara Serah Terima, tanggal 8 – 6 -2007 (1 bendel)***
 - e. Klarifikasi mantan Gubernur Sutiyoso (1 bendel)***
 - f. Sertifikat Hak Pakai No. 250 & 251 (1 bendel)***



PRIJANTO

Jakarta, 4 April 2014

Perihal : Laporan perkembangan
dan permohonan terkait
Kasus Taman BMW Jakut.

K e p a d a
Yth. 1. Bapak BUSYRO MUQODDAS
WAKIL KETUA KPK RI
2. KEPALA BPN RI

di J a k a r t a

Dengan hormat,

Saya Prijanto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, yang pernah berlapor Kasus Taman BMW di Jakarta Utara, dengan ini ijin melaporkan perkembangan kasus Taman BMW dan menyampaikan permohonan penyelesaian secara hukum atas kasus dugaan korupsi tersebut. Sebab dari bukti awal, patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum, kerugian negara dan ada pihak yang diuntungkan.

Sebagaimana laporan saya kepada Pimpinan KPK yang diterima bapak Adnan Pandu Praja pada 7-11- 2013 dan laporan saya kepada Kepala BPN RI pada 22-11-2013, bahwa salah satu tujuan mohon segera diproses secara hukum adalah untuk mencegah "*agar kasus tidak melebar dan tidak menyeret orang banyak di berbagai institusi*" antara lain Kantor Pertanahan (**Lampiran 1**)

Patut diduga, perkembangan kasus Taman BMW saat ini sudah menyeret aparat dari institusi di luar Pemprov DKI Jakarta, yaitu aparat dari

/ Kantor.....

Kantor Pertanahan Jakarta Utara. *Karena saat ini, di atas Taman BMW yang berstatus sengketa telah terbit 2 (dua) sertifikat atas nama Pemprov DKI Jakarta, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara.* Sertifikat Hak Pakai no. 250 seluas 72.858 m² dan Sertifikat Hak Pakai no. 251 seluas 35.098 m². "Asal hak" kedua sertifikat tersebut dari "Pemberian Hak Pakai" dan sertifikat ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tanggal 10-3-2014. Dengan keluarnya dua sertifikat tersebut, tentu memperpanjang adanya dugaan kolusi dan korupsi dalam kasus Taman BMW.

Walaupun kasus sudah pernah saya laporkan kepada Ketua KPK RI dan Kepala BPN RI, namun dengan terbitnya sertifikat, mohon ijin saya untuk mengulang dan merangkai secara utuh kasus Taman BMW dengan kronologis secara garis besar sebagai berikut :

1. Pemprov DKI Jakarta memiliki 3 (tiga) dokumen administrasi .

- a. *Hasil konsinyasi dengan PT. Buana Permata Hijau dan PT. Narpati Estate pada tahun 1991/1992.*
- b. *Tujuh buah Keputusan Hak Pakai dari Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta tahun 2003.*
- c. *Berita Acara Serah Terima (BAST) tanah yang terletak di jalan Rumah Sakit Koja Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara dari PT. Agung Podomoro kepada Pemprov DKI Jakarta, tanggal 8-6-2007.*

2. Hasil konsinyasi .

- a. **Dari PT. Buana Permata Hijau seluas 65.774 m².** Membaca surat Kepala Kantor Agraria Jakarta Utara, tanggal 26-11-1987, perlu diuji kebenarannya. Sebab, ada tanah milik PT Buana Permata Hijau yang dikelompokan di Kelurahan Papanggo, tetapi sangat janggal karena

/ surat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA ADMINISTRATIP

No. SK GUBERNUR	KECAMATAN	BATAS BATAS KELURAHAN	
		PETA KOTA	
No. : Ib.3/1/1/1966 Tanggal : 12 Agustus 1966 Tentang : Pembentukan Kota Administratip. Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Di tandatangani oleh : Ali Sadikin	TANJUNG PRIOK BARAT	U : Pantai laut Jawa	U : Pantai laut Jawa
		I : Kali Pajajaran - Landasan Udara	T : Sungai Tirem - Kali / Sungai Bar
		S : Landasan Udara	S : Jalan Jakarta By Pass
		B : Kali Sunter	B : Kali Pajajaran
No. : Ib.3/1/30/1969 Tanggal 1 maret 1969 Tentang : Perubahan batas-batas dan nama wilayah Administratip Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Di tandatangani oleh : Ali Sadikin	TANJUNG PRIOK	U : Pantai laut Jawa	U : Sungai Tiram terusan Lagoa
		I : Kali Pajajaran - Jl. Laksamana Muda Laut Yos Sudarso sisi sebelah Timur.	T : Selokan Sungai Bambu - Pipa L Besar dan Utara terus ke Selatan
		S : Kali Sunter - Bendungan Delapan	S : Selokan Kali papanggo
		B : Kali Sunter - Muara Ancol	B : Kali Pajajaran



SURAT PENYERAHAN

Nama : **YOS SOEYONO**
Selaku : **PT. SRI DOMES**
Alamat : **Jl. Garuda no. 83**
Laksono

YOS SOEYONO
PT. SRI DOMES

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BUANA PERMATA HIJAU**
Selaku : **PT. BUANA PERMATA HIJAU**
Alamat : **Jl. Garuda no. 83**
Laksono

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

dengan ini kedua belah pihak mengadakan perjanjian sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan hak dan kepemilikan tanah seluas **1000 m²** di **Kecamatan Tanjung Priok** dengan status **Kebada** kepada **PIHAK KEDUA**.
- **PIHAK KEDUA** telah menerima dan mengakui hak **PIHAK PERTAMA** atas tanah tersebut.
- Setelah selesai dengan ini kedua belah pihak telah selesai dengan perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

16 September 1984

SURAT PENYERAHAN



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA JAKARTA UTARA
Kecamatan Tanjung Priok
Jl. Yos Sudarso No. 22 Telp. 493204 Tg. Priok

SKALA : 1 : 500

No. : 91/1.711.1/1985.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Tanjung Priok:
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah garapan tersebut
(Eka puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua -
meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :

U t a r a	: Rel Kereta Api/Jalan RS. Martadinata.
S e l a t a n	: Garapan sdr. Selamet.
T i m u r	: Garapan sdr. Dalimantha.
B a r a t	: Jalan Baru Ancol.

Kecamatan Tanjung Priok Walikota Jakarta Utara.

dimana disebutkan bahwa :

Adalah sebagai pemilik/penggarap terakhir pada tanah garapan tersebut.

Demiikian rekomendasi ini kami buat untuk kepentingan pengurusan
sesuatu halanya pada Kantor Walikota Jakarta Utara. Wp. Kantor SUB. Dit.
Agraria Jakarta Utara.



TANGJUNG PRIOK

SOEMATI PAREWISASTI

Telp. 010054957.



KANTOR AGRARIA
Jalan Laksda Yos Sudarso 27 - 29
Telepon : 491009
JAKARTA

Nomor

148/2/17117/2/20/87

Tanjung Priok

26 - 11 - 1987

Lampiran

: 1 (satu) berkas.

Perihal

Penjelasan/Rekomendasi atas permohonan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPT),
s.n. PT. BUANA PERMATA HIJAU.

Kepada Yth. :

Bapak Gubernur DKI Jakarta
up. Kepala Direktorat Agraria
Jalan Merdeka Selatan No. 8-9

Sehubungan dengan surat PT. BUANA PERMATA HIJAU tgl. 30-10-1987 No.90/BPH/VI/87 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Memo HPUT tgl. 20-3-1986, berkenaan dengan permohonan SIPT dari PT. BUANA PERMATA HIJAU atas tanah yang terletak di :

Kelurahan	: Papanggo dan Sunter Agung	
Kecamatan	: Tanjung Priok	
Wilayah Kota	: Jakarta Utara	
Luas	a. Termasuk Kelurahan Papanggo	88.655 M2
	b. Termasuk Kelurahan Sunter Agung	16.420 M2
Jumlah		: 105.075 M2.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak dapat kami sampaikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

I. STATUS DAN RINAYAT TANAH :

Bahwa status tanah terdiri dari tanah Negara (garapan) semula atas nama Zubaidah Cs. yang diserahkan/dialihkan kepada PT. Buana Permata Hijau.

A. TANAH GARAPAN DI SUNTER AGUNG

- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Pengalihan Garapan empang tgl. [redacted] No.347/AI-6/U/1973, bahwa Zubaidah telah menyerahkan garapan empangnya kepada Ny. Widya Soesanti, seluas ± 4.900 M2.
- b. Berdasarkan Surat Penyerahan tgl. 15-7-1982 yang diketakan [redacted] No.201/1.711.01/B/82 bahwa Ny. Widya Soesanti telah menyerahkan hak garapan tanahnya kepada sdr. Yos Soeyono yang bertindak untuk dan atas nama PT. SRI DOMES, seluas : ± 4.900 M2.
- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Pengalihan Garapan empang tgl. [redacted] No.250/01-6/U/73, bahwa sdr. Zubaidah telah menyerahkan garapannya kepada Bonifacius Iwan Narpati, seluas ± 4.950 M2.
- b. Berdasarkan Surat Penyerahan tgl. 15-7-1982 yang diketakan [redacted] No.203/1.711.01/B/82 bahwa sdr. Bonifacius Iwan Narpati telah menyerahkan hak garapan tanah tersebut kepada sdr. Yos Soeyono yang bertindak untuk dan atas nama PT. SRI DOMES, seluas : ± 4.950 M2.

- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Pengalihan Garapan empang tgl. [REDACTED] No. 253/OI-6/U/73, bahwa sdr. Solihin telah menyerahkan garapan empangnya kepada Minawati, seluas ± 4.900 M2.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan tgl. 15-7-1982 yang diketahui [REDACTED] No. 206/1.711.01/B/82, bahwa sdr. Minawati telah menyerahkan hak garapannya kepada sdr. Yos Soeyono yang bertindak untuk dan atas nama PT. SRI DOMES, seluas ± 4.900
- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Pengalihan hak garapan empang tgl. [REDACTED] No. 254/A-I-6/U/73, bahwa sdr. Solihin telah menyerahkan garapan empangnya kepada sdr. Soesanto Brotohardjo, seluas ± 4.650 M2.
- b. Berdasarkan Surat Penyerahan tgl. 15-7-1982 yang diketahui [REDACTED] bahwa sdr. Soesanto Brotohardjo telah menyerahkan hak garapan tanahnya kepada sdr. Yos Soeyono yang bertindak untuk dan atas nama PT. SRI DOMES, seluas ± 4.650
- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Pengalihan Garapan empang tgl. [REDACTED] No. 255/AI-6/U/73 bahwa sdr. Solihin telah menyerahkan hak garapan empangnya kepada sdr. Jok Zaldi Kaumang, seluas ± 4.800 M2.
- b. Berdasarkan Surat Penyerahan tgl. 15-7-1982 yang diketahui [REDACTED] No. 200/1.711.01/B/82, bahwa sdr. Jok Zaldi Kaumang telah menyerahkan hak garapannya kepada sdr. Yos Soeyono yang bertindak untuk dan atas nama PT. SRI DOMES, seluas ± 4.800
- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Pengalihan Garapan empang tgl. [REDACTED] No. 252/AI-6/U/73 bahwa sdr. Solihin telah menyerahkan garapan empangnya kepada sdr. Iwan Santoso, seluas ± 4.550 M2.
- b. Berdasarkan Surat Penyerahan tgl. 15-7-1982 yang diketahui [REDACTED] No. 212/1.711.01/B/82, bahwa sdr. Iwan Santoso telah menyerahkan hak garapan tanahnya kepada Yos Soeyono yang bertindak untuk dan atas nama PT. SRI DOMES, seluas ± 4.550
- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Pengalihan Garapan empang tgl. [REDACTED] No. 256/AI-6/U/73 bahwa sdr. Solihin telah menyerahkan hak garapan empangnya kepada sdr. A.A. Wiyono Setia Budhi, seluas ± 4.750 M2.
- b. Berdasarkan Surat Penyerahan tgl. 15-7-1982 yang diketahui [REDACTED] No. 209/1.711.01/82 bahwa sdr. A.A. Wiyono Setia Budhi telah menyerahkan hak garapannya kepada sdr. Yos Soeyono yang bertindak untuk dan atas nama PT. SRI DOMES, seluas ± 4.750

Jumlah tanah yang telah diserahkan kepada PT. SRI DOMES : ± 33.500

[REDACTED] No. 101/1.711./85 bahwa sdr. Yos Soeyono yang bertindak untuk dan atas nama PT. SRI DOMES telah menyerahkan hak garapannya kepada Hamzah Atmohandoyo yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUANA PERMATA ELJAU, luas [REDACTED]

Dipindahkan :

9. a. Berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Garap tgl. 22-1-1973 No. 14/AI-6/U/1973 bahwa sdr. F. Kores telah menyerahkan tanah garapan empang dan satu bangunan rumah (11 x 6 m) kepada Herman Wijaya, seluas \pm 69.950 M².
- b. Berdasarkan Surat Penyerahan tgl. 16-11-1984 yang diketahui Lurah Sunter tgl. 1-5-1985 No. 89/1.711./85, sdr. Herman Wijaya telah menyerahkan hak garapannya kepada sdr. Hamzah Atmo- handojo yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUANA PERMATA HIJAU, seluas : 69.950 M².

10. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tgl. yang diketahui Lurah Sunter tgl. 1-5-1985 No. 98/1.711./85 bahwa sdr. E. Tagor Moeda Dalimoenthe telah melepaskan/mengoperkan hak tanah garapannya kepada sdr. Hamzah Atmohandojo, Bonifacius Iwan Narpati dan Slamet Setiadi, ketiganya bertindak untuk dan atas nama PT. BUANA PERMATA HIJAU, seluas : 229.422 M².

Jumlah luas tanah yang telah dibebaskan oleh PT. BUANA PERMATA HIJAU di Kelurahan Papanggo (dahulu Sunter).

Bahwa sebagian dari tanah seluas 229.422 M² terletak diluar lokasi yang dimohon dan berdasarkan Peta Gambar Situasi hasil pengukuran dari Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Jakarta Utara tgl. 10-8-1987 No. 228/KH/1987, tanah yang dimohon SIPPT nya seluas : 88.655 M².

Berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Papanggo No. 138/I-20/87 tgl. 2-9-1987, bahwa PT. BUANA PERMATA HIJAU telah menguasai tanah seluas 88.855 M² tersebut dan tidak ada masalah/sengketa.

B. TANAH DI KEMBARAN SUNTER AGUNG

11. a. Berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Garap tgl. 18-12-1972 yang diketahui Lurah Sunter tgl. 1-5-1973 No. 284/AI-6/U/73 bahwa Ny. Marintan Marto Poerodjo telah menyerahkan garapan empangnya kepada Slamet Setiadi, luas \pm 64.390 M².
- b. Berdasarkan Surat Penyerahan tgl. 16-11-1984 yang diketahui Lurah Sunter tgl. 1-5-1985 No. 100/1.711./85, bahwa sdr. Slamet Setiadi telah menyerahkan hak garapannya kepada Hamzah Atmohandojo yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUANA PERMATA HIJAU, seluas : 64.390 M².

Bahwa sebagian dari tanah seluas 64.390 M² terletak diluar lokasi yang dimohon dan berdasarkan Peta Gambar Situasi dari Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Jakarta Utara tgl. 10-8-1987 No. 229/KH/1987, tanah yang dimohon SIPPT nya seluas 16.420 M².

Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Sunter Agung No. 221/1.711./87 tgl. 2-9-1987, bahwa PT. BUANA PERMATA HIJAU telah menguasai tanah seluas 16.420 M² tersebut dan tidak ada masalah/sengketa.

yang sebagian terletak diluar lokasi yang dimohon, dan berdasarkan Peta Gambar Situasi hasil pengukuran dari Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Jakarta Utara, tanah yang dimohon seluas 88.655 M² + 16.420 M² = 105.075 M².

Bahwa

Bahwa diatas tanah tersebut masih ada beberapa penggarap (sdr.Koren dan sdr.Yono Os) yang merasa belum dibebaskan garapannya oleh PT. BUANA PERMATA HIJAU.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Hassan Alimohandjoe, Direktur Utama PT. BUANA PERMATA HIJAU tgl. 13-10-1987 No.98/BPH/I/87, bahwa apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain, maka PT. BUANA PERMATA HIJAU akan bertanggung jawab dan menanggung segala resiko.

Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris BPH Surab tgl. 13-10-1987 No. 849/STR/I/O/1987, bahwa tidak ada keberatan untuk diizinkan BPH dan PT. BUANA PERMATA HIJAU dengan surat yang telah ditandatangani oleh Sekretaris BPH dan PT. BUANA PERMATA HIJAU untuk menandatangani, mengikat, mengikat PT. BUANA PERMATA HIJAU untuk menandatangani.

II. KEADAAN TANAH :

Bahwa diatas tanah tersebut masih dalam keadaan kosong yang merupakan empang dan belum diurus, dengan batas2 berupa patok-patok dari kayu dolken, dimana tanda2 batas sebagian sudah rusak dan hilang, hingga tidak terlihat lagi tanda2 batasnya.

III. ASPEK TATA GUNA TANAH :

Tinjauan dari segi Tata Guna Tanah, kami sampaikan sebagaimana terlampir

IV. Bahwa PT.BUANA PERMATA HIJAU didirikan dengan akta Notaris Raden Santos tgl. 4-4-1984 No.10, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. tgl. 20 Juni 1984 No. 02.3471.HP.02.01.TH.84.

Demikian penjelasan kami sehubungan dengan status dan keadaan tanah dimaksud, pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

A.N. WALIKOTA JAKARTA UTARA
Kepala Kantor Agraria,

A.N. SYAHBANA
NIP.010025710.

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Wagub Bidang III/Pembangunan.
2. Sekretaris RFUT.
3. Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta.
4. Bapak Walikota Jakarta Utara.
5. PT. BUANA PERMATA HIJAU.-

Nomor : 166/G/1991/Th/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang -
memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Tata Usah
Negara dalam tingkat pertama yang bersidang digedu
yang telah disediakan untuk itu di Jalan Angkasa I
Nomor 24 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini da
perkara antara :

EKA FEBANO NARPATI, Warganegara Indonesia,

Pekerjaan : Direktur PT. Narpati

Estates beralamat di Jalan Garu
Nomor 99 Jakarta Pusat; dalam ha
kedudukannya bertindak untuk dan
nama PT. Narpati Estates memberi
Kuasa kepada R. RAMBE, SH., Advo
Pengacara pada Kantor Advokat da
Pengacara R. RAMBE, SH. & ASSOCI
beralamat di Jalan Karya Raya No.
Daan Mogot, Jakarta Barat, selan
disebut sebagai PENGUGAT ; ----



TERGUGAT :

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAR

berkantor di Jalan Merdeka Selat
Nomor 8-9 Jakarta Pusat, selanju
disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; ----
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan -
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/PEN-MH/PTUN-JKT/1991
tertanggal 8 Januari 1992 tentang Penunjukan Susunan --
Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara -
tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis ----
Hakim Nomor 160/PEN-HS/PTUN-JKT/1991 tertanggal 23-----
Januari 1992 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan-
Persiapan yaitu hari Rabu tanggal 5 Februari 1992; ----
Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar-
kan keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta-
mendengarkan keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat -----
Gugatannya tertanggal 18 Desember 1991 yang dibuat dan-
ditanda tangani oleh Kuasanya telah menggugat Tergugat;
Surat Gugatan mana diterima dan didaftarkan di -----
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta -----
pada tanggal 19 Desember 1991 dibawah Register Nomor --
160/G/1991/Tn/PTUN-JKT., yang pada pokoknya berbunyi --
sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan terhadap:
TERGUGAT, mengenai Suratnya Nomor 3698/073.3 tanggal --
19 September 1991 Perihal : Pengukuhan Taksasi Ganti --
Rugi Tanah Bangunan dan benda-benda lain di atasnya ---
yang terkena Jalur Hijau terletak di Kelurahan Papanggo

dan Kelurahan ...



dan Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, --
Wilayah Jakarta Utara (Bukti P - 8); -----

ADAPUN DUDUKNYA PERKARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang Tanah --
Garapan/Empang seluas 27.240 M² yang terletak di --
Jalan Baru R.E. Marthadinata Rt. 006/RW.06, -----
Kelurahan Sunter Agung (depan Pengadilan Negeri --
Jakarta Utara), dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Empang Sumantri --
dan Djohan Narpati; -----

- Sebelah Timur : Tanah Garapan Empang H. Dedy --
Hamid; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Baru R.E. Marthadinata; --

- Sebelah Barat : Tanah Garapan Empang Dulmadjid
dan Djohan Narpati; -----

(Bukti P-1, P-2, P-3, P-4); -----

2. Bahwa Tanah Garapan ini diperoleh dari Departemen-
Kehakiman/Balai Harta Peninggalan Jakarta, sesuai-
dengan Akta Nomor 182 tanggal 15 April 1973 yang --
dibuat oleh Notaris Nyonya SITI MARJAMI -----
KOLBIOEN, SH., (Bukti P-5) berdasarkan Putusan ---
Nomor 6/1972 Paillit, Pengadilan Negeri Jakarta ---
Pusat tertanggal 25 Oktober 1973 (Bukti P-6); ----

3. Berdasarkan Surat yang telah dikeluarkan TERGUGAT
dengan Nomor 331/I/7111 tanggal 25 Januari 1991, -
Perihal : Penjelasan Empang Garapan Atas Nama ----
PT. NARPATI ESTATES & DJOHAN NARPATI yang terletak
di Jalan Baru R.E. Marthadinata Rt.006/RW.06, ----
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, -

Wilayah/...



LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KAKANWIL BPN JAKARTA

TENTANG

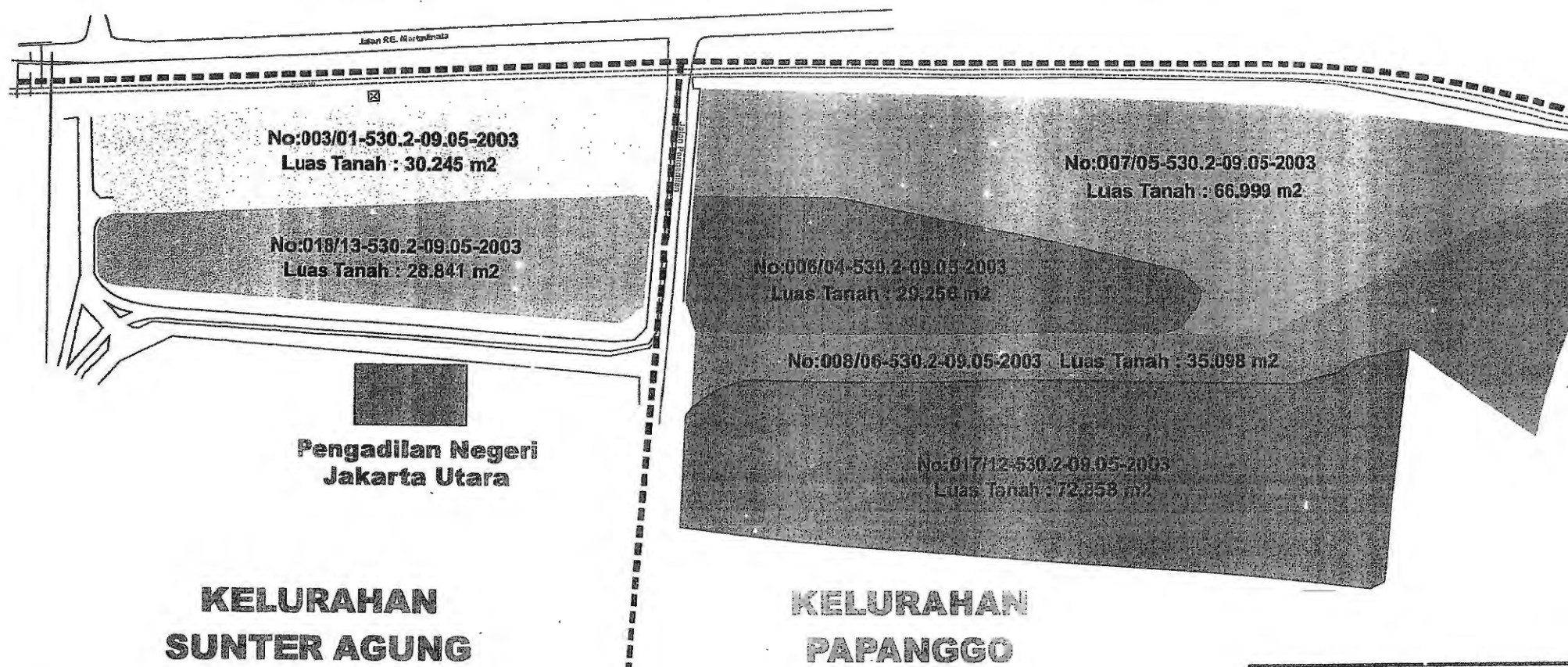
PEMBERIAN HAK PAKAI

TAHUN 2003

ISI:

- 1. Gambar Lokasi SK HAK PAKAI yang dimohon PEMPROV DKI JAKARTA tahun 2003.**
- 2. SURAT KAKANWIL BPN DKI JAKARTA NO: 1055/0-9/PPS & KP/2009, tanggal 20 MEI 2009, kepada JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN Ub. DIREKTUR EKONOMI dan KEUANGAN.**

GAMBAR LOKASI SK HAK PAKAI YANG DIMOHON OLEH PEMROV DKI JAKARTA TAHUN 2003



Keterangan :

1. Semua SK terletak di Jl. Pengadilan.
2. SK Hanya berlaku 3 bulan.
3. Batal dengan sendirinya bila ternyata asset tersebut adalah milik orang lain





KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan Taman Jatibaru No. 1 Telp. 38515150 - 3847819 Jakarta - 10150

Nomor : 1055 /0-9/PPS & KP/2009

Jakarta, 20 Mei 2009

Lampiran :

Kepada Yth. :

Perihal : Permintaan Keterangan

Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen
Ub. Direktur Ekonomi dan Keuangan

di-

JAKARTA

Sesuai permintaan lisan dari Jaksa S.I Limbong, SH tanggal 19-05-2009 yang disampaikan kepada kami perihal permintaan tertulis tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 003/01-530.2-09.05-2003, No. 006/04-530.2-09.05-2003, dan No. 007/05-530.2-09.05-2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas tanah yang terletak di Jalan Pengadilan, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dokumen/warkah yang ada di Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta setelah kami perhatikan secara seksama, proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 003/01-530.2-09.05-2003, No. 006/04-530.2-09.05-2003, dan No. 007/05-530.2-09.05-2003 telah memenuhi prosedur yang berlaku.
2. Bahwa di dalam Diktum kelima Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tersebut di atas, balai dengan sendirinya apabila penerima hak tidak mendaftarkan hak atas tanahnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan.
3. Bahwa selain itu, dalam Diktum keenam SK Pemberian Hak tersebut di atas, apabila terdapat gugatan/kiam dan pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (penerima hak) untuk menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI DKI JAKARTA**


Dr. H. S. MUHAMMAD IKHSAN, SH., M.Si, MH
NIP. 19620209 198703 1 002

LAMPIRAN 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

ISI:

- 1. BERITA ACARA SERAH TERIMA, tanggal 8-6-2007**
- 2. BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS, tanggal 11-7-2008
(1 tahun setelah BAST Ditandatangani) dengan lampirannya
antara lain DAFTAR SURAT PELEPASAN HAK (SPH)**
- 3. Surat SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA, NO: 847/-1.711, tanggal
27 MEI 2009**
- 4. GAMBAR LETAK TANAH dan KETERANGAN POKOK terkait
Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai lampiran dari BAST.
(Dari 5 buah SPH, ada 1 SPH yang tidak jelas letak tanahnya /
tidak ada peta situasinya. Hanya lokasi umum di Rt10 / Rw 08)**
- 5. KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NO. 758/2011
tanggal 10 Mei 2011 tentang PENUNJUKAN DINAS OLAHRAGA
sebagai pengguna tanah sebagaimana BAST.**

KELURAHAN PAPANGGO
DAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTAMADYA JAKARTA
UTARA DARI PT AGUNG PODOMORO KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

→ **ADA DI 2 KELURAHAN**

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh **2007** yang bertanda tangan dibawah ini :

Trihatma Kusuma Haliman : - Direktur I PT Agung Podomoro, bertempat tinggal di Jalan Agung II Blok I 4/12B RT 011 RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara.

- Dalam hal ini menjalani jabatannya selaku Direktur : Perseroan Terbatas (PT) Agung Podomoro oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Agung Podomoro sebagaimana Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 5 Desember 1975 dan terakhir diubah sebagaimana tercantum dalam akta Nomor 88 tanggal 8 Agustus 1988 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta.
- Sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan disebut di bawah ini, telah mendapat kuasa dan persetujuan tertulis dari Komisaris Utama (Ny. Sri Wulan) PT Agung Podomoro sesuai dengan persetujuan No. 100 tanggal 3 Agustus 1988, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara Serah Terima ini.
- Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

ii. Suhnyoso : - Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kotamadya Jakarta Pusat.

- Dalam hal ini menjalani Jabatannya berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

f

SM
Bil

5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
6. Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 2001 tentang Penetapan Perhitungan sisa Kewajiban Proporsional para Investor Developer di Wilayah Kerja Badan Pengawas Pelaksana Pembangunan Lingkungan Sunter Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penentuan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Nopember 1973 Nomor 2881/A/K/BKD/1973 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 8170/XII/1983 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas $\pm 301,7553$ Ha yang terletak di Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima **Tanah seluas $\pm 265.335,99$ m²** yang terletak di Jalan Rumah Sakit Koja Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima untuk dimiliki dari PIHAK PERTAMA tanah yang terletak di Jalan Rumah Sakit Koja Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Jenis yang diserahkan	Volume (m ²)	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1.	Tanah PHU (tanah kosong)	265.335,99	737.395.249.809,00	
	Jumlah Seluruhnya	265.335,99	737.395.249.809,00	

Terbilang : Tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah.

Pasal 2

Penyerahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kewajiban proporsional dari 7 (tujuh) Investor-Developer (Pengembang) di wilayah Kotamadya Jakarta Utara, masing-masing :

1. PT Asira International Tbk
2. PT Agung Podomoro;
3. PT Prospect Motor;
4. PT Indofica Housing;
5. PT Subur Brodard
6. PT REAM / PT Pembangunan Jaya,
7. PT Yakln Gloria

**TIDAK MENGAKUI KONTRIBUSINYA
DALAM EAST**

berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 223 Tahun 2001 tentang Penetapan Perhitungan Sisa Kewajiban Proporsional para Investor Developer di Wilayah Kerja Badan Pengawas Pelaksana Pembangunan Lingkungan Sunter Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam penyerahannya di wakili oleh PIHAK PERTAMA.

[Signature] 002

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin bahwa tanah yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dalam keadaan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ~~tidak dalam sengketa bebas dari segala tuntutan/gugatan~~, demikian juga tidak pernah diperjualbelikan/dialihkan kepada pihak lain, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai agunan, tidak disewakan serta bebas dari beban lain dan/atau semacam itu, apabila ada tuntutan/gugatan dan sengketa dengan PIHAK KETIGA, baik sekarang maupun di kemudian hari, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA selain menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 November 1973 Nomor 2881/A/K/BKD/1973 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 8170/XII/1983 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyelesaikan sertifikat tanah yang diserahkan menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Biro Perlengkapan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

~~Penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, disertai dengan surat-surat/dokumen antara lain Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 841/GBS/JU/XII/90 dan buku pembebasan tanah serta surat-surat/dokumen lain sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Serah Terima ini.~~

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIJOSO

PIHAK PERTAMA

PT AGUNG PODOMORO
PRESIDEN DIREKTUR,



TRIATMA KUSUMA HALIMAN

M/ 21

REKAP SPH DAN CONSIGNATIE TAMAN BMW

No	PEMEGANG HAK GARAP (YANG MELEPASIKAN HAK)	PENGEMBANG (YANG MEMBEBAHKAN)	TANGGAL SPH	Luas M2
SURAT PELEPASAN HAK (SPH)				
1	Drs. H Dady Hamid	PT Indofica Housing	08-Agust-90	565
				10.351
2	Drs. H Dady Hamid	PT Indofica Housing	08-Agust-90	420
				10.870
3	Drs Soeyono (PT Sinar Mas Sunter Jaya)	PT Indofica Housing	12-Sep-90	60.614
4	Annie Sumanti	PT Indofica Housing	18-Sep-90	6.277
5	GMH Kesuma, SE	PT Indofica Housing	26-Sep-90	33.131
	Jumlah			122.228
CONSIGNATIE				
	Penawaran Konsignate dari BP3L sunter tanggal 20 Mei 1994 melalui Pengadilan Negeri			
	Jakarta Utara atas tanah garapan:			
	PT Buana Permata Hijau			65.774
	PT Narpati Estate			29.451
	Jumlah			95.225
JUMLAH LUAS SURAT PELEPASAN HAK DAN CONSIGNATIE				217.453



**BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG
WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA UTARA**

Jl. Dariau Agung III No. 5 Sunter Agung, Tg. Priok Jakarta Utara
Telp. 645 9767, 6471 1214, Fax. 645 3612

Kode Pos 14350



BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS

Pada hari ini tanggal sebelas bulan Juli tahun DUA RIBU
DELAPAN (2008) yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. HAMDI
NIP : 470056544
Jabatan : Sekretaris Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang
Wilayah (BP3W) Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133/2004 tanggal
19 Januari 2004
Yang selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA,

Nama : DRS. H. RIYANTO, M.Si
NIP : 470037557
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi DKI Jakarta
Yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Surat-surat asli Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) kepada PIHAK KEDUA antara lain :

1. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) Tanah areal Waduk Sunter Utara dan Rumah Pompa yang terletak di Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara terdiri dari 1 (satu) bundel 20 (Dua puluh) berkas terlampir.
2. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) tanah areal Tamanan BMW yang terletak di Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Sunter Agung terdiri dari 1 (satu) bundel 6 (enam) berkas terlampir.
3. Surat Penyerahan/Pelepasan Tanaman areal Waduk Sunter Utara yang terletak di Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung terdiri dari 1 (satu) bundel 3 (tiga) berkas terlampir.

PIHAK KEDUA telah menerima Surat-surat Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) asli dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan lengkap secara keseluruhan, dan selanjutnya keberadaan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Berita Acara

Handwritten signature and date: 11/07/08

Berita Acara ini dibuat rangkai 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dengan ketentuan yang sama, 1 (satu) rangkai untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkai untuk PIHAK KEDUA.

Berita Acara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lampiran Surat No. 532/-1.711 tanggal 9 Juli 2008, Perihal Penyampaian Surat-surat asli Penyerahan/Pelepasan Hak (SPH) areal Waduk Sunter Utara, Rumah Pompa dan Taman BMW.

PIHAK KEDUA
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA



DRS. H. RIYANTO, M.Si
NIP 470037557

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH
PENGEMBANG WILAYAH KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA UTARA

Sekretaris

Ir. H. HAMDI
NIP 470056544

Lampiran 7 Berita Acara Serah Terima Berkas
Lampiran 532/D/1.711
Lampiran 9 JULI 2008

**DAFTAR REKAPITULASI SURAT PENYERAHAN/PELEPASAN HAK (SPH)
SPH TANAH TAMAN BMW**

No.	YANG MEMBEDAKAN	PASAPENGARAP	BERUPA	DIPERUNTUKAN TAMAN BMW	PENYERAHAN SURAT PELEPASAN HAK TANAH	KETERANGAN
1	PT. Indofica Housing 08-08-1990	Drs. H. Dady Hamid	Tanah/Bangunan	± 565.00 10,351.00	a Surat Pelepasan Hak Tanah sesuai Surat tanggal. 08-08-1990 dari Drs. H. Dady Hamid kepada Trihatma K Haliman. b Surat Pernyataan sesuai Surat tanggal. 08-08-1990 atas nama Drs. H. Dady Hamid c Surat Pernyataan sesuai Surat tanggal 08-08-1990 No. 1443/AI-6/U/8/1977 tanggal 04-08-1977 d Peta Situasi	Asli Asli Asli Asli Diperuntukan Taman BMW
2	PT. Indofica Housing 08-08-1990	Drs. H. Dady Hamid	Tanah/Bangunan	± 420.00 10,673.00	a Surat Pelepasan Hak Tanah sesuai Surat tanggal. 08-08-1990 dari Drs. H. Dady Hamid kepada Trihatma K Haliman b Surat Pernyataan sesuai Surat tanggal. 08-08-1990 Drs. H. Dady Hamid c Peta Situasi	Asli Asli Asli Diperuntukan Taman BMW
3	PT. Indofica Housing 12-09-1990	Dr. Soeyono	Tanah/Bangunan	± 60,614.00	a Surat Pelepasan Hak Tanah sesuai Surat tanggal. 12-09-1990 dari Dr. Soeyono kepada Trihatma K Haliman b Surat Pernyataan sesuai Surat tanggal. 12-09-1990 atas nama Dr. Soeyono d Surat Keterangan Lurah Papandigo No. 2/11.711.01 tanggal. 12-09-1990	Asli Asli Asli Diperuntukan Taman BMW
4	PT. Indofica Housing 18-09-90	Annie Sumanti	Tanah	± 6,277.00	a Surat Pelepasan Hak Tanah sesuai Surat tanggal. 18-09-1990 dari Annie Sumanti kepada Trihatma K Haliman. b Surat Pernyataan sesuai Surat tanggal. 18-09-1990 atas nama Annie Sumanti. c Surat kesaksian tanggal. 09-05-1980 d Surat Pernyataan persetujuan tanggal. 04 April 1964 e Peta Situasi (Permaterai Rp. 1000)	Asli Asli Asli Asli Asli Diperuntukan Taman BMW
	PT. Indofica Housing 26-09-1990	GMH Kesuma, SE	Tanah	± 33,131.90	a Surat Pelepasan Hak Tanah sesuai Surat tanggal. 26-09-1990 dari GMH Kesuma, SE kepada Trihatma K Haliman. b Surat Pernyataan Asli sesuai Surat tanggal 26-09-1990 atas nama GMH Kesuma, SE c Surat Keterangan Lurah Sunter Agung No. 016/1.711.1/11/1/1991 tanggal. 09-01-1991. d Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan dari Polres Jakut No. 228/SKET/B/XI/90/STPK tanggal. 21-11-1990. e Peta Situasi	Asli Asli Asli Asli Asli Diperuntukan Taman BMW



Jakarta

Kode Pos : 10110

Nomor : 847/-1.711

27 Mei 2009

Sifat : Segera

Lampiran :

Kepada

Hal : Penyerahan kewajiban sertifikat
atas nama Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

Yth. Direktur PT Agung Podomoro
Jln. Agung II Blok I 4/12
RT 011/016

di

Jakarta

Sehubungan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanah yang terletak di Jalan Rumah Sakit Koja Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara dari PT Agung Podomoro kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 Juni 2007, dengan ini saya beritahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 4 ayat (2) BAST tanggal 8 Juni 2007 yang intinya :
 - a. PT Agung Podomoro menjamin bahwa atas bidang tanah yang diserahkan tidak dalam sengketa, bebas dari segala tuntutan/gugatan dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada tuntutan/gugatan dari Pihak Ketiga serta.
 - b. PT Agung Podomoro berkewajiban untuk menyelesaikan sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun sampai saat ini PT Agung Podomoro belum menyerahkan sertifikat dimaksud.
2. Atas obyek tanah yang diserahkan oleh PT Agung Podomoro kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam BAST tanggal 8 Juni 2007 tersebut, saat ini dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, agar PT Agung Podomoro segera menyelesaikan permasalahan dimaksud, selanjutnya menyelesaikan pensertifikatan tanah dan menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 8 Juni 2009. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan PT Agung Podomoro belum menyelesaikan kewajiban dimaksud, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempertimbangkan kembali perizinan yang telah diterbitkan terkait dengan BAST.

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH
MUHAYAT
NIP 050012362

tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung
4. Asisten Pembangunan dan Linokundaan Hidup Sekda

BOGAWAN KOLUSI dan KORUPSI pada KASUS TAMAN BMW

FAKTA LETAK tanah dalam 5 Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST) dan FAKTA LETAK Taman BMW



SPH dari GMH. KESUMA
Seluas 33.131 m² - di Kel. Sunter Agung
(Gambar Lokasi : di Kel. Sunter Agung)

- Dilegalisir Lurah Sunter Agung.
- Tanda tangan GMH Kesuma di SPH tampak berbeda dengan tanda tangan yang bersangkutan dalam surat lainnya.
- Pernyataan anak pertama dari GMH Kesuma yang menyanggah bahwa tanda tangan bapaknya dalam SPH adalah palsu dan tidak memiliki tanah seperti dimaksud dalam SPH.

SPH dari ANNIE SUMANTI
Seluas 6.277 m² - di Kel. Sunter Agung
(Gambar Lokasi : di Kel. Sunter Agung)

- Dilegalisir Lurah Sunter Agung
- Surat keterangan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menerangkan nomor KTP Annie Sumanti tidak tercatat dalam data base kependudukan (teknik fiktif)

SPH dari DADY HAMID
Seluas 10.916 m² - di Kel. Sunter Agung
(Gambar Lokasi : di Kel. Sunter Agung)

- Dilegalisir Lurah Sunter Agung
- Asal tanah Dady Hamid dari Uwas Bin Laing.
- Tanda tangan Dady Hamid dan Uwas di SPH tampak berbeda dengan tanda tangan yang bersangkutan di KTP, KK, dan Pasport.
- Dihadapan Notaris Uwas dan keluarganya menyanggah, tidak pernah punya dan tidak pernah menjual tanah.
- Pernyataan R. Hamidi dihadapan Notaris bahwa Drs. H. Dady Hamid tidak pernah punya dan tidak pernah menjual tanah.

SPH dari DADY HAMID
Seluas 11.290 m² - di Kel. Sunter Agung
(Gambar Lokasi : di Kel. Papanggo)

- Dilegalisir Lurah Sunter Agung
- Asal tanah Dady Hamid dari Uwas Bin Laing.
- Tanda tangan Dady Hamid dan Uwas di SPH tampak berbeda dengan tanda tangan yang bersangkutan di KTP, KK, dan Pasport.
- Dihadapan Notaris Uwas dan keluarganya menyanggah, tidak pernah punya dan tidak pernah menjual tanah.
- Pernyataan R. Hamidi dihadapan Notaris bahwa Drs. H. Dady Hamid tidak pernah punya dan tidak pernah menjual tanah.

SPH dari DR. SOEYONO
Seluas 60.614 m² - di Kel. Pa
(Gambar Lokasi : Tidak ada)

- Lokasi tanah hanya disebut di RT Kel. Papanggo (lokasi tanah yang jelas / tidak ada lampiran gambar)
- Dilegalisir Lurah Papanggo
- Tanda tangan Dr. Soeyono di SPH berbeda dengan tanda tangan yang bersangkutan dalam surat lainnya
- Pernyataan anak dan istri dihadapan Notaris, yang menyatakan bahwa alm. Dr. Soeyono bukan Sinar Air Mas Sunter Jaya dan tidak pernah menjual tanah
- Istri Dr. Soeyono juga menyanggah tidak pernah menjadi komisaris Sinar Air Mas Sunter Jaya sebagai direksi dalam SPH.

Keterangan :

- Tanah yang diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI.
- Tanah rakyat / Taman BMW
- Batas Kelurahan.

KESIMPULAN :

1. Jumlah luas tanah dalam 5 SPH 122.228 m², tidak sama dengan luas yang tertulis dalam BAST 265.395,99 m².
2. Para pelepas hak MENYANGGAH, berarti SPH FIKTIF.
3. Letak tanah-tanah dalam SPH bukan Taman BMW.
4. Memasukkan Taman BMW sebagai Asset Pemprov DKI yang di daftarkan BAST adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
5. Taman BMW sebagai asset Pemprov DKI Jakarta adalah FIKTIF, sehingga menimbulkan KERUGIAN NEGARA Rp.737.395.249.809,-.



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 758/2011

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BERUPA TANAH SELUAS 265.335,99 M² YANG TERLETAK DI
JALAN RUMAH SAKIT KOJA, KELURAHAN PAPANGGO,
KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

MANIPULASI DATA DENGAN
MENGHILANGKAN
KELURAHAN SUNTER AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 8 Juni 2007 telah dilakukan serah terima dari PT Agung Podomoro kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas 265.335,99 m² (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh sembilan meter persegi) yang berasal dari kewajiban investor developer (pengembang) yang terletak di Jalan Rumah Sakit Koja, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - bahwa barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Tanah seluas 265.335,99 m² yang terletak di Jalan Rumah Sakit Koja, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH SELUAS 265.335,99 M² YANG TERLETAK DI JALAN RUMAH SAKIT KOJA, KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pengguna barang milik daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas 265.335,99 m² (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Rumah Sakit Koja, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris dengan nomor, kode dan rincian barang sebagai berikut :

Tanah yang digunakan :

Luas Tanah : 265.335,99 m²

Nomor Inventaris	: <u>11.9.3.09.00.00.002.2007</u> <u>01.01.05.05.004.00001</u>
------------------	---

KETIGA : Pengguna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan barang milik daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan, pemeliharaan, pengamanan terhadap barang milik daerah beserta sarana penunjang lainnya;
- c. menggunakan dan mengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, serta memenuhi semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pengguna barang milik daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN 5

KLARIFIKASI
MANTAN GUBERNUR SUTIYOSO
TERKAIT DENGAN BAST YANG DITANDATANGANI
BAHWA
LETAK TANAH YANG DIMAKSUD DALAM BAST
BUKAN TAMAN BMW

DITUTURKAN OLEH MANTAN WAGUB DKI JAKARTA TH 2007-2012
PADA MEDIA CETAK

Kasus BMW Sarat Manipulasi Luas Lahan



DOK. INDOPOS
Prijanto

Prijanto Ungkap Pendapat Bang Yos

MANTAN Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mengungkapkan pendapat mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos), mengenai kasus tanah Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW) Jakarta Utara.

Melalui rilis yang diterima INDOPOS, Prijanto menerangkan, dirinya telah me-

nunjukkan bukti administrasi yang terkait kasus tanah BMW kepada Bang Yos. Mantan gubernur dua periode itu pun sangat terkejut setelah mempelajarinya. "Saya menghadap beliau, karena kasus tanah BMW dilatarbelakangi oleh Berita Acara Serah Terima (BAST) kewajiban pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta, ditandatangani Bang Yos pada tanggal 8 Juni 2007," ujar Prijanto melalui rilis yang diterima INDOPOS, Jumat (14/3).

► Baca Kasus...Hal 10

Kasus BMW Sarat Manipulasi Luas Lahan

Sambungan dari halaman 9

Prijanto menjelaskan, dari pembicaraan dirinya dengan Bang Yos, dapat disimpulkan sebagai berikut. **Pertama**, memang benar Bang Yos menandatangani BAST atas tanah yang terletak di Jalan Rumah Sakit Koja, Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dari PT Agung Podomoro kepada Pemprov DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2007. Setelah dilihat secara seksama, draft BAST tersebut sudah diparaf oleh para staf terkait.

Kedua, Bang Yos merasa heran terkait dengan luas tanah yang diserahkan da-

lam 5 (lima) dokumen Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai lampiran BAST, luasnya hanya 122.228 m². Sedangkan di BAST, disebut menyerahkan tanah seluas 265.395,99 m². Artinya terjadi manipulasi luas tanah yang diserahkan.

Ketiga, ketika polemik kasus tanah BMW mencuat dan Bang Yos mendengar bahwa eksekusi tanah BMW pada 28 Agustus 2008 disebut berdasarkan BAST, Bang Yos mengatakan bahwa itu salah sasaran. Sebab tanah yang dimaksud dalam BAST bukan tanah BMW. Eksekusi tersebut tidak sepengetahuan bang Yos. Apalagi dirinya sudah tidak

menjabat sebagai gubernur.

Keempat, sambung Prijanto, ternyata Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai lampiran BAST, baru diserahkan kepada Biro Perlengkapan DKI tanggal 11 Juli 2008, atau setahun setelah BAST ditandatangani. Semestinya penyerahan dokumen SPH tersebut harus dicek atau dicocokkan dengan BAST.

Sehingga bila tidak sesuai antara BAST dengan SPH, gubernur harus membatalkan BAST. Sesungguhnya para staf mengecek administrasi dan di lapangan sebelum BAST ditandatangani. **Kelima**, bagaimana mungkin, SPH tidak sesuai

dengan BAST tetapi DKI tidak talkan BAST, malah BAST sebagai dasar eksekusi tanah tanggal 28 Agustus 2008, beb

Keenam, Bang Yos juga merkin keheranan ketika tanah B sukkan sebagai aset DKI be BAST. Sebab tanah-tanah yang di dalam BAST sesungguhnya bukan di tanah BMW. "Terketujuh, lebih jauh, setelah mempelajari isi SPH dari lam yang beliau tandatangani, bel perlu untuk diuji keabsahan hukum," pungkas Prijanto. (ir

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 6

ATAS NAMA
PEM PROV DKI JAKARTA
NO. 250 & NO. 251

ISI:

1. Gambar Lokasi "SK HAK PAKAI 2003" yang dimohon PEM PROV DKI JAKARTA .
2. Surat KAKANWIL BPN DKI JAKARTA NO: 1055/0-9/PPS & KP/2009, 20 MEI 2009, tentang SK HAK PAKAI 2003, kepada JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN Ub. DIR EKONOMI dan KEUANGAN.
3. SK HAK PAKAI No. 017/12-530.2-09.05-2003, tanggal 11 April 2003 dengan luas tanah 72.858 M2.
4. SERTIFIKAT No: 250 atas nama PEM PROV DKI JAKARTA.
5. SK HAK PAKAI No. 008/06-530.2-09.05-2003, tanggal 4 Maret 2003 dengan luas tanah 35.098 M2.
6. SERTIFIKAT No. 251 atas nama PEM PROV DKI JAKARTA.

PERTANYAAN KRITIS

"Apa ALAS HAK Sertifikat No. 250 & 251?"

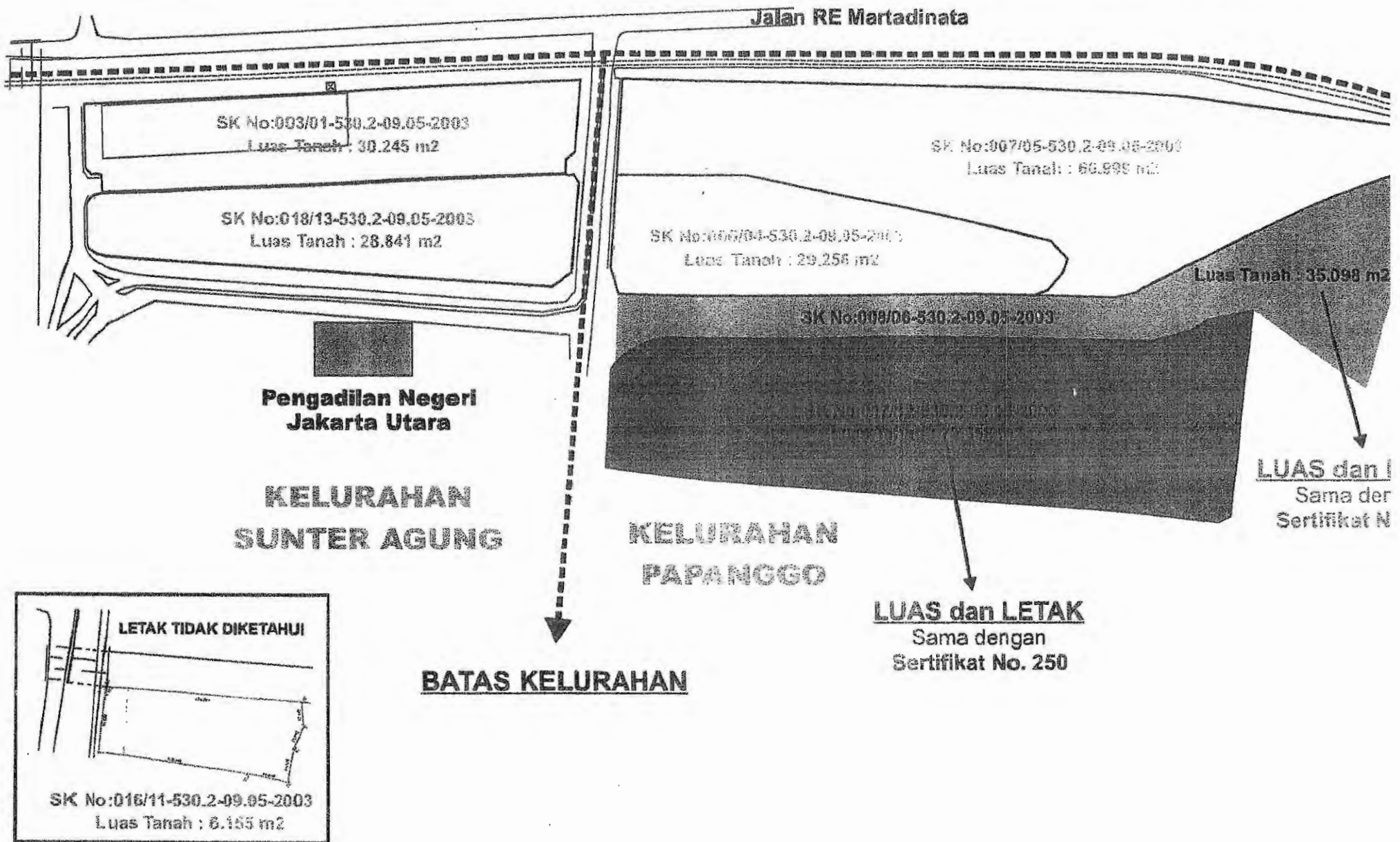
SK HAK PAKAI 2003 ? Bukankah sudah batal demi hukum ?

SK HAK PAKAI dengan Alas Hak BAST 8-6-2007?

Bukankah BAST diduga fiktif?

Sertifikat no: 250 & 251 bermasalah?

GAMBAR LOKASI SK HAK PAKAI Yang Diterbitkan Oleh Kanwil BPN DKI Jakarta Kepada PEMPROV DKI JAKARTA TAHUN 2003





Jalan Taman Jatibaru No. 1 Telp. 38515150 - 3847819 Jakarta - 10150

Nomor : loss /0-9/PPS & KP/2009

Jakarta, 20 Mei 2009

Lampiran :

Kepada Yth. :

Perihal : Permintaan Keterangan

Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen
Ub. Direktur Ekonomi dan Keuangan

di-

JAKARTA

Sesuai permintaan lisan dari Jaksa S.I Limbong, SH tanggal 19-05-2009 yang disampaikan kepada kami perihal permintaan tertulis tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 003/01-530.2-09.05-2003, No. 006/04-530.2-09.05-2003, dan No. 007/05-530.2-09.05-2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas tanah yang terletak di Jalan Pengadilan, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dokumen/warkah yang ada di Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta setelah kami perhatikan secara seksama, proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 003/01-530.2-09.05-2003, No. 006/04-530.2-09.05-2003, dan No. 007/05-530.2-09.05-2003 telah memenuhi prosedur yang berlaku.
2. Bahwa di dalam Diktum kelima Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tersebut di atas, batalkan sendiri apabila penerima hak tidak mendaftarkan hak atas tanahnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan.
3. Bahwa selain itu, dalam Diktum keenam SK Pemberian Hak tersebut di atas, apabila terdapat gugatan klaim dan pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (penerima hak) untuk menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. S. MUHAMMAD IKHSAN, SH, M.Si, MH
NIP. 19620209 198703 1 002



KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Taman Jatibaru No.1 Telp. 3851550 Fax. 3847819 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 017 / 12 - 330.2 - 03.05 - 2003

Tentang

PEMBERIAN HAK PAKAI

ATAS NAMA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ATAS TANAH DI KOTAMADYA JAKARTA UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA:

Surat permohonan dari **Drs. MA'MUN AMIN** qq. **PEMERINTAH DKI JAKARTA** tanggal 1 April 2002, beserta berkas yang berhubungan dengan itu.

MENIMBANG:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Hak Pakai atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, seluas 72.858 M² (Tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Pengadilan, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara;
- Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah Negara bekas Eigendom Nomor 12778 sebagian, Nomor 12779 sebagian dan 16159 sebagian, yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, yang diuraikan dalam Berita Acara Tim Penelitian Tanah tanggal 29 Juli 2002 ;
- Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2002 Nomor 3217/073.51, **H. MARGANI M. MUSTAR, MSc** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** (pemohon) menyatakan bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan Pengadilan, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, seluas 72.858 M² dengan penggunaan Tarnan BMW adalah tanah milik/dikuasai pemohon, tidak ada pihak manapun yang menguasai tanah tersebut kecuali pemohon, sampai saat ini tidak ada sengketa dengan pihak manapun juga, tidak dalam keadaan dibuat jaminan/hipotik ditanggguhkan dan jika ternyata di kemudian hari ada pihak lain yang mengklaim pemohon bersedia menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilapangan bidang tanah yang dimohon telah dipergunakan untuk Taman sesuai Berita Acara Tim Penelitian Tanah tanggal 29 Juli 2002 ;
- Bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk dikabulkan Hak Pakai Selama Dipergunakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, sesuai suratnya tanggal 21 Maret 2003 Nomor 1.711.2/13/09/HP/U/2003;
- Berdasarkan Pasal 3 (1) b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);

g. Sesuai *ke*.....

- g. Sesuai Surat Edaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Desember 1990 Nomor 500-5569-D.III dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500-1255 menyatakan bila tanah yang dimohon oleh Instansi Pemerintah sama sekali tidak memiliki bukti perolehan/penguasaan dapat melengkapinya dengan Surat Pernyataan dari Instansi yang bersangkutan yang isinya bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik dan sudah tercatat dalam daftar inventaris (aset) serta tidak ada sengketa/permasalahan dengan pihak lain;
- h. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6-12-1990 Nomor 500-5569-D.III, tanggal 1-4-1992 Nomor 500-947 yang ditujukan kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tanggal 16-1-1992 Nomor 530.2-202 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan bahwa dalam rangka penertiban tanah-tanah milik Negara permohonan hak dapat segera diproses tanpa Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Advis Planning;
- i. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Hak Pakai dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (LN. Tahun 1960 No. 104);
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 (LN. Tahun 1997 No. 44) jls. Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996;
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
5. Peraturan Pemerintah No. 33, 34 dan 35 Tahun 1997;
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3 Tahun 1997;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3 Tahun 1999;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.7 Tahun 1999;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.9 Tahun 1999;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 1992;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA Memberikan kepada **PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** Hak Pakai Selama Dipergunakan semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, atas sebidang tanah seluas **72.858 M²** (Tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tanggal 29 Agustus 2000 Nomor 303/U/2000 NIB : 09.02.03.02.01404 terlampir dengan tanda garis keliling kuning, terletak di **Jalan Pengaditan** Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, yang telah dipergunakan untuk Taman, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus dipelihara keberadaannya.
3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan.
4. Uang pemasukan kepada Negara ditetapkan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
5. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara.
6. Penerima hak wajib taat pada Ketentuan Planologi Kota dan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA

- KEDUA** : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, penerima hak harus terlebih dahulu mendaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana dipersyaratkan pada Diktum PERTAMA butir 5 tersebut diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekurangan pembayaran uang pemasukan kepada Negara yang ditetapkan dalam keputusan ini, maka penerima hak wajib melunasi/membayar kembali kekurangan uang pemasukan kepada Negara tersebut.
- KEEMPAT** : Hak Pakai ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara.
- KELIMA** : Keputusan Pemberian Hak Pakai ini batal dengan sendirinya, apabila:
1. Penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA.
 2. Dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya, serta terbukti bahwa obyek Surat Keputusan ini adalah Asset pihak lain.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat gugatan/klaim dari pihak lain maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** (penerima hak) untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH** : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pakai ini penerima hak dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : *Jakarta*
 PADA TANGGAL : *11-4-2002*

KEPALA KANTOR WILAYAH
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



DR. ROBERTA LUMEMPOUW, MSI
 010153674

Catatan :

Uang pemasukan kepada Negara ditetapkan sebesar
 Rp. 0,- (Nol rupiah).

KEPADA :

Sdr.Drs. MA'MUN AMIN.

qq. **PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

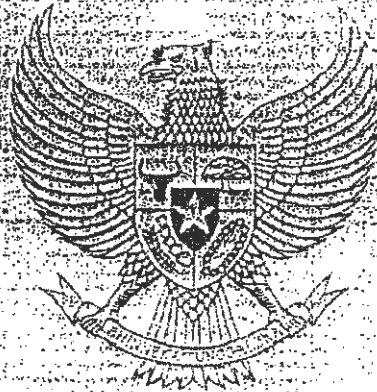
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9, Jakarta Pusat.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta
3. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Kepala Biro Umum Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
5. Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta.
6. Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jakarta Utara di Jakarta.
7. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara di Jakarta.
8. Kepala Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.
9. Arsip.

1 s/d 8 untuk diketahui seperlunya.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK BAKAT No. 250

PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KABUPATEN / KOTA

JAKARTA UTARA

KECAMATAN

TANJUNGPRIK

DESA / KELURAHAN

PAPANDU

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

Kota Administrasi Jakarta Utara

DAFTAR ISIAN 101


No. 4449/2014

DAFTAR ISIAN 102

No. 4458/2014

09.05.03.02.4.00.250

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

<p>a) HAK PAKAL</p> <p>No. 250</p> <p>Desa / Kel. PAPANGGO</p> <p>Tgl. berakhirnya hak 9 - 3 - 2024</p>	<p>D. NAMA PEMILIK HAK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 09.05.03.02.03781</p> <p>Letak Tanah Jalan R.E. Martadinata</p> <p>Sufter Permai</p>	<p>LOKASI BUKAN di Jl. RE. MARTADINATA</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Komersi</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>PAKAL. BERARTI bukan dari BAST</p> <p>3. Pemecahan / Pembekuan / Penggabungan bidang</p>	<p>e) PEMBUKUAN</p> <p>JAKARTA 10 MAR 2014</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kota Administrasi Jakarta Utara</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan Kantor Pertanahan</p> <p>Tgl. 05-03-2014</p> <p>No. IHP/BN.31.72/2014</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>	<p>ADMIRAL FAIZAL SH. MSI</p> <p>NIP. 195905101980031004</p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>1. SURAT KEPUTUSAN</p> <p>2. SURAT UKUR</p> <p>3. DITERBITKAN</p> <p>5 HARI</p> <p>10 MAR 2014</p> <p>Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kota Administrasi Jakarta Utara</p> <p></p> <p>ADMIRAL FAIZAL SH. MSI</p> <p>NIP. 195905101980031004</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 07-03-2014</p> <p>No. 00001/Papanggo/2014</p> <p>Luas 72.858 m²</p>	
<p>i) PENUNJUK</p> <p>Tanah Negara BERARTI bukan dari BAST</p>	

FOTOCOPI

14 2013

X

LA'GAN

09.05.23.02.4.00250

NIB : 09.05.03.02.03781

SURAT UKUR

Nomor 00001/Papanggo/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kabupaten / Kota : Kota Administrasi Jakarta Utara

Kecamatan : Tanjung Priok

Desa / Kelurahan : Papanggo

Peta : Nomor Pet. Pendaftaran : TM/48.2-35.091-03-6

Lembar : Kotak : C-D-E 1-2-3

LOKASI BUKAN di JL. RE. MARTADINATA

Letak Tanah : Jalan R.E. Martadinata / Sunter Permai

Keadaan Tanah : Sebidang tanah sekarang diatasnya berdiri beberapa bangunan semi permanen

dengan bagian-bagiannya yang sebagian berdiri di luar

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan PMNA KBPN No.3 Tahun 1997.

Luas : 72.858 m² (Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi.)

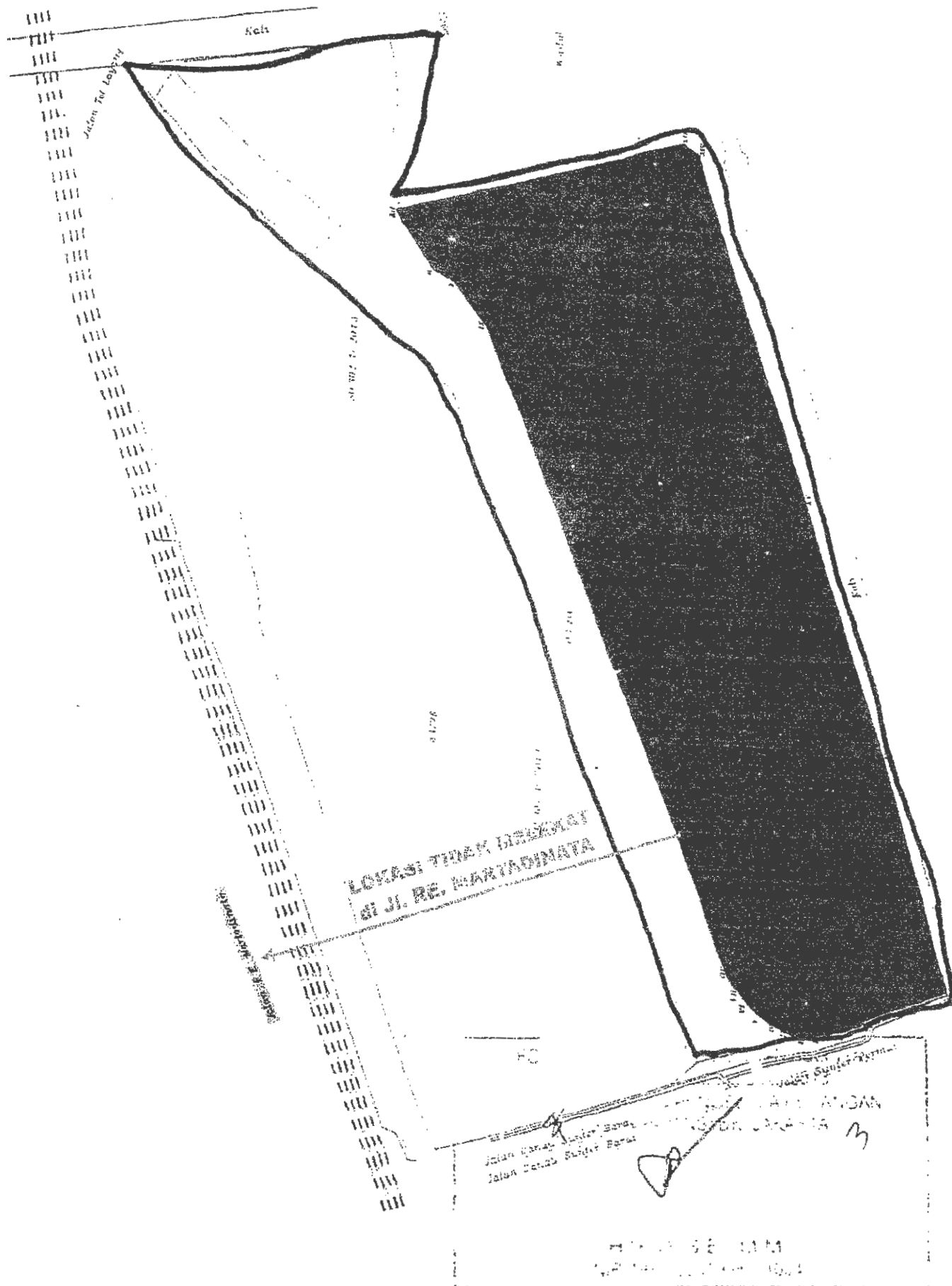
Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Syarif Hidayat, Sugimin dan Agus Priyono
kuasa dari PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Pemohon)

Digambar kembali oleh : Toto Budhiarto, BSc



SESUAI DENGAN ASLINYA
2013
DAN PENGELOLAAN RUANG
DAERAH PROVINSI JAKARTA

SKALA 1 : 2500



2


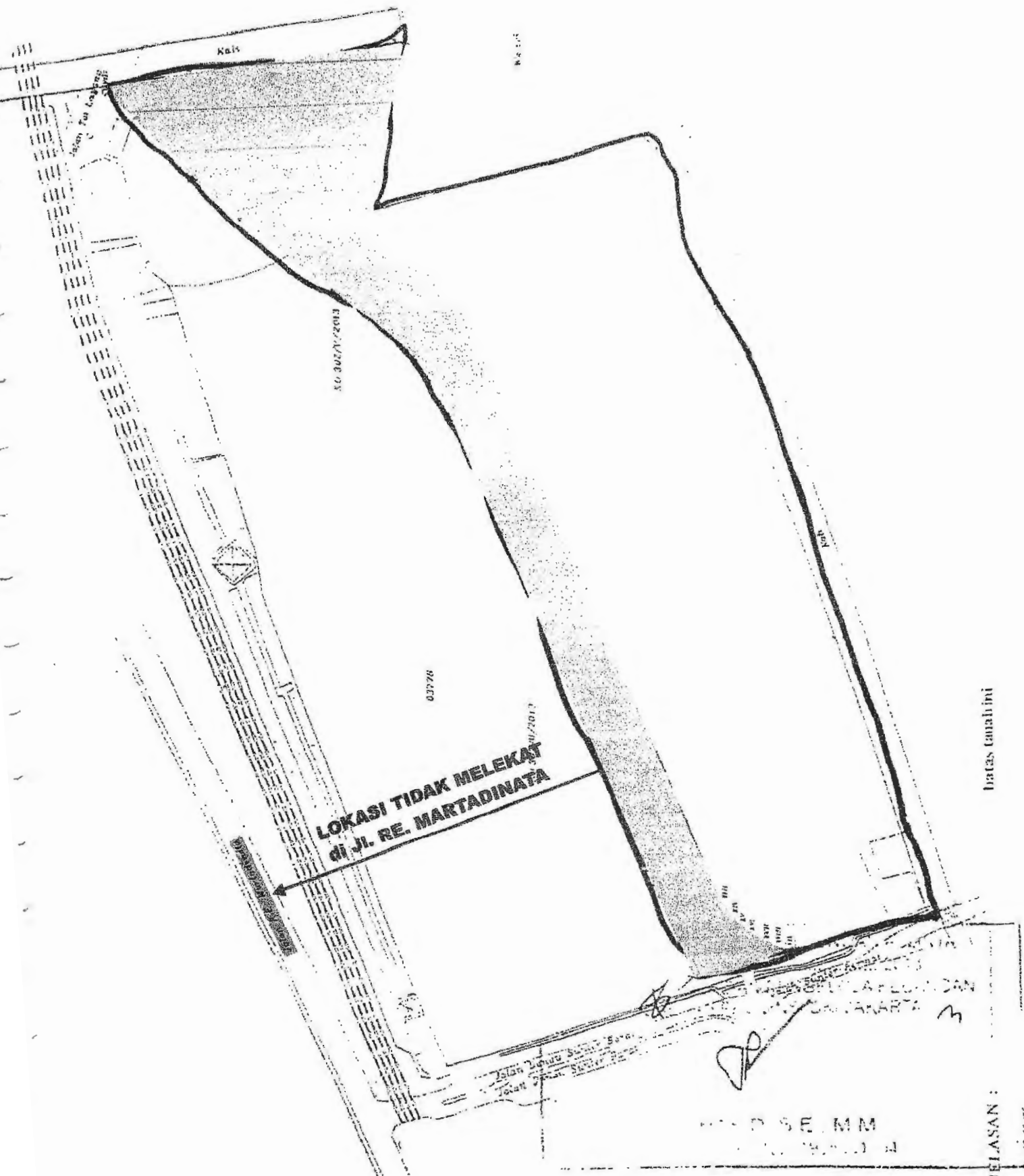
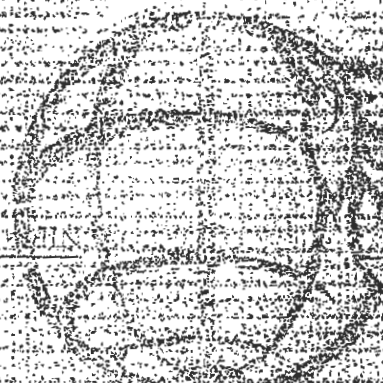
No. 251 Bero/Kel. PAPANGGO Tgl. berakhirnya hak 9 - 3 - 2024	D. NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Tanggal diterbitkannya
NIB 09/05/03/02/09780 Lerak Tanah Jalan R.E. Martadinata Sunter Permai	→ LOKASI BUKAN di JL. RE. MARTADINATA
c) ASAL HAK 1. Konstitusi 2. Pemberian hak 3. Perizinan / Penggabungan / Penggabungan bidang	g. PEMBUKUAN JAKARTA 10 MAR 2014 Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Utara → BERARTI bukan dari BAST
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Perencanaan Tgl. 05-03-2014 No. 814/HR/BPN.31.72/2014 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	ADMIRAL FAIZAL, SH. MS NIP. 195905101980031004 PENERBITAN SERTIFIKAT 1. SURAT KEPUTUSAN 2. SURAT UKUR 3. DITERBITKAN Kantor Perencanaan Administrasi Jakarta Utara 5 HARI 10 MAR 2014
e) SURAT UKUR Tgl. 07-03-2014 No. 00002/Papanggo/2014 Luas. 35.098 m ²	 ADMIRAL FAIZAL, SH. MS NIP. 195905101980031004
i) PENUNJUK Tanah Negara → BERARTI bukan dari BAST	

FOTO BELAKANG SUDUTAN ASLINYA
 JAWABAN 2013
 SERTIFIKAT DAN PENGELOLA KEUANGAN
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA





**Berarti mempergunakan
SK Hak Pakai yang sudah BATAL tahun 2003
Bukan berdasarkan BAST**



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0380/KLA/0765.2014/PBP.53/Tim.4/IX/2014

Lampiran : -

Jakarta, 1 September 2014

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Di Jakarta

Perihal : **Pemintaan klarifikasi mengenai penundaan berlarut terkait tindak lanjut penanganan laporan dugaan korupsi dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) di Kota Solo tahun 2010.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Ombudsman telah menerima laporan dari Wahyu Nugroho, beralamat di Jl. Jenggolo Utara 2 No. 44 RT. 001 Rw. 006 Nusukan Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah, berkenaan dengan penundaan berlarut terkait tindak lanjut penanganan laporan dugaan korupsi dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) di Kota Solo tahun 2010.

Adapun uraian laporan pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2012, Pelapor telah melaporkan dugaan korupsi berupa duplikasi data dana BPMKS Kota Solo tahun 2010 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Nomor Agenda: 2012-08-568, namun belum mendapat penyelesaian.
2. Pada tanggal 27 Juni 2014 Pelapor menanyakan langsung ke kantor KPK mengenai perkembangan laporan Nomor Agenda: 2012-08-568 tersebut dan menurut Pelapor, pihak KPK banyak kasus yang harus ditangani. Dalam kesempatan itu, Pelapor juga diminta untuk menjelaskan permasalahan yang dilaporkan serta memberikan tambahan data dan mendapat Nomor Agenda: 2014-06-000138.
3. Pada tanggal 11 Agustus 2014 lalu, Pelapor datang kembali ke kantor KPK untuk memberikan tambahan data dan mendapat Nomor Agenda: 2014-08-000030.
4. Pelapor mengharapkan KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut dan tidak tebang pilih laporan.

Memperhatikan uraian di atas, Ombudsman Republik Indonesia meminta Ketua KPK melakukan penelitian dan memberikan penjelasan secara tertulis mengenai tindak lanjut penyelesaian yang telah dilakukan. Ombudsman Republik Indonesia memperhatikan sungguh-sungguh permasalahan ini. Sebagai wujud pelayanan publik yang baik, kiranya penjelasan tertulis tersebut disampaikan kepada kami dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan penjelasan ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Demikian perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



[Signature]
Denang Girindrawardana
Ketua

Tembusan Yth.

Wahyu Nugroho/Ali Usman

Jl. Jenggolo Utara 2 No. 44 RT. 001 Rw. 006 Nusukan Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah

LAMPIRAN

IV

(EMPAT)

**LAPORAN DUGAAN KORUPSI KE KPK TENTANG DANA BANTUAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA (SOLO) TAHUN 2010
(KASUS BPMKS)**

**TANDA BUKTI
PENERIMAAN LAPORAN / INFORMASI DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nomor Agenda : 2014-08-000030

Nomor Informasi : 71100

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Pelapor : Wahyu Nugroho
Tempat, Tanggal Lahir : -, -
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Demak Bintoro I No. 29 Nusukan, Kec. Banjarsari, Solo
Nomor Tanda Pengenal : -, -
Nomor Telepon Pribadi : 081904511717
Nomor Telepon Rumah :
E-mail :

Media Penyampaian : Pelapor Langsung

Telah menyampaikan laporan / informasi tentang (peristiwa apa, tempat / waktu kejadian, modus operandi, kerugian yang timbul) :


Menyampaikan tambahan data pengaduan 2012-08-568 tentang dugaan korupsi dana BPMKS di Kota Solo tahun 2010, data tambahan yang disampaikan berupa surat Tugas sebagai konsultan IT dan LPJ Walikota Solo Joko Widodo

Lampiran dokumen pendukung :

NO.	JENIS DATA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Berkas dokumen	2	Surat Tugas dan LPJ

Jakarta, 11/08/2014

Pelapor,


Wahyu Nugroho

Penerima Laporan Pengaduan Masyarakat


Imam Turmudhi

Catatan :

Tanda Bukti Penerimaan Laporan Informasi ini hanya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah datang dan atau memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Pernyataan atau isi laporan beserta dokumen-dokumen pendukungnya adalah tanggung jawab pelapor.



Surakarta, 5 Desember 2011

Nomor : 420.5 / 5868 / SET-PEP/2011
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Tagihan II Kekurangan Hasil Pemeriksaan Aplikasi Website BPMKS**

Kepada:
Yth. Sdr. Wahyu Nugroho, M.Kom
Di -
Surakarta

Menyusuli Surat kami tanggal 26 November 2011 Nomor 420.5/571A1/SET-PEP/2011 perihal Tagihan Kekurangan Hasil Pemeriksaan Aplikasi Website BPMKS.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara segera melengkapi kekurangan dan menyerahkan login website dan hosting ke **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Dikpora Kota Surakarta** untuk pencairan pembayaran aplikasi website BPMKS **paling lambat hari Rabu tanggal 7 Desember 2011**. Dan apabila login website dan hosting tidak diserahkan maka dana tidak bisa cair.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**Kepala Dinas Dikpora
Kota Surakarta**



Drs. Rakhmat Sutomo, M.Pd
NIP. 19630730 198803 1 003

Tembusan:

1. Walikota Kota Surakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Kota Surakarta (sebagai laporan);

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 420/5654/SET-PEP/2011

Pada hari Rabu tanggal 23 bulan Nopember tahun 2011 telah dilaksanakanserah terima barang:

No.	Barang	Jenis	Keterangan
1.	Website BPMKS	- Kode Program (CD) - Diagram Flowchart	Masih ada perbaikan di bagian import, pencarian dan nama website masih atas nama Wahyu Nugroho & TIM dan belum ada penyerahan login website dan hosting

Yang diserahkan oleh:

Nama : Wahyu Nugroho, M.Kom

Alamat : Surakarta

Jabatan : Konsultan IT

Yang dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama CV. Jaringan Lintas Utara

Dan diterima oleh:

Nama : M. Kasmadi

Jabatan : Ketua PPHP

Alamat : Jalan Hasanudin No. 112 Kota Surakarta

Barang-barang tersebut diserahkan dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperluanya.

Yang Menerima,



(M. Kasmadi)

Yang Menyerahkan ,



(Wahyu Nugroho, M.Kom)



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271) 719873 Fax. 727127
SURAKARTA 57132

SURAT TUGAS

Nomor : 094/103/PEP/2011

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
2. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta;
3. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 19-D Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;

Membaca : Surat Permohonan Sdr. WAHYU NUGROHO, M.Kom, tanggal 2 Januari 2011, perihal Kerjasama Sistem Informasi dan Administrasi Pendidikan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SURAKARTA

MENUGASKAN

- Kepada : Nama : WAHYU NUGROHO, M.Kom
Tempat / tanggal lahir : Surakarta, 14 Mei 1965
Pekerjaan : Konsultan IT
Alamat : Jl. Demak Bintoro I No. 29 Nusukan
Untuk : Melakukan pekerjaan teknis perancangan dan fasilitasi operasinalisasi Sistem Informasi dan Administrasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta;
- Ketentuan : 1. Perumuskan detail teknis dan spesifikasi pelaksanaan pekerjaan dijalankan bersama dengan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta;
2. Mengonsultasikan dan melaporkan setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan : Terhitung mulai tanggal 10 Januari sampai dengan 31 Juli 2011.

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Surakarta, 8 Januari 2011



KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA SURAKARTA

Drs. RAKHMAT SUTOMO, MPd.

Pembina Tingkat I

NIP.: 19630730 198803 1 003

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

KC 25
PELESAI

NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
1	G.01.043101	GOLD	2500	Adela Bella P.	VI	Daryoko				SDN Sabranglor
2	G.01.043130	GOLD	2510	Adhela Ruli P.	VI	Joko Purnomo				SDN Sabranglor
X 3	G.01.043170	GOLD	2711	Adi Tri Nur Cahyono P. 0007156	II	Perjo	3372041203086045	3372042300610003	4 Mipitan RT 003/RW 009	SDN Sabranglor
X 4	G.01.043177	GOLD	2712	Aditya Candra Nugroho	II	Joko Sudarmono				SDN Sabranglor
X 5	G.01.043114	GOLD	2757	Aditya Dwi Saputra	I	Mat Nanang				SDN Sabranglor
6	G.01.043142	GOLD	2656	Adnant Nur Huda P. 0041589	III	Puryanto	3372043005050008	337204070800000	21 Sabranglor RT 02/RW 08	SDN Sabranglor
X 7	G.5518232	GOLD	2657	Adrian Aji N.		Tri Agus Wiyono	3372040309043	33720413040100003	Mertoudan RT 18/BX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
X 8	G.01.043143	GOLD	2657	Adrian Aji N.	III	Tri Agus Wiyono				SDN Sabranglor
X 9	G.01.043145	GOLD	2758	Afil Zona Tori		Joko Sutopo				SDN Sabranglor
X 10	G.1537258	GOLD	2758	Afil Zona Tori		Joko Sutopo	337202904090120	3,37205410403E+15		SDN Sabranglor Kec. Jebres
11	G.01.043143	GOLD	2619	Agustina Setyowati	IV	Siswanto				SDN Sabranglor
12	G.910186	X GOLD	2619	Agustina Setyowati	IV	Siswanto	3372041203084207	3372046108000003	Sabranglor, RT.03/VIII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
X 13	G.01.043178	GOLD	2713	Ajeng Cahyaningrum	II	Sigit Widi H.				SDN Sabranglor
X 14	G.01.043179	GOLD	2714	Ajeng Kharisma Ayu Ajitama	II	Dacwaji				SDN Sabranglor
15	G.01.043144	GOLD	2617	Aji Dewi Periwati	IV	Suwito				SDN Sabranglor
16	G.6530917	GOLD	2617	Aji Dewi Periwati	IV	Suwito	3372041303081904	3372044605000003	Mipitan, RT.06/CXIX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
X 17	G.01.043167	GOLD	2810	Alfin Ekananda Sartono S.	VI V	Saptano	3372041304100009	3372042803990003	Sabranglor RT 03/VIII	SDN Sabranglor
X 18	G.01.043180	GOLD	2715	Alvina Dian Cahyaninghyas	II	Sugiyarto				SDN Sabranglor
19	G.4433803	GOLD	2461	Anang Dwi P.	VI	Suparno	33720406091165	3372041805970002	Mertoudan, RT.08/BX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
20	G.01.043120	GOLD	2461	Anang Dwi P.	VI	Suparno				SDN Sabranglor
X 21	G.01.043181	GOLD	2716	Andika Purba Praseliawan	II	Makherun	3372042004090928	3372041004020003	Mertoudan RT 06/IX	SDN Sabranglor
X 22	G.01.043182	GOLD	2717	Andini Dwi Ambarwati	II	Sukardi				SDN Sabranglor
X 23	G.710180 P.0041570	GOLD P	2717	Andini Dwi Ambarwati	II	Sukardi	33720408000000 1705100004	33720443020200006	Sabranglor RT 02/VIII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
X 24	G.01.043116	GOLD	2750	Angger Besta Ramadhani	I	Acuk Setiawan				SDN Sabranglor
X 25	G.01.043183	GOLD	2718	Anggil Sakro Anggoro	II	Rurahman				SDN Sabranglor
26	G.01.043129	GOLD	2508	Anissa Rachim	VI	Nyono				SDN Sabranglor
X 27	G.01.043184	GOLD	2719	Annisa Milmalinah	II	Joko Kukuh	3372041203082068	337204510702001	Mertoudan RT 08/03	SDN Sabranglor
28	G.0000707	GOLD	2508	ANNISA RACHIM	S	NYONO	3372040611000006	3372045903000003	MERTOUAN RT 006 RW 000 Mojowarno, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
X 29	G.01.043144	GOLD	2659	Annisa Yola A	III	Wiyono				SDN Sabranglor
30	G.4035352	GOLD	2388	Ari Setiawan	VI	Supardi	3372041304060004	3372042600060021	Mertoudan, RT.06/BX	SDN Sabranglor Kec. Jebres

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
31	G.0008336	GOLD	2761	ARIEL HAREGUNA RITOSA	I	SANTOSO	3372041103082913	337204260802002	sabrang lor RT 001 RW 008 Mojoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
32	G.01.043117	GOLD	2761	Ariel Hareguna Ritoso	I	Santoso				SDN Sabranglor
33	G.4233147	GOLD	2563	Arif Muhajidin	V	Mulyono	3372041303082773	3372040904990003	Sabranglor RT 02/35	SDN Sabranglor Kec. Jebres
34	G.01.043170	GOLD	2563	Arif Muhajidin	V	Mulyono				SDN Sabranglor
35	G.6822567	GOLD	2618	Arifah Nur Baill D.A	IV	Dalimin	3372041203082076	3372044702900002	Mertoudan, RT 08/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
36	G.01.043112	GOLD	2618	Arifah Nur Baill D.A	IV	Dalimin				SDN Sabranglor
37	G.01.043131	GOLD	2542	Arifin	VI	Wagyo				SDN Sabranglor
38	G.717883	GOLD	2564	Arum Sekar M	V	Tulano M.	3372041103083398	3372045801990022	Kedunglungkul RT 06/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
39	G.01.043171	GOLD	2564	Arum Sekar M	V	Tulano M.				SDN Sabranglor
40	G.0008816	GOLD	2664	ARUM SEKAR MELATI	5	TULANO MARUKI	3372041103083398	3372045801990022	Kedunglungkul RT 005 RW 007 Mojoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
41	G.01.043128	GOLD	2607	Arum Setyowati	VI	Joko Sulistyono				SDN Sabranglor
42	G.01.043185	GOLD	2720	Arya Dwi Pratama	II	Sarwono				SDN Sabranglor
43	G.01.043131	GOLD	2511	Asih Fajarwati	VI	Suraino				SDN Sabranglor
44	G.0008970	GOLD	2585	ATIK LESTARI	5	SUHARNO	3372041103080098	3372046807990022	Kedunglungkul RT 001 RW 007 Mojoongo, Jebres	SD Negeri Sabrang Lor 78 M
45	G.01.043172	GOLD	2585	Atik Lestari	V	Suharno				SDN Sabranglor
46	G.01.043110	GOLD	2616	Auliya Rahmawati	IV	Sri Daryono	3372041203082066	3372044809790004	Mertoudan RT 08/IX	SDN Sabranglor
47	G.0011845	GOLD	2660	AZHAR BIMA ALFAROZI	3	SABAR	115502/03/13374	11.5502.030601.0001	Mertoudan RT 008 RW 009 Mojoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
48	G.01.043131	GOLD	2545	Bagas Arie M.	VI	Suroto				SDN Sabranglor
49	G.6321686	GOLD	2545	Bagas Arie M.	VI	Suroto	3372041303085457	3372041702080023	Sabranglor RT 02/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
50	G.01.043120	GOLD	2721	Bagas Pramono	II	Sahin				SDN Sabranglor
51	G.2129291	GOLD	2721	Bagas Pramono	2	SAMININ	337204280904E+15	337204280904E+15		SDN Sabranglor Kec. Jebres
52	G.01.043145	GOLD	2661	Bagas Putra K	III	Ali Pudiyanto				SDN Sabranglor
53	G.01.043173	GOLD	2566	Bagas Septa B	V	Prasetyo Widodo	3372041103080958	337204109990001	Kedunglungkul RT 002/II	SDN Sabranglor
54	G.01.043188	GOLD	2566	Bagus Cahyo Santoso	VI	Catur Mulyono				SDN Sabranglor
55	G.1210472	GOLD	2560	Bagus Cahyo Santoso	VI	Catur Mulyono	3372040405401	3372041112070003	Mertoudan RT 07/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
56	G.01.043116	GOLD	2621	Bella Prima Santoso	IV	Santoso				SDN Sabranglor
57	G.01.043114	GOLD	2620	Beta Istiqoma	IV	Markuat	3372041004090263	337204110300005	Kedunglungkul RT 05/VI	SDN Sabranglor
58	G.01.043145	GOLD	2536	Camelia Mila Ardana	VI	Maryono				SDN Sabranglor
59	G.5631640	GOLD	2536	Camelia Mila Ardana	VI	SUMARYONO	33720409080897	337204090808003	Mertoudan RT 07/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
60	G.01.043148	GOLD	2763	Chika Maya A.	I	Suharno				SDN Sabranglor

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

	NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
11	X 61	G.01.043174	GOLD	2587	Chynlia Febriana	V	Luhur Budi H.	3372040307744	3372044762990001	Sabranglor Rt 005/VIII	SDN Sabranglor
	62	G.01.043475	GOLD	2569	Dani Subekti	IV	Daliman	—	—	—	SDN Sabranglor
12	63	G.1724885	GOLD	2569	Dani Subekti	5	Daliman	3372041203085696	3372042712980005	Debegan, Rt.002 Rw. 002	SDN Sabranglor Kec. Jebres
	X 64	G.01.043119	GOLD	2764	Danu Tirta Pamungkas	I	Sri Riyadi	—	—	—	SDN Sabranglor
13	X 65	G.01.043176	GOLD	2570	David Angga SY.	V	Samadi Susiana Dwi H	3372041103083219	33720419079900001	Panggung Rejo Rt 03/23	SDN Sabranglor
	X 66	G.01.043116	GOLD	2663	Daa Kurniawati	III	Budi Haranto	—	—	—	SDN Sabranglor
	X 67	G.01.043186	GOLD	2722	Dafann Putra Ramadana	II	Sriyono	—	—	—	SDN Sabranglor
14	X 68	G.01.043177	GOLD	2571	Defby Sagita	V	Gito	3372041103082905	3372045610990007	007 Sabranglor Rt 01/VIII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
	69	G.0043402	GOLD	2571	DEEBY SAGITA	5	GITO	3372041103082905	3372045610990007	Sabrang Lor RT 001 RW 008 Majosongo, Jebres	SDN Sabranglor
	X 70	G.01.043146	GOLD	2664	Della Sandyaning Lintang	III	Nandi	—	—	—	SDN Sabranglor
	X 71	G.01.043110	GOLD	2765	Della Putri Utami	I	Mujiono	—	—	—	SDN Sabranglor Kec. Jebres
	X 72	G.2434837	GOLD	2572	Dena Aknesia P.	V	Joko P.	3372041303087520	3372045009990003	Sabranglor Rt 05/VIII	SDN Sabranglor
15	73	G.01.043178	GOLD	2572	Dena Aknesia P.	V	Joko P.	—	—	—	SDN Sabranglor
16	74	G.01.043187	GOLD	2723	Deva Alinisy Pradita	II	Sutarno	—	—	—	SDN Sabranglor
	X 75	G.01.043113	GOLD	2624	Deva Tri Cornelia	IV	Peino	3372040601182	3372044105000006	Kedunglungkul Rt 01/VII	SDN Sabranglor
	X 76	G.01.043111	GOLD	2766	Devika Walandari	I	Heru Kusmanito	—	—	—	SDN Sabranglor Kec. Jebres
	77	G.4546425	GOLD	2617	Dewi Masitoh	5	Harjo Mulyono	33720407090587	3372046407090002	Sabranglor Rt.02A/III	SDN Sabranglor
	78	G.01.043402	GOLD	2517	Dewi Masitoh	VI	Harjo Mulyono	—	—	—	SDN Sabranglor
	X 79	G.01.043188	GOLD	2724	Dewi Rahmawati Budiono	II	Sugiyono	—	—	—	SDN Sabranglor
	80	G.01.043116	GOLD	2622	Dhewi Putura Nafsintomi	IV	Sarlono	—	—	—	SDN Sabranglor Kec. Jebres
17	81	G.2714288	GOLD	2622	Dhewi Putura Nafsintomi	IV	Sarlono	3372041103087269	3372045208990002	Marboudan, Rt.07/09	SDN Sabranglor
	X 82	G.01.043108	GOLD	2573	Diah Herminawati	IV	H. Yoyok H	—	—	—	SDN Sabranglor Kec. Jebres
	83	G.4625548	GOLD	2573	Diah Herminawati	IV	H. Yoyok H	3372040500880	3372045810990003	Kedunglungkul Rt 01/VII	SDN Sabranglor
	X 84	G.01.043147	GOLD	2665	Diani Ari L.	III	Wibowo Leksono	—	—	—	SDN Sabranglor
	85	G.01.043137	GOLD	2471	Diky Candra P.	VI	Suprayanto	—	—	—	SDN Sabranglor
	86	G.01.043179	GOLD	2574	Dimas Ricky U	V	Sih Mugiono	—	—	—	SDN Sabranglor Kec. Jebres
	X 87	G.819164	GOLD	2574	Dimas Ricky Utomo	V	Sih Mugiono	3372041702050021	3372042605990021	Sabranglutan, Rt.08A/III Rt 01/35	SDN Sabranglor
	88	G.01.043134	GOLD	2510	Dimas Setyawan	VI	Binar	—	—	—	SDN Sabranglor Kec. Jebres
	89	G.6324241	GOLD	2510	Dimas Setyawan	VI	Binar	337204110308270	3372040110070001	Sabranglor Rt.01A/III	SDN Sabranglor
	X 90	G.01.043112	GOLD	2767	Dinda Rahma Juwita	I	Sri Harlanto	—	337204670703001	Ngemplak Rt 02/29	SDN Sabranglor

VERIFIKASI KARTU BPKS

NAMA SEKOLAH: SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
X 91	G.01.043112	GOLD	2633	Doni Setiawan	IV	Sarimin				SDN Sabranglor
92	G.3421114	GOLD	2623	Doni Setiawan	IV	Sarimin	3372041501090001	3372040810990003	Sabranglor, Rt.03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
X 93	G.01.043189	GOLD	2725	Dzulhinanda Bayu Pratama	II	Dwi Toni S				SDN Sabranglor
94	G.01.043103	GOLD	2623	Edi Prasetya	VI	Sakin				SDN Sabranglor
95	G.2420266	GOLD	2623	Edi Prasetya	S	SAMIN	3372041800040004	3372041907070004	KEDUNG TUNGKUL RT 003/007	SDN Sabranglor Kec. Jebres
96	G.2415846	GOLD	2576	Ega Prahendani	V	Parwoto	3372041103084832	3372044307990001	Kedunglungkul, Rt.01/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
97	G.01.043180	GOLD	2576	Ega Prahendani	V	Parwoto				SDN Sabranglor
98	G.3836021	GOLD	2521	Elsa Putri P	VI	Timbul	3372040600430	3372046912970003	Kedunglungkul, Rt.02/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
99	G.01.043136	GOLD	2521	Elsa Putri P	VI	Timbul				SDN Sabranglor
X 100	G.01.043141	GOLD	2808	Elshila Putri Ramadhani	IV	Timo				SDN Sabranglor
X 101	G.01.043148	GOLD	2670	Elyn Tegar Monica	III	Sugiyanto				SDN Sabranglor
102	G.5515631	GOLD	2625	Erika Valentina Febriani	IV	Susanto	3372041103084114	3372045402000003		SDN Sabranglor Kec. Jebres
103	G.01.043147	GOLD	2625	Erika Valentina Febdani	IV	Susanto				SDN Sabranglor
104	G.01.043197	GOLD	2522	Erita Nawan Sari	VI	Endar M				SDN Sabranglor
105	G.742649	GOLD	2522	Erita Nawan Sari	VI	Endar M	3372040804622	337204542970003	Medoulan, Rt.08/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
106	G.2435338	GOLD	2577	Ema Setyawati	V	Supardi	3372041904050004	3372045006990001	Medoulan, Rt.06/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
107	G.01.043181	GOLD	2677	Ema Setyawati	V	Supardi				SDN Sabranglor
108	G.4321978	GOLD	2570	Esty Setyaningsih	VI	Suyanto	3372041103087781	3372046703080002	Sabranglor, Rt.03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
109	G.01.043135	GOLD	2529	Esty Setyaningsih	VI	Suyanto				SDN Sabranglor
X 110	G.01.043149	GOLD	2671	Evane Rechimawati BS	III	Heras Tama P				SDN Sabranglor
X 111	G.5515859	GOLD	2626	Fadhila Nur Rohmah	IV	Joko Wahyudi	3372031103084121	3372044812990001	Kedung Tungkul RT 06/VI	SDN Sabranglor Kec. Jebres
112	G.01.043118	GOLD	2626	Fadhila Nur Rohmah	IV	Joko Wahyudi				SDN Sabranglor
X 113	G.01.043150	GOLD	2672	Fadhillah Nur Khasanah	III	Wahyo				SDN Sabranglor
114	G.6635386	GOLD	2531	Faizul Mu'in A	VI	Samsudin	33720404041478	3372041604080004	Kedunglungkul Rt.03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
115	G.01.043143	GOLD	2531	Faizul Mu'in A	VI	Samsudin				SDN Sabranglor
116	G.01.043168	GOLD	2529	Fajar Wahyudi	V	Daryadi	3372041303085458			SDN Sabranglor
117	G.726899	GOLD	2529	Fajar Wahyudi	V	Daryadi	3372040408346	3372042410980002	Sabranglor Rt.04/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
118	G.01.043139	GOLD	2526	Fajaria Cahyening R	VI	Suradi				SDN Sabranglor
119	G.728614	GOLD	2525	Fajaria Cahyening R	VI	HENDRO P	3372041103087281	3372046704080004	Medoulan, Rt.2/X	SDN Sabranglor Kec. Jebres
120	G.749585	GOLD	2630	Fandi Nur Cahyo	VI	Manjadi	33720404041371	3372044981988663	Sabranglor, Rt.04/VIII	SDN Sabranglor Kec. Jebres

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH: SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
121	G.01.043442	GOLD	2530	Fendi Nur Cahyo	VI	Maryadi				SDN Sabranglor
122	G.01.043420	GOLD	2628	Fani Melinda Sari	IV	Triyono	3372041912100050	3372044805800005		SDN Sabranglor
123	G.0204293	GOLD	2628	Fani Melinda Sari	IV	Triyono	1155020400589	1155024805800002	Kedungtungkul, Rt 03/VII	SDN Sabranglor
124	G.01.043413	GOLD	2768	Faradilla Taffy D.	I	Suroto				SDN Sabranglor
125	G.01.043182	GOLD	2578	Faris Anan Falah, R.	V	Sutrisno	3372041512100132	3372040612980009	Sabranglor Rt 04/08	SDN Sabranglor
126	G.0009812	GOLD	2756	FATCHUR RACHMAD	2	MARMANTO	3372042612080001	3372040203020028	ngorasan RT 001 RW 018 Jebres, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
127	G.01.043422	GOLD	2756	Fathur Rachman	II	Marmanto				SDN Sabranglor
128	G.01.043406	GOLD	2670	Fatihah Wulandari, R.	V	Iswanto	3372042010303081	3372045006990001	Kedung Tungkul Rt 07/VII	SDN Sabranglor
129	G.01.043404	GOLD	2532	Fauzan Ardianto	VI	Joko Riyanto				SDN Sabranglor
130	G.01.043159	GOLD	2689	Febri Pratiwi	III	Hadli Prasetyo				SDN Sabranglor
131	G.01.043444	GOLD	2770	Febri Selyawati	I	Sukardi				SDN Sabranglor
132	G.01.043121	GOLD	2629	Fendi Purboyo	IV	Sukar	3372042812100007	3372042208990005	Sabranglor Rt 05/VII	SDN Sabranglor
133	G.01.043438	GOLD	2524	Feni Purwanti	VI	Sukar				SDN Sabranglor
134	G.01.043446	GOLD	2771	Ferdian Irfan Nur Rizky	I	Joko Mulyono				SDN Sabranglor
135	G.01.043440	GOLD	2756	Ferry Kurniawan	V	Sadminarto	33720410307798	33720410307798		SDN Sabranglor
136	G.01.043446	GOLD	2773	Fitrah Abdi Purnomo	I	Cahyo Purnomo				SDN Sabranglor
137	G.01.043419	GOLD	2527	Fitria Dwi Tiffani	IV	Djaelani				SDN Sabranglor
138	G.01.043444	GOLD	2800	Flodinea Salyani	V	Sadminarto	33720410307798	33720410307798		SDN Sabranglor
139	G.01.043440	GOLD	2526	Francisca Julia K	VI	Zakharis				SDN Sabranglor
140	G.5827425	GOLD	2526	Francisca Julia K	VI	Zakharis	3372041109883388	3372046207980001	Kedungtungkul, Rt 02/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
141	G.4636087	GOLD	2527	Frieta Amin C	6	Wahyo	11550204003448	1155024806980002	Kedungtungkul, Rt 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
142	G.01.043444	GOLD	2527	Frieta Amin C	VI	Wahyo				SDN Sabranglor
143	G.01.043447	GOLD	2675	Genta Apriliani PS P 0008975 R	III	Suharno	3372041103080698	33720415004010001	Kedung Tungkul Rt 01/VII	SDN Sabranglor
144	G.01.043183	GOLD	2582	Gita Dwi Putra A. R	V	Sugiyarto	3372041804000629	3372044603990003	Sabranglor Rt 03/VII	SDN Sabranglor
145	G.01.043423	GOLD	2631	Gojek Galang Prajuang	IV	Sumadi				SDN Sabranglor
146	G.815220	GOLD	2631	Gojek Galang Prajuang	IV	Sumadi	3372040503986	3372040207000010	Kedung Tungkul Rt 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
147	G.3935363	GOLD	2630	Gresella Dinda Exsa Putri	IV	EKO SETIYONO	3372040602680	3372044909990004	Mipilan, Rt 06/RW.29	SDN Sabranglor Kec. Jebres
148	G.01.043422	GOLD	2630	Gresella Dinda Exsa Putri	IV	Eko S				SDN Sabranglor
149	G.01.043198	GOLD	2727	Hana Arzu	II	Mariono				SDN Sabranglor
150	G.01.043447	GOLD	2774	Hermani Dimas P.	I	Suharno				SDN Sabranglor

VERIFIKASI KARTU BPKMS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPKMS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
154	G.0008018	GOLD	2534	HERDARMA WAHYU A	4	MUHAMMAD NAHAR	3372040106050012	337204060600001	SOLO ELOK RT.004 RW.002 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
152	G.01.043144	GOLD	2534	Herdarma Wahyu A	VI	M. Nahanudin				SDN Sabranglor
153	G.01.043181	GOLD	2728	Hidayat Yasi Setiawan	II	Maryadi				SDN Sabranglor
154	G.01.043184	GOLD	2583	Ibnu Muwardi	V	Suwardi				SDN Sabranglor
155	G.3714535	GOLD	2583	Ibnu Muwardi	V	Suwardi	3372041103082226	3372042204990001	Kedunglungkul, RT.07/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
156	G.01.043144	GOLD	2632	Ida Safitri	IV	Ratno				SDN Sabranglor
157	G.4521724	GOLD	2622	Ida Safitri	4	Ratno	3372041103085220	3372045701000002	Merludan, RI.03/03	SDN Sabranglor Kec. Jebres
158	G.01.043154	GOLD	2678	Ikhsanli Furi P.	III	Slamei	3372041103082225	3372045710000003	Kedunglungkul RT.07/07	SDN Sabranglor
159	G.01.043182	GOLD	2720	Imam Nofian Utomo	II	Dacile				SDN Sabranglor
160	G.01.043105	GOLD	2615	Imam Siswo P.	V	Hardi				SDN Sabranglor
161	G.0011299	GOLD	2615	IMAM SISWO. P	5	HARDI	3372041403081578	3372042701990006	Debegan RT 003 RW 006 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
162	G.01.043152	GOLD	2679	Ina Corolla Silvi	III	Catur Mulyono				SDN Sabranglor
163	G.01.043148	GOLD	2776	Inka Widiarsi	I	Didik Sugiyarto				SDN Sabranglor
164	G.01.043140	GOLD	2776	Intan Ayu K.	I	Silvanus Eko W.				SDN Sabranglor
165	G.x22890	GOLD	2633	Intan Safitri	IV	Siswanto	3372042004160002	3372045201000021	Merludan, RI.08/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
166	G.01.043124	GOLD	2633	Intan Safitri	IV	Siswanto				SDN Sabranglor
167	G.01.043107	GOLD	2584	Intan Wisma Sari	V	Waluyo	3372040410100003			SDN Sabranglor
168	G.818797	GOLD	2584	Intan Wisma Sari	V	Waluyo	3372040315075	3372044101990007	Merludan RI.06/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
169	G.01.043193	GOLD	2730	Iisna Salsabila	II	Jumadi	337204031100047	3372045711010004	Kedunglungkul RT.03/VII	SDN Sabranglor
170	G.01.043185	GOLD	2585	Jovanka Addin P.A.	V	Sunarto	3372041103086959	3372040402000026	Peran Plara Ardi Blok B 8	SDN Sabranglor
171	G.01.043146	GOLD	2537	Kana Muhammad Rizal	VI	Karyadi				SDN Sabranglor
172	G.0011111	GOLD	2537	KANA MUHAMMAD RIZAL	6	KARYADI	3372040313428	3372044214070003	Sabranglor RT.005 RW.008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
173	G.4731088	GOLD	2537	Kana Muhammad Rizal		Karyadi	3372040313428	337204421407E+15		SDN Sabranglor Kec. Jebres
174	G.01.043127	GOLD	2638	Kanchi Piecastro Rumagil	IV	Hani Jemmy R.				SDN Sabranglor
175	G.3325046	GOLD	2638	Kanchi Piecastro Rumagil	IV	Hani Jemmy R.	3372040312373	3372040603000001	Kedunglungkul RI.03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
176	G.01.043130	GOLD PLATINUM	2778	Khoirudin Muhammad Saleh	I	Tiyanto	3372041103086951	3372041809020001	Kedunglungkul RT.02/07	SDN Sabranglor
177	G.01.043148	GOLD	2680	Khensa Genita R.	III	Sandi				SDN Sabranglor
178	G.0007755	GOLD	2636	KHURIN AULIYA	4	PARNO	3372041704090439	3372045502000002	Kedunglungkul RT.006 RW.007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
179	G.01.043125	GOLD	2636	Khurin Auliyah	IV	Parno				SDN Sabranglor
180	G.01.043166	GOLD	2686	Kemellius M.	V	Joko Widi S.				SDN Sabranglor

NA	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGTOR 76 SURABAKARTA

VERIFIKASI KARTU BPKMS

NO.	NO BPKMS	JN KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
241	G.01.043195	GOLD	2598	Pelra Ad P.	V	Subagyo				SDN Sabrangtor
242	G.01.043195	GOLD	2598	Pelra Ad P.	S	Subagyo	3372040300071	3372040205990011	Merindan, Rt.07IX	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
243	G.01.043195	GOLD	2792	Puri-Mahira-L.	I	Subdyono				SDN Sabrangtor
244	G.01.043195	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
245	G.01.043197	GOLD	2736	Rai Dyah Ayu Kusumawati	II	R.M Bambang S				SDN Sabrangtor
246	G.01.043197	GOLD	2690	Ramadhan Eka P.	III	Joko Susanto				SDN Sabrangtor
247	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
248	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
249	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
250	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
251	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
252	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
253	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
254	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
255	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
256	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
257	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
258	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
259	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
260	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
261	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
262	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
263	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
264	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
265	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
266	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
267	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
268	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
269	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor
270	G.01.043197	GOLD	2648	Rahayu Kusuma Putri	IV	Bayu Suryo P				SDN Sabrangtor

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
271	G.01.043169	GOLD	2550	SadhaYusnun	V	Wahono				SDN Sabranglor
272	G.3428805	GOLD	2550	SadhaYusnun	V	Wahono	3372042710040004	3372041304980001	Debegan Rt 01/VI	SDN Sabranglor Kec. Jebres
273	G.01.043196	GOLD	2601	Saleh Wahyu Cahyono	V	S. Triyanto				SDN Sabranglor
274	G.3416818	GOLD	2602	Samuel Maho	V	Ramy Sanjaya	3372040801529	3372041504990004	Kedungtungkul Rt.03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
275	G.01.043197	GOLD	2602	Samuel Maho	V	Ramy Sanjaya				SDN Sabranglor
276	G.01.043109	GOLD	2603	Sarda Ade Pradana	IV	Sri Hartanto				SDN Sabranglor
277	G.2015461	GOLD	2604	Sasa Faulina	V	Sri Hartanto	3372041103080064	3372044309980002	Kedungtungkul, Rt.01/VI	SDN Sabranglor
278	G.01.043108	GOLD	2604	Sasa Faulina	V	Sri Hartanto				SDN Sabranglor
279	G.0009918	GOLD	2650	SATRIO ADI DHARMA	IV	TULARNO	3372041103083398	3372042307000004	Kedung Tungkul RT.006 RW.002 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
280	G.717890	GOLD	2650	Satrio Adi Dharma	IV	Tularno	3372041103083398	3372042607000001	Kedungtungkul, Rt.06	SDN Sabranglor Kec. Jebres
281	G.01.043136	GOLD	2650	Satrio Adi Dharma	IV	Tularno				SDN Sabranglor
282	G.0013643	GOLD	2197	SEPTIAN RIZQI DARMAWAN P. 0041791	3	SUDARNO	3372041203086921	3372040409010024	Kedung Tungkul RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
283	G.01.043167	GOLD	2699	Seriko Pipit JN P. 0041605	III	Sri Riyadi	3372041804090641	3372044606010002	2 Sabranglor RT 003 / RW 008	SDN Sabranglor
284	G.01.043181	GOLD	2741	Selo Kurniawan Prayitno P. 0041581	II	Didik MelP	3372042004090148	3372041702020004	4 Sabranglor Kulon RT 001 / RW 005	SDN Sabranglor
285	G.01.043141	GOLD	2797	Shedy Aprilia	I	Suyanto				SDN Sabranglor
286	G.01.043142	GOLD	2798	Silvia Dewi A.	I	Widarno				SDN Sabranglor
287	G.01.043143	GOLD	2799	Siska Ariani	I	Sugimin				SDN Sabranglor
288	G.01.043158	GOLD	2549	Siska Kusuma W	VI	Agus.P				SDN Sabranglor
289	G.6012080	GOLD	2549	Siska Kusuma W	VI	Agus.P	3372040904050808	3372044511970001	Kedungtungkul	SDN Sabranglor Kec. Jebres
290	G.01.043113	GOLD	2813	Sofia Istiqomah P. 0041500	II	Irawati	3372041210040014	3372045909020021	21 Sabranglor RT 002 / RW 008	SDN Sabranglor
291	G.01.043168	GOLD	2700	Sri Purwati P. 0041606	III	Suwanlo	3309061807070000	8/33090666503	610001 Karangandong 04/01	SDN Sabranglor
292	G.01.043144	GOLD	2800	Stanislaus Dharu K P. 0041563	I	A.B Budi H				SDN Sabranglor
293	G.01.043160	GOLD	2701	Tabita Putri Natalia P. 0000006	III	Slamet Eko H.	3372052210090005	3372054912000005	Kestalan RT 002 / RW 003	SDN Sabranglor
294	G.01.043137	GOLD	2651	Taufiq Burhanudin	IV	Djumedi				SDN Sabranglor
295	G.01.043138	GOLD	2652	Taufiq Iskandar	IV	Serjono				SDN Sabranglor
296	G.01.043102	GOLD	2742	Tegar Dhanuri Putra P. 0041582	II	Rakimin	33720405020957	3372043101020001	Mipitan RT 003 / RW 029	SDN Sabranglor
297	G.01.043145	GOLD	2801	Tranda Putri D.	I	Budi Priyono				SDN Sabranglor
298	G.01.043103	GOLD	2743	Tri Agustina P. 4521733	II	Ratno	3372041103085220	3372045208020002	2 Mertoudan RT 003 / RW 009	SDN Sabranglor
299	G.01.043170	GOLD	2703	Tri Wahyu Wulandari P. 5317499	III	Mulud	3372041103080011	3372047108010007	Mertoudan RT 008 / RW 009	SDN Sabranglor
300	G.01.043146	GOLD	2802	Tri Rumanan	I	Hadi Prasetyo				SDN Sabranglor

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
301	G.01.043171	GOLD	2704	Trisnandaru DP	III	Ngadiman				SDN Sabranglor
302	G.01.043101	GOLD	2744	Uci Khoyrotun Nafsintomi P 5614311	II	Sartono	3372041103087269	33720406100000	3 Merduwan RT 007 / RW 003	SDN Sabranglor
303	G.01.043160	GOLD	2553	Uki Listia Saputri	VI	Tukino				SDN Sabranglor
304	G.423016	GOLD	2553	Uki Listia Saputri	VI	Tukino	3372040307743	3372045205980001	Merduwan, RT 008 / RW 003	SDN Sabranglor Kec. Jebres
305	G.6322606	GOLD	2552	Ummi Salamah	VI	Sadi	3372040500224	3372046907980002	Sabranglor, RT 06 / VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
306	G.01.043158	GOLD	2552	Ummi Salamah	VI	Sadi				SDN Sabranglor
307	G.01.043190	GOLD	2605	Ummu Salamah	V	Sureso				SDN Sabranglor
308	G.4614553	GOLD	2605	Ummu Salamah	V	Suroso	3372041111040013	3372046506990002	Merduwan RT 06 / IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
309	G.01.043147	GOLD	2803	Viky Prasetyo W	I	Sarno				SDN Sabranglor
310	G.01.043106	GOLD	2745	Vima Dwi Meisya P 0022475	II	Sunarimo	3372041804090550	33720450050000	Tambara Selatan RT 004 / RW 002	SDN Sabranglor
311	G.01.043106	GOLD	2746	Viviana Ade Purwanita P 0041533	II	Djoko Purwanita	3372041203085061	33720453090000	4 Perengin RT 002 / RW 002	SDN Sabranglor
312	G.01.043107	GOLD	2747	Wahyu Galuh Pramesti P 0041584	II	Suhardono	3372041510040050	3372045201020000	Sabranglor RT 007 / RW 003	SDN Sabranglor
313	G.01.043108	GOLD	2748	Wahyu Kusnawati P. 0008710	II	Samingun	3372040407000001	3372044505020001	1 Ngemplik RT 002 / RW 003	SDN Sabranglor
314	G.01.043100	GOLD	2606	Wahyu Novika A.	V	Agus Purwanita	3372041103082152	337204631198000		SDN Sabranglor
315	G.01.043161	GOLD	2554	Warik Cahyo Gumilar	VI	Ramelan				SDN Sabranglor
316	G.3820760	GOLD	2554	Warik Cahyo Gumilar	VI	Ramelan	1155020400083	1155022100070003	Kedungtungkul RT 03 / VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
317	G.01.043121	GOLD	2749	Widi Gilang Harbiono P. 3331095	II	Rudi Suhariyono				SDN Sabranglor
318	G.6635388	GOLD	2750	Wulida Rayhani P. 0041505	VI	Sameudin	3372040401178409 810001	3372041604000115 3372040604000200	Kedungtungkul RT 03 / RW 007	SDN Sabranglor Kec. Jebres
319	G.01.043100	GOLD	2750	Wulida Rayhani	VI	Sameudin				SDN Sabranglor
320	G.01.043140	GOLD	2654	Yanuar Bintang Pramana	IV	Sri Widodo				SDN Sabranglor
321	G.726428	GOLD	2654	Yanuar Bintang Pramana	IV	Sri Widodo	3372040209080014	3372041501000004	Merduwan, RT 06 / VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
322	G.01.043101	GOLD	2607	Yoga Pralana	V	Gunawan				SDN Sabranglor
323	G.01.043148	GOLD	2804	Yoga Septiawan P.	I	Miswanto	3372042603050020	3372040809002001	Merduwan RT 08 / IX	SDN Sabranglor
324	G.2415831	GOLD	2751	Yola Amanda		Suprpto	3372040500313	33720400302015		SDN Sabranglor Kec. Jebres
325	G.01.043110	GOLD	2751	Yola Amanda P. 0041509	II	Suprpto	3372041103080089	337204003020002	2 Kedungtungkul RT 001 / RW 007	SDN Sabranglor
326	G.5517082	GOLD	2706	Yoe Hatori Dava		Suyelo	3372040314206	3372042012000002	Sabranglor RT 03 / VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
327	G.01.043172	GOLD	2706	Yoe Hatori Dava	III	Suyelo				SDN Sabranglor
328	G.3833000	GOLD	2558	Yudhaetian R	VI	Subagyo	3372040400002	33720411041000001		SDN Sabranglor Kec. Jebres
329	G.01.043105	GOLD	2558	Yudhaetian R	VI	Subagyo				SDN Sabranglor
330	G.0006264	GOLD	260	YUDHISTIRA ERLANGGA DEWA	S	GUNARTO	3372040602006	3372040605000003	SABRANGLOR RT 05 RW 008 Mojopangreh, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres

VERIFIKASI KARTU BPKMS

NAMA SEKOLAH: SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPKMS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
331	G.01.043165	GOLD	2559	Yudhielira Erlangga Dewa	VI	Sumarto				SDN Sabranglor
332	G.0009626	GOLD	2607	YUGA PRATAMA	5	GUNAWAN	3372041303087509	3372041001990001	Sabrang Lor RT 005 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
333	G.01.043162	GOLD	2555	Yulia Mandasari	VI	Sarbini				SDN Sabranglor
334	G.1111704	GOLD	2555	Yulia Mandasari	VI	Sarbini	1155020404424	1155026807980004		SDN Sabranglor Kec. Jebres
335	G.01.043102	GOLD	2608	Yulia Tri Nuraini	V	Sukardi				SDN Sabranglor
336	G.1032556	GOLD	2608	Yulia Tri Nuraini	V	Sukardi	3372041155020307472	1155024307990003	Debegan RT 001/006	SDN Sabranglor Kec. Jebres
337	G.01.043164	GOLD	2557	Yuniar Ayu P	VI	Sarjono	3372041103087495	3372045906980004		SDN Sabranglor
338	G.5826778	GOLD	2557	Yuniar Ayu P	VI	Sarjono				SDN Sabranglor Kec. Jebres
339	G.01.043163	GOLD	2556	Yunita Anggara S	VI	Riplo				SDN Sabranglor
340	G.4322488	GOLD	2609	Yunita Sari	V	Sutimin	3372041103087783	3372046904990003	Sabrangkulon RT 03/35	SDN Sabranglor Kec. Jebres
341	G.01.043103	GOLD	2609	Yunita Sari	V	Sutimin				SDN Sabranglor
342	G.934887	GOLD	2653	Yustina Cahyaningtyas	IV	Kamlo	3372041103087460	3372046110990004	Kedungtungkul, RT.03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
343	G.01.043138	GOLD	2653	Yustina Cahyaningtyas	IV	Kamlo				SDN Sabranglor
344	G.01.043104	GOLD	2610	Yusuf Bachtiar	V	Kadar				SDN Sabranglor
345	G.4830931	GOLD	2610	Yusuf Bachtiar	V	Kadar	3372041303081899	3372041410980002	Mipitan RT 06/29	SDN Sabranglor Kec. Jebres
346	G.01.043173	GOLD	2707	Yuyun Nita Sari	III	Suginin				SDN Sabranglor
347	G.01.043108	GOLD	2611	Zaelani Dwi P.	V	Sukiran				SDN Sabranglor
348	G.1323921	GOLD	2611	Zaelani Dwi P.	V	Sukiran	3372041155020404046	1155021505990004		SDN Sabranglor Kec. Jebres
349	G.520219	GOLD	2708	Zaini Azhar Maulana		Dwi Suranto	337204110308114E-15	337204203000002E-15		SDN Sabranglor Kec. Jebres
350	G.01.043174	GOLD	2708	Zaini Azhar Maulana	III	Dwi Suranto				SDN Sabranglor
351	G.01.043149	GOLD	2805	Zakky Afwan	I	Djoko Harjono				SDN Sabranglor
352	G.01.043150	GOLD	2805	Zilfah Murchaliza	I	Supardi				SDN Sabranglor
353	P.0010706	PLATINUM	2589	ADELIA BELA PRATAMA	6	BARVOKO	33720412030803017	3372045902080003	KEDUNG TUNGKUL RT 005 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
354	P.0007156	PLATINUM	2711	ADI TRI NURCAHYONO	2	PARJO	33720412030806045	3372042308010003	MIPITAN RT 003 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
355	P.0015257	PLATINUM	2814	ADIET PEBRI PAMUNGKAS	1	SUNARNO	33720427030900017	3372042802040004	sabrang kulon RT 003 RW 035 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
356	P.0015360	PLATINUM	2815	ADIRA YULIYANTO	1	MACHININ MACHINEN	33720429010500013	3372040307040022	Kedungtungkul RT 007 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
357	P.935499	PLATINUM	2712	Aditya Candra Nugroho	II	Joko Sudarmono	33720403114244-11	3372041606020001	Sabranglor RT 01/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
358	P.5817997	PLATINUM	2757	Aditya Dwi Saputra	I	Mat Nanang	33720404080900012	3372042809030003	Kedunglungkul RT 06/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
359	P.5518242	PLATINUM	2657	Adrian Aji N	III	Tri Agus Wiyono	3372040309043	3372041304010003	Mentoculan RT006/RW 009	SDN Sabranglor Kec. Jebres
360	P.1537259	PLATINUM	2758	Aliif Zona Tori	I	Joko Sutopo	337202904090120	3372054104030004	Giya Tiara Ardi Blok FG	SDN Sabranglor Kec. Jebres

RT 01/35

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
361	P.0015315	PLATINUM	2816	AFRA FADEA HAMIDAH	1	IRAWAN	3372041103086352	3372044902040002	mojosongo RT 004 RW 009 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
362	P.0015294	PLATINUM	2817	AGE FRANTITO KRISMUNANTO	1	HARDONO ARMUNANTO	337204110302176	3372042808040001	sabrang lor RT 002 RW 008 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
363	P.0014688	PLATINUM	2713	AJENG CAHYANINGRUM	2	SIGIT WIDI H.	3372041103084190	3372045711010003	Kedung Tungkul RT 001 RW 007 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
364	P.3710466	PLATINUM	2714	Ajang Kharisma Ayu Ajitama	II	Darwaji	3372041203085678	3372046607020003	Dehagan RI 02/02	SDN Sabranglor Kec. Jebres
365	P.0015361	PLATINUM	2818	ALDAD WAHYUDHA ALI	1	UCU WAHYUDIN	3372041604090025	3372040705030002	sabrang lor RT 007 RW 008 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
366	P.6216907	PLATINUM	-	ALDI PRASETYO	1	SUROTO	3372040603000025	3372040603000025	SABRANG KULON RT 001/035	SDN Sabranglor Kec. Jebres
367	P.0015379	PLATINUM	2819	ALFENDI WAHYU BUDI LAKSANA	1	SUJIMIN	3372040801050015	3372042007040005	kedung lungkul RT 007 RW 007 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
368	P.0009967	PLATINUM	2810	ALFIN EKANANDA SARTONO	5	SAPTONO	3372041304100009	3372042803990003	Sabrang Lor RT 003 RW 008 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
369	P.1326691	PLATINUM	2715	Alvina Dian Cahyaningtyas	2	Sugiyanto	3372042107050015	3372045509010021	Kedung Tungkul RT 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
370	P.0015356	PLATINUM	2820	ALYA SHALMA FEBRIANA	1	AGUS WIYONO	3372040209040001	3372046402040001	KEDUNG TUNGKUL RT 001 RW 007 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
371	P.0001059	PLATINUM	2716	ANDIKA PURBA PRASETIWAN	2	MAKHERUN	3372040389359	337204100402884	meritoudan RT 006 RW 009 Mojosongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
372	P.0010558	PLATINUM	2760	ANGGER RESTA RAMADHANI	1	ACUK SETIAWAN	3372041303084570	3372042411020002	sabrang lor RT 004 RW 008 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
373	P.0015252	PLATINUM	2821	ANGGIA ARIYANI	1	MARSONO	3372041403081564	3372044402040004	dehagan RT 003 RW 006 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
374	P.3923469	PLATINUM	2718	Anggit Satrio Anggoro	II	Purahman	3372040389359	337204060901888	Kedunglungkul RT 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
375	P.0009375	PLATINUM	2719	ANNISA MUTMAINAH	2	JOKO KUKUH	3372041203082068	3372045407020001	MERTOUDAN RT 006 RW 009 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
376	P.0003315	PLATINUM	2659	ANNISA YOFI APRILLIANA	3	WIYONO	3372040314662	3372044504010002	ngemplak RT 005 RW 029 Mojosongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
377	P.0015301	PLATINUM	2822	ARNETTA REGI-NUGRAINI	1	EKO SANTOSO	3372041303081912	3372045511030003	MIPITAN RT 006 RW 029 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
378	P.5822054	PLATINUM	2720	Arya Dwi Pratama	II	Sarwono	3372040310504	3372042306020006	Sabranglor RI 02/VIII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
379	P.0015292	PLATINUM	2823	ARYANTA WICAKSANA	1	EKO NUGROHO	115502/04/01441	11.5502.230104.0001	kedunglungkul RT 003 RW 007 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
380	P.0015349	PLATINUM	2824	AYU MUTIARA ZAHRA	1	SARDI	3372041510040022	3372045905040001	meritoudan RT 006 RW 009 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
381	P.0015294	PLATINUM	2721	Bagas Pramono	2	SAMIN	3372042809040004	3372042809010001	KEDUNG TUNGKUL, RT. 003/007	SDN Sabranglor Kec. Jebres
382	P.0015332	PLATINUM	2661	Bagas Putra K.	III	Ali Pudiyanto	3372041805090002	3372041904010006	Sabranglor RI 01/VIII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
383	P.0004864	PLATINUM	2620	BETA ISTIQOMA	4	MARKUAT	3372041804090263	3372044103000005	KEDUNG TUNGKUL RT 005 RW 007 Mojosongo, Jebres, Si	SDN Sabranglor Kec. Jebres
384	P.0008965	PLATINUM	2763	CHIKA MAYA ARISTA	1	SUHARNO	3372041103080098	3372044801030043	Kedunglungkul RT 001 RW 007 Mojosongo, Jebres	SD Negeri Sabrang Lor 78 Mojosong
385	P.3421123	PLATINUM	2764	Danu Tirta Pamungkas	1	Sri Riyadi	3372040504990	3372040903030003	Sabranglor RI 02/VIII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
386	P.0003370	PLATINUM	2570	DAVID ANGGA YULIANTO	5	SAMADI	3372041103083219	3372041907990001	Panggung rejo RT 003 RW 023 Jebres, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
387	P.0015294	PLATINUM	2663	Dea Kurniawati	III	Budi Hartanto	3372041103082699	3372045302010001	Sabranglor Rt 02/08	SDN Sabranglor Kec. Jebres
388	P.0015332	PLATINUM	2825	DEA NURINA YESSA SOFIANA	1	HARIYANTO	3372040508090011	3372045309030003	ngemplak RT 001 RW 029 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
389	P.0015332	PLATINUM	2722	DEFANO PUTRA RAMADANA	2	SRIYONO	3372041103082912	3372040112040001	Sabrang Lor RT 001 RW 008 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
390	P.0009288	PLATINUM	2664	DEFTA SANDIANING LINTANG	3	NARDI	3372041203082052	3372045705010001	meritoudan RT 008 RW 009 Mojosongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres

VERIFIKASI KARTU BPKMS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANG LOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPKMS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
391	P.3335420	PLATINUM	2765	Della Putri Utami	I	Mujiono	3372041303081967	3372046312020002	Sabranglor RT 02/35	SDN Sabranglor Kec. Jebres
392	P.0004500	PLATINUM	2624	DEVA TRI CORNELIA	4	PAINO JOHAN	3372040601182	3372044105000006	KEDUNG TUNGKUL RT 001 RW 007 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
393	P.5631590	PLATINUM	2766	Devika Wulandari	I	Heru Kusmanito	3372040301315	3372045701030001	Debegan RT 02/VI	SDN Sabranglor Kec. Jebres
394	P.0015266	PLATINUM	2826	DEWI MAHANANI WAHYUNINGTYAS	1	SIH MUGIONO	3372041702050021	3372046612030001	sabrang lor RT 001 RW 035 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
395	P.726968	PLATINUM	2724	Dewi Rahmawati Budiono	2	Sugiyono	3372041103082742	3372045940010001	Ngemplak RT 02/29	SDN Sabranglor Kec. Jebres
396	P.2731701	PLATINUM	2666	Diani Atri L.	III	Wibowo Leksono	3372041103082243	3372044509000001	Kedung Tungkul RT 07/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
397	P.0066810	PLATINUM	2471	DIKY GAMBRA PRAKOSO	6	SUPRIYANTO	3372041108040013	3372040912060001	SABRANG LOR RT 002 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
398	P.0015324	PLATINUM	2827	DINDA AISYIYAH	1	TUGIMIN	3372041303085610	3372045211030001	ngemplak RT 001 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
399	P.0009440	PLATINUM	2767	DINDA RAHMA JUWITA	1	SRI HARTANTO	3372040503844	3372046707030001	Ngemplak RT 002 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
400	P.02.26256	PLATINUM	2828	DOMINITIUS GALANG DWI P	I	T Varida Koni Tri P	3372041604090006	3372040910040002	Debegan RT 02/02	SD Sabrang Lor
401	P.0016162	PLATINUM	2829	DZULFANICKO DWI RIZKI	1	DWI TONI S	3372041103087514	3372042901040004	Kedung tungkul RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
402	P.4718549	PLATINUM	2725	Dzulkhinanda Bayu Pratama	II	Dwi Toni S	3372041103087514	3372040902020002	Kedungtungkul RT 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
403	P.0003474	PLATINUM	2808	ELSITA PUTRI RAMADHANI	4	TRIMO	3372041203085576	3372046212990001	debegan RT 004 RW 002 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
404	P.0003768	PLATINUM	2670	ELYN TEGAR MONICA	3	SUGIANTO	3372041303086557	3372044412000003	debegan RT 004 RW 002 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
405	P.3814347	PLATINUM	2671	Evana Rochmawati BS	III	Horas Tama P	3372040602572	3372044412000003	Sabranglor RT 01/35	SDN Sabranglor Kec. Jebres
406	P.3214367	PLATINUM	2672	FADHILAH NUR KHASANAH	3	WALUYO	3372040304217	3372044101010001	MERTOUDAN RT 006/009	SD N SABRANG LOR
407	P.0015282	PLATINUM	2830	FADIAH NURJANAH	1	WIDADI	3372042104090376	3372046705040002	sabrang lor RT 001 RW 035 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
408	P.0015336	PLATINUM	2831	FAHRA GIZCA PUTRI	1	HENDRA PURNOMO	3372041103087281	3372044111030003	mertoudan RT 002 RW 009 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
409	P.5619587	PLATINUM	2769	Faradilla Taffy D.	I	Suroto	11552010201009	11.5502.451002.0002	Ngemplak RT 01/28	SDN Sabranglor Kec. Jebres
410	P.0003241	PLATINUM	2579	FATIKAH WULANDARI	5	ISWANTO	3372040308081	3372045006990001	Kedung tungkul RT 007 RW 007 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
411	P.9062962	PLATINUM	227	FAUZAN ARDIYANTO	6	JOKO RIYANTO	3372041103087458	3372092812070002	Kedung tungkul RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
412	P.0015251	PLATINUM	2832	FEBI RAHMAWATI NURHANA	1	SUKIDI	3372041303081916	3372044103040002	mipilan RT 006 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
413	P.4619645	PLATINUM	2770	Febri Setyawati	I	Sukardi	3372040504514	3372045702030003	Ngemplak RT 02/29	SDN Sabranglor Kec. Jebres
414	P.0005595	PLATINUM	2771	FERDIAN IRFAN RIZKY	1	JOKO MULYONO	3372040304289	3372040704030004	mertoudan RT 008 RW 009 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
415	P.0010563	PLATINUM	2756	FERRY KURNIAWAN	5	SADMINARTO	3372040307998	3372040603990001	sabrang lor RT 004 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
416	P.0015357	PLATINUM	2833	FITA FIONANDA	1	SURIPTO	3372040210090009	3372047110030007	debegan RT 002 RW 006 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
417	P.3814781	PLATINUM	2773	Fitrah Abdi Purnomo	I	Cahyo Purnomo	3372041810040101	3372041011020001	Ngemplak RT 02/29	SDN Sabranglor Kec. Jebres
418	P.0009922	PLATINUM	2627	FITRIA DWI TIFFANI	4	JAELANI	3372040502030	3372044901000001	mertoudan RT 007 RW 009 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
419	P.0010561	PLATINUM	2809	FLADINSA SATYANI	5	SADMINARTO	3372040307998	3372045612870004	sabrang lor RT 004 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
420	P.0008975	PLATINUM	2675	GENTA APRILIANI PUSPITASARI	3	SUHARNO	3372041103080088	3372045004010001	Kedungtungkul RT 001 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SD Negeri Sabrang Lor 78 Mojoso

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
421	P.0015262	PLATINUM	2834	GERI CANDRA SAPUTRA	I	MULYONO	3372041103080088	3372042808040002	Kedung Tungkul RT 001 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
422	P.02.26025	PLATINUM	2835	GESTI PUTRI WAHYUDI	I	Tenirem Wahyudi	3372041103082918	3372046303040008	Sabranglor Rt 01/VII	SD Sabrang Lor
423	P.0015362	PLATINUM	2836	HANA AIDAH	I	SUROTO	3372042710040002	3372046206040003	sabrang lor RT 007 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
424	P.3740679	PLATINUM	2727	Hana Arzli	II	Basuki	3372041103080087	3372044503020003	Kedungtungkul Rt D1/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
425	P.0006847	PLATINUM	2774	HARMANI DIMAS PRANOTO	I	SUHARNO	3372040313649	3372041912020002	NGEMPLAK RT 001 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
426	P.3815063	PLATINUM	2728	Hidayat Yasi Seliawan	II	Maryadi	33720409-5050009	3372040507020001	Ngemplak Rt 02/29	SDN Sabranglor Kec. Jebres
427	P.3833893	PLATINUM	2729	Imam Nofian Utomo	II	Dasilo	3372040505008	3372041111010006	Kedungtungkul Rt 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
428	P.2414232	PLATINUM	2679	Ina Corolla Silvi	III	Catur Mulyono	3372041103080088	3372046904010002	Merloutan RT 02/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
429	P.0015508	PLATINUM	2837	INDRA WICAKSANA	I	LUHUR BUDI HARJO	3372040307744	3372042312030006	sabrang lor RT 005 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
430	P.0012753	PLATINUM	2775	INKA WIDIARSI	2	DIDIK SUGIYARTO	3372041103082723	3372045202030004	Sabrang lor RT 006 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor
431	P.0015337	PLATINUM	2838	INNAZATUR ROFIAH	I	SALAMIN WITOWIYONO	3372041203086538	3372046211030001	merloutan RT 007 RW 009 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
432	P.0005577	PLATINUM	2776	INTAN AYU KUSUMAWATI	I	SILVANUS EKO W	3372041103085631	3372044505030002	mojosongo RT 004 RW 009 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
433	P.0003263	PLATINUM	2730	ITSNA SALSABILA	2	JUMADI	3372040500094	3372045711010002	Kedung tungkul RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres, Surakar	SDN Sabranglor Kec. Jebres
434	P.0015263	PLATINUM	2839	JOVAN SYAILENDRA	I	WIYARJO	3372041103083211	3372041612030001	mipitan RT 003 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
435	P.0015314	PLATINUM	2840	KEVIN MUHAMMAD APRILIA	I	SRIYONO	3372041303087517	3372042904040006	sabrang lor RT 005 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
436	P.0007399	PLATINUM	2778	KHOIRUDIN MUHAMMAD SHOLEH	I	TRIYANTO	3372041103080951	3372041809020001	KEDUNG TUNGKUL RT 002 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
437	P.0015386	PLATINUM	2841	KHOIRUL ANWAR FADILLAH	I	ARIS SUTARJO	3372040600972	3372040610030002	sabrang lor RT 005 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
438	P.0009838	PLATINUM	2680	KHONSA GONITA RAMADANI	3	SARDI	3372041510040022	3372041912000001	Merloutan RT 008 RW 008 Jebres, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
439	P.0005555	PLATINUM	2637	KURNIAWAN NUR PRASETYA	4	SURATMI	3372040305761	3372041111990003	merloutan RT 007 RW 008 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
440	P.0009957	PLATINUM	2752	LAKSAMANA SEPTIAN. C.S	3	DJOKO SUSILO	3372042303090011	3372040708010001	Sabrang Lor RT 002 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
441	P.0015557	PLATINUM	2842	LATIFAH NURI ANGGRAHINI	I	SUPARJO	3372040400405	3372046912030001	sabrang lor RT 005 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
442	P.0015258	PLATINUM	2843	LINGGA ASHARRIDHO ARWIE	I	ARI KUSWORO	3372041404050002	3372042212030001	ngemplak RT 002 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
443	P.0015305	PLATINUM	2844	LOCITA NARADIPA ANGGRI	I	NAGIL SRI WIDODO	3372040504377	3372046008040001	debegan RT 002 RW 006 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
444	P.0015447	PLATINUM	2780	Maulidia Muttahana P	I	Ibnu Musa	33720404040270	3372044505030001	Kedungtungkul Rt 06/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
445	P.3710476	PLATINUM	2732	Maya Anggraeni Kusuma W	II	Paryanto	3372042806050002	3372046005020001	Ngemplak Sultan Rt 04/29	SDN Sabranglor Kec. Jebres
446	P.0015366	PLATINUM	2845	MERY HAPSARI	I	MARYADI	3372041510040033	3372045503040001	sabrang lor RT 003 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
447	P.0009444	PLATINUM	2682	MEYLAWATI DORA. K	3	WIDODO	3372043101050008	3372046805010001	Ngemplak RT 005 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
448	P.0015395	PLATINUM	2846	MUH IHSAN SAJID SAPUTRA	I	JOKO SANTOSO	3372051203087983	3372052101040005	bitis kulon RT 001 RW 007 Gilingan, Banjarsari	SDN Sabranglor Kec. Jebres
449	P.0015302	PLATINUM	2847	MUH NURROCHIM	I	SUTATAK	3372041103080054	3372040305040002	KEDUNG TUNGKUL RT 001 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
450	P.0015753	PLATINUM	2848	MUH THOMAS TOMY PUTRA	I	MUH TATO DWI PUTRA	3372051303081895	3372052602040005	tejasari RT 004 RW 013 Gilingan, Banjarsari	SDN Sabranglor Kec. Jebres

VERIFIKASI KARTU BPKMS

NAMA SEKOLAH: SDN SABRANGTOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPKMS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
451	P.0008226 0241556	PLATINUM	2784	Muh. Rizal Saputra	1	Yono	3372040313052	3372040707020002	Sabrangtor Rt 02/VIII	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
452	P.0008226 0241556	PLATINUM	2733	MUHAMMAD ALIFIANSYAH	2	JOKO WAHONO	33720420804090079	3372042509020006	NGEMPLAK RT 001/029	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
453	P.0006855	PLATINUM	2783	MUHAMMAD GEMA ILHAM ALAFRIZAL	1	SUHADA	3372043009090011	3372040802030007	NGEMPLAK RT 001 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
454	P.0015288	PLATINUM	2849	MYCHAEL BINAR YUDHA P	1	WAHYU PARYONO	3372041902090006	3372041605040004	Mertoudan RT 003 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
455	P.0015288	PLATINUM	2786	Nabila Vika Amalia	1	Slamet Wahyudi	3372040902090020	3372045712020006	Kedunglungkul Rt 05/VII	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
456	P.0015288	PLATINUM	2812	NADILA YULIANTI	2	RUSLAN	3372041103083800	3372044707020001	Sabrang Lor RT 002 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
457	P.2435342	PLATINUM	2683	Nanang Setyawan	III	Supardi	3372041904050004	3372040811000001	Mertoudan Rt 06/IX	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
458	P.2435342	PLATINUM	2734	Naranja Via Agatha	II	Tukiman	3372041103081180	3372046612010002	Kedunglungkul Rt 01/VII	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
459	P.0005599 0041596	PLATINUM	2684	Natalius Yoganlara P.	3	Agustinus Rusdianto	3372041103084193	3372042212000001	Kedung Tungkul Rt 01/VII	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
460	P.0015288	PLATINUM	2735	Nida Viana Puspitasari	3	Muh. Yahya	3372040302340 3372040313052	3372045012010007	Ngemplak RT 003 / RW 029	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
461	P.1516461	PLATINUM	2787	Niko Kristian	1	Eko Susanto	3372041404050006	3372042304030021	Mertoudan Rt 08/IX	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
462	P.0008653	PLATINUM	2544	NITA EKA PRATIWI	6	PARDI MAN	3372041203082077	3372046608080002	Mertoudan RT 008 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
463	P.0004064	PLATINUM	2595	NOKIYANASARI G.01.043192	5	MAKHERUN	3372040309358	337204710899001	Mertoudan RT 008 RW 008 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
464	P.0007750 0241559	PLATINUM	2780	Nur Zakaria R.	1	Gendro Dwijantoro	3372052804090082	3372050611020006	Bibis Luhur RT 07 / RW 21	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
465	P.0015288	PLATINUM	2685	Nurdian Wisma Sari	III	Waluyo	3372040313052 3372040313052	3372045604010007	Mertoudan RT 06 / RW 009	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
466	P.0015265	PLATINUM	2850	OKTAVIANO KRISTIAN	1	SUTRISNO	3372041103087773	3372042610030002	Sabrang Lor RT 003 RW 035 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
467	P.5614846	PLATINUM	2686	Oky Nugroho	III	Maryadi	3372041510040033	3372041310000001	Sabrangtor Rt 04/II RT 003 / RW 008	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
468	P.0005599 0241560	PLATINUM	2791	Olivia Putri M.K	1	Ali Pudiyanto	3372041805090002	3372045501030005	Sabrangtor RT 01 / RW 008	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
469	P.0005484	PLATINUM	2597	OLLA DYAH MAYERZAN	5	SRI KISWANTI	3372040505330	3372046005990005	Kedung Kidul RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
470	P.131064011	PLATINUM	2688	PEBRI PRATIWI	3	HADI PRASETYO	33720411030875E+15	337204520201E+15		SDN Sabrangtor Kec. Jebres
471	P.0010043 0241599	PLATINUM	2689	PEBRI PRATIWI	3	HADI PRASETYO	3372041103087504	337204520201E+15 337204520201E+15	Kedunglungkul RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
472	P.0015358	PLATINUM	2851	PUTRI DEKSA AULIA	1	HARJANTO	3372041303087518	3372044701040001	Sabrang Lor RT 005 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
473	P.2428225	PLATINUM	2792	Putri Mardiva L.	1	Sulistiyono	3372042010040068	3372045208020001	Sabrangtor Rt 02/VII	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
474	P.0015320	PLATINUM	2852	PUTRI RATNASARI	1	SURATMI	3372041303084559	3372047006040024	Sabrang Lor RT 004 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
475	P.0015287	PLATINUM	2553	RAFU PALEFI YAHYA	1	MOH YAHYA	3372040302349	3372042912030003	ngemplak RT 005 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
476	P.0007750 0241594	PLATINUM		RAKA WAHYU P.S.	1	TOTOK SRI HARJANTO	3372040301951	3372042907020002	KEDUNG TUNGKUL RT 6/VII	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
477	P.2426658	PLATINUM	2690	Ramadhan Eko P.	III	Joko Susanto	3372041203085680	3372041312000003	Dabegan Rt 02/II	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
478	P.0010655	PLATINUM	2646	RENI GALUH SEPTIANA G.01.043191	1	SRIYANTO	3372042504090009	3372044809990007	Mertoudan RT 008 RW 009 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
479	P.0015260	PLATINUM	2854	REVA ISVALANA	1	NGADI	3372041103083218	3372045101040022	mpitan RT 003 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabrangtor Kec. Jebres
480	P.0003844	PLATINUM	2811	RHENDY RIZKY KUSRIYANTO	2	KUSRIYANTO	3372041103080914	3372043005020002	MERTAUDAN RT 008 RW 009 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabrangtor Kec. Jebres

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH : SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
481	P.0015322	PLATINUM	2855	RIAN CAHYA NATA	I	MEI YULIANTO	3372041103082889	3372041001040002	SABRANG LOR RT 001 RW 009 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
482	P.2415000	PLATINUM	2693	Ridwan Sanyoto SR	III	Dasuki	3372042411090012	3372042405010003	PURWOPRAJAN RT 03/XXX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
483	P.4619669	PLATINUM	2737	Rieke Devi Fiana	II	Rudi Harlono	3372041104050020	3372046206020001	Ngemplak Rt 02/29	SDN Sabranglor Kec. Jebres
484	P.840433	PLATINUM	2694	Rika Ayu Sukmawati	III	Triyono	3372041103087770	3372045401010003	Sabrangkulon Rt 03/35	SDN Sabranglor Kec. Jebres
485	P.0003780	PLATINUM	725	RIKO PRATAMA	3	JUPRI	3372040313350	3372040801010002	sabrang kulon RT 002 RW 035 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
486	P.0023549	PLATINUM	2695	Rizal Dea Alinta	II	Mulyono	3372040764064	3372042912000002	Mipitan RT 06/29	SDN Sabranglor Kec. Jebres
487	P.2715579	PLATINUM	2795	Rizal Widya Putra	I	Marsino	3372041704090443	3372042504030005	Kedung Tungkul Rt 06/07	SDN Sabranglor Kec. Jebres
488	P.0025554	PLATINUM	2739	Robby Irawan	II	Imam	3372042709040015	3372041404020001	Sabranglor Rt 02/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
489	P.2731529	PLATINUM	2696	Rochmad Nur Prasetyo	III	Sumaryono	33720403088897	3372041205010005	Meritudan Rt 07/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
490	P.0015342	PLATINUM	2856	ROSSA MULIA WARDANI MURRA	I	SUTARTO	3372040601050006	3372046306040001	sabrang lor RT 003 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
491	P.0009228	PLATINUM	2740	ROZAN EDWIN	2	EDY SUNARSO	3372042712040030	3372042706020001	KEDUNG TUNGKUL RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
492	P.0010341	PLATINUM	2697	RUDI NUR HIDAYAT	3	MUH SUTINO	3372040209040019	3372042400000004	sabrang lor RT 006 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
493	P.3324985	PLATINUM	2796	Ruqoyatul 'Uliya U.U	I	Elrika Hidayati	3372041012080006	3372045402030001	Kedungtungkul Rt 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
494	P.0007997	PLATINUM	2601	SALEH WAHYU CAHYONO G.01.04319	2	TRIYANTO	3372041103080951	3372041511980002	KEDUNG TUNGKUL RT 002 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
495	P.0009498	PLATINUM	2603	SARDA ADE PRADANA G.01.043109	4	SRI HARTANTO	3372040503844	3372042903990004	Ngemplak RT 002 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
496	P.3424144	PLATINUM	2699	Serliko Pipit JN P.0041605	III	Sri Riyadi	3372040504000	3372044606046804	Sabranglor Rt 02/VII RT 03/08 Mojosoongo	SDN Sabranglor Kec. Jebres
497	P.0011080	PLATINUM	2741	SETO KURNIAWAN PRAYITNO	2	DIDIK. M. P	337204180409084	3372040401780005	Sabrang Kulon RT 001 RW 035 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
498	P.0015259	PLATINUM	2857	SHAYNENDRA PHARAMESTY DEWI	1	SUNARTO	3372041303087506	3372045103040003	sabranglor RT 005 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
499	P.4324062	PLATINUM	2797	Sherty Aprillia	I	Suyanto	3372041103087781	3372045704030002	Sabrangkulon Rt 02/35	SDN Sabranglor Kec. Jebres
500	P.0023467	PLATINUM	2798	Silvia Deviana	I	Winarno	3372042701050007	3372045304030002	Kedungtungkul Rt 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
501	P.4026755	PLATINUM	2799	Siska Ariani	I	Sugimin	33720403040006	3372046202030002	Meritudan Rt 08/IX	SDN Sabranglor Kec. Jebres
502	P.0014968	PLATINUM	2813	SOFIA ISTIQOMAH	2	IRAWADI	3372041210040014	3372045909020021	Sabrang Lor RT 002 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
503	P.6101552	PLATINUM	2800	Stanislaus Dharu K.	I	A.B Budi H	3372040802100013	3372040104030004	Benus Solo Asri Kedung Tungkul 03/6	SDN Sabranglor Kec. Jebres
504	P.0015353	PLATINUM	2858	SYAFITRI BUDI PUSPITASARI	1	SAIMAN	3372041103082754	3372044312030002	ngemplak RT 002 RW 029 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
505	P.0008886	PLATINUM	2701	TABITA PUTRI NATALIA	3	SLAMET EKO. H	33720406000078	3372054912000005	Kestalan RT 002 RW 003 Kestalan, Banjarsari	SDN Sabranglor Kec. Jebres
506	P.0003706	PLATINUM	2851	TAUFIQ BURHANUDDIN G.01.043137	4	JUMADI	33720405000024	3372042301000007	kedung tungkul RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
507	P.1724005	PLATINUM	2742	Tegar Dannuri Putra	2	Rakimin	33720405022557	3372043101020001	Mipitan RT 003/ RW 029	SDN Sabranglor Kec. Jebres
508	P.0015329	PLATINUM	2859	TIARA SITI YANINGSIH	1	DARYANTO	3372041103082235	3372044704040002	kedung tungkul RT 007 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
509	P.26444	PLATINUM	2702	TORI CHRISTIAN	3	HERI S	3372041307044436	3372042702000003	GULON RT. 4/21	SDN Sabranglor Kec. Jebres
510	P.4826348	PLATINUM	2801	Trenda Putri O.	I	Budi Priyono	33720408034166	3372045810020006	Sabrangkulon Rt 03/035	SDN Sabranglor Kec. Jebres

VERIFIKASI KARTU BPMKS

NAMA SEKOLAH: SDN SABRANG LOR 78 SURAKARTA

NO.	NO BPMKS	JN. KARTU	NIS	NAMA SISWA	KL	NAMA ORANG TUA	NO KK	NIK	ALAMAT	SEKOLAH
511	P.4521733	PLATINUM	2743	Tri Agustina	2	Ratno	3372041103085220	3372045208020002	Mertoudan RT 03 / RW 09	SDN Sabranglor Kec. Jebres
512	P.5317489	PLATINUM	2703	Tri Wahyu Wulandari	III	Mulud	3372041203090011	3372047108010007	Mertoudan RT 08/DK	SDN Sabranglor Kec. Jebres
513	P.1510542	PLATINUM	2802	Tri Ramadani		Wedi Prasetyo	3372041103087504	3372044911020002	Kedung Tungkul RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
514	P.0040045	PLATINUM	2802	TRIA RUMANDANI	1	HADI PRASETYO	3372041103087504	33720440011020002	Mipitan RT 083/RW 029	SDN Sabranglor Kec. Jebres
515	P.1724030	PLATINUM	2704	Trisnendaru D P	3	Ngadiman	3372041103083201	3372040203010001	Mertoudan RT 07/DK	SDN Sabranglor Kec. Jebres
516	P.5614311	PLATINUM	2744	Udi Khayrotun Nafsinidmi	2	Sartono	3372041103087269	3372046610010003	Kedung Tungkul RT 003 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
517	P.0015264	PLATINUM	2860	VIANA BELA SAPUTRI	1	SAPARDI	3372041403081198	3372046803030004	DEBEGAN RT 003 RW 006 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
518	P.0004583	PLATINUM	2803	VIKY PRASETYO WIJANARKO	1	SARNO	115502/04/01445	1155020804030003	Sabrang Lor RT 003 RW 006 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
519	P.0002475	PLATINUM	2745	VIMA DWI MEISYA	2	SUNARIMO	3372041103087269	3372045805020001	Debegan RT 02/II	SDN Sabranglor Kec. Jebres
520	P.2431863	PLATINUM	2746	Viviane Ade Purwanto	1	Djoko Purwanto	3372041203085681	3372045309020004	Sabrang Lor RT 007 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
521	P.0040084	PLATINUM	2747	WAHYU GALUH PRAMESTI	2	SUHARDONO	3372041510040050	3372045201020001	NGEMPLAK RT 002 RW 028 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
522	P.0008710	PLATINUM	2748	WAHYU KUSMAWATI	2	SAMINGUN	3372040407060001	3372044505020001	01 Sabranglor RT 01 / VIII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
523	P.0003287	PLATINUM	2806	WAHYU NOVIKA AGUSTIN	3	AGUS PURWANTO	3372041103087269	3372046310060001	Sabrang Lor RT 001 RW 008 Mojosoongo, Jebres, Surakarta	SDN Sabranglor Kec. Jebres
524	P.0009229	PLATINUM	2506	WAHYU NOVIKA AGUSTIN	3	AGUS PURWANTO	3372041103087269	3372046310060001	Sabranglor RT 023/S	SDN Sabranglor Kec. Jebres
525	P.3331895	PLATINUM	2749	Widi Gilang Hariyono	II	Budi Suhariyono	3372040408050002	3372042406020001	Kedungtungkul RT 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
526	P.5635388	PLATINUM	2750	Wulida Rayhani	II	Samsudin	337204040101478	3372041510040050	debeagan RT 002 RW 006 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
527	P.0015283	PLATINUM	2862	YASHINTA SIENY SAPUTRI	1	SUGIHARTO	3372041303080169	3372045109030002	Mertoudan RT 008 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
528	P.0009344	PLATINUM	2804	YOGA SEPTIANWAN P.P	1	MISWANTO	3372042603050020	3372040809020001	Kedungtungkul RT 001 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
529	P.0009429	PLATINUM	2751	YOLA AMANDA	2	SUPRAPTO	3372041103087269	3372046003020002	Mertoudan RT 02 / RW 09	SD Sabrang Lor
530	P.0226394	PLATINUM	2863	YONATHAN KRISTANTO	3	Suharjani	1611100017	337204191030010	Sabranglor RT 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
531	P.5517994	PLATINUM	2706	Yos Halori Davi	III	Suyoto	3372040314206	3372042012000002	Mertoudan RT 08/DK	SDN Sabranglor Kec. Jebres
532	P.4626748	PLATINUM	2707	Yuyun Nita Sari	II	Sugiman	3372040304006	3372046310000001	Kedungtungkul RT 002 RW 007 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
533	P.0008461	PLATINUM	2708	ZAINI AZHAR MAULANA	3	DWI SURANTO	3372041403081144	3372042108000022	Kedungtungkul RT 03/VII	SDN Sabranglor Kec. Jebres
534	P.5631591	PLATINUM	2805	Zakky Alwan	1	Djoko Harjono	3372040908090015	3372042007030001	Mertoudan RT 07/DK	SDN Sabranglor Kec. Jebres
535	P.5432068	PLATINUM	2806	Zilzah Nurhaliza	1	Supardi	3372041101100009	3372044702030004	02 Ngemplak RT 05 / 29	SDN SABRANG LOR
536	P.0226379	PLATINUM	2871	ZINTYA INTAN AINI	V	Sumarno	1103086461	33720460020000	SABRANG LOR RT 05/08	SDN Sabranglor Kec. Jebres
537	P.4634965	SILVER	244	ADHELLA PUTRI PURNAMAWATI	5	JOKO PURNOMO	3372041303087520	3372048004080003	KEDUNGTUNGKUL RT 001/007	SDN Sabranglor Kec. Jebres
538	P.3215935	SILVER	791	DEWI PERMATA	5	TRI IRWANTO	3372042004090084	3372044912970026	Kedung Tungkul RT 006 / RW 007	SDN Sabranglor Kec. Jebres
539	P.5420728	SILVER		RAKA WAHYU P.S.	I	TOTOK SRI HARJANTO	3372041103087269	3372042907020001	SABRANG LOR RT 002 RW 008 Mojosoongo, Jebres	SDN Sabranglor Kec. Jebres
540	P.0008180	SILVER	2692	RHENTHANIA DEA INDI R	3	SUTARNO	3372040502518	3372045408000003		

LAMPIRAN

V

(LIMA)

**LAPORAN DUGAAN KORUPSI APBD UNTUK KOMITE OLAH RAGA NASIONAL
INDONESIA SURAKARTA TAHUN 2009**

TELAAH DANA BANTUAN APBD UNTUK KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA SURAKARTA TAHUN 2009

Posisi Kasus

Bahwa sebelumnya KONI Kota Surakarta telah mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam tahun anggaran 2009 yang diperuntukan bagi pembinaan dan bonus atlet berprestasi serta penyelenggaraan Perprof 2009. Atas permohonan bantuan dari KONI Kota Surakarta tersebut kemudian Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan dalam usulan RAPBD tahun 2009 dengan alokasi dana hibah sebesar Rp. 11,3 miliar;

Bahwa dalam tahun anggaran yang sama PERSATUAN SEPAK BOLA INDONESIA SURAKARTA (PERSIS Solo) yang beralamat di Balai PERSIS Jl. Gajah Mada 73 Surakarta, juga telah mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 28 Agustus 2008 untuk keperluan biaya mengikuti Kompetisi Divisi Utama tahun 2009/2010, permohonan proposal mana ditanda tangani oleh Pengurus PERSIS SOLO FX. Hadi Rudiyatmo (Ketua Umum). Atas permohonan tersebut Pemerintah Kota Surakarta tidak memberikan usulan dalam RAPBD Kota Surakarta tahun 2009;

Bahwa dalam pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Surakarta tentang RAPBD kota Surakarta tahun 2009/2010, dinyatakan bahwa pengalokasian dana APBD tahun 2009 untuk PERSIS Solo tidak semestinya diberikan bagi PERSIS Solo semata, yang pas anggaran tersebut diberikan kepada KONI Kota Surakarta. Bahwa namun demikian akhirnya DPRD Kota Surakarta menyetujui alokasi dana hibah untuk KONI Kota Surakarta dianggarkan sebesar Rp. 11,5 miliar yang dituangkan dalam APBD Kota Surakarta tahun 2009, dimana atas usulan sebelumnya dari Pemerintah Kota Surakarta untuk bantuan kepada KONI Kota Surakarta dalam alokasi dana hibah dalam RAPBD Kota Surakarta tahun 2009 sebesar Rp. 11,3 miliar;

Bahwa pemberian bantuan kepada KONI Kota Surakarta telah diberikan tahun sebelumnya yaitu dialokasikan dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp. 10 miliar dan dalam APBD tahun 2007 KONI Kota Surakarta mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp. 5 miliar. Sedangkan dalam tahun anggaran 2008 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Surakarta tidak mendapatkan dana pembinaan dari Pemerintah Kota Surakarta;

Bahwa dana bantuan untuk pembinaan dan bonus untuk atlet berprestasi dalam Perprof 2009 yang diterima KONI Kota Surakarta dalam tahun 2009 sebesar Rp. 11,5 miliar tersebut ternyata KONI Kota Surakarta hanya menerima dana sebesar Rp. 6,3 miliar dan sisa dana nya diduga masuk ke manajemen PERSIS Surakarta sebesar Rp. 4,8 miliar. (Suara Keadilan, Edisi II, Desember 2009);

Bahwa dugaan penyelewengan penggunaan dana bantuan Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang dalam APBD Kota Surakarta tahun 2009 untuk KONI sebesar 11,5 miliar dapat diperoleh dari keterangan Wakil Ketua KONI Surakarta Gatot Sugiarto SH yang menyatakan bahwa KONI Kota Surakarta pada APBD 2009 yang menganggarkan untuk bonus atlet berprestasi dan penyelenggaraan Perprof 2009 sebesar Rp. 11,5 miliar dan disetujui oleh

Pemerintah Kota Surakarta, namun dalam kenyataanya KONI hanya menerima Rp. 6,3 miliar, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 4,8 miliar diduga masuk ke manajemen PERSIS Solo. (Suara Keadilan edisi II, Desember 2009);

Bahwa selain itu ada dugaan oknum DPRD Kota Surakarta juga ikut menikmati dana yang diterima PERSIS Surakarta sebesar Rp. 4,8 miliar dan khusus dana Rp. 2,8 miliar yang tidak muncul dalam pembahasan APBD Perubahan, namun dalam kenyataanya tiba-tiba muncul dana untuk KONI kota Surakarta yang menurut rencana diperuntukan untuk menutup kekurangan bonus atlet berprestasi; (Suara Keadilan Edisi II Desember 2009)

Bahwa oleh karena berdasarkan hal tersebut diatas dana bantuan pembinaan dan bonus atlet dalam Perprof 2009 yang diterima oleh KONI Kota Surakarta yang dialokasikan dalam APBD 2009 sebesar Rp. 11,5 miliar dan dana tambahan dari Kota Surakarta yang tertuang dalam APBD Perubahan 2009 sebesar 2,8 miliar. Penggunaan dana bantuan mana diduga menyimpang dari peruntukannya sebesar Rp. 4,8 miliar masuk kepada manajemen PERSIS Surakarta dan oknum DPRD Kota Surakarta (Suara Keadilan , Edisi II Desember 2009)

Analisis kasus

a. Analisa Yuridis

Dalam pengalokasian dana yang dituangkan dalam APBD menggunakan skala prioritas

Undang undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah (lima belas urusan wajib daerah) yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peraturan menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 32

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.*
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:*
 - a. pendidikan;*
 - b. kesehatan;*

- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika; dan
- z. perpustakaan.

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. industri; dan
- h. ketransmigrasian.

(4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pengalokasian dana yang dituangkan dalam APBD Perubahan dilakukan dengan syarat dan kriteria tertentu

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah:

Pasal 81

1. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antartjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 3. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan, terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pengalokasian dana bantuan sosial atau hibah dilakukan secara selektif dan tidak terus menerus dalam tahun anggaran

Peraturan menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 42

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(4a) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- (5) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirmya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Dalam pengalokasian dana bantuan untuk kegiatan keolah ragaan dilakukan secara selektif

Undang undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pasal 36

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional.
- (2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten/kota.
- (2) Komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional

Pasal 40

Pengurus komite olah raga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

b. Analisa fakta dan yuridis

Pengalokasian dana bantuan Kepada KONI Kota Surakarta dalam anggaran APBD dan APBD Perubahan telah menyalahi ketentuan perundang undangan yang berlaku;

1. Bahwa berdasarkan posisi kasus/fakta tersebut diatas dapat disampaikan bahwa KONI Kota Surakarta telah mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Kota Surakarta dan atas

permohonan tersebut kemudian Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikannya dalam RAPBD 2009 sebesar Rp. 11,3 miliar dan disahkan oleh DPRD Kota Surakarta dalam alokasi bantuan hibah dalam APBD 2009 sebesar Rp. 11,5 miliar. Bantuan tersebut akan digunakan untuk pembinaan dan bonus atlet dalam Perprof 2009

2. Bahwa oleh karena kekuarangan dalam pembayaran bonus kepada atlet berprestasi maka KONI Kota Surakarta mengajukan permohonan dana tambahan dan ternyata dalam APBD Perubahan 2009 KONI Kota Surakarta juga mendapat tambahan bantuan dana sebesar Rp. 2,8 miliar;
3. Bahwa Pemerintah Kota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta dalam penyusunan anggaran dalam APBD 2009 Kota Surakarta tidak melakukan skala prioritas, mengingat belum banyak terpenuhinya kebutuhan wajib yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Surakarta misalnya anggaran untuk pendidikan 20 %, biaya kesehatan gratis, lingkungan hidup dan lain lain. Pemerintah Kota Surakarta malah mengalokasikan dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta tahun 2009 kepada KONI Kota Surakarta sehingga akhirnya tertuang dalam anggaran APBD Kota Surakarta tahun 2009 mendapatkan dana Rp. 11,5 miliar;
4. Bahwa demikian juga Pemerintah Kota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta kurang peka dan mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku oleh karena dalam alokasi anggaran APBD Perubahan 2009, KONI Kota Surakarta mendapat dana tambahan sebesar Rp. 2,8 miliar. Bahwa alasan karena kekurangan dana untuk pembayaran atlet berprestasi tidak bisa dijadikan alasan dalam mengalokasikan dana bantuan dalam APBD Perubahan. (ketentuan lebih lanjut tertuang dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
5. Bahwa demikian juga dalam tahun tahun sebelumnya KONI Kota Surakarta tahun anggaran 2006 mendapat bantuan yang tertuang dalam APBD Kota Surakarta tahun 2006 sebesar Rp. 10 miliar dan tahun anggaran 2007 KONI Kota Surakarta mendapatkan dana bantuan yang tertuang dalam APBD sebesar Rp. 5 miliar, pemberina bantuan mana telah menyalahi ketentuan peraturan perundang undangan oleh karena diberikan secara terus menerus. (pasal 42,43,44 Peraturan menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

Penerimaan dan penggunaan dana kepada KONI Kota Surakarta melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa dalam penerimaan dan penggunaan dana bantuan hibah kepada KONI Kota Surakarta diduga juga menyimpang oleh karena dana yang diterima oleh KONI Kota Surakarta dari APBD Kota Surakarta sebesar

Rp. 11,5 miliar berdasarkan keterangan Wakil Ketua KONI Kota Surakarta Gatot Sugiarto, SH ternyata KONI Kota Surakarta hanya menerima sebesar Rp. 6,2 miliar dan sisa dana nya masuk ke manajemen PERSIS Kota Surakarta sebesar Rp. 4,8 miliar.

7. Bahwa oleh karena penerimaan dan penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Surakarta yang teralokasi dalam APBD Kota Surakarta tahun 2009 seharusnya dilakukan atau dibuat naskah perjanjian hibah dengan pemerintah daerah (Pemerintah Kota Surakarta) naskah perjanjian hibah mana tidak boleh menyimpang dari ketentuan perundang undangan yang berlaku (Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Bahwa KONI Kota Surakarta harus mempertanggung jawabkan dana yang sudah teralokasi dalam APBD 2009 sebesar Rp. 11,5 miliar dan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 2,8 miliar, sebagaimana ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer : 32 Tahun 2008 Tanggal 16 Juni 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dinyatakan bahwa :
 - a) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
 - b) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2877/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;
9. Bahwa walaupun dalam isi perjanjian Hibah antara KONI Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan dana bantuan APBD 2009 sebesar Rp. 11,5 miliar dituangkan dalam perjanjian antara KONI Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk sebagian diberikan kepada PERSIS Surakarta, perjanjian hibah mana adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena secara struktural KONI Kota Surakarta tidak membawahi PERSIS Surakarta yang merupakan Klub Profesional yang berorientasi profit dan berada dibawah induk organisasi PSSI . (Undang undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 38 dan 39);

10. Bahwa oleh karenanya dana yang diterima KONI Kota Surakarta yang teralokasikan dalam anggaran APBD Kota Surakarta tahun 2009 sebesar Rp. 11,5 miliar yang peruntukannya untuk pembinaan dan bonus atlet yang berprestasi dalam Perprof 2009, namun dalam kenyataannya yang diterima KONI Kota Surakarta hanya 6,3 miliar dan sisa dananya Rp. 4,8 miliar diduga diterima oleh PERSIS Surakarta, penerimaan dana mana adalah bentuk penyimpangan atas pengelolaan dana bantuan yang bersumber dari APBD.
11. Bahwa DPRD Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta seharusnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Mekanisme kontrol DPRD dalam memutuskan anggaran dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Surakarta seharusnya memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, demikian juga Walikota Surakarta melalui SKPD terkait dapat mengontrol penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan kewenangannya.
12. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta terkait dengan pemberian dana hibah kepada KONI Kota Surakarta yang dituangkan dalam APBD dan APBD Perubahan 2009 diduga telah menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu :

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa:

"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 4 dimuat mengenai Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Pasal 4 ayat (1):

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4 ayat (2):

II. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan : Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan PERS Solo.
- b. Sasaran : Terciptanya sistem pengendalian manajemen (SPM) yang baik serta tertibnya penatausahaan dan administrasi dalam pengelolaan keuangan PERSIS.

III. Survey Sistem Pengendalian Manajemen

Dari hasil survey pengendalian intern, Sistem pengendalian manajemen PERSIS dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Organisasi
 - a. Struktur organisasi tidak dilengkapi dengan uraian tugas secara tertulis.
 - b. Tidak mempunyai ketentuan tentang persyaratan tenaga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab.
- 2) Kebijakan
Tidak dijumpai adanya kebijakan-kebijakan yang dinyatakan secara jelas dan tertulis.
- 3) Perencanaan
Tidak setiap kegiatan dibuat rencana terlebih dulu secara tertulis
- 4) Prosedur
Tidak dijumpai adanya prosedur yang dinyatakan dengan jelas dan dalam bentuk tertulis dan sistematis.
- 5) Pencatatan/Acoounting.
Pencatatan yang dimiliki masih belum memadai yaitu :
 - a. Tidak dibuat buku bantu bank yang digunakan untuk mencatat penyimpan dan pengambilan uang di Bank.
 - b. Tidak dibuat buku pembantu hutang yang mencantumkan nama-nama kredit (pemberi hutang)
 - c. Tidak dibuat buku bantu Piutang yang digunakan untuk mencatat tagihan kepada pihak ketiga antara lain PSSI

Nomor : .

18 Maret 2008

Hal : Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan
terhadap Penatausahaan /
Administrasi Keuangan PERSIS.

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengawas Daerah

Kota Surakarta

Di Surakarta

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Surakarta 094/195/TU/K/2008 tanggal 10 Maret 2008 untuk mengadakan Pembinaan terhadap Penatausahaan / Administrasi Keuangan PERSIS dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Umum :

1) Nama Organisasi	: Persatuan Sepak Bola Indonesia Surakarta (PERSIS)
2) Alamat	: Balai Persis Jl. Gajah Mada Surakarta Telp 0271.726322
3) Nama Ketua Umum	: FX. Hadi Rudyatmo (Wakil Walikota Surakarta)
4) Nama Sekretaris	: Ir. Ruhban Ruzziyatno, MT (Swasta)
5) Nama Bendahara	: Drs. Anung Indro Susanto, MM. (Kepala Kantor Keuangan Daerah Kota Surakarta)
6) Manajer Tahun 2007	: Wasesa
7) Nilai Bantuan Keuangan Thn 2007	: Rp 10.000.000.000,00

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dalam pasal 4 ditegaskan sebagai berikut :

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
 - (3) *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.*
 - (5) *Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.*
 - (6) *Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.*
 - (7) *Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.*
 - (8) *Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*
 - (9) *Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.*
 - (10) *Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.*
 - (11) *Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.*
13. bahwa pemerintah kota surakarta dan DPRD Kota Surakarta mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk :
1. *Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.*
 2. *Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.*

3. *Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
14. bahwa atas dugaan penyelewengan penganggaran dan penggunaan anggaran dalam bantuan kepada KONI Kota Surakarta tersebut telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2009 erhal informasi dugaan tindak pidana dan permohonan supervisi.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas kiranya penyimpangan yang dilakukan dalam bantuan APBD untuk KONI Kota Surakarta sebesar Rp. 11,5 miliar dan APBD Perubahan untuk KONI Kota Surakarta sebsesar 2,8 miliar yang sebagian diduga digunakan PERSIS Surakarta sebesar 4,6 milair dapat segera dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian telaah dana bantuan hibah kepada KONI Kota Surakarta tahun anggaran 2009, sekian dan terima kasih.

penerimaan/pemungutan pajak dan peng...

e. Daftar inventaris yang dibuat tidak mencantumkan tanggal perolehan.

6) Pelaporan

Laporan tidak dibuat, baik secara periodik maupun temporer, Manajer, maupun Panitia Pelaksana.

7) Personalia.

Tidak dijumpai adanya daftar pegawai, serta tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai.

8) Pemeriksaan Intern

Tidak dijumpai adanya mekanisme pemeriksaan intern.

Kami merekomendasikan kepada Ketua Umum PERSIS agar membenahi kelemahan sistem pengendalian manajemen seperti tersebut di atas dengan :

- 1) Membuat struktur organisasi dan uraian tugas secara tertulis.
- 2) Membuat ketentuan tentang persyaratan tenaga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab.
- 3) Membuat kebijakan yang dinyatakan secara jelas dan tertulis.
- 4) Membuat prosedur yang dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis.
- 5) Membuat catatan berupa :
 - a. Membuat buku bantu bank untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran Bank.
 - b. Membuat buku pembantu hutang yang mencantumkan nama-nama kredit (pemberi hutang).
 - c. Membuat Buku Bantu Piutang untuk mencatat tagihan kepada pihak ketiga antara lain PSSI
 - d. Membuat buku pembantu Pajak untuk mencatat pajak yang dipungut (dari karyawan, pemain, pelatih dsb) dan disetor ke Kas Negara.
 - e. Membuat buku inventaris yang mencatat barang-barang milik PERSIS berupa mobil, komputer, mebel dsb.
- 6) Membuat sistem pelaporan, baik secara periodik maupun temporer yang mencakup pengurus PERSIS, Manajer, maupun Panitia Pelaksana, dan disampaikan kepada Pemda Kota Surakarta.
- 7) Membuat daftar pegawai, serta tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai.

IV. Aliran Kas

Pengelolaan keuangan PERSIS yang kami identifikasi dimulai sejak periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.

Dari Buku Kas serta dokumen pengeluaran yang ada, dalam tahun 2007, PERSIS telah membukukan adanya penerimaan dan pengeluaran yang kami tuangkan dalam Aliran Kas sebagai berikut :

A	Saldo awal	413.655.925,00
B	Penerimaan	
1	Hutang	8.475.000.000,00
2	Bantuan Pemda	10.000.000.000,00
3	Setoran Panpel	828.613.680,00
4	Tiket Terusan	23.000.000,00
5	Kompensasi Divisi Utama	150.000.000,00
6	Match Fee Copa	99.000.000,00
7	Kompensasi Live TV	80.000.000,00
8	Bukopin/sponsor	25.000.000,00
9	Lain-lain	228.747.545,00
	Total Penerimaan	19.909.361.225,00
	A+B	20.323.017.150,00
C	Pengeluaran	
1	Pelunasan Hutang	8.325.000.000,00
2	Kontrak Pemain dan Pelatih	7.679.480.922,00
3	Kesekretaratan	176.019.483,00
4	Perlengkapan dan Kebutuhan Tim & copa	1.353.088.412,00
5	Transportasi dan Akomodasi	1.142.059.421,00
6	Bantuan PERSIS U-23 dan U-18	399.668.200,00
7	Bonus	891.950.000,00
8	Cash Bond	37.500.000,00
	Total Pengeluaran	20.004.766.438,00
D	Saldo Akhir (A+B)-C	318.250.712,00

V. Penjelasan Aliran Keuangan

A. Saldo Awal

Saldo awal adalah merupakan saldo per 1 Januari 2007 sebesar Rp413.655.92

(data buku kas PERSIS) terinci atas:

- Saldo Kas Per 1 Januari 2007

Rp 413.655.925,00

B. Penerimaan

1. Pertambahan hutang kepada pihak ketiga selama tahun 2007 sebesar Rp8.475.000.000,00, atas hutang tersebut tidak dapat dijelaskan atas nar perorangan, data hutang secara rinci tidak kami peroleh..
2. Bantuan dari Pemda Kota Surakarta selama tahun 2007 sebesar 10.000.000.000,00, dengan rincian:
 - Berita Acara Penyerahan Bantuan PERSIS dari Pemerintah Kota Surakarta No. 412.2/718/IV/2007 sebesar Rp 5.000.000.000,00.
 - Berita Acara Penyerahan Bantuan PERSIS dari Pemerintah Kota Surakarta No. 027/227.a/VII/2007 sebesar Rp 5.000.000.000,00.
3. Setoran Panpel dalam tahun 2007 sebesar Rp828.613.680,00, adalah seto dari panitia pertandingan saat PERSIS menjadi tuan rumah dalam kompetisi Liga Jarum 2007, Penyetoran oleh Panpel bervariasi jumlahnya. Panpel mempunyai pembukuan tersendiri yang terpisah dari PERSIS. Jumlah yang disetorkan adalah jumlah dari penjualan tiket setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan Panpel, atas selisih tersebut tidak seluruhnya disetorkan.
4. Penerimaan dari penjualan tiket terusan dalam tahun 2007 sebesar Rp23.000.000,00.
5. Penerimaan yang berasal Kompensasi Divisi Utama adalah sebesar Rp150.000.000,00, menurut Manual Liga Jarum tahun 2007 Komper Mengikuti Divisi Utama adalah sebesar Rp 600.000.000,00 dengan pembayar sebagai berikut:
 - 25 % dibayarkan satu minggu setelah kompetisi dimulai
 - 25 % dibayarkan satu minggu setelah putaran pertama kompetisi selesai.
 - 25 % dibayarkan satu minggu setelah putaran kedua selesai

Berdasarkan manual tersebut di atas seharusnya PERSIS sampai dengan saat audit telah menerima kompensasi sebesar Rp600.000.000,00.

Berdasarkan buku yang ada PERSIS baru menerima sebesar Rp150.000.000,00 sehingga PERSIS masih mempunyai piutang sebesar Rp 450.000.000,00 yang tidak tercatat dalam buku piutang.

Atas permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Ketua Umum PERSIS agar menagih kekurangan kompensasi klub peserta Divisi Utar sebesar Rp 450.000.000,00.

6. Match Fee Copa yang diterima selama tahun 2007 sebesar Rp 99.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

26/06/07	Match Fee VS Persipasi (Copa)	45.000.000
05/11/07	Match Fee Copa VS Persita	29.000.000
31/05/2007	Match Fee (Copa) VS Persikabo Bogor	25.000.000

7. Penerimaan yang berasal dari sponsor tahun 2007 adalah sebesar Rp25.000.000,00 yang berasal dari Bank Bukopin
8. Penerimaan lain-lain selama tahun 2007 sebesar Rp 228.747.545,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer pemain	Rp 195.849.950,00
- Pengembalian Cash nbond	Rp 30.250.000,00
- Lainnya	Rp 2.647.600,00

C. Pengeluaran

1. Pelunasan Hutang

Dana bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta dalam tahun 2007 sebagian telah digunakan untuk pelunasan hutang kepada pihak III yaitu sebesar Rp8.325.000.000,00, namun demikian per tanggal 31 Desember 2007 PEI

sebagai berikut.

- Saldo Hutang per 1 Januari 2007	Rp 3.450.000.000,00
- Penambahan Hutang	<u>Rp 8.475.000.000,00</u>
Jumlah	Rp11.925.000.000,00
- Pelunasan	<u>Rp 8.325.000.000,00</u>
- Saldo per 31/12/2007	Rp 3.600.000.000,00

2. Kontrak Pemain dan Pelatih

Dalam tahun 2007 Pembayaran Pemain dan Pelatih sebesar Rp7.679.480.922,00. Pembayaran Pemain adalah merupakan nilai sebelum pajak penghasilan, pajak penghasilan ditanggung oleh PERSIS, dalam tahun 2007 PERSIS belum membayarkan pajak untuk gaji pemain dan pelatih sebesar Rp2.188.953.443,00 dibahas terpisah dalam Temuan Audit.

3. Kesekretariatan

Pengeluaran untuk kesekretariatan selama tahun 2007 sebesar Rp176.019.483,00, biaya tersebut digunakan untuk membayar gaji sekretariat, operasi sekretariat, operasional manajemen dan publikasi.

Dalam pengeluaran tersebut diatas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran dari pihak ketiga, bukti pengeluaran hanya ditandatangani oleh Sekretaris Mania Rp75.811.500,00, terinci atas:

- Dana kesekretariatan	Rp 24.000.000,00
- Operasional Kelancaran Organisasi	Rp 51.811.500,00

- 2) Pengeluaran yang tidak ketentuan yang mendasari yaitu untuk pembelian pulsa bagi sekretaris manager sebesar Rp14.616.900,00

4. Perlengkapan dan Kebutuhan Tim

Pengeluaran untuk Perlengkapan dan kebutuhan Tim dalam tahun 2007 sebesar Rp1.353.088.412,00. Pengeluaran tersebut digunakan untuk

- Try Out
- Perlengkapan nMess
- Asuransi pemain dan pelatih
- Medical
- Sewa stadion
- Catering

- Bola

Dalam pengeluaran tersebut diatas diantaranya terdapat pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya yaitu pengeluaran untuk catering sebesar Rp434.406.350,00, pengeluaran tersebut hanya berdasarkan nota/faktur pihak ketiga tanpa didasari kontrak pengadaan, permintaan pesanan, dan bukti bahwa catering tersebut telah diterima oleh pengelola mess. Atas pembayaran catering tersebut belum dikenakan pajak. Dengan pembayaran sebesar Rp434.404.350 PPN yang harus dikenakan sebesar Rp 39.491.305,00 dan PPh 22 sebesar Rp 5.923.695,75

5. Transportasi dan Akomodasi

Pengeluaran Transportasi dan Akomodasi dalam tahun 2007 sebesar Rp1.142.059.421,00. Pengeluaran tersebut digunakan untuk Pemeliharaan kendaraan, transportasi dan akomodasi saat pertandingan Tandang.

6. Bantuan PERSIS U-23 dan U-18

Pengeluaran yang digunakan untuk membantu operasional PERSIS U-23 dan U-21 selama tahun 2007 sebesar Rp891.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Penanggung jawab
Dana talangan untuk operasional kompetisi U 23 di Solo	121.625.000,00	Drs. M Wisen
Dana operasional untuk tim PERSIS U18	20.000.000,00	Totok S
Dana operasional untuk tim PERSIS U18	30.000.000,00	Totok S
Dana operasional untuk tim PERSIS U23	228.043.200,00	Budi Suharto

Sampai dengan saat audit berakhir tanggal 18 Maret 2008 bukti-bukti pengeluaran untuk kegiatan tersebut belum diterima, sedangkan dana talangan untuk operasional Kompetisi U-23 sebesar Rp 121.625.000,00 belum dikembalikan.

7. Bonus

Bonus yang diberikan kepada pemain, pelatih dan staf manajemen selama tahun 2007 sebesar Rp891.950.000,00; atas pemberian bonus tersebut belum dikenakan PPh 21.

8. Cash Bond

sebesar Rp37.500.000,00 atas cash bond tersebut telah dipotongkan ke gaji pemain yang bersangkutan

D. Saldo Akhir

Saldo akhir uang kas per 31 Desember 2007 adalah sebesar 318.250.712,00, uang tersebut berada dalam penguasaan manajemen PER. Saldo bank tidak kami peroleh

VI Temuan Audit

1. Terdapat pembayaran bonus yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada Al Ahmad, Edward Chong dan Abraham sebesar Rp 22.000.000,00

Terdapat pembayaran bonus yang tidak sesuai dengan ketentuan atas 1 pertandingan Menang Tandang lawan PKT Bontang sebesar Rp 22.000.000 pada tgl 12 Des 2007 yang diterima oleh Anshar Ahmad, Edward Tjong, Abraham.

Sesuai dengan kontrak perjanjian tidak disebutkan ketentuan pemberian bc tambahan tersebut.

Hal tersebut disebabkan kelalaian manajemen PERSISI dalam mematuhi ketentuan kontrak.

Direkomendasikan kepada Ketua Umum PERSIS untuk menginstruksikan kepada Manajemen PERSISI untuk mengembalikan kelebihan pembayaran bonus tersebut ke Kas PERSIS sebesar Rp 22.000.000,00.

2. Pembayaran Gaji dan Bonus kepada Pemain/pelatih lokal dan pemain asing selama tahun 2007 belum dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp2.168.953.443,00

Pembayaran Gaji dan Bonus atas hasil pertandingan kepada Pemain/pelatih lokal dan pemain asing selama tahun 2007 sebesar Rp 8.465.722.755 belum dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp 2.168.953.443,00 (Rincian terlampir).

bonus pemain, pelatih ditanggung oleh PERSIS.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 17 Tahun 2000. tentang Pajak Penghasilan:

- ps 21 disebutkan bahwa: Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh: a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- ps 26 disebutkan bahwa dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan

Hal tersebut disebabkan kelalaian manajemen PERSIS dalam mentaati peraturan Perpajakan.

Akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp 2.168.953.443,00.

Direkomendasikan kepada Ketua Umum PERSIS agar menginstruksikan kepada Manajemen PERSIS untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara sebesar Rp2.168.953.443,00.

- 3) Terdapat kelebihan pembayaran atas Gaji Pemain asing atas nama Greg Nwolo sebesar Rp 40.000.000,00

Nilai kontrak pemain asing atas nama Greg Nwokolo sesuai kontrak 03/PSPA/12/2006 tgl 9 Desember 2006 adalah sebesar Rp 800.000.000. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa realisasi pembayaran gaji kepada pemain tersebut sebesar Rp840.000.000,00, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp40.000.000,00, dengan perhitungan sbb:

			000.000,00
2	Realisasi pembayaran:		
	Dlm th 2006	200.000.000	
	Dlm th 2007	600.000.000	
	Bln Jan 2008	40.000.000	
	Jumlah		840.000.00
3	Kelebihan pembayaran		40.000.00

Sesuai dengan kontrak perjanjian seharusnya pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kontrak.

Hal tersebut disebabkan kelalaian manajemen PERSIS yang tidak cermat dalam melakukan pembayaran.

Akibatnya menimbulkan kerugian bagi keuangan PERSIS sebesar Rp 40.000.000, Direkomendasikan kepada Ketua Umum PERSIS agar menginstruksikan kepada Manajemen PERSIS untuk menyetorkan pajak ke Kas PERSIS sebesar Rp40.000.000,00.

- 4) Terdapat kelebihan pembayaran atas Gaji kepada 16 pemain, pelatih PERSIS sebesar Rp 582.914.166,00

Dari hasil audit menunjukkan adanya kelebihan pembayaran terhadap pemain/pelatih sebesar Rp 582.914.166,00. Kelebihan terjadi karena adanya dua pembayaran akhir kontrak terhadap 12 pemain/pelatih sebesar Rp220.819.000 dan adanya pembayaran gaji diluar perjanjian sebesar Rp 362.095.166 (perhitungan terlampir).

Sesuai dengan kontrak perjanjian seharusnya pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kontrak

Hal tersebut disebabkan kelalaian manajemen PERSIS yang tidak cermat dalam melakukan pembayaran.

Akibatnya menimbulkan kerugian bagi keuangan PERSIS sebesar Rp582.914.166,00.

Direkomendasikan kepada Ketua Umum PERSIS agar menginstruksikan kepada Manajemen PERSIS untuk menyetorkan pajak ke Kas PERSIS sebesar Rp582.914.166,00.

Pengendali Teknis

Ketua Tim

Taufan Hidayat
NIP. 740000028

Zaenal Muttaqin
NIP. 740002117

TELAAH PERKARA DUGAAN KORUPSI PASAR KLITHIKAN NOTOHARJO

Posisi Kasus

Pembangunan pasar Klithikan Notoharjo dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan dengan penawaran lelang dan penetapan pemenang lelang dengan penawaran terendah dari pagu yang ditetapkan yakni Rp. 5,5 miliar dan nama pemenang lelang yaitu; PT. Surya Baru Sejahtera dengan nilai penawaran Rp. 5.125,775 miliar, PT. Nusa AP Rp. 4,705 Miliar dan PT. Rudi Persada N Rp. 5,275 Miliar dan akhirnya pemenang lelang dengan penawaran Rp. 5.1 Miliar. (solopos 16 Maret 2006)

Dari perhitungan unit kerja terkait untuk menyempurnakan pasar Klithikan Notoharjo total anggaran yang diperlukan seluruhnya sebesar Rp. 9,6 miliar. Untuk itu kemudian Pemerintah Kota Surakarta mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Maret 2006 dan atas permohonan tersebut kemudian Gubernur menyetujuinya dengan surat Keputusan Gubernur No. 921/124/2009-90/SKO-2006 tanggal 1 Mei 2006 Rp. 1 Miliar dan pada tanggal 14 Agustus 2006 mendapatkan dana dari Gubernur senilai Rp. 1,5 Miliar sehingga total dana bantuan Gubernur sebesar Rp. 2,5 miliar. (Solopos 7 september 2006).

Bahwa dari perhitungan anggaran pembangunan pasar Klithikan Notoharjo yang telah disetujui DPRD Kota Surakarta sebesar Rp. 5,5 miliar ditambah dengan anggaran dari bantuan Gubernur Rp. 2,5 Miliar sehingga Pemerintah Kota Surakarta masih membutuhkan anggaran Rp. 2.176.382.000,-. Dari anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp. 2.176.382.000,-.

Bahwa atas anggaran dana tersebut kemudian Pemerintah Kota Surakarta telah meminta persetujuan dari DPRD Kota Surakarta untuk mengajukan permohonan persetujuan dana mendahului anggaran yang dimasukkan dalam APBD Perubahan Kota Surakarta 2006, dengan surat No. 921/1.006.01 tanggal 8 Mei 2006 perihal permohonan dana tambahan. DPRD Kota Surakarta melalui Komisi II memberikan persetujuan kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk menjalankan mekanisme mendahului anggaran dalam pembangunan pasar klithikan notoharjo sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan. (Solopos, 2-09-2006).

Bahwa persetujuan DPRD untuk memasukan dana mendahului anggraan dalam APBD Perubahan disampaikan Komisi II DPRD Kota Surakarta dituangkan dalam Surat Komisi II nomer surat No. 04/Kom II/1.006.01 tanggal 12 Mei 2006 perihal permohonan persetujuan mendahului anggaran *dengan sayarat sepanjang tidak melanggar peraturan.*

Bahwa kemudian ternyata Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta mengajukan permohonan *ijin kepada Gubernur dengan surat No. 050/417 tanggal 2 Mei 2006 perihal ijin penunjukan langsung lanjutan* untuk menindaklanjuti pembangunan pasar Klithikan Notoharjo tahap II,

Analisa kasus

A. Pembangunan Pasar Klithikan Tahap Pertama

Bahwa permasalahan pembangunan pasar Klithikan Notoharjo yang dilakukan dalam tahap pertama dilakukan dengan lelang terbuka untuk umum pembangunan mana dilakukan dengan perencanaan yang kurang baik dari pemerintah kota surakarta. Perencanaan yang kurang baik tersebut karena masih ada pekerjaan tambahan sarana dan prasarana baik untuk peningkatan infrastruktur baik fisik maupun pendamping yang diajukan senilai Rp. 7.676.382.000,- meningkat Rp. 2.176.382.000,- atau 39,57 % dari pagu yang sudah direncanakan sebesar 5,5 miliar. Perlu dikaji lebih jauh tentang pembangunan tahap pertama oleh karena ternyata dari hasil pekerjaan Pasar Klitikan Notoharjo tahap pertama ternyata belum dapat digunakan untuk menampung PKL Pasar Banjarsari.

Bahwa Kondisi yang demikian ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 85 tahun 2006 tanggal 6 oktober 2006 tentang perubahan ke enam atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan barang/Jasa Pemerintah pada:

(1). Pasal 3

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip prinsip :

- Efisien, berarti pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Efektif berarti pengadaan barang/jas harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- Akuntabel berarti harus mencapai baik sasaran fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 9 ayat (5)

Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

...tersebut diatas kiranya perlu diaudit terkait dengan penggunaan dana Rp. 5,1-miliar dalam pembangunan Pasar Klithikan Notoharjo dalam pembangunan tahap Pertama.

B. Pembangunan Pasar Klithikan Notoharjo Tahab Kedua

Bahwa pebangunan pasar Klithikan Notoharjo tahab kedua dilakukan dengan dana pembangunan mendahului anggaran dan pelaksanaanya dilakukan dengan penunjukan langsung, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

Pembangunan Pasar Klithikan Notoharjo dengan dana pembangunan mendahului anggaran

Bahwa Pemerintah Kota Surakarta dengan alasan untuk menyempurnakan pembangunan tahap pertama telah diajukan permohonan pembangunan tahap kedua, pembangunan tahap kedua mana dilakukan dengan dana mendahului anggaran. Dasar yang digunakan Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan pembangunan tahap kedua dengan mendahului anggaran sebagaimana disampaikan dalam Pengantar Nota Keuangan sebagai berikut;

" mengingat perubahan kebijakan penyelesaian pembangunan pasar seiring dengan dinamikan tuntutan masyarakat yang akan menempatnya kebutuhan anggaran, pasar Klithikan mencapai Rp.9,6 miliar, namun dipotong bantuan gubernur total 2,5 miliar serta anggara yang telah disetujui dewan senilai Rp. 5,5 miliar , sehingga masih membutuhkan anggaran senilai Rp. 2.176.382.000,- ".

Kebutuhan dana tersebut untuk peningkatan infrastruktur baik fisik maupun pendamping yang diajukan senilai Rp. 7.676.382.000,- meningkat Rp. 2.176.382.000,- atau 39,57 % dibanding anggaran semula sebesar Rp. 5,5 miliar.

Bahwa alasan lebih lanjut menurut Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemkot solo, Tri Puguh Priyadi menyatakan bahwa dalam konteks pembangunan pasar Klithikan Notoharjo, pagu yang tersedia adalah Rp. 5,5 miliar sudah dilelang dan pemenang lelangnya menawar Rp. 5,1 miliar. Dalam prosesnya ada kekurangan saran dan prasarana dari proyek senilai Rp. 5,1 miliar. Mekanisme suatu proyek yang mendahului alokasi anggaran dapat dilaksanakan asalkan pagu anggaranya sudah tersedia . (solopos 5 /9/2006).

Bahwa selain itu dari Kepala Dinas Perkerjaan Umum kota solo Ir. Tjeng Haedar menyatakan bahwa bahwa salah satu alasan yang memungkinkan ditemponya mekanisme persetujuan mendahului anggaran (APBD-P) adalah kenyataan proyek pembangunan pasar klithikan Notoharjo sebagai proyek yang mendesak untuk segera diselesaikan, sesuai aspirasi para PKL Banjarsari (Solopos 2/9/2006).

Surakarta tersebut maka dalam pembangunan Pasar Klithikan Notoharjo dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembangunan pasar Klithikan Notoharjo pada tahap pertama, ada perencanaan yang kurang baik dari Pemerintah Kota Surakarta karena masih ada pekerjaan tambahan sarana dan prasarana baik untuk peningkatan infrastruktur baik fisik maupun pendamping yang diajukan senilai Rp. 7.676.382.000,- meningkat Rp. 2.176.382.000,- atau 39,57 % dari pagu yang sudah direncanakan sebesar 5,5 miliar, oleh kerannya hasil pekerjaan pada tahap pertama belum dapat digunakan.
2. Bahwa Kondisi yang demikian ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 85 tahun 2006 tanggal 6 oktober 2006 tentang perubahan ke enam atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan barang/Jasa Pemerintah pada sebagaimana yang kami uraikan tersebut diatas;
3. Bahwa disamping itu dalam pembangunan Pasar Klithikan Notoharjo tahap kedua yang dilakukan dengan mendahului anggaran dan dimasukan dalam APBD Perubahan 2007, dilakukan dengan alasan untuk peningkatan infrasetruktur dan dana pendamping serta dinamikan tuntutan masyarakat yang akan menempati Pasar Klithikan Notoharjo, alasan tersebut bukanlah alasan yang secara hukum dikatagorikan alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam perundang undangan, sehingga pengalokasian dana untuk pembangunan pasar Klithikan Notoharjo yang diajukan mendahului anggaran adalah terlalu dipaksakan.
4. Bahwa demikian halnya dengan persetujuan dari DPRD Kota Surakarta adalah terlalu politis adan atau mengambang oleh karena persetujuan dari DPRD Kota Surakarta melalui Komisi II DPRD Kota Surakarta sebagaimana dituangkan dalam Surat Komisi II nomer surat No. 04/Kom II/1.006.01 tanggal 12 Mei 2006 perihal permohonan persetujuan mendahului anggaran hanya didasarkan pada syarat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan.(solopos, 5 /9/2006);
5. Bahwa argumentasi persetujuan dari DPRD Kota Surakarta terlalu politis dapat kita lihat dari jawaban Ketua Komisi II DPRD solo, James August pattiwael yang menyatakan bahwa "berdasarkan surat walikota kepada Gubernur yang disetujui tersebut tertera" anggaran pembangunan pasar Klithikan Notoharjo senilai Rp. 9,6 miliar. " dari sana kami punya pemikiran, kami berpikir kalau Gubernur saja sudah menyetujui Rp. 9,6 miliar kenapa kami sebagai wakil rakyat tidak menyetujuinya " ujar james. (Solopos 2/9/2009);
6. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang dikatakan Persetujuan dari Gubernur adalah surat keputusan Gubernur yang memberikan bantuan Rp.2,5 miliar sebagaimana surat jawaban dari surat permohonan bantuan Pemerintah Kota Surakarta tanggal 7 Maret 2006 kepada Gubernur yang kemudian disetujui dengan surat Keputusan Gubernur No. 921/124/2009-90/SKO-2006 tanggal 1 Mei 2006 Rp. 1 Miliar dan pada tanggal 14 Agustus 2006 mendapatkan dana dari Gubernur senilai Rp. 1.5 Miliar sehingga total dana

nya sebesar Rp. 2,5 miliar. (Solopos 7 september 2006) ataukah ada surat yang lainya ?

7. Bahwa kalau yang dimaksud adalah surat Keputusan Gubernur No. 921/124/2009-90/SKO-2006 tanggal 1 Mei 2006 Rp. 1 Miliar dan surat keputusan pada tanggal 14 Agustus 2006 yang Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan dana dari Gubernur senilai Rp. 1.5 Miliar, maka surat persetujuan dari Surat Komisi II nomer surat No. 04/Kom II/1.006.01 tanggal 12 Mei 2006 perihal permohonan persetujuan mendahului anggaran adalah terlalu rancu, oleh karena surat keputusan Gubernur mana hanya merupakan surat keputusan pemberian bantuan kepada Pemerintah Kota Surakarta dan bukannya surat persetujuan mendahului anggaran yang kemudian tertuang dalam APBD Perubahan.
8. Bahwa dalam peraturan yang terkait dengan pembangunan dapat dilaksanakan dengan mendahului anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solo, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) :

Dalam keadaan darurat atau mendesak walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD

Pasal 35 ayat (2)

Pengeluaran yang belum tersedia anggaranya setelah mendapatkan persetujuan dari APBD harus dicantumkan dalam APBD Perubahan atau perhitungan APBD pada akhir tahun anggaran.

- b. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,

Secara formal Pemerintah Kota Surakarta harus menyampaikan persetujuan ke DPRD. Apabila DPRD menyetujui maka harus disampaikan ke Gubernur untuk disetujui. Persetujuan dari Gubernur tersebut mutlak dilakukan.

9. Bahwa sedangkan untuk dapat dilakukanya perubahan APBD Perubahan adalah Ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (1)

Alasan dimaksud berupa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat strategis, penyesuaian akhir karena tidak tercapainya target penerimaan dan terjadinya kebutuhan yang bersifat mendesak.

Bahw pengertian kebutuhan yang mendesak tidaklah hanya didasarkan pada permintaan masyarakat yang akan menempati atau pada kebutuhan sarana prasarana fisik yang belum selesai pada tahap pembangunan yang pertama, oleh karena kebutuhan yang sifatnya mendesak adalah karena suatu hal yang bersifat emergensi atau darurat antara lain bencana alam, banjir, gempa bumi, jembatan rusak/roboh, pembangunan sekolah roboh dan lain lain

Pembangunan Pasar Klithikan dengan Penunjukan Langsung

Bahwa apabila dilihat dalam perpektif peraturan perundang undangan maka penunjukan langsung pembangunan Pasar Klithikan Notoharjo tahap II dapat kamiuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembangunan pasar Klithikan Notoharjo tahap kedua dengan anggaran dari dana bantuan Gubernur senilai Rp. 2,5 miliar. (Solopos 7 september 2006) dan dana mendahului anggaran senilai Rp. 2.176.382.000,-".
2. Bahwa berdasarkan surat dari DPU Kota Solo No. 050/417 tanggal 2 mei 2006 perihal ijin penunjukan langsung lanjutan peningkatan pasar Klithikan kepada Gubernur untuk melaksanakan pembangunan pasar klithikan notoharjo tahap kedua (Solopos 5 /9/2006).
3. Bahwa anggaran pembangunan pasar klithikan dengan bantuan dari Gubernur dan dana dari pemerintah Kota Surakarta mendahului anggaran dengan penunjukan langsung adalah bertentangan dengan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah.
4. Bahwa dalam Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah, mekanisme pengerjaan suatu proyek mendahului alokasi anggaran dilakukan dengan ikatan surat perintah kerja sementara (SPKS)

Bab kedua pasal 9 ayat (4)

Penggunaan barang /jasa dilarang, dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang /jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauainya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas kiranya pengusutan terhadap pembangunan pasar Klithikan tahap pertama dan tahap kedua dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dan atau melakukan pemeriksaan dengan mengaudit secara keseluruhan

Gubernur.


... ..

**PERSETUJUAN KOMISI II
DPRD KOTA SURAKARTA**

**TERKAIT DENGAN :
ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN
APBD KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006**

**UNTUK KEGIATAN
PEMBANGUNAN PASAR KLITHIKAN SEMANGGI**

**KOMISI II
DPRD KOTA SURAKARTA
2006**



KOTA SURAKARTA

KOMISI II

Jl. Adisucipto Nomor 143 A Telp. (0271) 712461 Psw. 109 Fax. (0271) 7177

Surakarta, 12 Mei 2006

Kepada :

Nomor : 04/Kom.II DPRD/V/2006
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Persetujuan Anggaran
Mendahului Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2006

Di -

SURAKARTA

Menindaklanjuti Surat Walikota Surakarta tanggal 8 Mei
Nomor : 921/1.006.1 Perihal : Permohonan Dana Tamb
Pembangunan Pasar Klithikan Semanggi dan Ijin Pelaksa
Mendahului Anggaran dan dengan memperhatikan :

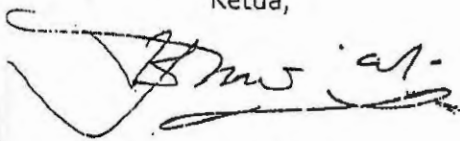
1. Surat Walikota Surakarta tanggal 7 Maret 2006 Nomor : 900
Perihal : Permohonan Bantuan Dana INGUB, Pembangi
Monumen 45 dan Pasar Klithikan Surakarta (terlampir);
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Mei 2006 Nom
921/124/2006
90/SKO-2006
tentang Otorisasi Anggaran, Ganjaran kepada Pemerintah Kabupat
Kota Tahun 2006 (terlampir);
3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta tanggal 2
2006 Nomor : 050/417 Perihal : Permohonan Ijin Penunju
Langsung Lanjutan Peningkatan Pasar Klithikan . Semar
(terlampir);
4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta tanggal 5
2006 Nomor : 648/106.1 Perihal : Permohonan Pekerjaan Mendah
Anggaran Kegiatan Peningkatan Pasar Klithikan Seman
(terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan
Komisi II berpandangan bahwa terkait dengan pengajuan da
mendahului anggaran untuk Tambahan Pembangunan Pasar Klithik
Semanggi sebesar Rp. 3.885.513.000,00 (*Tiga miliar delapan ra
delapan puluh lima juta lima ratus tiga belas rubu rupiah*) pe
prinsipnya dapat disetujui sepanjang tidak bertentangan deng
peraturan yang berlaku dan selanjutnya untuk dialokasikan dal
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatian
disampaikan terima kasih.

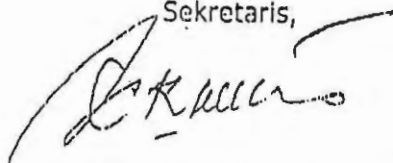
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
KOMISI II

Ketua,



JAMES AUGUST PATTIWAEI

Sekretaris,



H. SUROTO MANGUNSUDARMO, ST.



WALIKOTA SURAKARTA

Surakarta, 8 Mei 2006.

Kepada:

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Derah Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

921/1.006.1

1 (satu) berkas

Permohonan Dana Tambahan
Pembangunan Pasar Klithikan Semanggi dan
Ijin Pelaksanaan Mendahului Anggaran

Sebagaimana aspirasi warga Kota Surakarta dan kesepakatan bersama tentang Relokasi PKL Klithikan Banjarsari dan Pembangunan Pasar Klithikan di Semanggi yang tertuang dalam Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengesahan APBD Kota Surakarta Tahun 2006.

Berkenaan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan kelayakan sebagai pasar yang formal maka Pasar Klithikan Semanggi harus didukung dengan fasilitas yang lengkap dan memadai. Untuk memenuhi kelengkapan tersebut diperlukan biaya pembangunan sebesar Rp 9.931.612.000,-

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 telah mengalokasikan nilai fisik (nilai kontrak) sebesar Rp. 5.126.250.000,00. Sebagai upaya guna memenuhi kekurangan biaya kami telah mohon penambahan dana dengan surat kepada Gubernur Propinsi Jawa Tengah nomor : 900/S29 tanggal 7 Maret 2006 (terlampir). Permohonan tersebut ditanggapi Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor : 921/124/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang 90./SKO - 2006 mengalokasikan dana untuk kegiatan Pembangunan Pasar Klithikan Semanggi dengan nilai fisik Rp. 1.000.000.000,00 (terlampir).

Untuk mewujudkan keseluruhan bangunan masih diperlukan dana fisik sebesar Rp. 3.805.362.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Fisik	= Rp. 3.368.510.909,00
- PPN 10 %	= Rp. 336.851.091,00
- PPN 10% Pendamping Cansjuran Gubernur	= Rp. 100.000.000,00
Jumlah	= Rp. 3.805.362.000,00

Disamping keperluan dana untuk fisik di atas, masih diperlukan dana sebesar Rp 80.151.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya <i>Technical Assistance</i>	= Rp. 70.000.000,00
- Biaya Administrasi Umum	= Rp. 10.151.000,00

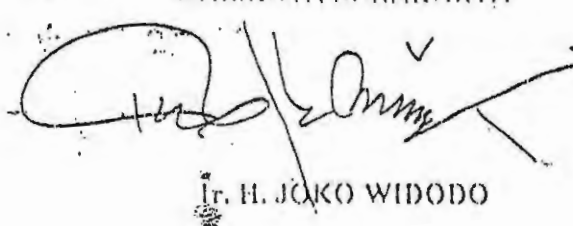
Dengan demikian jumlah keseluruhan dana yang masih diperlukan adalah sebesar Rp. 3.885.513.000,00,- (*Tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*). Selanjutnya dana tersebut dapat dialokasikan melalui APBD Perubahan Tahun 2006.

Schubungan dengan mendesakanya waktu pelaksanaan fisik untuk menyelesaikan Pembangunan Pasar Klithikan Semanggi dikaitkan dengan agenda Pemerintah Kota Surakarta akan melaksanakan pemindahan PKL Banjarsari dan Peresmian Penggunaan Pasar Klithikan Semanggi yang dijadwalkan tanggal 23 Juli 2006.

Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon ijin mendahului anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pasar Klithikan Semanggi dimaksud

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih perhatiannya.

WALIKOTA SURAKARTA



Ir. H. JOKO WIDODO

tembusan :

1. Wakil Walikota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Kepala BAPEDA Kota Surakarta;
4. Kepala BAWASDA Kota Surakarta;
5. Kepala Kantor Keuangan Daerah Kota Surakarta;
6. Arsip.

WALIKOTA SURAKARTA

Surakarta, 7 Maret 2006

900/529

1 (satu) berkas.

Permohonan Bantuan Dana INGOB,
Pembangunan Monumen 45 dan
Pasar Klithikan Surakarta.

Kepada :

Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat kami Nomor 900/2460 tanggal 11 Oktober 2005 perihal Permohonan Bantuan Dana INGOB, serta setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah bersama Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang pada tanggal 2 Maret 2006 di Rumah Dinas Walikota Surakarta Laji Gandrung, her ini kami laporkan hal - hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur bahwa perlu segera ditanganinya Penjualan Pedagang Kakilima di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta secara serentak melaksanakan program kegiatan tersebut, khususnya upaya penataan Pedagang Lina (PKL) Kawasan Banjarsari yaitu di Lapangan Monumen 45 Keen Banjarsari, sebagai tempat monumental perjuangan patriotik bangsa.
2. Rencana pemindahan PKL Banjarsari telah disepakati bersama di kawasan Sema Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta.
3. Rencana Anggaran Pembangunan Kembali Monumen 45 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta pembangunan kios di kawasan Sema beserta infrastruktur penunjangnya sejumlah ± Rp 9.600.000.000,- (sembilan enam ratus juta rupiah).
4. Untuk menyelesaikan kegiatan tersebut Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan pada TA. 2006 sebesar Rp 500.000.000,- untuk Pembangunan Kembali Monumen 45 Banjarsari dan Rp 5.500.000.000,- untuk Pembangunan Klithikan Semarang.

Sehubungan dengan perihal tersebut, kami mohon dengan hormat k Bapak Gubernur Propinsi Jawa Tengah untuk berkenan memberikan bantuan k Pemerintah Kota Surakarta sejumlah Rp 5.100.000.000,- (lima miliar seratus rupiah) guna menyelesaikan kekurangan anggaran dimaksud. Sebagai bahan pertimbangan kami haturkan Proposal sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenan Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih.



MBUSAN :

Kepala Bapeda Propinsi Jawa Tengah;
Ka. Biro Bangda Propinsi Jawa Tengah;
Ka. Biro Keuangan Propinsi Jawa Tengah;
Kepala Bapeda Kota Surakarta;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta;
Kepala Kantor Keuangan Daerah Kota Surakarta;
Arsip.



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 921 /124 /2006
90 /SKO - 2006

T E N T A N G

OTORISASI ANGGARAN GANJARAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Anggaran Belanja Biro Keuangan Setda P
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 perlu disediakan dengan mene
Surat Keputusan Otorisasi.

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pro
Jawa Tengah.
 - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ne
 - d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pe
an dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 - e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da
 - f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2000
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - i. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pel
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke
Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pe
Barang/Jasa Pemerintah ;
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005
28 Desember 2005 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 20
 - k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan da
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pe
Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
 - l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2005 t
Desember 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan d
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 ;
 - m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005 1
Desember 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005, tanggal 15 Desember 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

Jumlah uang setinggi-tingginya yang dibayarkan : Rp. 1.000.000.000,00 .
(Satu milyar rupiah).

Untuk keperluan kegiatan bantuan kepada : Kota Surakarta dalam rangka pembangunan pe-
Klithikan Semanggi.

Atas beban :

a. Bagian Belanja : Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Jenis Belanja : Bantuan kepada Pemerintah Kab. / Kota.

b. Tahun Anggaran : 2006

c. Unit Kerja : Biro Keuangan Setda Prov. Jateng.

Pengguna Anggaran : Drs. ADHI KARSADI, MSI
Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Jateng.

Pemegang Kas : M. NOOR HIDAYAT, SH
Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa Tengah.

Dasar Otorisasi :

a. DASK. : Tanggal : 1 - 5 - 2006
Nomor : 914/123/2006
90 / DASK - 2006

b. Jumlah untuk Anggaran yang bersangkutan : Rp. 35.000.000.000,00

Rekapitulasi Otorisasi :

a. Jumlah Anggaran : Rp. 35.000.000.000,00

b. s/d Otorisasi yang lalu : Rp.

c. Sisa Anggaran : Rp.

d. Otorisasi ini : Rp. 1.000.000.000,00

e. Sisa pada hari ini : Rp.

Ketentuan-ketentuan Lain :

a. Bahwa permintaan uang tersebut harus diajukan oleh Pemegang Kas bersangkutan dengan persetujuan Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah lewat Biro Keuangan berangsur-angsur menurut kebutuhan, baik beban tetap maupun untuk Pengisian Kas dan akan diberikan dengan mengadanya uang di Kas Daerah ;

Penyediaan dana per Triwulan terperinci sebagai berikut :

- Triwulan I Tahun 2006 sebesar Rp.
- Triwulan II Tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
- Triwulan III Tahun 2006 sebesar Rp.
- Triwulan IV Tahun 2006 sebesar Rp.

- b. Penyediaan uang tersebut kepada Pemegang Kas atas dasar Surat Keputusan sepanjang mengenai Pengisian Kas akan dimusukkan ke dalam Rekening Pemeg Kas yang bersangkutan pada PT. Bank Jateng ;
- c. Pengguna Anggaran yang bersangkutan berkewajiban memberikan persetujuan tagihan dan harus mengadakan / menjalankan pengawasan yang seksama pengurusan keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Kas;
- d. Penerima Bantuan bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran/keter pelaksanaan kegiatan ;
- e. Penerima Bantuan tiap bulan harus menyampaikan laporan pelaksanaan keg dan keuangan kepada Gubernur Jawa Tengah (Biro Keuangan, Bagian Akuntar Semarang).

Ditetapkan di : Semarang.
Pada Tanggal : 1 Mei 2006



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah ;
3. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri di Jakarta ;
4. Ketua BPK Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah ;
7. Kepala Kanwil X Ditjen Pajak Jawa Tengah ;
8. Kepala Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah ;
9. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
10. Walikota Surakarta ;
11. Ketua DPRD Kota Surakarta ;
12. Direktur PT. Bank Jateng di Semarang ;
13. Kepala Biro Keuangan (Bagian Verifikasi, Bagian Perbendaharaan, Bagian Akuntansi dan Bagian Anggaran) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
14. Pengguna Anggaran / Penerima Bantuan yang bersangkutan ;
15. Pemegang Kas yang bersangkutan ;
16. Bertinggal.

.....

Surakarta, 2 Mei 2006

Kepada :

Yth. Bapak WALIKOTA SURAKARTA

050/417

Permohonan Ijin Penunjukan Langsung
Lanjutan Peningkatan Pasar Kilthikan Semanggi

di - SURAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pasar Kilthikan Semarang dengan dana APBD Kota Surakarta Tahun 2006 yang berlokasi di Kampung Silir Kelural Semanggi Kecamatan Pasarkllwon Kota Surakarta, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan proses Penunjukan Langsung :
 - a. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 12.(1).a.5), bahwa pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
 - b. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17.(5), bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik tertutup maupun terbuka sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2006 Lampiran BAB III.B.4.b, bahwa untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.
 - d. Instruksi Walikota Surakarta Nomor : 90.3/001/2/2006 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2006, Bab III.I.3.d.h, bahwa pekerjaan lanjutan di bidang perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas teknis sesuai dengan lingkup bidang/sub bidang pekerjaan yang disetujui Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 310/K.CK/III/2 tanggal 29 Maret 2006 dengan nilai Rp. 5.126.250.000,- (*Lima milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) antara PT. SURYA BAYU SEJAHTI Semarang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran meliputi pekerjaan yang berupa pembuatan kios, bangunan masjid, kantor pengelola water tower.
3. Bahwa Pasar Kilthikan Semanggi Kota Surakarta belum sepenuhnya dapat terselesaikan secara sempurna baik dari segi arsitektural maupun fungsional dikarenakan masih terdapat komponen bangunan yang belum lengkap, antara lain : perbaikan atap sebagian pekerjaan plesteran dan pasangan, sebagian pekerjaan beton, sebagian pekerjaan atap, sebagian pekerjaan rabat lantai, sebagian pekerjaan rolling dan pekerjaan pengecatan, sebagian pekerjaan saluran lingkungan, pekerjaan rabat beton pedestrian, pekerjaan mekanikal dan elektrik, penambahan daya listrik, pemasangan keramik dan plafond, pekerjaan drainase, dan pembuatan area parkir.

4. Bahwa berdasarkan SKO Gubernur Jawa Tengah No.921/124/2006 tanggal 1 M
No.90.SKO - 3006
tentang Otorisasi Anggaran Ganjaran Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Anggaran 2006, untuk Kegiatan Peningkatan Pasar Klithikan mendapat bantuan
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) yang akan digunakan untuk p
penyempurnaan kios (plafon dan keramik), pekerjaan drainase, dan pekerja
parkir.

Sehubungan dengan perihal tersebut, kami mohon persetujuan serta perken
Walikota, pengadaan jasa pemborongan untuk Kegiatan Lanjutan Peningkatan Pasar
Semanggi dilaksanakan melalui proses Penunjukan Langsung.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terim

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. TJENG HAEDAR, MSI
NIP. 010 228 161

REMBUSAN :

Wakil Walikota Surakarta ;
Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Surakarta;
Kepala Kantor Keuangan Daerah Kota Surakarta;
Kasubdin Cipta Karya DPU Kota Surakarta;
Arsip.



DINAS PEKERJAAN UMUM

Jln. Jend. Urip Sumoharjo No. 92 Telp. (0271) 643050, 63626.
SURAKARTA 57128

Nomor : 648 / 196.1
Tempat : I (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pekerjaan Mendahului
Anggaran Kegiatan Peningkatan Pasar
Klithikan Semanggi.

Surakarta, 5 Mei 2006

Kepada :
Yth. TIM PENYUSUN ANGG/ KOTA SURAKARTA
di-

SURAKARTA

Menindak lanjuti surat kami kepada Ketua Tim Penyusun A
Pemerintah Kota Surakarta nomor : 648/195.1 tanggal 3 Mei 2006 perihal Perm
Penambahan Dana Pembangunan Pasar Klithikan Semanggi.

Sehubungan dengan mendesaknya waktu pelaksanaan fisik menyelesaikan Pembangunan Pasar Klithikan Semanggi dikaitkan dengan Pemerintah Kota Surakarta akan melaksanakan penindihan PKI. Banjarsar Peresmian Penggunaan Pasar-Klithikan Semanggi yang dijadwalkan tanggal 23 Jul Kami mohon ijin mendahului anggaran untuk melaksanakan pekerjaan penye Pembangunan Pasar Klithikan Semanggi dimaksud senilai Rp 3.705.362.000,- (Tiga tujuh ratus lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah). Adapun yang me permohonan kami dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I. Perda No.5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 35 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya.
 - b. Pasal 39 ayat (1) dan (2)
Pasal 35. ayat (1)
Dalam Keadaan Darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang tersedia anggarannya setelah mendapat persetujuan DPRD.
Penjelasan ayat (1)
Termasuk belanja untuk keperluan mendesak
Pasal 35. ayat (2)
Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam Peru APBD dan atau Perhitungan APBD
Pasal 39. ayat (1)
Pengeluaran Kas yang mengakibatkan bétan APBD tidak dapat dilan sebelum Rancangan Perda tentang APBD disahkan dan ditempatkan e Lembaran Daerah
Pasal 39. ayat (2)
Pengeluaran Kas sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengel belanja Pegawai yang foemasinya telah ditentukan dan keperluan kepe lain yang sifatnya mendesak dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan ijin DPRD.
- II. KepMendagri 29/ 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyus Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 26. ayat (1) Perubahai APBD dilakukan sehubungan dengan
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang be strategis
 - c. Terjadinya Kebutuhan mendesak

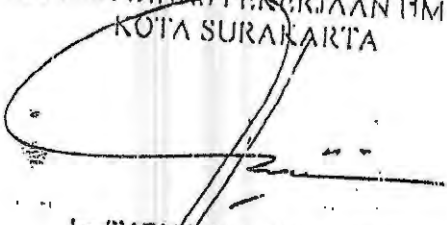
III. Peraturan Pemerintah 58 / 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Catatan :

Diberlakukan Tahun Anggaran 2007 dengan seiring berlakunya Perm
no. 13 / 2006 Perihal Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian permohonan kami untuk menjadikan periksa dan atas-perket
kami menyampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SURABAYA


Ir. TJENG HAEDAR, MSI

Pembina Tk I

NIP. 010 228 161

MBUSAN :

Walikota Surabaya (sebagai laporan);

Wakil Walikota Surabaya;

Panitia Anggaran DPRD Kota Surabaya;

Kepala BAWASDA Kota Surabaya;

Kepala Kantor Keuangan Daerah Kota Surabaya;

Arsip.

LEGAL OPINION DUGAAN KORUPSI REKLAME VIDEOTRON MANAHAN SOLO

Posisi Kasus

Dugaan kasus korupsi reklame videotron di pertigaan Gor Manahan Surakarta yang pembangunannya dilakukan oleh PT. Loka Niaga Adipermata. Pembangunan reklame Videotron di pertigaan Manahan sebelum dimulai dibangun. PT. Loka Niaga Adipermata mengirim surat kepada Walikota Surakarta tertanggal 15 Desember 2008 dan atas surat tersebut ternyata tidak dijawab oleh Walikota Surakarta akan tetapi dijawab oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Budi Suharto dan dengan memberikan surat tanggal 19 Desember 2008, yang berisi memberikan rekomendasi PT. Loka Niaga Adipermata untuk didaftarkan sebagai peserta lelang *dan hanya diikuti satu peserta lelang yang terdaftar yaitu PT. Loka Niaga Adipermata.*

PT. Loka Niaga Adipermata melakukan pembangunan Videotron di Pertigaan Gor Manahan sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2008 digelar penjelasan lelang dan kemudian tanggal 23 Desember 2008 pelaksanaan lelang baliho, billboard, bando dan JPO yang diikuti biro iklan namun peserta yang hadir tidak tahu kalau ada lelang Videotron.

Pada tanggal 24 Desember 2008 digelar rapat di ruang lantai II Dispenda pukul 14 wib untuk menyaksikan pemaparan pemasangan videotron yang dipimpin kepala Dispenda Budi Suharto dihadiri PT. Jarum Budi Ismoyo (Pemenang lelang) dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Wardhani, Dinas Tata Kota Ahmad Aroni, Kantor Aset Singgih Y dan DLLAJ Yosca Herman SJ. (Solopos 18 Maret 2009)

Rencana awal pemasangan reklame videotron dilakukan di tiga lokasi yaitu di Pertigaan Gor Manahan, Perempatan Jl. Adisucipto Manahan dan Perempatan Panggung Jl. Kolonel Sutarto Jebres dengan nilai Rp. 4 miliar terungkap dalam rapat Komisi III dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKA). Sebelumnya ketiga lokasi tersebut sudah ada kajian yang dilakukan oleh CV. Tika Martindo Design dengan alamat tidak jelas dengan anggaran dari Pemkot sebesar Rp.90 Juta. Dalam kerja menentukan lokasi tempat dilakukan *tanpa melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.*

Atas kajian tersebut CV. Tika Martindo memberikan rekomendasi pemasangan videotron dapat dilakukan di tiga lokasi yaitu di Pertigaan Manahan, Perempatan Jl. Adisucipto Manahan dan Perempatan Panggung Jl. Kolonel Sutarto Jebres Surakarta dengan skala prioritas di Perempatan Panggung Jebres Surakarta. Namun Pemerintah Kota Surakarta dengan PT. Loka Niaga Adipermata melakukan pemasangan Videotron di Pertigaan Gor Manahan, dan atas kebijakan Pemkot tersebut Tim Konsultan dari CV. Tika Martindo Desain mengaku kecewa, sebagaimana disampaikan oleh Tenaga Ahli Perencanaan Tata Ruang Wilayah Urban Design *Ir. Winny Astuti, MSc.Phd. yang menyatakan bahwa mestinya pemasangan Videotron tidak di Pertigaan Gor Manahan Surakarta karena tidak sesuai dengan rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan. Mestinya yang menjadi prioritas adalah di Perempatan Panggung Jebres Surakarta karena lokasi lebih*

luas dan tidak bertentangan dengan estetika tata ruang kota. (Solopos 10 Maret 2009).

Kasus pemasangan videotron di pertigaan Gor Manahan ini telah menjadi polemik dimasyarakat dimana dari kalangan DPRD telah mengajukan Hak Interpelasi (Solopos 7 Maret 2009) dan dari kalangan akademisi diantaranya Prof. Dr. Adi Sulistyono, Prof Dr. Jamal Wiwoho, dari UNS dan dari UMS Prof. Khudzaifah Dimyati serta tokoh masyarakat Surakarta yang pada intinya meras prihatin karena pemasangan Videotron di Pertigaan Manahan Surakarta karena di duga ada kesalahan prosedur dan administrasi serta menghilangkan nilai estetika dan etika . (Solopos 13 Maret 2009).

Langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surakarta

Kejaksaan Negeri Surakarta mulai mengusut kasus dugaan penyimpangan prosedur dan administrasi dalam pemasangan Videotron di Pertigaan Gor Manahan Surakarta, sebagaimana disampaikan oleh Kajari Surakarta Djuwaeriyah, SH yang menyatakan bahwa " Kami akan menindaklanjuti kasus itu secepatnya , kami tidak main main yang jelas tunggu saja . " (Solopos 5 Maret 2009). Atas sikap Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut kemudian Kasi Pidsus Sigit Kristanto, SH mulai melakukan mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan dengan memanggil sejumlah pejabat Pemkot Surakarta.

Pemeriksaan terhadap pejabat Pemerintah Kota Surakarta dilakukan terhadap : Plt. Sekda Surakarta, Supradi Kertamenawi , Kepala Dinas Tata Ruang Kota (DTRT) Agus Joko Witioarso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bhudi Yulistianto, Mantan Kepala Dispenda Budi Suharto dan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Surakarta Toto Amanto didampingi Kabag Hukum Supartono diperiksa di Kejaksaan Negeri Surakarta (Solopos 12 Maret 2009). Pemanggilan penyidik Kejaksaan juga dilakukan terhadap Kepala Dinas Tata Kota (DTK) Agus Joko Witiyarso dan staf lapangan DTK Rochmat (Solopos 13 Maret 2009). Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Yosca Herman Soedrajat diperiksa Kejaksaan Negeri Surakarta (Solopos tanggal 17 Maret 2009). Pegawai Pemkot dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Wardhani dan Amirudin, Staf dari PT. Loka Niaga Adipermata Budi Ismoyo juga diperiksa Kejaksaan Negeri Surakarta (Solopos tanggal 18 Maret 2009).

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat, Budi Suharta, Budi Suharta adalah saksi yang berperan penting dalam pemasangan videotron di Pertigaan Gor Manahan, yang dalam pemerisaannya ternyata mengakui tidak membentak tlm lelang dalam proyek pengadaan videotron, melainkan dengan penunjukan langsung. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendapatan Daerah Gunung Indro Susanto diperiksa kejaksaan Negeri Surakarta (Solopos 1 April 2009).

Atas beberapa pemeriksaan pejabat Pemkot Surakarta tersebut Kasi Pidsus Sigit Kristanto,SH mengakui adanya fakta bahwa dalam pengadaan videotron tidak dilakukan secara lelang (Solopos 18 Maret 2009). Lebih lanjut Sigit Kristanto, SH Kasi Pidsus menyatakan membenarkan adanya

kelidak sesuaian prosedur dalam pemasangan lelang Videotron. (Solopos 1 April 2009) karena dari hasil pemeriksaan terhadap Budi Suharto, terungkap bahwa tidak ada SK pembentukan Panitia Lelang. (Solopos 4 april 2009) .

Namun demikian Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Djuwaeriyah , SH menyatakan bahwa pihaknya tidak akan buru buru menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan data / Puldata dan mengumpulkan keterangan/ Pulket. (Solopos 4 April 2009) : Selanjutnya dalam perkembangan penyelidikan di Kejaksaan Negeri Surakarta ternyata penyidik dari Kejaksaan Negeri Surakarta tidak dapat segera melakukan proses pemeriksaan oleh karena kesulitan untuk mendatangkan atau meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit yang nantinya dapat diketahui kerugian negara. (Solopos 2 Desember 2009)

Analisa Kasus

Kejaksaan Negeri Surakarta mulai melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dan data dari saksi para Pejabat Pemerintah Kota Surakarta yang dipanggil untuk diperiksa mulai bulan Maret 2009. Bahwa namun demikian sampai dengan saat ini bulan Desember 2009 penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Surakarta belum menemui kemajuan yang berarti untuk meningkatkan proses pemeriksaan ketahap penyelidikan dengan menetapkan tersangka atau kasus dugaan korupsi Videotron ditutup karena tidak cukup bukti.

Alasan dari Kejaksaan Negeri Surakarta adalah kesulitan dalam mendatangkan BPK untuk melakukan audit guna mengetahui ada kerugian negara adalah terlalu formalistik. Bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi saksi dari pejabat Pemkot Surakarta dan pihak PT. Loka Niaga Adipermata dalam rangka penyelidikan mengumpulkan data dan keterangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. **Bahwa pengadaan pemasangan Videotron dilakukan PT. Loka Niaga Adipermata dengan penunjukan langsung atau tidak dilakukan dengan lelang sebagaimana pengakuan Budi Suharto karena tidak ada SK penunjukan Panitia Lelang.**
2. **Bahwa penunjukan langsung terhadap PT. Loka Niaga Adipermata dengan Pemerintah Kota Surakarta, kemudian dibuat perjanjian pembagiannya adalah space reklame pada videotron sebesar Rp. 30 % untuk Pemkot dan 70 % untuk bisnis dengan batas waktu lima tahun. Padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemasangan Baloho satu tahun dan reklame selama 3 tahun.**
3. **Bahwa Tim Penataan Reklame yang anggotanya dari lintas SKPD tidak dilibatkan sebagaimana pengakuan dari Ketua Tim Penataan Reklame /PLt Sekda Solo Supardi Kertamenawi yang tidak dilibatkan dalam menentukan standar dan titik titik reklame atau tidak tahu menahu pemasangan videotron di Pertigaan Manahan Surakarta. Penentuan titik titik pemasangan diserahkan kepada pihak ketiga CV.Tika Martindo yang dalam kerjanya juga tidak melibatkan SKPD terkait.**

4. Bahwa untuk penentuan titik titik reklame seharusnya dilakukan oleh Tim Penataan Reklame yang anggotanya dari lintas SKPD, sebagaimana Surat Keputusan Walikota Solo No. 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan reklame dalam Bab III tentang Tim Penataan dan Standarisasi Reklame, yang dalam pasal 3 dinyatakan bahwa standar dan tempat pemasangan reklame diwilayah solo ditetapkan oleh tim penataan reklame dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Sekda
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Sekertaris I : Kasi Dinas Pertamania dan Kebersihan (DKP)
Sekertaris II : Kasi Pendaftaran dan pendataan Dispenda
Anggota : Kepala Dinas tata Kota (DTK), Kepala Dinas
Pekerjaan Umum (DPU), Kabag Hukum, Kabag.

5. Bahwa namun demikian yang melakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan menunjuk CV. Tika Martindo Desidn dengan alamat tidak jelas dengan anggaran dari Pemkot sebesar Rp.90 Juta untuk melakukan kajian dan menentukan titik titik pemasangan reklame dan kemudian CV. Tika Martindo memberikan rekomendasi pemasangan reklame Videotron rencananya dilakukan di tiga lokasi yaitu di Pertigaan Gor Manahan, Perempatan Jl. Adisucipto Manahan dan Perempatan Panggung Jl. Kolonel Sutarto Jebres Surakarta adalah tempat sekala prioritas rekomendasinya.
6. Bahwa Penetapan Pemerintah Kota Surakarta yang lebih memilih pertigaan Gor Manahan disésalkan oleh Tenaga Ahli Perencanaan Tata Ruang Wilayah Urban Design, Ir. Winny Astuti, MSc.PHD. yang menyatakan bahwa mestinya pemasangan Videotron tidak di Pertigaan Gor Manahan Surakarta karena tidak sesuai dengan rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan. Yang menjadi prioritas tim adalah di Perempatan Panggung Jebres Surakarta karena lokasi lebih luas dan tidak bertentangan dengan estetika tata ruang kota. (Solopos 10 Maret 2009).
7. Bahwa dengan demikian pelaksanaan pemasangan videotron dari aspek prosedur penunjukan langsung bertentangan dengan ketentuan KEPRES NO. 80 tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang / Jasa pemerintah.
8. Bahwa demikian juga dengan penentuan lokasi yang tanpa melibatkan Tim penataan Reklame yang anggotanya dari lintas SKPD, Pemerintah Kota Surakarta telah mengabaikan ketentuan dalam SK. Walikota No. 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan reklame dalam Bab III tentang Tim Penataan dan Standarisasi Reklame dalam pasal 3 dinyatakan bahwa standar dan tempat pemasangan reklame diwilayah solo ditetapkan oleh tim penataan reklame.
9. Bahwa dengan demikian dari keterangan saksi dalam pemeriksaan penyelidikan telah ditemukan delik dalam kasus pemasangan Videotron di pertigaan Gor Manahan Surakarta, dimana telah melanggar ketentuan dalam Kepres 80 tahun 2003 tentang

pengadaan barang dan jasa dan Surat Keputusan Walikota No. 4 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan reklame dan peraturan yang terkait lainnya, oleh karenanya peningkatan setatus dalam pemeriksaan sudah dapat dilakukan ketahap penyidikan dengan menetapkan tersangkanya.

10. Bahwa alasan Kejaksaan Negeri Surakarta yang belum meningkatkan ketahap penyidikan karena kesulitan dalam mendatangkan BPK untuk menentukan kerugian negara tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.
11. Bahwa dugaan pasal tindak pidana korupsi adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 2 :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,- dan paling banyak 1.miliar;

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau sedikit dikitnya 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak 1 miliar;

12. Bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dinyatakan bahwa **melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.**
13. bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait asas kepatutan dicabut dan dalam pemberantasan korupsi lebih ditekankan pada delik formal, oleh karenanya untuk menentukan **unsur dapat merugikan keuangan /perekonomian negara**, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang undang No. 31 tahun 1999 dinyatakan bahwa dalam undang undang ini frase "**dapat "** sebelum frase "**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana

korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat .

14. Bahwa salah satu alasan klise untuk dimintakannya audit dari BPK dan atau BPKP adalah untuk menghitung kerugian negara yang nantinya dapat dimintakan hukuman tambahan dengan uang pengganti atau mengembalikan kerugian negara sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah terdau berlebihan, oleh karena dalam menentukan kerugian negara / akibat tindak pidana korupsi selain tidak bersifat mutlak (delik formil) juga kerugian negara dapat dimintakan keterangan dari saksi ahli yang dapat memberikan keterangan tentang kerugian yang sudah muncul dan atau yang akan timbul akibat tindak pidana korupsi.
15. bahwa kalau kita melihat kasus dugaan korupsi disekitar Solo Raya misalnya kasus dugaan Korupsi Bantuan Dana KONI dan Bantuan Dana untuk PERSIWI Wonogiri pengusutan nya tanpa menunggu atau melibatkan audit BPK, demikian juga dengan kasus kasus korupsi daerah lainnya, bahwa untuk membuktikan unsur kerugian negara Kejaksaan Negeri Wonogiri meminta keterangan dari saksi ahli sehingga dalam perkara dugaan korupsi di Persiwi dan KONI di Kab. Wonogiri tersebut telah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Wonogiri

Berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah selayaknya pemeriksaan dugaan korupsi Videotron di pertigaan Gor Manahan dapat segera ditingkatkan ketahap penyidikan dengan menentukan tersangkanya dan seterusnya dapat segera dituntaskan sesuai dengan peraturan perundang udangan yang berlaku .

Demikian legal opinion kasus Videotron di pertigaan Gor Manahan Surakarta, sekian dan terima kasih.

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007
2. PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI – KOMISI

Rapat dibuka Pukul : 00.30

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota Surakarta,
Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan,
Yth. Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta,
Serta para tamu Undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenankanlah kami atas nama Pimpinan Dewan mengajak se! hadirin yang terhormat untuk bersama-sama memanjatkan Puji Syukur keha! Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, pada har! kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan se! sejahtera.

Atas kehadiran Saudara – saudara disampaikan selamat datang dan ter! kasih atas perkenannya memenuhi Undangan Dewan pada acara Rapat Paripu! dengan pokok bahasan :

1. Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi – komisi.
2. Penandatanganan Perubahan KUA dan Penandatanganan Perubahan PPA
3. Pendapat Akhir Fraksi dan Penandatanganan Persetujuan Bersama RAP! TA. 2007.

Selanjutnya kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan un! melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang te! ditanda tangani.

Yth. Bapak Walikota Surakarta. Bapak Pimpinan Rapat. Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Sabtu, tanggal 17 Maret 2007 dihadiri oleh 33 orang Anggota Dewan.

Nama Anggota Dewan yang diundang dan tidak / belum hadir adalah :

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Hary Rudyanto | - Ijin. |
| 2. Ign. Juni Wahyono | - Ijin. |
| 3. Muhammad Fajri | - Ijin. |

Adapun Anggota DPRD yang berhalangan hadir / tidak diundang atas dasar Pasal 106 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, adalah :

1. Drs. Bandung Joko Suryono, SH
2. Darsono, SE.
3. Purwono, SH.
4. HM. Yusuf Hidayat.

Demikian laporan Presensi Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan, dari 40 Anggota Dewan yang telah hadir sebanyak 33 Anggota. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 61 ayat (1) huruf b Rapat Paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota Dewan, untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan ayat (1) huruf c dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah Anggota DPRD, untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b. Dengan demikian Rapat Paripurna dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan "*Bismillahirohmannirohim*" Rapat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (Ketok Palu 3 x)

dan Keanggotaan Komisi – komisi, dengan berdasarkan pada ketentuan – ketentuan yang tertuang dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan Hasil Rapat Antar Pimpinan Fraksi pada tanggal 6 Maret 2007, telah dilakukan Rolling Komisi sesuai dengan pengajuan dari masing – masing Fraksi dan telah terbentuk Pimpinan Komisi – komisi melalui Pemilihan Pimpinan Komisi yang dilaksanakan pada siang hari ini jum'at tanggal 16 Maret 2007.

Berdasarkan ketentuan Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 22 ayat (8) yang menyebutkan bahwa masa penetapan Anggota dalam Komisi dan perpindahan Komisi lain diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal Tahun Anggaran, maka dalam Rapat Paripurna ini akan ditetapkan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi – komisi, untuk itu kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk membacakan naskah Keputusan DPRD Tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi – komisi.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan naskah keputusan dari penyerahan naskahnya, untuk itu perlu kami tawarkan "apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD Tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi – komisi dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Pimpinan DPRD ?"

DEWAN MENJAWAB : Setu

Terima kasih, memasuki acara selanjutnya adalah Penandatanganan Perubahan KUA dan Penandatanganan Perubahan PPA. Sesuai dengan rapat Panitia Musyawarah pada tanggal 16 Maret 2007 dengan catatan rapatnya Nomor 8/PM-DPRD/III/2007 telah diagendakan pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPA pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2007 dan pembahasan mana telah berlangsung sejak sore dan malam hari ini tadi, untuk selanjutnya akan ditanda tangani pada Rapat Paripurna malam hari ini. Kepada Sekretaris Dewan agar mempersiapkan kelengkapannya.

Kami mohon kepada Saudara yang terhormat Walikota untuk menandatangani Perubahan KUA dan Perubahan PPA. Dan saya Wakil Ketua DPRD selaku Pimpinan DPRD juga akan menandatangani Perubahan tersebut. Dipersilahkan..... untuk segenap hadirin dimohon berdiri.

PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA

.....
(Kemudian penyerahan persetujuan bersama kepada Yth. Sdr. Walikota)

Bersama ini saya serahkan perubahan KUA dan Perubahan PPA, selanjutnya untuk ditindak lanjuti.

Hadirin kami mohon duduk kembali.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Pendapat Akhir Fraksi dan Penandatanganan Persetujuan Bersama RAPBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007. Dan sebagaimana Rapat Paripurna Dewan tanggal 14 Maret 2007 yang lalu telah diselenggarakan Laporan Hasil Pembahasan Komisi – komisi dan telah diadakan Sinkronisasi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007. Sesuai dengan Hasil Rapat Panitia Musyawarah tanggal 16 Maret 2007 dengan catatan rapatnya Nomor 8/PM-DPRD/III/2007 diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada malam hari ini Jum'at tanggal 16 Maret 2007 dengan acara pokok : Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan bersama RAPBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya adalah :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Yth. Sdr. Pratikno, SH. | dari Fraksi PD |
| 2. Yth. Sdr. Bakti Karebet | dari Fraksi PG |
| 3. Yth. Sdr. Abdullah Abdulkadir Assegaf | dari Fraksi PAN |
| 4. Yth. Sdr. Maryuwono, SH | dari Fraksi PDI - P |
| 5. Yth. Sdr. Eko Susanto, Amd. Kom | dari Fraksi PDS |
| 6. Yth. Sdr. Ir. Muhammad Rodhi | dari Fraksi PKS |

Baiklah untuk yang pertama dipersilahkan kepada Yth. Sdr. Pratikno dari fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Disampaikan Oleh :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Yth. Sdr. Pratikno, SH | dari Fraksi PD. (Terlampir) |
| 2. Yth. Sdr. Bakti Karebet | dari Fraksi PG. (Terlampir) |
| 3. Yth. Sdr. Abdullah Abdulkadir Assegaf | dari Fraksi PAN. (Terlampir). |
| 4. Yth. Sdr. Maryuwono, SH | dari Fraksi PDI - P (Terlampir) |
| 5. Yth. Sdr. Eko Susanto, Amd. Kom | dari Fraksi PDS (Terlampir) |
| 6. Yth. Sdr. Ir. Muhammad Rodhi | dari Fraksi PKS (Terlampir). |

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Pratikno, SH dari Fraksi Partai Demokrat, Sdr. Bakti Karebet dari Fraksi Partai Golkar, Sdr. Abdullah Abdulkadir Assegaf dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Sdr. Maryuwono, SH dari Fraksi Partai PDI - Perjuangan, Sdr. Eko Susanto, Amd. Kom dari Fraksi Partai Damai Sejahtera dan Sdr. Ir. Muhammad Rodhi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dan penyerahan naskahnya.

Surakarta TA. 2007 untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APB Kota Surakarta TA. 2007. Dan satu (1) fraksi yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan Menolak.

Oleh karena itu rapat di skors 15 menit untuk diadakan Rapat Antar Pimpinan Fraksi.

Rapat Diskors 15 Menit.

Skors dicabut, dan Rapat dibuka kembali.

Hasil rapat Antar Pimpinan Fraksi-fraksi tidak mencapai kata sepakat, oleh karena itu akan dilakukan pemungutan suara (Votting). Pemungutan Suara at Votting diikuti oleh 30 orang Anggota Dewan dari 33 orang anggota yang ha berdasarkan presensi. Hasil Votting 23 orang menerima / menyetujui dan 10 orang menolak (dari fraksi Partai Amanat Nasional).

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Penandatanganan Persetujuan Bersama RAPE Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007 Antara Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Surakarta, kepada Sekretariat Dewan untuk mempersiapkan kelengkapannya. Kami mohon kepada Yth. Sdr. Walikota untuk menanda tangani Persetujuan Bersama dimaksud dan saya Wakil Ketua DPRD selaku Pimpinan DPRD ju akan menandatangani Persetujuan Bersama, tersebut, dipersilahkan.

Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA

(Penyerahan Persetujuan Bersama kepada Yth. Sdr. Walikota)

"Bersama ini saya serahkan Persetujuan Bersama Tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007 dan selanjutnya untuk ditindak lanjuti".

Hadirin kami mohon duduk kembali. Terima Kasih.

bersama Walikota dan Pimpinan DPRD terkait dengan ...
Surakarta Tahun Anggaran 2007.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Akhirnya selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan, dan
atas nama Pimpinan Dewan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin
atas kesabaran dan perhatiannya yang telah mengikuti Rapat pada hari ini,
demikian juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat
Paripurna ini.

Dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobilalamin*", akhirnya Rapat dapat
diakhiri dan Rapat hari ini kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3 x)

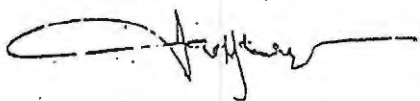
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rapat ditutup pukul : 02.30 WIB

Surakarta, 17 Maret 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**


Pimpinan Rapat,



ALQAF HUDAYA, SH

Wakil Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



PUJA HARIYANTO, SH., MM

NIP. 500 078 213



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2008**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 17 A /RLHP/XVIII.SMG/04/2009

Tanggal : 17 April 2009

4. PENCATATAN DAN PENYIMPANAN UANG DAERAH BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN SECARA TERTIB

Pemerintah Kota Surakarta pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 menyajikan saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp41.737.529.825,40 yang terdiri atas rekening giro sebesar Rp35.737.529.825,00 pada Bank Jateng dan rekening deposito sebesar Rp6.000.000.000,00 pada Bank Niaga dengan rincian:

No	Nama Sertifikat	No. Rekening	Suku Bunga	Jumlah (Rp)	Jangka waktu
1.	Drs. A (Pemda)	056-01-18493-20-2	8,25%	1.000.000.000,00	28 Desember 2007 - 25 Juni 2008
2.	Drs. A	056-01-17660-20-4	7,50%	2.500.000.000,00	14 Februari 2007 - 14 Februari 2008
3.	Drs. A	056-01-17659-20-3	7,50%	2.500.000.000,00	14 Februari 2007 - 14 Februari 2008
	Jumlah			6.000.000.000,00	

Saldo kas di rekening giro Bank Jateng sudah sesuai dengan rekening Koran per 31 Desember 2008.

Dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Mengenai pengelolaan uang, Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan manajemen kas dengan membuat anggaran kas dan berdasarkan anggaran kas tersebut Pemkot Surakarta melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan kegiatan untuk memanfaatkan kelebihan kas, misalnya dengan menempatkannya pada deposito, maupun kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas, misalnya dengan melakukan pinjaman daerah. Pemeriksaan kas (*cash opname*) terhadap BUD dilakukan pada tanggal 2 April 2009. Hasil pemeriksaan kas menunjukkan:

1.	Saldo menurut rekening	:		
	a. No. 1-002-00217-7 (Kasda)	Rp	10.754.145.842,00	
	b. No. 1-002-04044-2 (DAU)	Rp	15.403.963.601,00	
	c. Surat berharga lainnya	Rp	46.000.000.000,00	
	Jumlah	Rp		72.158.109.443,00
2.	Saldo menurut Buku Kas Umum	Rp		10.754.145.842,00
3.	Selisih	Rp		61.403.963.601,00

Selisih terjadi karena adanya saldo di rekening DAU sebesar Rp15.403.963.601,00 serta penempatan uang dalam bentuk deposito sebesar Rp46.000.000.000,00 yang terdiri dari:

No	Nama Sertifikat	Bank	Tgl Aplikasi	No. Rekening	Jumlah (Rp)	Jk waktu	Si B
1.	Drs. A (Pemda)	Niaga	02-04-2009	056-01-20853-20-2	1.000.000.000,00	3 bl	11
2.	Drs. A	Niaga	02-04-2009	056-01-20853-20-4	2.500.000.000,00	3 bl	11
3.	Drs. A	Niaga	02-04-2009	056-01-20854-20-8	2.500.000.000,00	3 bl	11
4.	Pemerintah Kota Surakarta	Muamalat	18-03-2009	52103090022001	10.000.000.000,00	1 bl	B ha 50
5.	Pemda Kodya Dati II Surakarta	Bank Jateng	10-02-2009	039238	30.000.000.000,00	1 bl	85
	Jumlah				46.000.000.000,00		

Sertifikat asli deposito pada Bank Muamalat dan Bank Jateng disimpan oleh BUD di brankas kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), sedangkan untuk sertifikat asli deposito pada Bank Niaga disimpan oleh Bank Niaga. BUD hanya menyimpan fotokopinya.

BPK melakukan pengecekan ke bank tanggal 2 April 2009 untuk melihat sertifikat asli deposito tersebut namun Asisten Manager (petugas yang bertanggungjawab atas penyimpanan deposito tersebut) sedang tidak ada di tempat dengan alasan menghadiri rapat di Semarang. Para karyawan bank Niaga yang lain tidak dapat membahtu BPK untuk menunjukkan sertifikat asli, karena hanya Asisten Manager tersebut yang mengetahui.

Kemudian BPK datang lagi keesokan harinya tanggal 3 April 2009 dan ditemui oleh Asisten Manager tetapi Asisten Manager tidak dapat menunjukkan sertifikat asli deposito yang dimaksud karena menurut keterangannya sertifikat-sertifikat tersebut sudah dihancurkan dengan alasan terjadi perubahan tingkat suku bunga. Sebagai gantinya diterbitkan sertifikat deposito yang baru pada tanggal 2 April 2009, tanggal yang sama dengan saat dilakukannya pemeriksaan kas BUD dan saat dilakukan pengecekan sertifikat tersebut, dan juga tanggal yang sama dengan saat Asisten Manager sedang ke Semarang menghadiri rapat. Namun dokumen yang ditunjukkan kepada BPK pada tanggal 3 April 2009 adalah Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka (*Confirmation of Time Deposit*), bukan sertifikat asli deposito. Pada dokumen Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka tersebut disebutkan keterangan sebagai berikut: Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka ini

diterbitkan oleh Bank semata-mata sebagai tanda penerimaan sejumlah dana Nasabah untuk didepositokan pada Bank, bukan merupakan surat berharga ataupun surat berharga yang dapat diperjualbelikan ataupun dialihkan.

Keterangan yang diberikan oleh Asisten Manager ini banyak yang berbelit-belit. Menurutnya diterbitkannya sertifikat yang baru karena terjadi perubahan tingkat suku bunga. Namun selanjutnya dijelaskan selama jangka waktu penyimpanan tersebut tingkat suku bunga selalu berubah, akan tetapi sertifikat deposito tidak pernah diganti dengan yang baru. Asisten Manager lebih lanjut menjelaskan bahwa tentang perpanjangan otomatis tergantung dari permintaan deposan, yang dilakukan dengan memberikan *advice* mengenai perubahan-perubahan apa saja yang diminta oleh deposan. Sertifikat deposito yang baru ini jangka waktu penempatannya berubah, dari enam bulan dan satu tahun, menjadi tiga bulan selama (2 April 2009 – 1 Juli 2009 ARO).

Keterangan yang diperoleh dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini merupakan deposan – adalah bahwa BUD tidak pernah meminta untuk merubah jangka waktu deposito, juga tidak pernah menerima *advice* dari bank Niaga. Dengan demikian keterangan dari pihak bank tidak sesuai dengan keterangan BUD sehingga seharusnya pihak bank tidak perlu melakukan perubahan apapun pada deposito tersebut.

Dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa:

- a. Sertifikat deposito yang ditempatkan di bank Niaga adalah atas nama pribadi Bendahara Umum Daerah bukan atas nama Daerah. Alamat yang digunakan juga alamat rumah bukan alamat kantor.
- b. Setoran bunga deposito ke Kas Daerah tidak mudah ditelusur ke rekening koran Kas Daerah karena setiap kali terjadi penyetoran bunga, Pemkot Surakarta (dalam hal ini Bidang Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) tidak menerima tembusan setoran tersebut;
- c. Dalam catatan atas laporan keuangan Pemkot Surakarta Tahun 2008, dinyatakan bahwa sertifikat deposito tersebut berjangka waktu satu bulan dengan perpanjangan secara otomatis (ARO – *Automatic Roll Over*) sehingga diklasifikasikan sebagai Kas, sedangkan jangka waktu penyimpanan yang

tertuliskan di salinan sertifikat deposito adalah enam bulan dan satu tahun ARO. Dengan demikian deposito tersebut adalah termasuk Investasi Jangka Pendek;

d. Bank sudah tidak menyimpan sertifikat asli deposito karena sertifikat tersebut sudah dihancurkan, dengan alasan terjadi perubahan suku bunga. Bank Niaga menerbitkan sertifikat deposito yang baru (pada saat dilakukan pemeriksaan kas, Asisten Manager baru bisa menunjukkan surat Konfirmasi Penempatan Deposito, belum menunjukkan sertifikat-nya). Konfirmasi Penempatan Deposito ini diterbitkan pada tanggal 2 April 2009, tanggal dan hari yang sama dengan dilakukannya pemeriksaan kas oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut keterangan Asisten Manager yang menangani deposito Pemkot Surakarta ini, dokumen surat berharga yang sudah tidak berlaku akan dihancurkan dalam waktu tiga bulan setelah dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan sertifikat-sertifikat ini baru tidak berlaku tanggal 2 April 2009 (karena sudah diterbitkan sertifikat baru – yang pada saat pemeriksaan belum berupa sertifikat, tetapi hanya Konfirmasi Penempatan). Sehingga jangka waktu saat dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku dengan saat diadakan pemeriksaan untuk mengetahui sertifikat deposito yang asli adalah baru satu hari (tanggal 3 April 2009). Tidak seharusnya dokumen tersebut sudah dihancurkan. Penelusuran terhadap bunga deposito yang masuk ke Kasda menunjukkan bahwa selama Tahun 2008, bunga atas penempatan deposito di bank Niaga sebesar Rp5.000.000.000,00 (Rp2.500.000.000,00 + Rp2.500.000.000,00) sudah masuk ke Kasda, sedangkan bunga atas penempatan deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 belum masuk ke Kasda karena untuk deposito ini, perlakuan terhadap bunga adalah secara ARO, dimana bunga disimpan di bank Niaga dan pada saat jatuh tempo akan ditambahkan kepada pokok deposito. Transaksi di Kasda setelah tanggal neraca, yaitu antara bulan Januari – Maret 2009 menunjukkan bahwa setoran bunga deposito dari Bank Niaga terakhir masuk ke Kasda pada tanggal 9 Januari 2009. Sedangkan pada bulan Februari dan Maret 2009 sudah tidak ada lagi setoran bunga ini. Bunga deposito yang masuk ke Kasda selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I.

Menurut keterangan BUD, deposito baru dicairkan pada 14 April 2009 yang dibuktikan dengan surat No. 583.1/368/2009 dari Kepala DPPKA kepada Pimpinan Bank Niaga tanggal 8 April 2009 perihal Pencairan Deposito dan salinan rekening koran Kasda nomor rekening 1-002-04044-2 yang menunjukkan adanya transfer masuk melalui RTGS Niaga sebesar Rp1.002.827.397,00; Rp2.507.068.493,00; dan Rp2.507.068.493,00.

Penelusuran bunga deposito Tahun 2008 yang masuk ke Kas Daerah melalui statement rekening koran giro di Bank Jateng menunjukkan bahwa terdapat bunga deposito yang pada mulanya tidak diketahui asalnya. Pada saat ditanyakan bunga ini berasal dari deposito yang mana, Bidang Akuntansi DPPKA tidak mengetahui, karena Bank Jateng tidak pernah melampirkan nota kredit atau bukti transfer atas seloran bunga ini. Setelah DPPKA menanyakan kepada Bank Jateng, diketahui bahwa bunga tersebut berasal dari penempatan deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 sebagai penjaminan kredit atas nama PT. Askrindo yang ditunjuk sebagai pengelola kredit bergulir yang diberikan oleh bank kepada koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Hal ini menunjukkan kurang tertibnya pengelolaan pendapatan asli daerah yang berasal dari bunga deposito. Seharusnya Pemkot mengetahui setiap transfer masuk ke Kasda itu berasal dari mana.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada:
 - 1) Pasal 1 angka 14 Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/daerah;
 - 2) Pasal 1 angka 16 Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

- 3) Pasal 9 ayat (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - huruf h. Menyimpan uang daerah;
 - huruf i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
 - 1) No. 01 Penyajian Laporan Keuangan paragraph 49 yang berbunyi antara lain: Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan;
 - 2) No. 03 Laporan Arus Kas paragraph 9 Setara Kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya, Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan, Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya;
 - 3) No. 06 Akuntansi Investasi paragraph 12 yang antara lain berbunyi: Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas (a) deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- c. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 7 ayat (2) PPKD selaku BUD berwenang:
 - 1) Huruf c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - 2) Huruf f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pada:

- 1) Pasal 7 ayat (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga;
- 2) pasal 9 ayat (4) Penarikan dana dari rekening kas umum daerah di bank umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah; ayat (5) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- 3) Pasal 37 ayat (2) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa bendahara umum daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan;
- 4) Pasal 38 ayat (1) Bendahara Umum Negara/Daerah, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor atau satuan kerja di pusat maupun di daerah bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya; ayat (2) Bendahara Umum Negara/Daerah, kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya, yang menguasai uang Negara/daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan uang Negara/daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 5) Pasal 39 pengendalian internal terhadap pengelolaan uang Negara/daerah dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/ kepala kantor/satuan kerja.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Deposito atas nama pribadi bisa dicairkan sewaktu-waktu karena deposito ini atas nama pribadi bukan atas nama Pemkot Surakarta;
- b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan uang daerah;
- c. Tujuan pengendalian atas Kas tidak sepenuhnya tercapai.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Bendahara Umum Daerah tidak tertib dalam mengelola uang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Bendahara Umum Daerah tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Atas permasalahan di atas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta selaku Bendahara Umum Daerah menjelaskan bahwa:

- a. Yang terjadi sebenarnya bukan masalah ketidaktertiban pengelolaan penyimpanan uang daerah tetapi lebih kepada masalah adanya model pelayanan antar bank yang bervariasi. Jadi secara prinsip telah dilakukan pengelolaan penyimpanan uang daerah secara tertib. Sedangkan berkaitan dengan penyajian deposito sebesar Rp6.000.000.000,00 sebagai Kas tidak tepat, koreksi tersebut dapat kami pahami dan selanjutnya akan kami perbaiki dalam pelaksanaan pengelolaan penyimpanan uang daerah di tahun berikutnya.
- b. Bahwa saldo di Neraca Pemerintah Kota Surakarta TA 2008 sebesar Rp42.292.305.721,40 yang terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening giro atas Rekening Kas Umum Daerah Kota Surakarta pada PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta (No. Rek. 1-002-00217-7) sebesar Rp35.737.529.825,00;
 - 2) Deposito pada Bank Niaga Cabang Surakarta sebesar Rp6.000.000.000,00;
 - 3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp554.775.896,00.
- c. Atas penempatan deposito di Bank Niaga sebesar Rp6.000.000.000,00 tersebut, pendapatan bunganya secara prinsip telah dimasukkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Surakarta (copy rekap terlampir) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Untuk deposito yang sebesar Rp5.000.000.000,00 telah dimasukkan pada Tahun Anggaran 2008;
 - 2) Untuk deposito di Bank Niaga sebesar Rp1.000.000.000,00 telah dimasukkan pada tanggal 16 April 2009. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengertian terhadap masalah ARO sehingga baru dapat diselesaikan sekarang.

- d. Bahwa deposito di Bank Niaga sebesar Rp6.000.000.000,00 tersebut belum pernah dicairkan dan baru dicairkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 (copy surat dan copy RC Bank telah disampaikan ke Tim Auditor BPK). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta memiliki hak penuh atas deposito dimaksud.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2008 dapat diyakini kebenarannya.

Atas tanggapan dari Bendahara Umum Daerah di atas, BPK RI menyatakan tidak sependapat:

- a. Berkaitan dengan penjelasan nomor 1, mengenai komentar dari BUD bahwa letak permasalahan adalah pada model pelayanan antar bank yang bervariasi dan bukan pada ketidaktertiban, karena:
- 1) Pada kenyataannya, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, BUD tidak mengetahui bunga deposito yang masuk ke Kas Daerah itu berasal dari mana saja. BUD tidak pernah melakukan pengecekan.
 - 2) Pada saat pemeriksaan dilakukan, BUD tidak dapat memberikan keterangan mengenai bunga deposito di bank Niaga sebesar Rp1.000.000.000,00, padahal seharusnya BUD tahu kalau bunga itu ditahan di bank untuk di *roll-over* kembali. Karena pada saat penempatan deposito tentunya sudah dijelaskan mengenai bagaimana perlakuan bank terhadap bunga atas deposito tersebut dan sudah disetujui oleh BUD.
 - 3) Deposito ditempatkan atas nama dan alamat pribadi BUD, hal ini jelas-jelas menunjukkan ketidaktertiban pengelolaan keuangan daerah, karena yang ditempatkan itu adalah uang pemerintah daerah bukan uang pribadi.
- b. Berkaitan dengan penjelasan nomor 3 yang menyebutkan bahwa deposito pada Bank Niaga belum pernah dicairkan dan baru dicairkan tanggal 14 April 2009. Dari penelusuran bunga deposito yang masuk ke Kas Daerah, tidak ada bunga deposito dari bank Niaga tersebut yang masuk pada bulan Februari dan Maret 2009. BUD belum memberikan penjelasan mengenai hal ini.

Rekomendasi BPK RI

Walikota Surakarta agar:

- a. Menegur dan memerintahkan Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah supaya tertib, transparan dan akuntabel;
- c. Memerintahkan Inspektorat Kota Surakarta untuk melakukan pemeriksaan atas bunga atas deposito senilai Rp6.000.000.000,00 di Bank Niaga yang belum masuk ke Kas Daerah.

LAMPIRAN

VI

(ENAM)

**SURAT FRONT PELOPOR UNTUK PRESIDEN SBY,
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG DAN KAPOLRI**



FRONT PELOPOR

UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN

JALAN JATIPADANG RAYA NO: 54 A, JAKARTA SELATAN

Jakarta, 7 Agustus 2014.
Kepada Yang Terhormat,
Presiden Republik Indonesia
Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Jalan Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10270

~~Dr. Temma. Dumaat B.S.~~

Dr. Temma B.S.

PERIHAL : Netralitas Polri Untuk Demokrasi

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hj. Rachmawati Soekarnoputri, SH.,**
Jabatan : **Ketua Umum FRONT PELOPOR**
Untuk Kebenaran dan Keadilan
2. Nama : **Bambang Suroso, SH, MH.,**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal FRONT PELOPOR**
Untuk Keadilan dan Kebenaran

Atas nama warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum, kami yang berhimpun dalam FRONT PELOPOR Untuk Kebenaran dan Keadilan, wajib melaksanakan amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3): "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
- UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"
- UUD 1945 Pasal 30 ayat (4): "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum*";

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.



FRONT PELOPOR

UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN

JALAN JATIPADANG RAYA NO: 54 A, JAKARTA SELATAN

Jakarta, 7 Agustus 2014
Kepada Yang Terhormat,
Presiden Republik Indonesia
Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Jalan Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10270

PERIHAL : Netralitas Polri Untuk Demokrasi

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hj. Rachmawati Soekarnoputri, SH.,**
Jabatan : **Ketua Umum FRONT PELOPOR**
Untuk Kebenaran dan Keadilan

2. Nama : **Bambang Suroso, SH, MH.,**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal FRONT PELOPOR**
Untuk Keadilan dan Kebenaran

Atas nama warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum, kami yang berhimpun dalam FRONT PELOPOR Untuk Kebenaran dan Keadilan, wajib melaksanakan amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3): "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
- UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"
- UUD 1945 Pasal 30 ayat (4): "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum*";

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini sikap dan tingkah laku Polri terkesan dan terasa *tidak netral*, terutama menjelang, dan pada saat berlangsungnya ~~persidangan Perselisihan Hasil Perhitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014~~, (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Polri tidak sepenuh hati dalam melayani berbagai pengaduan yang terkait dengan pelanggaran dalam Pilpres 2014. Pengaduan yang disampaikan oleh Panwaslu maupun Bawaslu sebagai rekomendasi atas ditemukannya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, sangat lamban dalam memproses penyelidikan maupun penyidikan. Bahkan menurut Pimpinan dan Anggota Bawaslu sebagian pengaduan-pengaduan itu diabaikan. *(Pernyataan Anggota Bawaslu Nelson Simanjutak, akhir Juli 2014).*

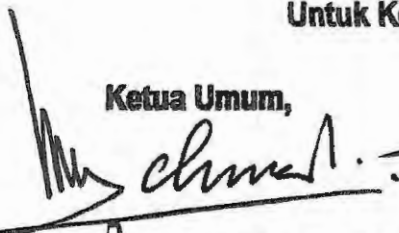
Sikap Polri juga sangat lamban, bahkan terasa mengulur-ulur waktu terhadap pengaduan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU maupun Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 (dua). Bahkan menurut Timnas Prabowo - Hatta (Fadli Zon), segala hal yang menyangkut tentang pelanggaran dan kejahatan (kecurangan-kecurangan) telah dilaporkan / diadukan ke Polri cq. Bareskrim Mabes Polri, namun *tanggapan Polri jauh dari yang diharapkan*. Terasa ada kesengajaan untuk mengabaikan pengaduan Timnas Prabowo - Hatta dengan dalil-dalil diluar prosedural.

Menyikapi kejadian yang mengkhawatirkan tersebut, kami yang tergabung dalam FRONT PELOPOR Untuk Kebenaran dan Keadilan memohon kepada **Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi Polri dan TNI**, melalui surat ini, yang tembusannya disampaikan kepada **Yang Terhormat Bapak Menkopolhukam**, kepada **Yang Terhormat Bapak Panglima TNI** dan **Bapak Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri)**, untuk mengevaluasi dan mengeluarkan kebijakan atau *menegur* agar Polisi Republik Indonesia yang dibanggakan oleh rakyat Indonesia tidak bersikap memihak kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

Demikian informasi sekaligus harapan disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
FRONT PELOPOR
Untuk Kebenaran dan Keadilan

Ketua Umum,



H.J. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, SH.,



Sekretaris Jenderal,



BAMBANG SUROSO, SH, MH.,

Tembusan:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Yth. Menkopolhukam | 3. Yth. Kapolri | 5. Yth. Jaksa Agung |
| 2. Yth. Panglima TNI | 4. Yth. Ketua Mahkamah Agung | 6. Yth. Ketua MK |

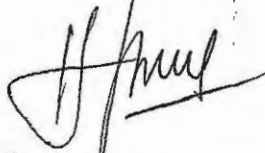
FORMULIR

TANDA PENERIMAAN PERMASALAHAN HUKUM

Pada pukul 10.00 - ulu hari Jumat tanggal 19 - 09 tahun 2014, telah menerima permasalahan hukum (konsultasi/pertanyaan hukum klasifikasi I, informasi hukum klasifikasi II, laporan/aduan klasifikasi III, laporan/aduan klasifikasi IV)* dengan register buku jurnal klasifikasi nomor dari FRONT PELAPOR: Centuk Rebenan dan dan keadilan di Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai Klasifikasi mengenai penundaan Berlarut Terkait Pemanggilan Subkarnur Oki, Menteri sebagai Penerima Kasus Pengadaan PUS beserta kelengkapan dokumen: TRANS JAKARTA,

1.
2.
3.
4.
5.

Yang Menerima,



RMA

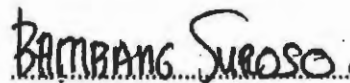
NIP. 19690614198831001

(021) 722 9687

Jakarta,

19 September 2014

Yang Menyeruhkan,



081285878700

*) Coret yang tidak perlu



FRONT PELOPOR

UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN

JALAN JATIPADANG RAYA NO: 54 A, JAKARTA SELATAN

Jakarta, 17 September 2014

Kepada Yang Terhormat,

Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia

di

Jakarta

PERIHAL : Klarifikasi Mengenai Penundaan Berlarut Terkait Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta sebagai Saksi Kasus Pengadaan Bus Trans Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H.,
Jabatan : Ketua Umum FRONT PELOPOR untuk Kebenaran dan Keadilan
Ketua Dewan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN SOEKARNO
NIK : 09.5306.670952.0024
Alamat : Jl. Jatipadang Raya No.54 A, Pasar Minggu-Jakarta Selatan

Beserta berbagai elemen anak bangsa yang bergerak dalam satu barisan perjuangan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, melalui surat pengantar ini meminta penjelasan atas berlarutnya proses kasus hukum pengadaan bus Trans Jakarta dan meminta agar Kejaksaan Agung segera memanggil Gubernur DKI Jakarta sebagai saksi utama. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KETUA UMUM FRONT PELOPOR

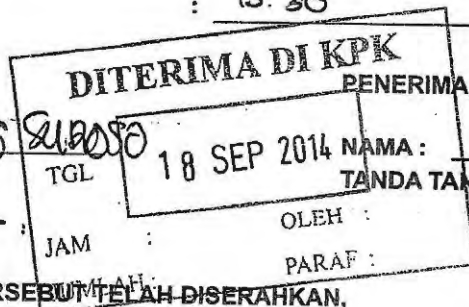
HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, S.H.,

TANDA TERIMA SURAT/DOKUMEN

NOMOR REGISTRASI : _____
NOMOR SURAT : _____
JUMLAH DOKUMEN : 1
INSTANSI/LEMBAGA PENGIRIM : Hy. Rachmawan Soekarno Putri
Front Pelopor
TUJUAN SURAT : kpk
DITERIMA TANGGAL : 18.09.2014
PUKUL : 13.30

PENGIRIM,

NAMA : PAMBANG SUROSO
TANDA TANGAN : _____



DOKUMEN/SURAT TERSEBUT TELAH DISERAHKAN,

KEPADA : _____
TANGGAL : _____
PARAF PENERIMA SURAT : _____
OLEH : _____

Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C.1 Jakarta Selatan 12920
Telp. (62 21) 2557 8300, Faks (62 21) 5289 2456, <http://www.kpk.go.id>

Distribusi Formulir :
Putih : Untuk Pengirim
Biru : Untuk Penerima
Merah : Untuk Pos Surat



FRONT PELOPOR

UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN

JALAN JATIPADANG RAYA NO: 54 A, JAKARTA SELATAN

Jakarta, 17 September 2014

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia

Gedung KPK-Kuningan, Jakarta

PERIHAL : Klarifikasi Mengenai Penundaan Berlarut Terkait Tindak Lanjut Penanganan Laporan Dugaan Korupsi Dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) di Kota Solo Tahun 2010 dan Laporan Dugaan Korupsi Taman BMW Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H.,
Jabatan : Ketua Umum FRONT PELOPOR untuk Kebenaran dan Keadilan
Ketua Dewan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN SOEKARNO
NIK : 09.5306.670952.0024
Alamat : Jl. Jatipadang Raya No.54 A, Pasar Minggu-Jakarta Selatan

Beserta berbagai elemen anak bangsa yang bergerak dalam satu barisan perjuangan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, melalui surat pengantar ini mengajukan klarifikasi mengenai janji Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memanggil dan memeriksa **Megawati** terkait kasus BLBI sesudah Lebaran (Hari Raya Idul Fitri/Tanggal 28 Juli 2014) dan penundaan berlarut terkait tindak lanjut penanganan laporan dugaan **Korupsi Dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) di Kota Solo Tahun 2010** serta laporan dugaan korupsi **Taman BMW Jakarta Tahun 2014** yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami meminta agar KPK Republik Indonesia tidak melakukan **tebang pilih** dan segera memprosesnya dan menetapkan tersangkanya terhadap laporan dugaan Korupsi sebagai berikut :

1. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Megawati, membebaskan para pengemplang BLBI dengan R&D (*"Release and Discharge"*) yang oleh KPK telah

dijanjikan akan dipanggil dan diperiksa sesudah lebaran (Hari Raya Idul Fitri/ Tanggal 28 Juli 2014). Pemerintah Megawati melindungi para obligor hitam untuk mengembalikan cicilan kerugian negara dengan potongan dari 16-36 persen, yang diatur dalam MSAA (*Master of Acquisition and Agreement*) dan merupakan perjanjian penyelesaian utang di luar pengadilan (*settlement out of court*), tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, karena perjanjian perdata tidak bisa meniadakan pelanggaran pidana yang diatur oleh UU.

2. Pada bulan September 2012, Pelapor (Warga Negara) telah melaporkan dugaan korupsi berupa duplikasi data dana BPMKS Kota Solo tahun 2010 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Nomor Agenda: **2012-08-568**.
3. Pada tanggal 27 Juni 2014 Pelapor (Warga Negara) menanyakan langsung ke kantor KPK, mengenai perkembangan laporan Nomor Agenda: 2012-08-568 tersebut dan menurut Pelapor, pihak KPK banyak kasus yang harus ditangani. Dalam kesempatan itu, Pelapor juga diminta untuk menjelaskan permasalahan yang dilaporkan serta memberikan tambahan data dan mendapat Nomor Agenda: **2014-06-000138**.
4. Pada tanggal 11 Agustus 2014, Pelapor (Warga Negara) datang kembali ke kantor KPK untuk memberikan tambahan data dan mendapat Nomor Agenda: **2014-08-000030**.
5. Pada tanggal 4 April 2014, Pelapor (Warga Negara) melaporkan tindak pidana korupsi atas Taman BMW-Jakarta Utara kepada KPK.
6. **Progres 98** telah melaporkan mengenai Rekening Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 (Dua) dalam Pilpres 2014 yang tidak dilaporkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa ternyata Janji KPK memanggil Megawati dan dua laporan dugaan korupsi tersebut hingga saat ini oleh KPK **belum ditindaklanjuti** sebagaimana mestinya. Sebagai anak bangsa, kami protes sekaligus kami meminta tanggung-jawab KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi untuk tidak melakukan **diskriminasi** dan **segera menetapkan tersangka** terkait dengan dua kasus korupsi tersebut diatas.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KETUA UMUM FRONT PELOPOR


HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, S.H.,